



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025 -2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);



4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 19);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Pembangunan Jangka Atas Rencana Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4,

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);

20. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Blitar Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR

dan

WALIKOTA BLITAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025 -2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang berpedoman pada RPJP Nasional.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk

periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program pasangan Presiden dan Wakil Presiden dengan berpedoman pada RPJP Nasional.

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disebut RPJM Daerah Provinsi Jawa Timur adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah Provinsi Jawa Timur dan RPJM Nasional.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
12. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau disebut RKP Daerah adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
16. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
17. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

18. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
19. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka piker atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
20. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
21. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan Tindakan pengerahan sumber daya, baik berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
22. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
24. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN RPJM DAERAH

Pasal 2

- (1) RPJM Daerah merupakan penjabaran visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikator untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada:
 - a. RPJP Daerah;

- b. RTRW;
 - c. RPJM Nasional; dan
 - d. RPJM Daerah Provinsi Jawa Timur.
- (3) Dalam penyusunan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan RPJM Daerah kabupaten/kota sekitar.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 3

RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Bab I Pendahuluan;
- b. Bab II Gambaran Umum Daerah;
- c. Bab III Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah;
- d. Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaran Pemerintah Daerah; dan
- e. Bab V Penutup.

Pasal 4

Isi beserta uraian RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV KERANGKA KERJA RPJM DAERAH

Bagian Kesatu

Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 5

- (1) Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.
- (2) Berdasarkan konsep pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang telah diserahkan untuk meningkatkan dan pemeratakan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.
- (3) Dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di bentuk dan disusun secara berjenjang sesuai periodisasi dan

substansinya baik untuk Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah.

- (4) Dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud ayat (3) meliputi : RPJP Daerah dijabarkan oleh RPJM Daerah dan Renstra Perangkat Daerah.
- (5) Dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud ayat (4) dioperasionalkan dalam perencanaan pembangunan tahunan daerah yang terdiri dari:
 - a. RKP Daerah; dan
 - b. Renja Perangkat Daerah.

Pasal 6

RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) disusun dengan:

- a. berpedoman RPJM Nasional yang memuat prioritas pembangunan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia;
- b. berpedoman RPJP Daerah yang diarahkan untuk penguatan fondasi transformasi dengan fokus pada transformasi ekonomi, sosial, lingkungan, dan pemerintahan; dan
- c. memperhatikan Rancangan Teknokratik RPJM Daerah.

Bagian Kedua

Sinkronisasi dan Penyelarasan

Pasal 7

- (1) Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, untuk itu diperlukan penyelarasan RPJM Daerah dengan RPJM Nasional dan RPJP Daerah.
- (2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penyelarasan kinerja dan periodisasinya.
- (3) Penyelarasan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:
 - a. Aspek penyelarasan RPJM Daerah terhadap RPJP Daerah, Penjabaran visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota terpilih, berpedoman pada Visi Pembangunan Daerah dalam RPJP Daerah adalah: *"Kota yang maju dan berkelanjutan, Cerdas, Inklusif dengan kekuatan Budaya, Religi Dan Nasionalisme"*, dengan 4 sasaran yang akan diwujudkan, yaitu:
 1. Peningkatan pendapatan per kapita;
 2. Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan;
 3. Peningkatan daya saing sumber daya manusia; dan
 4. Penurunan emisi GRK menuju *net zero emission*.

- b. Aspek penyalarsan RPJM Daerah terhadap RPJM Nasional, sebagai upaya mendukung secara seiring sejalan dengan pelaksanaan dan pencapaian 8 (Delapan) Asta Cita, 17 (Tujuh belas) Program Prioritas, dan 8 (Delapan) Proyek Hasil Terbaik Cepat yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden.
- (4) Penyalarsan Periodisasi sebagaimana dimaksud ayat (2), berupa masa berlaku RPJM Daerah untuk Periodisasi tahun 2025 berakhir sampai dengan tahun 2029.

Pasal 8

- (1) RPJM Daerah disusun secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RPJM Daerah Provinsi Jawa Timur.
- (2) RPJM Daerah proses penyusunannya dilakukan secara bersamaan atau simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah.
- (3) Sebagian substansi Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan bagian dari RPJM Daerah.

BAB V

PELAKSANAAN RPJM Daerah

Pasal 9

RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), dilaksanakan oleh:

- a. Perangkat Daerah dan seluruh pemangku kepentingan melaksanakan kebijakan dan strategi, arah kebijakan, program/kegiatan/subkegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program prioritas yang tercantum di dalam RPJM Daerah; dan
- b. Perangkat Daerah dan seluruh pemangku kepentingan mendukung pencapaian target kinerja visi misi dan program serta tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana yang telah ditetapkan RPJM Daerah.

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 menyusun Renstra Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPJM Daerah, yang penyusunannya dilakukan secara bersamaan atau simultan.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

- (3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagian substansinya merupakan bagian dari RPJM Daerah.
- (4) Perangkat Daerah pengampu indikator Utama Pembangunan harus membuat kertas kerja rencana pencapaian selama 5 (lima) tahun dalam bentuk Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kinerja Perangkat Daerah.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur Perangkat Daerah, maka penanggungjawab penyelenggaraan urusan pemerintahan menyesuaikan dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah yang baru.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pengendalian

Pasal 11

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJM Daerah dilakukan dalam rangka menjamin dan memastikan tercapainya visi dan misi Walikota yang dituangkan dalam RPJM Daerah.
- (2) Walikota melalui Kepala perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan RPJM Daerah.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan terhadap pelaksanaan pembangunan daerah, indikasi program prioritas, dan kebutuhan pendanaan.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan setiap semester.
- (5) Kepala perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah melaporkan hasil pengendalian pelaksanaan RPJM Daerah kepada Walikota.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 12

- (1) Kepala perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJM Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk mengetahui tingkat indikator kinerja, Indikasi rencana program prioritas, kebutuhan

pendanaan untuk mencapai misi, tujuan, dan sasaran dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah.

- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan setiap tahun, pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan RPJM Daerah.
- (4) Kepala perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan RPJM Daerah kepada Walikota.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara evaluasi dan pengendalian pelaksanaan RPJM Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

PERUBAHAN RPJM DAERAH

Pasal 14

- (1) Perubahan RPJM Daerah dapat dilakukan dalam hal:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa terdapat substansi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
 - e. terdapat indikator target yang tidak dapat dihitung dan berpengaruh lebih dari 20% terhadap capaian kinerja;
 - f. terjadi perubahan yang mendasar, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional; atau
 - g. bertentangan dengan kebijakan nasional dan Provinsi Jawa Timur.
- (2) Perubahan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sampai dengan huruf e, tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJM Daerah kurang dari 2 (dua) tahun.

- (4) Perubahan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKP Daerah dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 15

- (1) Target dan kebutuhan pendanaan yang terdapat dalam RPJM Daerah bersifat indikatif.
- (2) Perubahan target dan kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terjadi pada setiap tahun pelaksanaan RPJM Daerah, disampaikan oleh Kepala perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah kepada Walikota pada rapat Tim Perumusan Anggaran untuk mendapatkan keputusan.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam RKP Daerah.
- (4) Perubahan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKP Daerah dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 16

- (1) Dalam hal target sasaran kinerja yang ditetapkan dalam RPJM Daerah telah tercapai, maka dirumuskan kembali besaran target sasaran kinerja baru.
- (2) Dalam hal target sasaran kinerja yang ditetapkan dalam RPJM Daerah sulit tercapai, maka dirumuskan kembali penyesuaian kembali besaran target sasaran kinerja baru.
- (3) Target sasaran kinerja baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Semua ketentuan mengenai RPJPD, RPJMD, dan RKPD yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku harus dibaca dan dimaknai sebagai RPJP Daerah, RPJM Daerah, RKP Daerah, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberlakukan sebagai RPJM Daerah transisi yang menjadi pedoman penyusunan RKPD Tahun 2030 sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah Tahun 2030-2034 yang memuat visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih.

Pasal 19

- (1) Penyusunan RKP Daerah Tahun 2026 dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada Visi, Misi, dan program Walikota terpilih yang dijabarkan ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, kinerja, program yang termuat dalam RPJM Daerah 2025-2029.
- (2) Dalam hal RPJM Daerah 2025-2029 belum ditetapkan penyusunan RKP Daerah menggunakan RPJM Daerah yang masih berlaku dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan RPJP Daerah 2025-2045.
- (3) RKP Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. rancangan kerangka ekonomi daerah;
 - b. prioritas pembangunan daerah;
 - c. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
 - d. Program Strategis Nasional; dan
 - e. kesepakatan Rakortekbang Nasional Tahun 2025.
- (4) Penyusunan RKP Daerah Tahun 2026 dilakukan simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RPJM Daerah.
- (5) Dalam hal RPJM Daerah telah ditetapkan, dapat dilakukan perubahan terhadap RKP Daerah Tahun 2026 yang telah ditetapkan atau penyesuaian terhadap rancangan RKP Daerah Tahun 2026 sesuai dengan penyusunan RKP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) RKP Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah.
- (7) Penyusunan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan disusun secara simultan dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah.
- (8) RKP Daerah Tahun 2026 berpedoman pada RKP Tahun 2026 dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 20

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan Pembangunan Daerah, Walikota dan Wakil Walikota pada tahun terakhir pemerintahannya wajib menyusun RKP Daerah untuk tahun pertama periode pemerintahan Walikota berikutnya.
- (2) Penyusunan RKP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada RPJP Daerah, dan target kinerja RPJM Daerah yang belum tercapai, sebelum RPJM Daerah periode berikutnya ditetapkan.



- (3) RKP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD tahun pertama periode pemerintahan Walikota berikutnya.
- (4) Penyusunan Rancangan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 20 Agustus 2025
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SYAUQUL MUHIBBIN

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 20 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,


ttd.

PRIYO SUHARTONO

LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2025 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 142-5/2025

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025 -2029

I. UMUM

RPJM Daerah Kota Blitar merupakan dokumen perencanaan Kota Blitar untuk periode 5 (lima) tahun yang dimaksudkan untuk memberikan arahan sekaligus menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan di Kota Blitar dalam menyelenggarakan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJP Daerah dan RPJM Nasional.

RPJM Daerah digunakan sebagai pedoman penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dan penyusunan RKP Daerah serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2025-2029. Sehubungan dengan itu, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH TAHUN 2025 -2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada tanggal 27 November 2024 Kota Blitar melaksanakan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota periode 2025 – 2030. Berdasarkan hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada), ditetapkan pasangan H. Syauqul Muhibbin dan Elim Tyu Samba sebagai Walikota dan Wakil Walikota Blitar Periode 2025-2030 yang dilantik pada tanggal 20 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia. Sebagaimana diatur Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam pasal 260 Ayat (1) daerah sesuai dengan kewenangan menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

RPJMD merupakan dokumen penjabaran visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program-program pembangunan daerah termasuk di dalamnya program prioritas yang dicanangkan Walikota dalam proses Pemilihan Kepala Daerah.

Proses penyusunan RPJMD sebagaimana sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, secara faktual dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan.

Tahap persiapan dilakukan pada Masa Bhakti Walikota Blitar tahun 2021 – 2024 yang meliputi:

- a) Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RPJMD;
- b) orientasi mengenai RPJMD;
- c) penyusunan agenda tim penyusun RPJMD;
- d) penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD); dan
- e) penyusunan rancangan teknokratik RPJMD.

Tahap Pelaksanaan dilakukan setelah Pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Masa Bhakti 2025 – 2029 dilantik. Tahapan pelaksanaan dimulai dari penyusunan Rancangan Awal sampai dengan penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD.



Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar, 2025

Gambar 1.1

Timeline Penyusunan RPJMD Kota Blitar 2025 – 2029

Dalam penyusunan dokumen RPJMD Kota Blitar Tahun 2025–2029, telah dilakukan integrasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 7 Tahun 2018. Proses ini didukung oleh pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang menilai kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa kebijakan yang dirumuskan dalam RPJMD selaras dengan prinsip keberlanjutan dan memiliki ketahanan jangka panjang

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RPJMD Kota Blitar Tahun 2025 – 2029 didasarkan sejumlah peraturan perundang – undangan sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang- Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
 8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6987);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
 14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 19);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

- 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Pembangunan Jangka Atas Rencana Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 461);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);
 20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor ... Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor ...);
 21. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Blitar Nomor 1);

1.3. Hubungan antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya

Hubungan RPJMD Kota Blitar 2025–2029 dengan dokumen perencanaan lainnya, adalah bersifat keselarasan dan saling terkait antara perencanaan satu engdan perencanaan lainnya. Pendekatan dilakukan dengan mengimplementasikan pendekatan perencanaan secara holistik, integratif dan spasial.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 pasal 160, RPJMD Kota Blitar disusun dengan mempedomani dokumen RTRW dan RPJPD. Selain itu RPJMD juga harus selaras dengan RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Timur, dan RPJMD daerah lain. Hal ini untuk menjamin keharmonisan strategi dan arah kebijakan pembangunan dalam mencapai cita-cita pembangunan nasional.

1.3.1. Hubungan RPJMD Kota Blitar dengan RPJM Nasional

Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada pasal 156 ayat (2) Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Selanjutnya dalam pasal 260 ayat

(1) Daerah sesuai kewenangannya menyusun rencana Pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Sehingga jelas RPJMD Kota Blitar harus selaras dan mendukung pencapaian RPJM Nasional. Hal ini dimaksudkan agar pembangunan daerah mendukung baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan nasional. Sehingga RPJMD Kota Blitar disusun mengacu pada RPJM Nasional. Misi RPJMD Kota Blitar disandingkan dan diselaraskan dengan Asta Cita sebagai misi dari RPJM Nasional. Arah kebijakan Pembangunan harus selaras dengan kebijakan Pembangunan Nasional. Hal ini bertujuan agar seluruh program dan kegiatan pembangunan di tingkat daerah, termasuk di Kota Blitar, dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional. Sinkronisasi ini tidak hanya mencakup penyesuaian substansi perencanaan, tetapi juga menyangkut keterpaduan dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan.

1.3.2. Hubungan RPJMD Kota Blitar dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada pasal 276 ayat (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Pembangunan daerah kabupaten/kota. Sehingga secara teknis RPJMD Kota/Kabupaten Se Jawa Timur akan selaras dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur, karena pada saat Evaluasi penyusunan rancangan RPJMD Kota/Kabupaten akan diselaraskan dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur. Hal ini dimaksudkan agar pembangunan daerah Kota/Kabupaten dapat mendukung pembangunan provinsi Jawa Timur.

Dengan demikian RPJMD Kota Blitar pasti dan dapat dipastikan selaras dan mendukung pencapaian RPJMD Provinsi Jawa Timur. Dimana Misi RPJMD Kota Blitar disandingkan dan diselaraskan dengan Nawa Bhakti Satya sebagai misi dalam naskah RPJMD Provinsi Jawa Timur.

1.3.3. Hubungan RPJMD Kota Blitar dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Blitar 2025-2045

Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada pasal 263 ayat (3) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan Pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Sehingga jelas bahwa RPJMD berpedoman pada RPJPD.

1.3.4. Hubungan RPJMD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Blitar

Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 263 ayat (2) menetapkan bahwa RPJPD disusun dengan

berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah. Sebagaimana diuraikan dalam hubungan RPJMD dengan RPJPD, berkaitan dengan pengaturan Undang Undang tersebut, maka RPJMD disusun dengan memperhatikan dan mempertimbangkan Rencana Tata Ruang Wilayah.



Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar, 2025

Gambar 1.2

Penyelarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan RTRW

1.3.5. Hubungan RPJMD Kota Blitar dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Blitar

Dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah 2025 -2029 menetapkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah analisis sistematis, menyeluruh dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan Pembangunan berkelanjutan ke dalam RPJMD. Dengan demikian RPJMD menjadikan KLHS sebagai bahan dasar untuk Menyusun perencanaan Pembangunan yang berkelanjutan.

1.3.6. Hubungan RPJMD Kota Blitar dengan RPJMD Kabupaten Blitar

RPJMD disusun dengan memperhatikan RPJMD Daerah lain yaitu dengan cara menyelaraskan strategi dan arah kebijakan jangka menengah daerah dengan daerah lainnya atau daerah sekitar yang berbatasan langsung dengan Kota Blitar. Penelaahan dokumen daerah sekitar dilakukan untuk sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah sehingga dapat mendukung percepatan program strategis nasional.

1.3.7. Hubungan RPJMD Kota Blitar dengan RIPJPID

RPJMD Tahun 2025–2029 selain mengacu pada visi, misi, dan program kepala daerah terpilih, juga memperhatikan dokumen perencanaan pembangunan daerah

lainnya, salah satunya adalah Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah (RIPJPID). RIPJPID disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (SISNAS IPTEK), yang mengatur perlunya arah kebijakan dan strategi pembangunan Iptek di daerah.

Keterkaitan RPJMD dengan RIPJPID bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan daerah memperkuat ekosistem inovasi, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mendukung peningkatan daya saing daerah. Program dan kegiatan dalam RPJMD diarahkan untuk selaras dengan strategi dan sasaran yang ditetapkan dalam RIPJPID, sehingga pembangunan daerah berbasis Iptek dapat terwujud secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan.

Tabel 1.1
Hubungan RPJMD Kota Blitar dengan RIPJPID

Aspek	RPJMD 2025–2029	RIPJPID	Keterkaitan
Dasar Hukum	UU No. 25/2004 tentang SPPN, Permendagri No. 86/2017	UU No. 11/2019 tentang Sisnas Iptek	Kedua dokumen disusun berdasarkan ketentuan perundangan yang saling mendukung
Ruang Lingkup	Pembangunan seluruh sektor daerah selama 5 tahun	Pemajuan Iptek daerah dalam jangka panjang	RIPJPID memperkuat aspek Iptek dalam pelaksanaan program program RPJMD
Fungsi Utama	Menjadi pedoman penyusunan RKPDP tahunan, arah kebijakan pembangunan	Menjadi acuan pengembangan Iptek berbasis potensi daerah	RIPJPID menjadi landasan untuk program/kegiatan Iptek di RPJMD
Visi dan Misi	Berasal dari visi-misi Kepala Daerah	Mendukung terwujudnya ekosistem riset dan inovasi daerah	Visi-misi RPJMD harus mempertimbangkan kebutuhan pengembangan Iptek daerah dari RIPJPID
Tujuan Pembangunan	Peningkatan kesejahteraan masyarakat,	Peningkatan kapasitas Iptek dan	Program inovasi dan riset daerah dalam RPJMD

Aspek	RPJMD 2025–2029	RIPJPID	Keterkaitan
	daya saing daerah	inovasi daerah untuk kesejahteraan	merujuk pada strategi RIPJPID
Strategi dan Program	Menyusun strategi sektor pembangunan daerah	Menyusun strategi pengembangan Iptek daerah	Strategi RPJMD di sektor pendidikan, industri, kesehatan, dan lain – lain disinergikan dengan RIPJPID
Kinerja	Indikator pembangunan	Indikator kinerja Iptek daerah	ndikator bidang Iptek dalam RPJMD harus konsisten dengan target RIPJPID

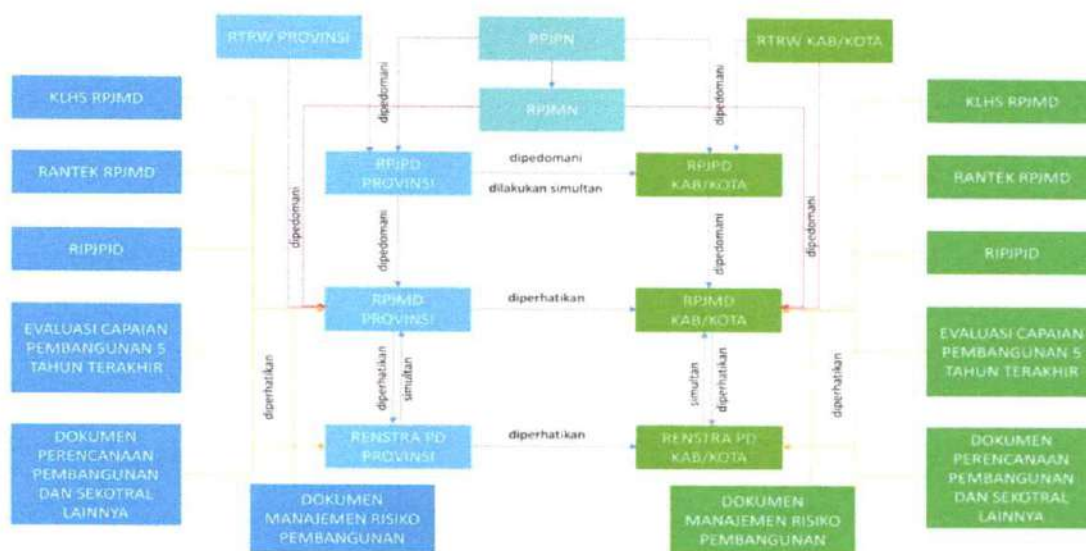
Sumber : *Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar, 2025*

1.3.8. Hubungan RPJMD Kota Blitar dengan Rencana Pembangunan Tahunan

RPJMD sebagai rencana jangka menengah daerah direncanakan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan operasionalisasi rencana pembangunan tahunan yang disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD yaitu dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Rencana Pembangunan Tahunan harus berpedoman pada RPJMD Kota Blitar.

1.3.9. Hubungan RPJMD Kota Blitar dengan Dokumen Sektorial Lainnya

Selain memiliki hubungan dengan dokumen perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Timur, RTRW, RPJMD Kota Blitar Tahun 2025 - 2029 juga memperhatikan beberapa dokumen antara lain; 1) Agenda pembangunan Sustainable Development Goals (SDG's); 2) Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM); 3) Masterplan Smart City dan dokumen perencanaan sektorial lainnya.



Sumber : Kementerian Dalam Negeri

Gambar 1.3
Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan
Pembangunan dan Sektoral Lainnya

1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1. Maksud

Penyusunan RPJMD Kota Blitar Tahun 2025 -2029 dimaksudkan untuk memberikan arah Pembangunan Kota Blitar dalam kurun waktu 2025-2029 yang didasarkan pada visi dan misi Walikota masa Bhakti 2025-2030. Dimana RPJMD Kota Blitar 2025-2029 juga dimaksudkan untuk dipergunakan sebagai pedoman dalam berpartisipasi membangun Kota Blitar bagi seluruh pemangku kepentingan atau seluruh elemem masyarakat Kota Blitar dalam mewujudkan kemajuan Kota Blitar.

1.4.2. Tujuan

Penyusunan RPJMD Kota Blitar Tahun 2025-2029 memiliki tujuan antara lain sebagai berikut:

- a. Memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) PD;
- b. Memberikan pedoman bagi penyusunan RKPd setiap tahun selama tahun 2025 -2029;
- c. Menjadi tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bawah kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota;
- d. Menjadi instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Blitar dalam mengendalikan penyelenggaraan pembangunan daerah dan menjalankan aspirasi masyarakat sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD; dan
- e. Memungkinkan terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah;
- f. Menjadi pedoman bagi semua elemen Masyarakat dalam turut membangun Kota Blitar tahun 2025 -2029.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan RPJMD Kota Blitar Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar belakang;
2. Dasar hukum penyusunan;
3. Hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya;
4. Maksud dan tujuan; dan
5. Sistematika penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

1. Gambaran Umum Kondisi Daerah memuat :
 - a. Aspek Geografi dan Demografi
 - b. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
 - c. Aspek Daya Saing Daerah
 - d. Aspek Pelayanan Umum
2. Gambaran Keuangan Daerah memuat penjelasan tentang realisasi APBD Tahun Anggaran 2020 – 2024 dan proyeksi keuangan daerah Tahun Anggaran 2025 – 2029
3. Permasalahan dan Isu Strategis memuat :
 - a. Permasalahan pembangunan daerah; dan
 - b. Isu strategis daerah

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran memuat :
 - a. Visi dan Misi; dan
 - b. Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025 - 2029
2. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah memuat :
 - a. Strategi dan arah kebijakan daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025 – 2029 ; dan
 - b. Program-program prioritas daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025 – 2029.

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

1. Program Perangkat Daerah memuat :

Daftar Program Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 dalam mencapai kinerja pembangunan daerah dan Indikator program, target dan pagu indikatif Program Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029
2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memuat :
 - a. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU); dan
 - b. Target penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2025–2029 melalui indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (IKD).

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan daerah sebagai bagian dari Upaya pencapaian sasaran Pembangunan di daerah.

BAB II

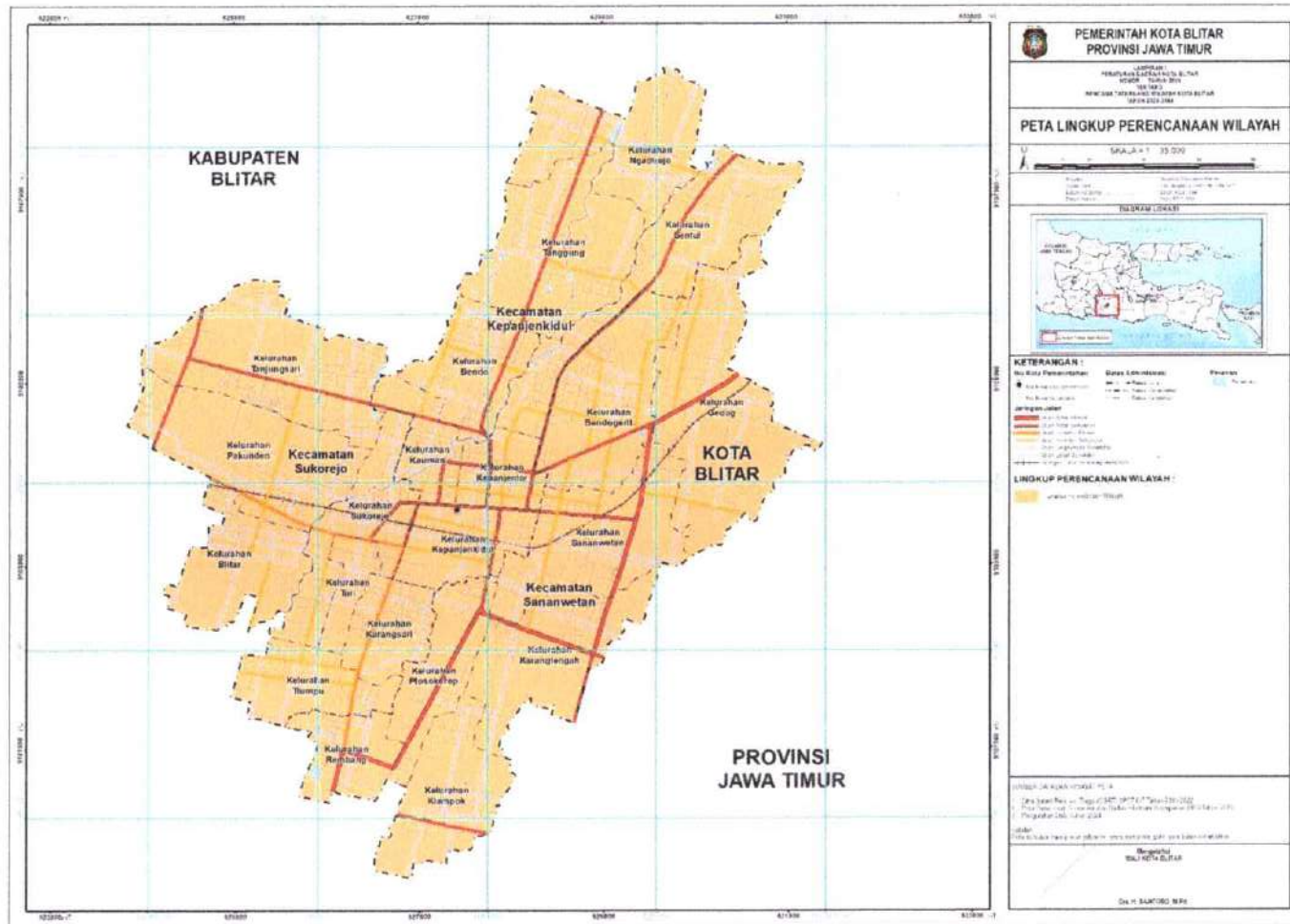
GAMBARAN UMUM

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Secara geografis, wilayah Kota Blitar terletak 112°14'-112°28' Bujur Timur dan 8°2'-8°8' Lintang Selatan dengan luas wilayah 33,203 km² yang dibagi atas tiga wilayah kecamatan, yaitu Sananwetan, Kepanjenkidul, dan Sukorejo. Kota Blitar terletak di sebelah selatan Provinsi Jawa Timur dan kota ini merupakan wilayah terkecil kedua di Provinsi Jawa Timur setelah Kota Mojokerto serta wilayahnya hanya berbatasan langsung dengan Kabupaten Blitar. Adapun batas-batas wilayah Kota Blitar adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara: Kecamatan Garum dan Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar
2. Sebelah Barat: Kecamatan Sanankulon dan Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar
3. Sebelah Selatan: Kecamatan Sanankulon dan Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar
4. Sebelah Timur: Kecamatan Kanigoro dan Kecamatan Garum Kabupaten Blitar



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar, 2025

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kota Blitar

8

Wilayah Kota Blitar meliputi 3 kecamatan, yaitu Kepanjenkidul, Sukorejo, dan Sananwetan. Masing-masing kecamatan tersebut terdiri atas 7 kelurahan. Adapun luas masing-masing kecamatan adalah sebagai berikut.

Tabel 2.1
Luas Wilayah Kota Blitar

NO	KELURAHAN	KODE	KECAMATAN	LUAS (KM2)
1	Kepanjenkidul	35.72.01.1001	Kepanjenkidul	1,043
2	Ngadirejo	35.72.01.1002	Kepanjenkidul	1,928
3	Sentul	35.72.01.1003	Kepanjenkidul	2,287
4	Kauman	35.72.01.1004	Kepanjenkidul	0,765
5	Tanggung	35.72.01.1005	Kepanjenkidul	2,449
6	Bendo	35.72.01.1006	Kepanjenkidul	1,254
7	Kepanjenlor	35.72.01.1007	Kepanjenkidul	0,7
8	Pakunden	35.72.02.1001	Sukorejo	2,31
9	Blitar	35.72.02.1002	Sukorejo	1,448
10	Tlumpu	35.72.02.1003	Sukorejo	1,081
11	Turi	35.72.02.1004	Sukorejo	0,438
12	Karangsari	35.72.02.1005	Sukorejo	0,863
13	Sukorejo	35.72.02.1006	Sukorejo	1,384
14	Tanjungsari	35.72.02.1007	Sukorejo	2,604
15	Gedog	35.72.03.1001	Sananwetan	2,95
16	Plosokerep	35.72.03.1002	Sananwetan	1,164
17	Klompok	35.72.03.1003	Sananwetan	1,557
18	Sananwetan	35.72.03.1004	Sananwetan	2,154
19	Rembang	35.72.03.1005	Sananwetan	0,869
20	Karangtengah	35.72.03.1006	Sananwetan	1,899
21	Bendogerit	35.72.03.1007	Sananwetan	2,055
JUMLAH				33,203

Sumber : *Badan Informasi Geospasial, 2022*

2.1.1.1. Posisi dan Peran Strategis Daerah

Kebijakan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur dan nasional memandang posisi strategis Kota Blitar sehingga menetapkan Kota Blitar sebagai Pusat Kegiatan Wilayah. Hal tersebut dikaitkan dengan posisi Kota Blitar yang berada di tengah tengah Kabupaten Blitar. Dan Blitar menjadi wilayah penghubung antara wilayah selatan dan tengah yaitu Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Tulungagung dengan wilayah Malang Raya. Posisi ini membuat Kota Blitar berperan cukup strategis dalam konektivitas, distribusi pelayanan dan pertumbuhan wilayah.

Sebagai Pusat Kegiatan Wilayah Kota Blitar menjadi pusat kegiatan ekonomi, industri, perdagangan, jasa yang menyediakan berbagai fasilitas pendidikan dan kesehatan. Kondisi tersebut didukung dengan fasilitas transportasi antar daerah yaitu Stasiun Kereta Api dan Terminal Tipe B.

2.1.1.2. Potensi Sumber Daya Alam

Potensi sumber daya alam dapat dilihat dari pola penggunaan lahan, dimana pola penggunaan lahan Kota Blitar dengan karakteristik kota kecil dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.2
Pola Penggunaan Lahan

No.	Jenis Penutup / Penggunaan Lahan	Luas	
		Ha	%
1	Bangunan	396.86	11.95
2	Fasilitas Hankam	22.17	0.67
3	Fasilitas Kesehatan	14.68	0.44
4	Fasilitas Olahraga	29.54	0.89
5	Fasilitas Pendidikan	58.14	1.75
6	Fasilitas Peribadatan	3.74	0.11
7	Fasilitas Perkantoran	45.18	1.36
8	Fasilitas Sosial Budaya	2.33	0.07
9	Fasilitas Transportasi	9.30	0.28
10	Hotel/Losmen	0.81	0.02
11	Industri dan Gudang	40.55	1.22
12	Industri Pangan	0.03	0.00
13	Industri Rokok	0.51	0.02
14	Industri Roti	0.20	0.01
15	Jalan	114.38	3.44
16	Kebun	471.98	14.21
17	Pariwisata	7.90	0.24
18	Pekarangan	880.23	26.51
19	Pemukaman	3.49	0.11
20	Perdagangan dan Jasa	69.76	2.10
21	Perdagangan dan Jasa (bank)	0.51	0.02
22	Perdagangan dan Jasa (bengkel)	0.33	0.01
23	Perdagangan dan Jasa (kios)	2.04	0.06
24	Perdagangan dan Jasa (pasar)	3.01	0.09
25	Perdagangan dan Jasa (pertokoan)	9.64	0.29
26	Perdagangan dan Jasa (show room motor)	0.21	0.01
27	Perdagangan dan Jasa (SPBU)	0.37	0.01
28	Perdagangan dan Jasa (SPBE)	0.15	0.00
29	Perdagangan dan Jasa (warung)	1.84	0.06
30	Rel kereta api	4.39	0.13
31	Ruang Terbuka Hijau	37.75	1.14
32	Sawah	1,082.56	32.60
33	Sungai	5.46	0.16
34	TPA	0.26	0.01
	TOTAL	3,320.30	100.00

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar, 2025

Dalam keterbatasan sumber daya alam, Kota Blitar memiliki potensi yang cukup baik untuk dikembangkan yaitu daerah penghasil belimbing dengan kualitas baik, yaitu Kelurahan Karangsari. Belimbing yang dikembangkan di kelurahan ini termasuk bibit unggul dan sudah mendapatkan sertifikasi dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia yaitu Belimbing Merah Karangsari. Selain sebagai pusat budidaya, Karangsari juga menjadi tempat wisata petik belimbing.

Selain itu, Kota Blitar dikenal dengan Kota Koi karena Kota Blitar minimal sekali dalam setahun mengadakan lomba koi tingkat nasional. Tanah dan air Kota Blitar termasuk baik untuk budidaya koi. Dengan memanfaatkan posisi strategis Kota Blitar sebagai Pusat Kegiatan Wilayah, maka Kota Blitar memosisikan diri sebagai daerah

pemasaran dan pusat transaksi ikan koi di wilayah Blitar dan sekitarnya.

Potensi sumber daya alam lainnya, meskipun tidak terlalu luas beberapa sumber mata air dimanfaatkan untuk menjadi tempat wisata seperti Sumber Balang dan Sumber Mbah Bawuk.

2.1.1.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Secara geografis, Kota Blitar terletak diujung selatan Provinsi Jawa Timur dengan ketinggian 156 m dari permukaan air laut dengan suhu udara cukup sejuk rata-rata 24°C- 34°C karena berada di kaki Gunung Kelud. Karena seluruh wilayahnya adalah wilayah perkotaan, yang berupa pemukiman, perdagangan, layanan publik, sawah pertanian, kebun campuran dan pekarangan, maka sebagai penggerak ekonomi Kota Blitar mengandalkan potensi diluar sumber daya alam, yaitu sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Potensi tersebut didukung dengan kekuatan demografi Kota Blitar yang terus mengalami kenaikan cukup signifikan. Namun, peningkatan jumlah penduduk memberikan konsekuensi tersendiri bagi keberlangsungan lingkungan. Kualitas dan kondisi wilayah menjadi semakin menurun akibat adanya kegiatan manusia yang tidak memperhatikan aspek keberlanjutan dari fungsi lingkungan hidup. Hal lain yang menyebabkan penurunan kualitas lingkungan adalah terjadinya ketidaksesuaian penggunaan ruang, antara lain ditunjukkan dengan meningkatnya lahan kritis, bencana, dan pelanggaran peruntukan tata ruang, dimana banyak kawasan lindung yang berubah fungsi.

Kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung peri kehidupan manusia, makhluk hidup lainnya dan keseimbangan antar keduanya (daya dukung lingkungan hidup) serta kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya (daya tampung lingkungan hidup) penting untuk diketahui, dipahami dan dijadikan dasar dalam perencanaan pembangunan dan perencanaan pemanfaatan ruang.

Sebagai bagian dari integrasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dilakukan analisis terhadap Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TL) Kota Blitar. Hasil perhitungan D3TL memberikan gambaran kapasitas lingkungan dalam menunjang pembangunan secara berkelanjutan.

1. Daya Dukung Lahan (DDL)

Nilai DDL Kota Blitar adalah 0,63. Nilai ini lebih kecil dari 1, menunjukkan bahwa kebutuhan ruang untuk aktivitas manusia dan pembangunan melebihi luas lahan yang tersedia secara ekologis. Kondisi ini mengindikasikan tekanan terhadap fungsi lahan dan potensi konflik penggunaan ruang, serta perlunya pengendalian alih fungsi lahan dan peningkatan efisiensi tata ruang.

2. Daya Tampung Resapan Air (DTRA)
Nilai DTRA Kota Blitar adalah 0,97, yang berarti hampir seimbang namun mulai menunjukkan ketidakseimbangan antara air hujan yang masuk dan kemampuan lahan untuk meresapkannya. Hal ini mengindikasikan perlunya langkah konservasi lahan dan pengendalian alih fungsi ruang terbuka hijau agar genangan dan limpasan air dapat dikendalikan secara efektif.
3. Daya Tampung Limbah Cair Domestik (DTLCD)
Nilai DTLCD adalah 0,42, menunjukkan bahwa daya tampung badan air permukaan untuk menerima limbah cair domestik jauh di bawah jumlah limbah yang dihasilkan oleh masyarakat. Ketidakseimbangan ini dapat menurunkan kualitas air permukaan dan berisiko menimbulkan pencemaran lingkungan perairan. Oleh karena itu, penguatan sistem pengelolaan air limbah domestik dan IPAL komunal menjadi sangat penting untuk ditekankan dalam arah kebijakan ke depan.
4. Daya Tampung Emisi Karbon (DTEC)
Nilai DTEC Kota Blitar adalah 0,21, mencerminkan bahwa kemampuan ekosistem di wilayah ini untuk menyerap emisi karbon sangat terbatas dibandingkan jumlah emisi yang dihasilkan, terutama dari sektor transportasi dan energi. Kondisi ini menunjukkan kontribusi signifikan Kota Blitar terhadap perubahan iklim, serta perlunya kebijakan mitigasi emisi seperti penghijauan, efisiensi energi, dan transisi ke energi bersih.

Hasil analisis D3TL menjadi dasar penting dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan berkelanjutan di Kota Blitar. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa pembangunan yang direncanakan perlu mempertimbangkan keterbatasan daya dukung dan daya tampung lingkungan, agar tidak memperburuk degradasi sumber daya alam. Integrasi ini selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS.

Kota Blitar memiliki potensi daya dukung dan daya tampung lingkungan yang relatif baik, dengan nilai daya dukung lahan 0,021 ha/jiwa (2025) dan 0,020 ha/jiwa (2029), masih berada di atas ambang minimum sesuai standar nasional. Hal ini menunjukkan wilayah Kota Blitar masih mampu menampung populasi hingga akhir masa perencanaan.

2.1.1.4. Daya Dukung Pangan dan Daya Dukung Air

2.1.1.4.1. Daya Dukung Pangan

Produktivitas lahan untuk pemenuhan pangan beras di Kota Blitar pada tahun 2025 memiliki nilai 0,10 dimana nilai tersebut diatas dari nilai konsumsi fisik beras minimum per tahun sebesar 0,12. Kondisi pada tahun 2025 dan 2045 juga memiliki tingkat produktivitas lahan sawah masing-masing sebesar 0,10 dan 0,07 sehingga dapat disimpulkan jika kebutuhan pangan di Kota Blitar memiliki

status Defisit Daya Dukung Pangan atau Belum Mampu Swasembada Pangan. Lebih detail lagi kondisi daya dukungan pangan setiap kecamatan di Kota Blitar ditunjukkan tabel dibawah ini.

Tabel 2.3
 Daya Dukung Pangan Kota Blitar Tahun 2025 dan Tahun 2045

Daya Dukung Pangan Kota Blitar Tahun 2025						
Nama Wilayah	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan Pangan (ton)	Kebutuhan Luas Pertanian (ha)	Luas Pertanian Eksisting (ha)	Daya Tampung Pangan	Keterangan
Kecamatan Kepanjen Kidul	47.211	3.834,95	614,58	528,31	0,86	Defisit/ Terlampaui
Kecamatan Sananwetan	46.020	3.738,20	588,69	545,61	0,93	Defisit/ Terlampaui
Kecamatan Sukorejo	50.088	4.068,65	640,73	496,46	0,77	Defisit/ Terlampaui
KOTA BLITAR	143.319	11.641,80	1.844,00	1.570,38	0,85	Defisit/ Terlampaui
Daya Dukung Pangan Kota Blitar Tahun 2045						
Nama Wilayah	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan Pangan (ton)	Kebutuhan Luas Pertanian (ha)	Luas Pertanian (ha)	Daya Tampung Pangan	Keterangan
Kecamatan Kepanjen Kidul	41.467	3.368,36	539,80	295,38	0,55	Defisit/ Terlampaui
Kecamatan Sananwetan	45.961	3.733,41	587,94	458,94	0,78	Defisit/ Terlampaui
Kecamatan Sukorejo	63.157	5.130,24	807,91	246,66	0,31	Defisit/ Terlampaui
KOTA BLITAR	150.585	12.232,02	1.935,65	1.000,97	0,52	Defisit/ Terlampaui

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar, 2025

2.1.1.4.2. Daya Dukung Air

Pada tahun 2025 dan 2029, daya dukung air Kota Blitar dinyatakan kurang, karena kebutuhan melebihi ketersediaan.

Tabel 2.4
 Status Daya Dukung Air Kota Blitar

Tahun	Ketersediaan Air (m ³ /tahun)	Kebutuhan Air (m ³ /tahun)	Status
2023	23.294.039	22.827.832,43	Optimal
2025	23.294.039	25.426.932,44	Kurang
2029	22.132.800	25.827.953,05	Kurang

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar, 2025

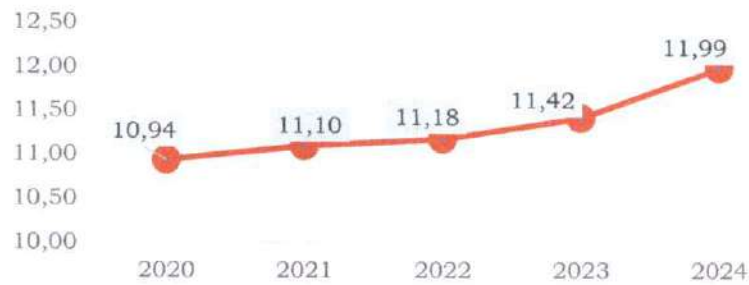
Distribusi jasa ekosistem penyedia air bersih menunjukkan bahwa tiga kecamatan di Kota Blitar masih memiliki area signifikan yang masuk dalam kategori tinggi dan sangat tinggi. Namun demikian, tekanan pembangunan di pusat kota menjadi tantangan terhadap keberlanjutan daerah tangkapan air.

2.1.1.5. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

2.1.1.5.1. Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum

Akses terhadap air minum yang layak merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat dan bagian dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Salah satu

ukuran yang dapat digunakan untuk menilai akses rumah tangga terhadap konsumsi air minum adalah jumlah sambungan rumah aktif yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan air bersih.



Sumber: Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Patria, 2025

Gambar 2.2

Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum Kota Blitar 2020 – 2024

Berdasarkan data di atas, terdapat tren peningkatan jumlah sambungan rumah aktif setiap tahunnya. Peningkatan paling signifikan terjadi pada periode 2023 – 2024. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan dalam penyediaan akses air minum kepada rumah tangga di tahun terakhir. Keberlanjutan peningkatan akses air minum harus didukung dengan investasi infrastruktur, kebijakan yang tepat, serta pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan.

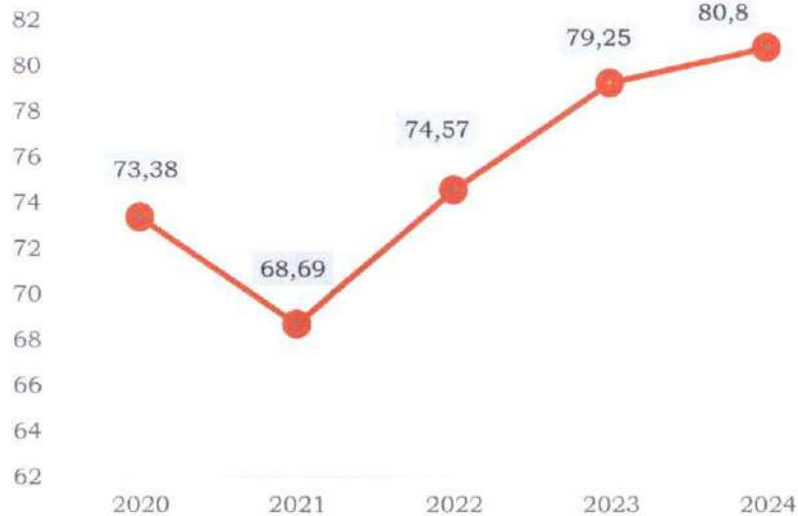
2.1.1.5.2. Indeks Ketahanan Pangan

Ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Pembangunan ketahanan pangan dan gizi dilakukan secara sistemik dengan melibatkan lintas sektor. Pendekatan ini diarahkan untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang memadai melalui produksi pangan domestik dan perdagangan, tercapainya stabilitas ketersediaan dan akses pangan secara makro-meso dan mikro, tercukupinya kualitas (keragaman dan keamanan pangan) dan kuantitas konsumsi pangan yang didukung oleh perbaikan infrastruktur. Untuk mewujudkan kondisi tersebut, diperlukan dukungan kebijakan ekonomi makro yang mampu mewujudkan stabilitas ekonomi menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan.

Dalam rangka mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor-faktor pendukungnya, telah dikembangkan suatu sistem penilaian dalam bentuk Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk sistem ketahanan pangan. Sembilan indikator yang digunakan dalam penyusunan IKP merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan

pemanfaatan pangan. Pemilihan indikator yang digunakan dalam IKP didasarkan pada hasil revidi terhadap indeks ketahanan pangan global, tingkat sensitivitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi, keterwakilan 3 (tiga) pilar ketahanan pangan, dan ketersediaan data secara rutin untuk periode tertentu (tahunan) serta mencakup seluruh kabupaten/kota dan provinsi.



Sumber : *Badan Pangan Nasional, 2025*

Gambar 2.3
Indeks Ketahanan Pangan Kota Blitar
Tahun 2020 – 2024

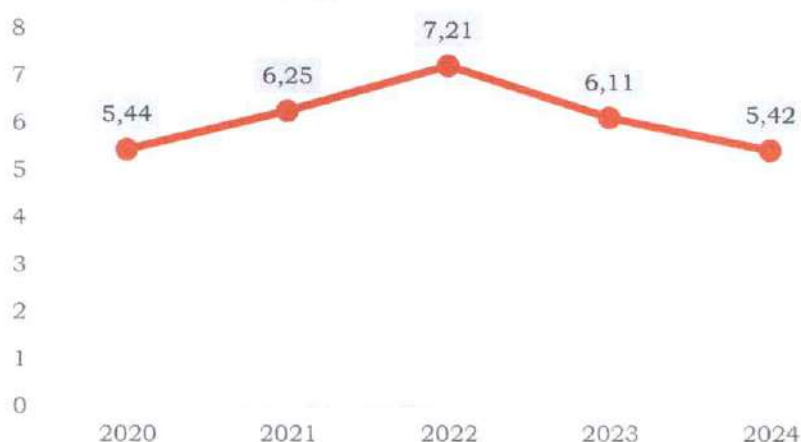
Indeks Ketahanan Pangan Kota Blitar mengalami peningkatan pada tahun 2024 menjadi 80,8. Hal ini dipengaruhi oleh peningkatan rasio konsumsi, penurunan persentase penduduk di bawah garis kemiskinan, peningkatan pangsa pengeluaran pangan, penurunan rumah tangga tanpa akses listrik, peningkatan rata-rata lama sekolah perempuan berusia di atas 15 tahun, peningkatan persentase rumah tangga dengan akses terhadap air bersih dan penurunan presentase balita stunting.

Dalam rangka meningkatkan Indeks Ketahanan Pangan, kedepan Pemerintah Kota Blitar akan mengeluarkan kebijakan teknis melalui pemantauan secara rutin harga pasar dan stok pangan di gudang toko pangan serta melakukan koordinasi intensif antar Perangkat Daerah terkait integrasi program dan kegiatan yang mendukung ketahanan pangan daerah melalui rakor tribulanan. Disamping itu perlu untuk mempertahankan lahan pertanian dalam LP2B sebagai wilayah untuk ketersediaan produksi pangan masa depan dan wilayah resapan air karena semakin tingginya pertumbuhan populasi perkotaan dan urbanisasi yang menyebabkan konversi lahan pertanian.

2.1.1.5.3. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan

Ketidakcukupan konsumsi pangan merupakan kondisi seseorang secara reguler mengkonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif dan sehat sesuai dengan standar

energi minimum yang dibutuhkan menurut umur, jenis kelamin dan tinggi badan. Prevalensi Ketidacukupan konsumsi pangan atau dikenal dengan istilah *Prevalence of Undernourishment* (PoU) dapat digunakan sebagai alat untuk melihat kondisi kerawanan pangan dan gizi.



Sumber : *Badan Pusat Statistik, 2025*

Gambar 2.4
Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan
Kota Blitar Tahun 2020-2024

PoU Kota Blitar mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga 2022 dan mencapai puncaknya pada 2022 yaitu sebesar 7,21%. Setelah itu, terjadi penurunan pada 2023 dan 2024, dengan capaian akhir di 5,42% yang lebih rendah dari tahun 2020. Peningkatan PoU hingga 2022 kemungkinan besar dipengaruhi oleh dampak ekonomi pandemi COVID-19, yang menyebabkan penurunan daya beli dan terganggunya akses pangan. Penurunan pasca 2022 mencerminkan upaya pemulihan ekonomi dan peningkatan efektivitas program pangan.

Capaian PoU tahun 2024 sebesar 5,42% menunjukkan perbaikan yang signifikan dan mencerminkan membaiknya akses konsumsi energi masyarakat, meskipun masih berada sedikit di atas ambang 5% yang umumnya dianggap sebagai batas aman secara nasional.

2.1.1.6. Lingkungan Hidup Berkualitas

2.1.1.6.1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Blitar Tahun 2024 tercapai 64,94 dan termasuk ke dalam kategori Sedang. Nilai ini tergolong masih rendah, utamanya untuk nilai Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Lahan. Rendahnya nilai Indeks Kualitas Air disebabkan limbah industri tahu, limbah domestik, dan limbah peternakan masih belum dikelola dengan baik sehingga mempengaruhi kualitas badan air. Indeks Kualitas Lahan masih rendah, dikarenakan Kualitas tutupan lahan yang ditentukan oleh luasan pada deliniasi pohon yang bersifat keras dan bukan hanya dari Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang ada di Kota Blitar. Data selengkapnya dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Blitar dapat disimak dari tabel berikut.

Tabel 2.5
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Blitar
Tahun 2020 - 2024

No	Tahun	Kab/Kota	IKU	IKA	IKL	IKLH	RATING IKLH
1.	2020	Kota Blitar	82,63	56,32	54,23	66,52	Sedang
2.	2021	Kota Blitar	83,76	51,58	38,52	61,75	Sedang
3.	2022	Kota Blitar	85,9	59,73	31,5	64,15	Sedang
4.	2023	Kota Blitar	85,83	67,78	33,51	67,58	Sedang
5.	2024	Kota Blitar	89,79	56,11	34,13	64,94	Sedang

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar, 2025

- Indeks Kualitas Udara (IKU) Kota Blitar

Nilai IKU Kota Blitar tergolong baik (nilai 89,79 pada tahun 2024), namun menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil analisis dalam dokumen KLHS RPJMD Kota Blitar, wilayah yang menunjukkan kualitas udara terburuk adalah daerah yang memiliki konsentrasi aktivitas transportasi tinggi serta padatnya permukiman, terutama di pusat kota. Tingginya emisi dari kendaraan bermotor menjadi penyumbang utama penurunan kualitas udara.

Faktor pendorong capaian Indeks Kualitas Udara di Kota Blitar yaitu :

- a. Sebagian besar parameter udara seperti SO_2 , NO_2 , CO, dan $PM_{2.5}$ masih di bawah baku mutu;
- b. Luas RTH yang masih tersedia di beberapa wilayah pinggiran.

Sedangkan faktor penghambat capaian Indeks Kualitas Udara diantaranya adalah :

- a. Peningkatan kepemilikan kendaraan bermotor pribadi (khususnya roda 4);
- b. Penggunaan bahan bakar ber-RON rendah (seperti Premium dan Pertalite);
- c. PM_{10} melebihi baku mutu di titik Taman Kebonjero ($76,95 \mu g/m^3$).

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas udara, antara lain:

- a. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk menyerap polutan udara;
- b. Penataan transportasi dan pembatasan kendaraan di area tertentu;
- c. Kampanye penggunaan kendaraan ramah lingkungan dan program "Bike to Work";
- d. Peningkatan pengawasan terhadap sumber emisi tidak bergerak seperti aktivitas industri rumah tangga dan pembakaran terbuka.

- Indeks Kualitas Air (IKA) Kota Blitar

Penurunan kualitas air di Kota Blitar disebabkan oleh beberapa bahan pencemar utama, yaitu:

- a. Bahan pencemar dominan: limbah domestik (mengandung BOD, COD tinggi), limbah deterjen, dan limbah rumah tangga yang mengandung mikroplastik;

b. Sumber pencemar: permukiman padat yang belum memiliki pengolahan limbah memadai, aktivitas perdagangan di pasar tradisional, dan kegiatan usaha kecil seperti *laundry* serta warung makan.

Adapun faktor pendorong capaian nilai IKA Kota Blitar adalah :

- a. Peningkatan kesadaran dan pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup;
- b. Peningkatan pengolahan limbah organik di beberapa titik.

Di sisi lain faktor penghambat capaian IKA yaitu :

- a. Limbah domestik dan industri (tahu, peternakan) belum tertangani optimal;
- b. Klorin bebas (6,08–24,7 mg/L), Fecal Coliform (30–11000/100 ml), dan Total Coliform (30–4300/100 ml) melebihi baku mutu.

- Indeks Kualitas Lahan (IKL) Kota Blitar

Nilai IKL Kota Blitar mengalami kenaikan jika dibandingkan capaian tahun 2023. Adapun faktor pendorong capaian IKL tersebut diantaranya yaitu perhitungan IKL berbasis fungsi ekologis dan upaya perluasan RTH.

Sedangkan faktor penghambat capaian IKL yaitu :

- a. Konversi lahan hijau menjadi kawasan terbangun (industri, permukiman);
- b. Penurunan drastis luasan RTH dari 37,75 ha (2020) menjadi 5,69 ha (2023).

Untuk mempertahankan dan meningkatkan IKL, Pemerintah Kota Blitar telah melaksanakan sejumlah langkah:

- a. Pengendalian alih fungsi lahan melalui penegakan aturan tata ruang;
- b. Rehabilitasi dan konservasi lahan kritis, terutama di bantaran sungai dan lahan terbuka;
- c. Optimalisasi lahan tidur dan eks fasilitas publik sebagai RTH atau kebun kota;
- d. Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat dalam program pertanian organik dan konservasi lahan berbasis komunitas.

Kegiatan tersebut juga didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi untuk pemantauan tutupan lahan berbasis citra satelit.

2.1.1.6.2. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Akses sanitasi aman adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan dan dikelola dengan baik. Kondisi sanitasi aman, di Kota Blitar masih rendah yaitu sebesar 4,45% dari seluruh rumah tangga sebanyak 52.691 yang ada. Hal ini disebabkan selama ini target sanitasi masih sanitasi layak yang sudah tercapai hampir 100%.

Tabel 2.6
Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman
Kota Blitar Tahun 2020 - 2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	6,45	6,55	7,15	8,21	8,45

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar, 2025

Terdapat permasalahan yang dihadapi dalam rangka meningkatkan akses sanitasi aman diantaranya sebagai berikut:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sanitasi aman yang sangat berpengaruh terhadap kesehatan;
2. Lokasi rumah yang sulit dijangkau oleh kendaraan sedot tinja;
3. Kapasitas Infrastruktur pengolah limbah domestik (IPLT: Instalasi Pengolahan Limbah Terpadu) yang terbatas.

Adapun beberapa upaya telah dilaksanakan guna menangani permasalahan diantaranya:

1. Meningkatkan sosialisasi baik melalui media massa, media sosial maupun melalui sosialisasi secara langsung dengan masyarakat;
2. Menyampaikan usulan untuk dapat dilaksanakan pengadaan kendaraan/peralatan sedot tinja dengan ukuran yang dapat menjangkau lokasi dengan jalan yang cukup sempit;
3. Melaksanakan pengkajian guna mengembangkan IPLT sehingga kedepan dapat memenuhi kapasitas yang diperlukan oleh masyarakat Kota Blitar.

2.1.1.6.3. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

Pengolahan sampah bertujuan untuk mengurangi volume sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA), meminimalkan dampak lingkungan, dan memanfaatkan kembali material yang masih memiliki nilai. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), pengolahan sampah pada tahun 2024 mencapai 98,01%, mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 92,10%.

Tabel 2.7
Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah
Kota Blitar Tahun 2020 - 2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	92,10	97,69	97,73	97,78	98,01

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar, 2025

Berdasarkan data tersebut, capaian penanganan dan pengurangan sampah di Kota Blitar yaitu :

- Capaian penanganan sampah pada tahun 2024 menunjukkan volume sampah yang terangkut dan ditangani sebesar 22,531.63 ton/hari atau 80.50 % dari total timbulan;
- Capaian pengurangan sampah melalui kegiatan daur ulang, komposting, dan pengurangan dari sumber mencapai 4,390.08 ton/hari atau sekitar 15.69 %.

Pemerintah Kota Blitar saat ini memiliki beberapa fasilitas pengolahan sampah, antara lain:

- Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST);
- Bank Sampah Induk;
- Fasilitas pengolahan sampah berbasis komunitas di kelurahan dan sekolah;
- Komposting dan pengolahan limbah organik di beberapa kawasan percontohan.

Sedangkan faktor penghambat yang dihadapi terkait pengelolaan sampah adalah :

- Kapasitas TPA Gedog mendekati batas maksimal (87,99% terisi pada 2022). Kapasitas TPA pada tahun 2024 yaitu Cell 1 dengan kapasitas sebesar 82.669,16 m³ sudah dipasifkan (ditutup) sejak tahun 2017 namun keberlanjutan pemanfaatan dilakukan Pembangunan Tanggul Cell sepanjang 290 m' dengan tinggi 6 m sehingga menambah kapasitas TPA. Adapun Kapasitas Cell 1 sudah terpakai sebanyak 78 %. Cell 2 dengan kapasitas 71.859,96 m³ , dibangun tahun 2016 dan saat ini sudah di nyatakan penuh atau dipasifkan (di tutup);
- Belum optimalnya pemilahan sampah dari sumber (rumah tangga dan usaha);
- Ketergantungan pada satu lokasi TPA menjadikan pengelolaan sampah rawan tekanan jika tidak ada ekspansi atau inovasi teknologi pengolahan lanjutan.

Adapun faktor pendorong ketercapaian pengelolaan sampah yaitu:

- Peningkatan jumlah dan fungsi Bank Sampah (54 unit tahun 2024);
- Ketersediaan sarana dan prasarana seperti dump truck, container, TPS, dan pembangunan IPAL komunal;
- Upaya edukasi masyarakat untuk memilah sampah dari sumber dan kerjasama dengan lembaga mitra seperti USAID dalam program SELARAS.

Upaya pengelolaan sampah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Blitar yaitu :

- Sosialisasi dan edukasi masyarakat melalui program Sekolah Adiwiyata, Bank Sampah, dan kampanye *zero waste*;
- Pengembangan inovasi digital untuk pelaporan dan pemantauan timbulan sampah;
- Kolaborasi dengan pelaku usaha seperti kafe, restoran, apotek, swalayan, dan pusat perbelanjaan dalam pengurangan sampah plastik. Kegiatan yang dilakukan

yaitu dengan mengeluarkan surat edaran tentang pembatasan penggunaan plastik sekali pakai.

Untuk mendukung agenda reformasi sistem persampahan secara menyeluruh, perlu ditambahkan pendekatan berbasis ekosistem dan partisipatif masyarakat, dengan poin-poin sebagai berikut:

1. Perubahan Perilaku dan Penguatan Tata Kelola Persampahan
 - Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui pembinaan dan perluasan Bank Sampah, yang per 2024 sudah mencapai 54 unit aktif di Kota Blitar;
 - Mendorong pemilahan sampah dari sumber (rumah tangga) dengan edukasi berkelanjutan dan insentif ekonomi berbasis sampah bernilai.
2. Peningkatan Pengumpulan dan Pengolahan Sampah
 - Penguatan infrastruktur pengangkutan sampah melalui pengadaan *Dump Truck*, Gerobak Sampah, *Armroll*, dan tempat sampah terpilah;
 - Optimalisasi rute pengumpulan sampah untuk efisiensi biaya dan jangkauan layanan.
3. Pemrosesan Residu di TPA dan *Sanitary Landfill*
 - Peningkatan kualitas layanan di TPA Gedog, yang kapasitasnya sudah mencapai 87,99% terisi (2022), dengan pendekatan *Sanitary Landfill* dan pemanfaatan gas *methane* dari sampah organik;
 - Penambahan Cell TPA dinilai tidak berkelanjutan karena keterbatasan lahan, maka alternatif TPA Regional atau lokasi baru perlu direncanakan sejak dini.

2.1.1.6.4. Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah

Layanan penuh pengumpulan sampah merupakan layanan yang mengambil dan memindahkan sampah dari sumbernya ke tempat pengolahan sampah. Di Kota Blitar layanan penuh pengumpulan sampah yang bersumber dari rumah tangga pada tahun 2024 sebesar 90,5% yang mengalami kenaikan dari tahun 2020 yang hanya sebesar 88,4%.

Tabel 2.8
Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah Kota Blitar Tahun 2020 – 2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	88,4	88,6	89,0	90,0	90,5

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar, 2025

Adapun faktor pendorong pengumpulan sampah rumah tangga adalah:

- Perluasan jaringan pengangkutan sampah berbasis zonasi wilayah dan rute pengumpulan;
- Dukungan anggaran operasional pengelolaan persampahan;
- Keterlibatan masyarakat melalui program lingkungan dan kampanye pilah sampah.

Sedangkan faktor penghambat pengumpulan sampah rumah tangga yaitu:

- Masih terdapat wilayah marginal yang belum terlayani secara optimal;
- Ketergantungan pada armada dan sarana fisik pengangkut yang kapasitasnya terbatas.

2.1.1.6.5. Kinerja Penataan Tata Ruang

Pemerintah Kota Blitar secara konsisten menegakkan dan meningkatkan ketaatan terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Berdasarkan Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2011 tentang RTRW 2011–2030 dan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2017 tentang RDTR & zonasi 2017–2037, aturan zonasi dan pemanfaatan ruang diterapkan sebagai pedoman dalam pengendalian pembangunan. Ketaatan terhadap tata ruang perlu ditingkatkan melalui pembangunan kerangka hukum, institusi yang kuat, serta mekanisme pemantauan untuk memastikan pembangunan kota berjalan sesuai dengan rencana tata ruang secara berkelanjutan dan terkontrol.

Data hasil pengawasan penyelenggaraan penataan ruang dari Sistem Informasi Pengawasan Teknis atau SIWASTEK untuk kinerja di tahun 2021–2023 menunjukkan bahwa kinerja aspek pengaturan, sebagaimana data berikut.

Tabel 2.9

Kinerja Pengaturan Penataan Ruang, Pembinaan Penataan Ruang dan Pelaksanaan Penataan Ruang Tahun 2021 – 2023

No.	Aspek	Periode Tahun	
		2021	2022-2023
1	Pengaturan Penataan Ruang	90	82,50
2	Pembinaan Penataan Ruang	30	89,81
3	Perencanaan Tata Ruang	100	75,00
4	Pemanfaatan Ruang	63	71,43
5	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	4	75,00
	Total	57,33	78,75
	Predikat	Sedang	Sedang

Sumber: Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, 2025

Dari data tersebut, terlihat bahwa terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada aspek pembinaan penataan ruang, dari skor 30 pada tahun 2021 menjadi 89,81 pada tahun 2022–2023. Hal ini menunjukkan adanya upaya intensif dalam memperkuat kapasitas pembinaan, baik melalui pelatihan, sosialisasi, maupun peningkatan

koordinasi antar pemangku kepentingan. Selain itu, aspek pengendalian pemanfaatan ruang yang sebelumnya sangat rendah di angka 4,00 mengalami lonjakan drastis menjadi 75,00, yang mengindikasikan peningkatan pengawasan serta penegakan terhadap pelanggaran tata ruang.

Namun demikian, aspek perencanaan tata ruang yang pada tahun 2021 mencapai skor tertinggi yaitu 100, justru mengalami penurunan menjadi 75,00. Penurunan ini dapat mencerminkan adanya tantangan dalam penyelarasan rencana tata ruang dengan dinamika kebijakan nasional atau implementasi regulasi baru. Sementara itu, pengaturan penataan ruang mengalami sedikit penurunan dari 90 menjadi 82,50, dan pemanfaatan ruang mengalami peningkatan moderat dari 63 menjadi 71,43.

Secara keseluruhan, nilai total kinerja meningkat dari 57,33 menjadi 78,75, meskipun masih berada pada kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa meski telah terjadi perbaikan signifikan dalam beberapa aspek, terutama pembinaan dan pengendalian, masih diperlukan penguatan menyeluruh dan berkelanjutan pada aspek perencanaan dan pengaturan untuk mencapai predikat kinerja yang lebih tinggi dan merata di seluruh komponen penataan ruang.

2.1.1.6.6. Pertanahan

Urusan pertanahan difokuskan pada pengelolaan administrasi pertanahan yang meliputi penataan kembali aset milik daerah, pengendalian pemanfaatan tanah sesuai peruntukan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta fasilitasi penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan. Pemerintah Kota Blitar juga memprioritaskan percepatan sertifikasi tanah aset pemerintah, penataan batas wilayah administrasi, serta peningkatan koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk memastikan legalitas dan kepastian hukum hak atas tanah. Upaya ini diiringi dengan pengawasan terhadap alih fungsi lahan agar tetap sejalan dengan rencana pembangunan, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk memperbarui data pertanahan secara berkala guna mendukung pengambilan kebijakan yang akurat dan transparan.

Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi berhasil mencapai 100 persen setiap tahunnya. Realisasi ini dihitung melalui persentase penanganan/mediasi terhadap kasus sengketa yang terjadi. Pada tahun 2024, tidak terdapat kasus sengketa tanah garapan, sehingga capaian 100 persen.

Tabel 2.10

Indikator Kinerja Pertanahan Tahun 2020 – 2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan	100	100	100	100	100

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
	melalui mediasi (persen)					

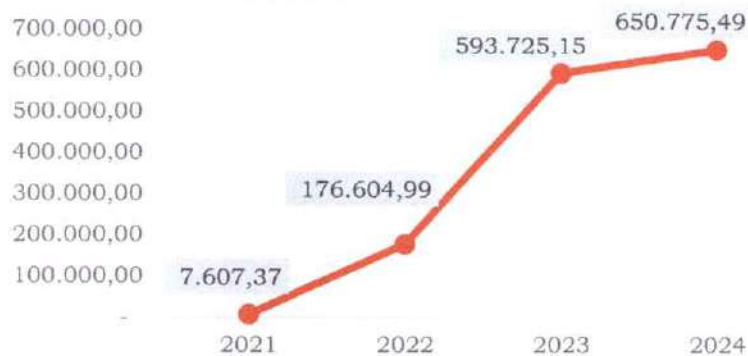
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar, 2025

Permasalahan yang masih dihadapi adalah masih terjadi ketidaksesuaian pemanfaatan lahan dengan peruntukan dalam RTRW, termasuk potensi alih fungsi lahan pada kawasan lindung dan ruang terbuka hijau. Sengketa kepemilikan tanah antara warga maupun antara warga dengan pemerintah masih ditemukan, meskipun jumlahnya relatif kecil, namun penyelesaiannya membutuhkan waktu panjang akibat perbedaan bukti kepemilikan. Keterbatasan anggaran serta sumber daya manusia yang memiliki kompetensi teknis di bidang pertanahan turut menjadi kendala dalam mempercepat penyelesaian permasalahan ini secara menyeluruh.

2.1.1.7. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

2.1.1.7.1. Potensi Penurunan Emisi GRK Kumulatif

Perubahan iklim merupakan ancaman besar bagi kehidupan dan pembangunan global dimana salah satu pemicunya adalah emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) merupakan upaya untuk mengurangi jumlah emisi GRK yang dilepaskan ke atmosfer per satuan aktivitas. Emisi GRK adalah gas-gas yang dapat menyebabkan efek rumah kaca, yaitu proses penahanan panas di atmosfer yang memengaruhi suhu permukaan bumi.



Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2025

Gambar 2.5

Potensi Penurunan Emisi GRK Kumulatif Kota Blitar Tahun 2021 - 2024

Upaya pembangunan rendah karbon di Kota Blitar telah menunjukkan hasil positif melalui pelaksanaan sejumlah aksi mitigasi perubahan iklim. Berdasarkan data dari Sistem Registri Nasional Aksi Perubahan Iklim (AKSARA) hingga April 2025, total capaian penurunan emisi GRK di Kota Blitar adalah sebesar 643.361,77 Ton CO₂e. Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan dibanding data sebelumnya pada tahun 2023 yang tercatat sebesar 593.725,15 Ton CO₂e dari berbagai kegiatan mitigasi yang tercantum dalam dokumen KLHS.

Penurunan emisi GRK berasal dari kegiatan di berbagai sektor, antara lain:

- Limbah dan sanitasi : seperti pembangunan IPAL permukiman, tangki septik komunal, optimalisasi IPLT, dan penyedotan lumpur tinja;
- Energi dan transportasi : pengadaan lampu hemat energi dan PJU solarcell mendukung program Kampung Iklim (Proklim);
- Kehutanan dan tutupan lahan : penanaman pohon di jalan dan taman kota.

Beberapa kegiatan mitigasi yang telah dilaksanakan meliputi:

- Pertanian : pendampingan pola tanam padi sehat, pelatihan pembuatan pupuk organik;
- Pengolahan limbah peternakan (5.883 ton CO₂eq);
- Penanaman pohon (6.695 ton CO₂eq);
- Pendampingan pembuatan pupuk organik (49.636 ton CO₂eq);
- Penggunaan PJU *solar cell* (105 ton CO₂eq);
- Operasional pengelolaan sampah seperti TPS 3R dan PDU.

Faktor Pendorong penurunan emisi GRK yaitu:

- Adanya dukungan program nasional seperti Proklim dan SELARAS;
- Partisipasi aktif masyarakat melalui edukasi dan pendampingan;
- Investasi pada teknologi rendah emisi (IPAL, PJU *solarcell*).

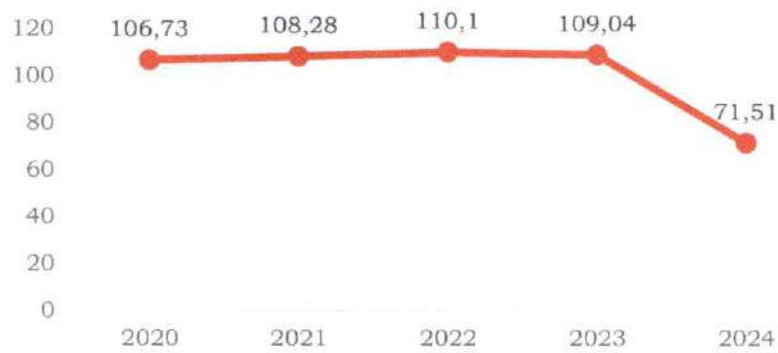
Adapun faktor penghambat penurunan emisi GRK yaitu:

- Terbatasnya ruang hijau dan hutan kota sebagai penyerap karbon di pusat kota;
- Emisi tinggi dari sektor transportasi dan pemukiman padat (contoh: Kelurahan Kepanjenkidul, Plosokerep, Sukorejo).

Target penurunan emisi GRK pada periode 2025–2029 telah ditetapkan melalui indikator kinerja RPJMD dalam rentang 2,95 hingga 15,74 poin pada indeks GRK. Penurunan GRK tersebut ditujukan sebagai bagian dari indikator keberhasilan pembangunan rendah karbon dan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Kota Blitar harus menyesuaikan perencanaan pengurangan emisi GRK dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025, yang mensyaratkan integrasi program-program mitigasi perubahan iklim ke dalam dokumen RPJMD, serta pelaporan capaian melalui sistem AKSARA.

2.1.1.7.2. Indeks Risiko Bencana

Indeks Risiko Bencana (IRB) merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tingkat risiko bencana di suatu wilayah atau lokasi tertentu. Indeks ini digunakan untuk mengidentifikasi potensi risiko bencana alam atau risiko terkait bencana manusia, serta untuk membantu pemangku kebijakan dan peneliti dalam perencanaan mitigasi bencana dan manajemen risiko. Adapun realisasi IRB Kota Blitar selama lima tahun terakhir adalah sebagai berikut :



Sumber: *Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur, 2025*

Gambar 2.6

Indeks Risiko Bencana Kota Blitar Tahun 2020 – 2024

Berdasarkan data capaian Indeks Risiko Bencana (IRB) Kota Blitar dalam periode 2020 hingga 2024, terlihat adanya penurunan yang konsisten dalam nilai indeks risiko bencana, hal ini menggambarkan berkurangnya potensi dan dampak dari bencana di Kota Blitar. Dari tahun 2020 hingga 2024, terdapat penurunan sebesar 20,08 poin atau sekitar 18,9%. Penurunan ini menunjukkan bahwa Kota Blitar telah berhasil mengurangi potensi risiko bencana dalam periode tersebut.

Kota Blitar memiliki 4 (empat) ragam ancaman yaitu erupsi gunung berapi, gempa bumi, kebakaran permukiman dan cuaca ekstrem yang melekat terhadap karakter wilayah perkotaan.

1. Erupsi gunung berapi

Kawasan rawan bencana di Kota Blitar tidak terlepas dari keberadaan gunung Kelud, yang merupakan salah satu gunung berapi di Jawa Timur. Gunung Kelud memiliki ketinggian 1.731 meter dengan kondisi yang masih aktif. Gunung Kelud berada pada daerah perbatasan antara Kabupaten Kediri dengan Kabupaten Blitar dengan jarak sekitar 27 km dari sebelah timur Kota Kediri. Pada letusan Gunung Kelud Tahun 1991, Kota Blitar terkena aliran lahar dan hujan abu yang sangat tebal sehingga melumpuhkan aktivitas perekonomian Kota Blitar. Meskipun letusan tahun 2014 relatif tidak berdampak besar terhadap Kota Blitar, mengingat sifat letusan yang tidak dapat diprediksi, Kota Blitar tetap menjadi wilayah yang rawan terhadap letusan Gunung Kelud. Beberapa wilayah yang menjadi kawasan rawan lahar Gunung Kelud adalah kelurahan yang berada di sepanjang Sungai Lahar.

2. Gempa bumi

Gempa bumi adalah peristiwa alam karena proses tektonik maupun vulkanik. Gempa bumi vulkanik hanya bisa dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di sekitar gunung saja, gempa ini disebabkan oleh pergerakan dan tekanan magma di dalam dapur magma gunung tersebut. Sedangkan gempa bumi tektonik disebabkan dari pergerakan tektonik lempeng. Wilayah Kota Blitar dan sekitarnya masih terletak pada jalur subduksi lempeng,

yaitu Lempeng Indo – Australia yang menyusup di bawah Lempeng Eurasia. Dengan demikian wilayah Kota Blitar merupakan wilayah yang rawan gempa bumi baik tektonik maupun vulkanik.

3. Kebakaran permukiman

Tingkat kepadatan penduduk Kota Blitar relatif tinggi, mencapai 4.486 jiwa per km². Kondisi jalan lingkungan padat hunian, sebagian besar tidak dapat dilewati mobil pemadam kebakaran termasuk jenis mobil paling kecil sekalipun sehingga menimbulkan kerawanan terjadinya kebakaran di permukiman. Data historis menunjukkan kawasan yang rawan kebakaran adalah kawasan perdagangan dan jasa dan yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang relatif tinggi. Kejadian kebakaran pada Tahun 2015 di wilayah pertokoan (Kelurahan Kepanjen Lor) dan di Pasar Legi (Kelurahan Sukorejo). Meskipun memiliki akses jalan yang relatif lebih lebar daripada kawasan permukiman, tapi jika tidak ditanggulangi dengan optimal akan menimbulkan kerugian yang cukup berdampak pada aktifitas perekonomian kota. Kajian Rawan Bencana Provinsi Jawa Timur juga menyebutkan bahwa Kota Blitar (seperti wilayah perkotaan lainnya) merupakan salah satu wilayah yang rawan kebakaran.

4. Cuaca ekstrem

Cuaca Ekstrem yang memicu angin puting beliung adalah angin kencang dan berbahaya yang bergerak melingkar hingga menyentuh permukaan bumi dan awan kumulonimbus atau, dalam sedikit kasus, awan kumululus. Yang paling hebat dari semua fenomena atmosfer, angin puting beliung datang dengan berbagai bentuk dan ukuran, tetapi secara tipikal berbentuk gumpalan corong yang ujungnya menyentuh permukaan bumi dan sering disertai dengan puing-puing dan debu. Kebanyakan angin puting beliung berkecepatan antara 64 km/jam sampai 177 km/jam, menerjang beberapa kilometer dan akhirnya menghilang. Yang paling ekstrem dapat mencapai kecepatan di atas 480 km/jam, terbentang lebih dari 1,6 Km, dan menyentuh permukaan bumi lebih dari 100 km. Pada akhir Tahun 2015 dan awal Tahun 2016 terjadi genangan air hujan yang frekuensi dan intensitasnya meningkat sehingga cukup aktivitas warga. Gejala keterbatasan air tanah ditunjukkan dengan semakin dalamnya warga kota harus mengebor sumur untuk memperoleh air (hingga 16 meter). Gejala kekeringan juga meningkat seiring juga terjadinya badai El Nino yang mengakibatkan hampir seluruh wilayah Indonesia mengalami kemarau panjang.

5. Potensi bencana lain

Potensi bencana yang dapat melanda Kota Blitar adalah kegagalan teknologi karena perkembangan kota dan yang cukup menjadi perhatian adalah pengelolaan TPA (Tempat Pembuangan Akhir) sampah, dengan tingginya gas metan yang berpotensi terjadi ledakan. Juga potensi

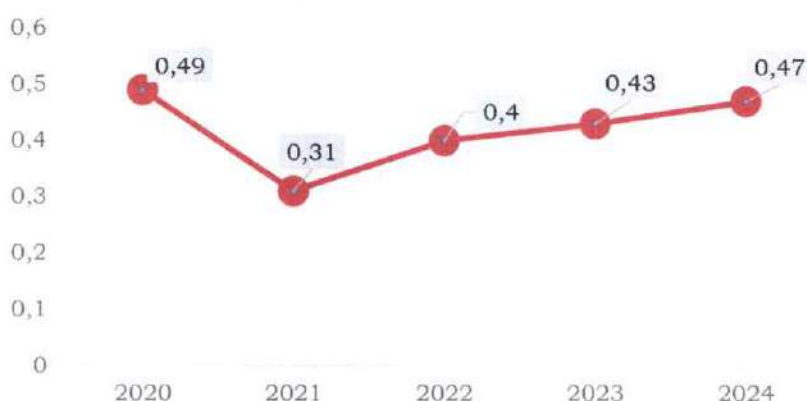
konflik sosial terutama di wilayah dengan karakteristik masyarakat yang beragam.

Berbagai kebijakan yang dilakukan guna menurunkan tingkat risiko bencana diantaranya yaitu perbaikan infrastruktur yang sensitif ancaman bencana, penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana, penyusunan peraturan daerah tentang penanggulangan bencana dan penyusunan rencana kontinjensi ancaman bencana.

2.1.1.7.3. Indeks Ketahanan Daerah

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan instrumen untuk mengukur kapasitas daerah dengan asumsi bahwa bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan di daerah tersebut kondisinya tetap. Dari IKD, setiap daerah mampu mengetahui apa saja upaya yang sudah dilakukan dan langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk menurunkan risiko. Berdasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 07 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, BPBD Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan kegiatan pengukuran IKD dengan metodologi pengukuran untuk kapasitas Provinsi Jawa Timur adalah agregat dari kapasitas Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga Kabupaten/Kota (C1) dan kapasitas Provinsi Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga Provinsi Jawa Timur (C2).

$$\text{Kapasitas Jawa Timur} = (60\% \times C1) + (40\% \times C2)$$



Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar, 2025

Gambar 2.7

Indeks Ketahanan Daerah Kota Blitar Tahun 2020 – 2024

Nilai IKD Kota Blitar terus mengalami peningkatan selama empat tahun terakhir. Indeks Kapasitas Daerah Kota Blitar tahun 2024 adalah 0,47. Hal ini dikandung maksud kemampuan daerah dan masyarakat untuk melakukan tindakan pengurangan ancaman dan potensi kerugian akibat bencana secara terstruktur, terencana dan terpadu dikategorikan Sedang. Nilai IKD tahun 2024 ini belum memenuhi target sebesar 0,60. Permasalahan yang dihadapi diantaranya yaitu belum adanya regulasi atau kebijakan

teknis dalam upaya penanggulangan bencana sehingga diperlukan adanya peraturan daerah tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Blitar. Selain itu kurang lengkapnya dokumen dan bukti dukung dari Perangkat Daerah terkait pemenuhan dokumen pendukung Indeks Kapasitas Daerah (IKD) juga merupakan permasalahan yang perlu untuk diatasi.

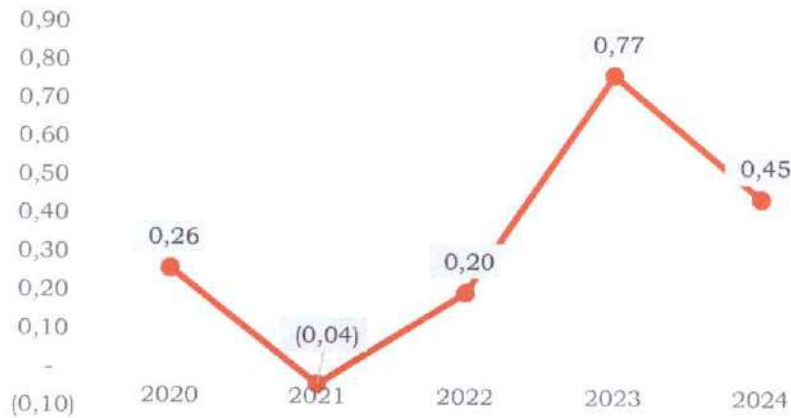
Pemerintah Kota Blitar telah melakukan sejumlah langkah teknis untuk memperkuat ketahanan daerah dan meningkatkan efektivitas penanggulangan bencana. Berikut adalah beberapa langkah teknis yang telah dilakukan yaitu menyusun peraturan daerah tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, melakukan sosialisasi dan rapat koordinasi bersama Perangkat Daerah terkait tentang pentingnya pemenuhan dokumen dan kelengkapan bukti dukung untuk pengisian IKD Tahun 2025 serta menyelenggarakan *Focus Group Discussion (FGD)* secara simultan dan berkelanjutan dengan stakeholder untuk menyisir kembali hasil evaluasi tahun sebelumnya sehingga dapat ditingkatkan kinerja *output* masing-masing variabel dari setiap indikator.

2.1.1.8. Demografi

2.1.1.8.1. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk merupakan angka yang menggambarkan penambahan jumlah penduduk yang dipengaruhi oleh pertumbuhan alamiah maupun perpindahan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk berguna untuk melihat kecenderungan penduduk dimasa lampau, sekarang dan masa depan.

Laju pertumbuhan penduduk per tahun selama 2020-2024 rata-rata sebesar 0,33 %, melambat dibandingkan rata-rata periode 2016-2020 sebesar 1,67 %. Laju pertumbuhan penduduk Kota Blitar 2024 adalah 0,472 yang berarti tergolong dalam laju pertumbuhan rendah karena kurang dari 1 (satu). Hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Kota Blitar berhasil mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Namun meskipun demikian, laju pertumbuhan penduduk harus tetap dikendalikan salah satunya dengan upaya pembinaan kepada remaja dan keluarga remaja dalam rangka pendewasaan usia pernikahan. Laju pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi dan berbagai masalah lainnya.

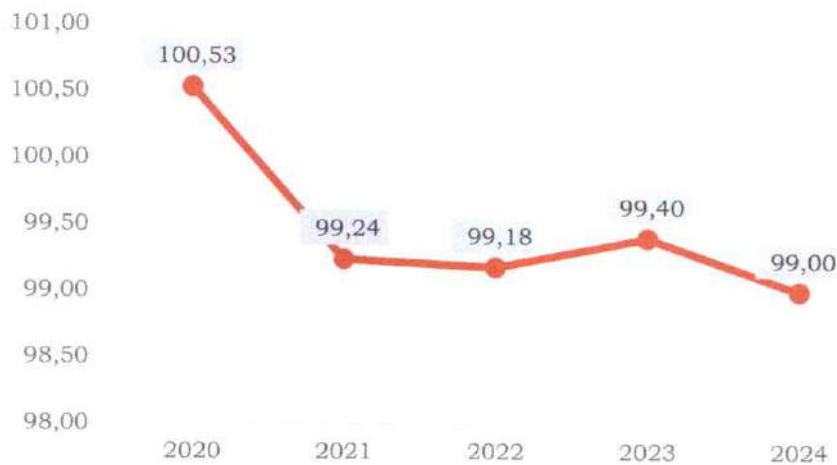


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Gambar 2.8
Laju Pertumbuhan Penduduk
Kota Blitar 2020 - 2024

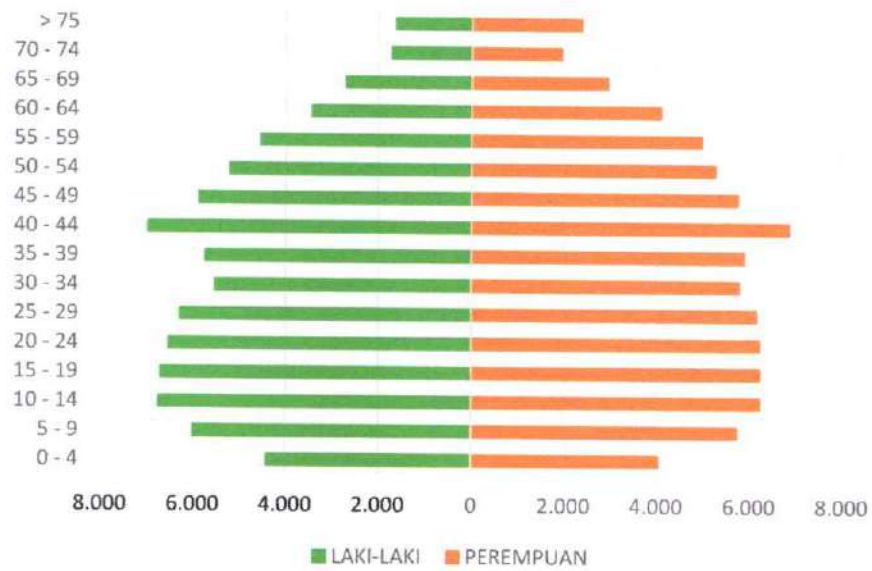
2.1.1.8.2. Rasio Penduduk

Rasio Jenis Kelamin adalah perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Data rasio jenis kelamin dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan berwawasan gender. Rasio Jenis Kelamin Kota Blitar 2020-2024 berada di 99-100% yang artinya untuk setiap 100 penduduk perempuan, terdapat 99-100 penduduk laki-laki. Salah satu penyebab rasio jenis kelamin kurang dari 100% adalah Angka Harapan Hidup (AHH) perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Gambar 2.9
Rasio Jenis Kelamin Kota Blitar 2020 - 2024



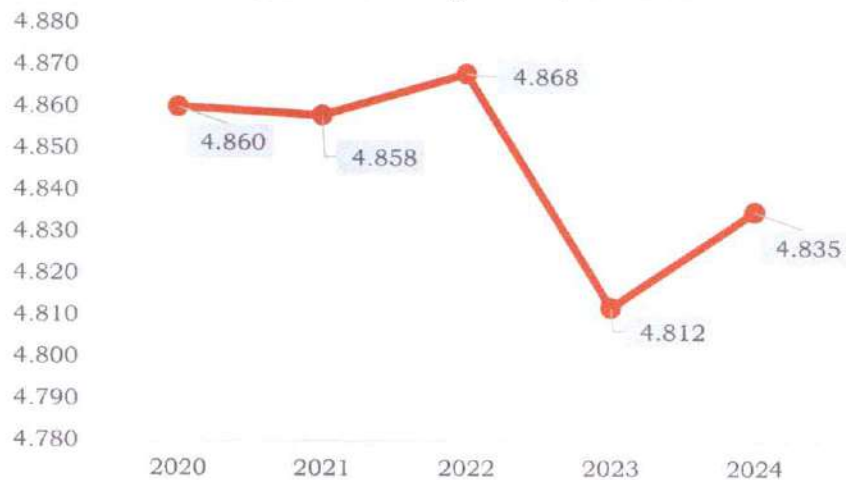
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Gambar 2.10

Data Jumlah Penduduk Kota Blitar Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2024

2.1.1.8.3. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk adalah ukuran persebaran penduduk yang menunjukkan jumlah penduduk untuk setiap kilometer persegi luas wilayah. Rata-rata kepadatan penduduk 2020-2024 sebesar 4.847, naik bila dibandingkan dengan rata-rata kepadatan penduduk periode 2015-2019 sebesar 4.716. Hal ini dikarenakan jumlah penduduk Kota Blitar yang memiliki tren kenaikan dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir. Sedangkan penurunan kepadatan penduduk pada tahun 2023-2024 dibandingkan tahun 2020-2022 disebabkan oleh luas wilayah Kota Blitar yang bertambah di tahun 2023 dari 32,57 km² menjadi 33,20 km².



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Gambar 2.11

Kepadatan Penduduk Kota Blitar 2020 - 2024

Kota Blitar merupakan kota terkecil kedua di Provinsi Jawa Timur dengan luas sekitar 33,20 km² yang terbagi dalam 3 (tiga) kecamatan. Berdasarkan distribusinya,

penduduk terbanyak ada di Kecamatan Sananwetan, namun kecamatan yang paling padat penduduknya adalah Kecamatan Sukorejo.

Tabel 2.11
Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Kota Blitar 2024

Wilayah	Luas Wilayah		Penduduk		Kepadatan
	Km ²	% terhadap Luas	Jumlah	% terhadap Jumlah	
Kecamatan Kapanjenkidul	10,43	31,42	46.000	28,54	4.410
Kecamatan Sukorejo	10,13	30,51	54.996	34,12	5.429
Kecamatan Sananwetan	12,65	38,10	60.208	37,35	4.760
Kota Blitar	33,20	100	161.204	100	4.856

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar, 2025

Tabel 2.12
Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Kota Blitar 2020 - 2024

Tahun	Jumlah Penduduk (Ribuan Jiwa)			Laju Pertumbuhan Penduduk	Rasio Jenis Kelamin	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km ²)
	Laki - laki	Perempuan	Total			
2020	79,460	78,853	158,313	0.26	100.53	4,768
2021	78,820	79,424	158,244	- 0.04	99.24	4,766
2022	78,952	79,606	158,558	0.20	99.18	4,776
2023	79,651	80,130	159,781	0.77	99.40	4,813
2024	80,376	80,828	161,204	0.45	99.00	4,856

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar 2025, data diolah

2.1.1.8.4. Proyeksi dan analisis penduduk 5 (lima) tahun ke depan sesuai RPJPD Kota Blitar 2025-2045

Proyeksi demografi adalah perkiraan atau ramalan mengenai perkembangan jumlah penduduk suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Proyeksi ini biasanya didasarkan pada data demografi masa lalu, tren pertumbuhan, dan faktor-faktor lain yang memengaruhi perubahan jumlah penduduk, seperti tingkat kelahiran, kematian, dan migrasi.

Pada tahun 2029, proyeksi demografi Kota Blitar akan mencakup estimasi jumlah penduduk kota tersebut berdasarkan asumsi-asumsi tertentu. Asumsi-asumsi ini melibatkan faktor-faktor seperti tingkat kelahiran, tingkat kematian, dan arus migrasi penduduk. Juga, faktor-faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah, perubahan ekonomi, dan perubahan sosial dapat memengaruhi proyeksi demografi.

Berikut ini adalah proyeksi penduduk Kota Blitar Tahun 2025-2029 berdasarkan Proyeksi Penduduk

Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur 2020-2035 Hasil Sensus Penduduk 2020.

Tabel 2.13
Proyeksi Penduduk Kota Blitar Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2025 – 2029 (Ribu)

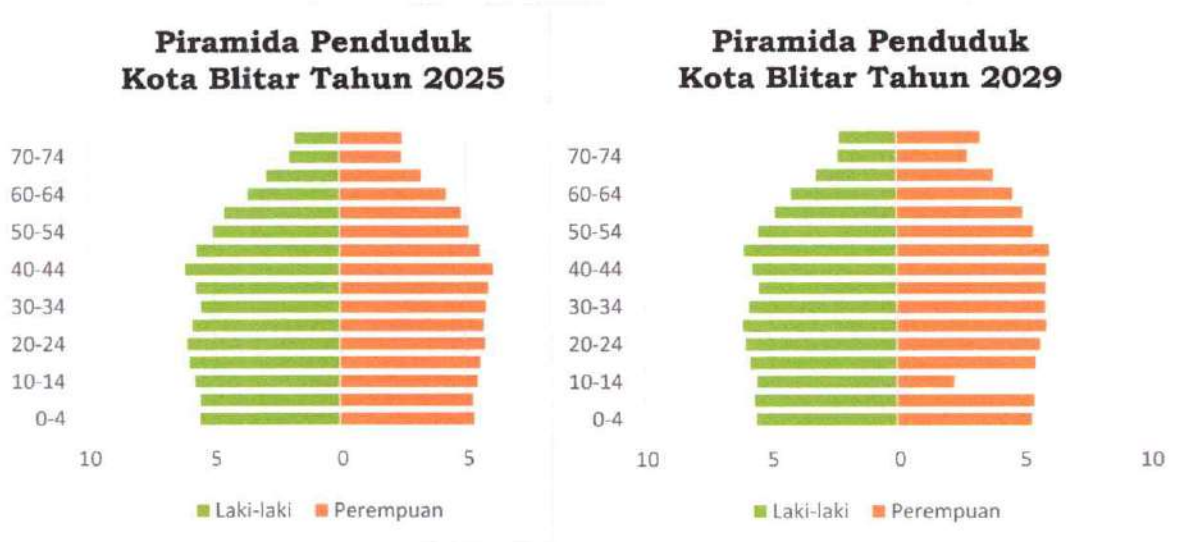
Umur	Jenis Kelamin	2025	2026	2027	2028	2029
0-4	Laki-laki	5,55	5,55	5,56	5,57	5,57
	Perempuan	5,33	5,33	5,34	5,35	5,35
5-9	Laki-laki	5,53	5,55	5,59	5,62	5,64
	Perempuan	5,27	5,31	5,36	5,41	5,44
10-14	Laki-laki	5,74	5,69	5,63	5,58	5,55
	Perempuan	5,45	5,41	5,36	5,3	5,28
15-19	Laki-laki	5,95	5,92	5,89	5,85	5,81
	Perempuan	5,57	5,55	5,53	5,53	5,51
20-24	Laki-laki	6,04	6,05	6,04	6,02	6
	Perempuan	5,76	5,76	5,75	5,72	5,69
25-29	Laki-laki	5,85	5,93	6	6,06	6,1
	Perempuan	5,71	5,76	5,83	5,89	5,94
30-34	Laki-laki	5,5	5,55	5,64	5,75	5,86
	Perempuan	5,8	5,82	5,83	5,85	5,89
35-39	Laki-laki	5,71	5,62	5,54	5,49	5,46
	Perempuan	5,89	5,87	5,87	5,88	5,9
40-44	Laki-laki	6,12	6,06	5,96	5,84	5,72
	Perempuan	6,09	6,09	6,05	5,99	5,93
45-49	Laki-laki	5,69	5,81	5,92	6,01	6,05
	Perempuan	5,56	5,68	5,82	5,95	6,05
50-54	Laki-laki	5,02	5,12	5,23	5,36	5,49
	Perempuan	5,12	5,18	5,25	5,33	5,42
55-59	Laki-laki	4,56	4,66	4,71	4,76	4,81
	Perempuan	4,82	4,87	4,91	4,94	4,99
60-64	Laki-laki	3,62	3,75	3,9	4,05	4,19
	Perempuan	4,23	4,35	4,45	4,54	4,61
65-69	Laki-laki	2,88	2,96	3,03	3,1	3,18
	Perempuan	3,26	3,4	3,55	3,7	3,85
70-74	Laki-laki	1,98	2,08	2,17	2,25	2,33
	Perempuan	2,47	2,58	2,67	2,74	2,82
75+	Laki-laki	1,76	1,88	2,01	2,14	2,28
	Perempuan	2,5	2,67	2,87	3,08	3,31
Total		156,33	157,79	159,22	160,62	161,99

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2020

Tabel 2.14
Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Blitar Tahun 2025 - 2029

Parameter	2025	2026	2027	2028	2029
Penduduk					
Laki-laki	77,5	78,16	78,81	79,43	80,03
Perempuan	78,83	79,62	80,41	81,19	81,96
Total	156,33	157,79	159,22	160,62	161,99

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2020



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2020

Gambar 2.12

Piramida Penduduk Kota Blitar Tahun 2025 dan 2029

Proyeksi penduduk Kota Blitar untuk periode tahun 2025 hingga 2029 menunjukkan tren pertumbuhan positif dimana diperkirakan jumlah penduduk Kota Blitar akan terus mengalami peningkatan, mencapai 161,99 ribu jiwa pada tahun 2029.

Dengan proyeksi pertumbuhan penduduk yang cenderung positif, Pemerintah Kota Blitar perlu terus memperhatikan aspek pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sektor lainnya guna menjaga keseimbangan perkembangan di setiap wilayah di Kota Blitar. Proyeksi ini menjadi dasar penting bagi perencanaan pembangunan dan pengelolaan sumber daya dalam rangka mendukung keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat Kota Blitar.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

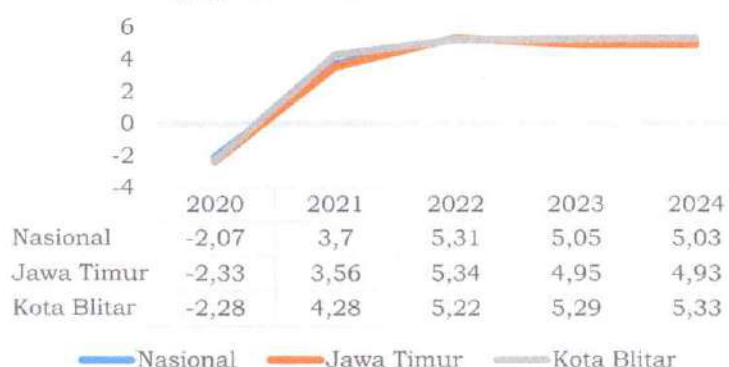
2.1.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

2.1.2.1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan konsep yang mengukur perubahan dalam nilai total produksi ekonomi suatu wilayah selama periode waktu tertentu. Analisis data pertumbuhan ekonomi penting untuk merancang kebijakan ekonomi dan pembangunan yang sesuai dengan kondisi aktual dan perubahan ekonomi, serta untuk mengidentifikasi sektor-sektor yang mungkin perlu mendapatkan perhatian khusus dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi di masa mendatang.

Ekonomi Kota Blitar mulai pulih pada tahun 2021 dengan pertumbuhan sebesar 4,28 persen. Hal ini mengindikasikan keberhasilan usaha Kota Blitar mengatasi dampak pandemi. Pada tahun 2023 ekonomi mengalami peningkatan pertumbuhan menjadi 5,29 persen dan terus meningkat sebesar 0,04 % (persen) menjadi 5,33 % (persen) pada tahun 2024. Angka ini masih lebih tinggi dibanding laju pertumbuhan Provinsi Jawa Timur tahun 2024 yang sebesar 4,93 % (persen), juga di atas laju pertumbuhan ekonomi

nasional yang sebesar 5,03 % (persen). Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Kota Blitar dalam kurun waktu 5 (lima) tahun tersaji pada tabel berikut.



Sumber : *Badan Pusat Statistik, 2025*

Gambar 2.13
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Blitar
Tahun 2020-2024

2.1.2.1.2. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan yang didefinisikan sebagai angka kemiskinan. Selama tahun 2021 sampai dengan tahun 2024, angka kemiskinan di Kota Blitar terus mengalami penurunan.

Pada tahun 2021, angka kemiskinan di Kota Blitar mencapai 7,89. Pada tahun 2022 turun menjadi 7,37 atau turun sebesar 0,52 poin dari tahun 2021 dan terus turun menjadi 7,30 di tahun 2023 atau turun sebesar 0,07 poin dari tahun 2022. Kondisi ini juga diikuti oleh jumlah penduduk miskin di Kota Blitar yang berkurang sebanyak 0,68 ribu jiwa, dari 11,33 ribu jiwa pada 2021 menjadi 10,65 ribu jiwa di tahun 2022 atau turun sebesar 6 persen dan terus turun menjadi 10,61 ribu jiwa di tahun 2023 atau turun sebesar 0,38 persen dari tahun 2022. Tahun 2024 jumlah penduduk miskin di Kota Blitar turun menjadi 9,86 ribu jiwa.

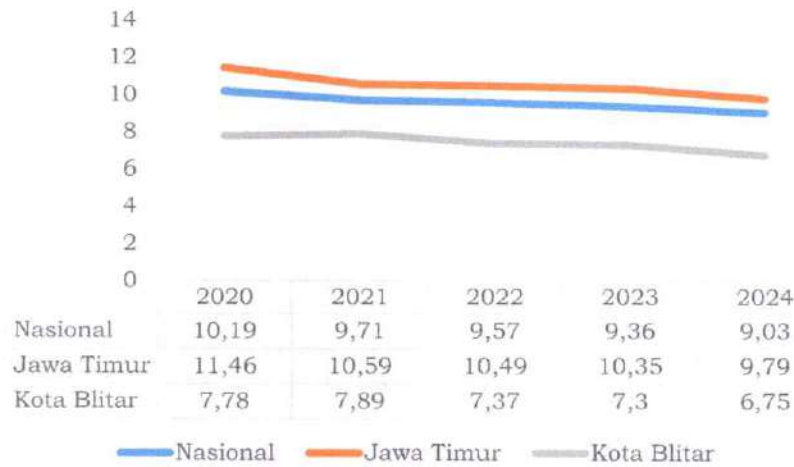
Berdasarkan grafik tren angka kemiskinan, dibandingkan dengan rata-rata kemiskinan Propinsi Jawa Timur dan Nasional, angka kemiskinan Kota Blitar masih dibawah rata-rata kemiskinan Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Penurunan angka kemiskinan di Kota Blitar dari tahun 2023 ke 2024 sebesar 0,55 poin lebih rendah daripada penurunan rata-rata kemiskinan Provinsi Jawa Timur dari 2023 ke 2024 sebesar 0,56 poin dan lebih rendah daripada penurunan rata-rata kemiskinan Nasional dari 2023 ke 2024 sebesar 0,33 poin.

Tabel. 2.15
Tingkat Kemiskinan Kota Blitar Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Tingkat kemiskinan	7,78	7,89	7,37	7,30	6,75

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
2.	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	11,10	11,33	10,65	10,61	9,86
3.	Garis Kemiskinan (per kapita per bulan)	465.868	481.229	517.363	568.280	596.105

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Gambar 2.14

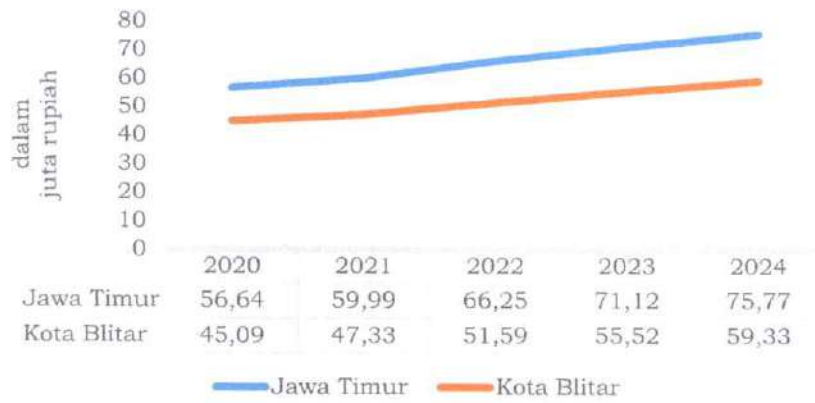
Tingkat Kemiskinan Kota Blitar Tahun 2020 - 2024

Tantangan dalam mempertahankan penurunan kemiskinan di Kota Blitar :

1. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif yang merata ke semua lapisan masyarakat;
2. Perlindungan sosial melalui program bantuan sosial harus terus diperkuat untuk mencegah masyarakat jatuh kembali ke dalam kemiskinan;
3. Peningkatan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan diperlukan untuk memastikan masyarakat dapat bersaing di pasar kerja.

2.1.2.1.3. PDRB Per Kapita (dalam juta rupiah, ADHB)

PDRB per kapita (Produk Domestik Regional Bruto per kapita) adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur rata-rata pendapatan atau *output* ekonomi yang dihasilkan oleh setiap individu dalam suatu wilayah (provinsi, kabupaten, atau kota) dalam satu tahun. Indikator ini diperoleh dengan membagi total PDRB suatu wilayah dengan jumlah penduduk di wilayah tersebut pada tahun yang sama. PDRB per kapita Kota Blitar dalam kurun waktu 5 (lima) tahun tersaji pada tabel berikut.



Sumber : *Badan Pusat Statistik, 2025*

Gambar 2.15

PDRB Per Kapita (dalam juta rupiah, ADHB) Kota Blitar Tahun 2020 - 2024

Faktor yang mempengaruhi peningkatan PDRB per kapita Kota Blitar:

1. Pertumbuhan ekonomi di Kota Blitar. Laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 sebesar 5,29 % (persen) meningkat 0,04 % (persen) menjadi 5,33 % (persen) pada tahun 2024;
2. Kondisi demografi laju pertumbuhan penduduk Kota Blitar yang relatif menunjukkan perkembangan positif;
3. Struktur ekonomi Kota Blitar bertumpu pada sektor ekonomi yang produktif seperti industri atau jasa;
4. Investasi dan infrastruktur yang berjalan baik.

2.1.2.1.4. Tingkat Pengangguran Terbuka

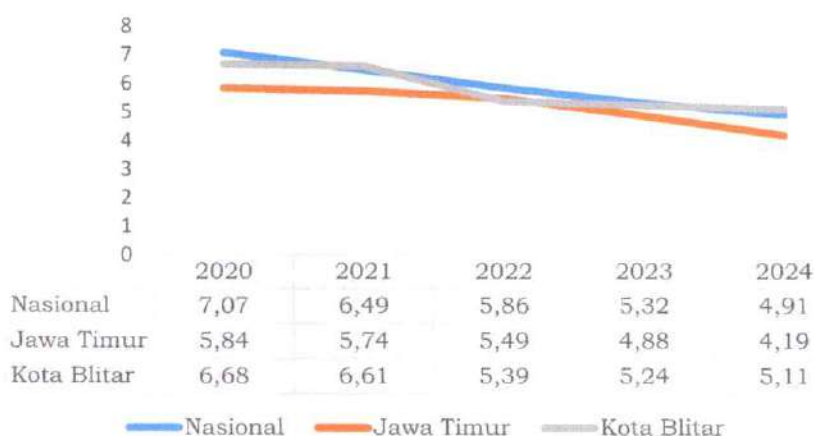
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. TPT hasil Sakernas (Survei Angkatan Kerja Nasional) bulan Agustus 2023 sebesar 5,24 % (persen). Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 5 (lima) orang pengangguran. Dibanding Agustus 2022 dimana TPT sebesar 5,39 % (persen), TPT pada Agustus 2023 mengalami penurunan sebesar 0,15 persen. TPT di tahun 2024 sebesar 5,11 mengalami penurunan sebesar 0,13 % (persen).

Tabel 2.16

Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Blitar Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	TPT	6,68	6,61	5,39	5,24	5,11
2.	Penduduk yang Bekerja (orang)	73.201	74.339	73.616	82.605	81.650
3.	Pengangguran (orang)	5.244	5.264	4.192	4.571	4.390

Sumber : *Badan Pusat Statistik, 2025*



Sumber: *Badan Pusat Statistik, 2025*

Gambar 2.16
Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Blitar
Tahun 2020 – 2024

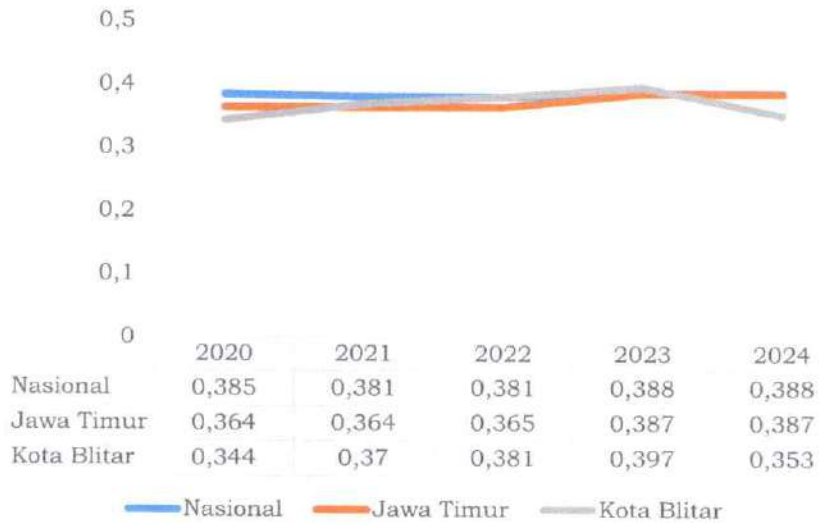
Strategi untuk menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Blitar, melalui:

1. Penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan sektor-sektor yang padat karya dan memberikan ruang untuk investasi di Kota Blitar;
2. Peningkatan keterampilan melalui pelatihan vokasi dan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja;
3. Dukungan untuk UMKM dengan bantuan modal dan pelatihan kepada usaha kecil;
4. Program Padat Karya seperti pembangunan infrastruktur yang melibatkan tenaga kerja lokal melalui pemberdayaan RT/RW.

2.1.2.1.5. Rasio Gini

Rasio Gini adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara 0 (nol) (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Semakin tinggi nilai Rasio Gini menunjukkan ketidakmerataan pendapatan yang semakin tinggi. Jika nilai Rasio Gini adalah nol maka artinya terdapat pemerataan sempurna pada distribusi pendapatan, sedangkan jika bernilai satu berarti terjadi ketidakmerataan pendapatan yang sempurna.

Pada tahun 2024, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia secara Nasional yang diukur menggunakan Rasio Gini adalah sebesar 0,388, sedangkan Rasio Gini Provinsi Jawa Timur adalah sebesar 0,387. Dibanding dengan Rasio Gini Nasional dan Provinsi Jawa Timur, Rasio Gini pada Kota Blitar sedikit lebih rendah daripada Nasional dan Provinsi Jawa Timur yaitu sebesar 0,353. Dari data tersebut menunjukkan bahwa Kota Blitar memiliki tingkat ketidaksetaraan pendapatan yang lebih tinggi dibanding Provinsi Jawa Timur dan Nasional.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Gambar 2.17
Rasio Gini Kota Blitar Tahun 2019 – 2024

2.1.2.1.6. Indeks Pembangunan Manusia

Kualitas hidup manusia di Kota Blitar terus mengalami kemajuan, hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM Kota Blitar tahun 2024 menempati peringkat 5 (lima) di Jawa Timur dan termasuk status “sangat tinggi” dengan nilai 81,44 atau meningkat 0,66 poin dari tahun 2023.

Perkembangan IPM selama tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada Gambar berikut:



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Gambar 2.18
IPM Kota Blitar Tahun 2019 – 2024

Peningkatan IPM tahun 2023 didukung oleh semua dimensi penyusunnya, yang terdiri dari Umur Harapan Hidup (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Pengeluaran Riil per Kapita. Berikut Tabel Indikator penyusun IPM dengan perkembangannya dari tahun 2020 – 2024:

Tabel 2.17
IPM Kota Blitar menurut Indikator Penyusunnya
Tahun 2020 – 2024

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Umur Panjang dan Hidup Sehat Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74,39	74,46	74,71	74,97	75,20
2	Pengetahuan Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	14,32	14,33	14,56	14,57	14,81
	Rata – Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	10,11	10,35	10,65	10,78	10,82
3	Standar Hidup Layak Pengeluaran Riil per Kapita (yang disesuaikan)	Ribu Rupiah	13.733	13.816	14.058	14.548	14.933
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	78,88	79,27	80,15	80,78	81,44

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

2.1.2.1.7. Rata – Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun

Kesejahteraan masyarakat juga dapat diukur dari kualitas pendidikan. Rata-rata lama sekolah menjadi salah satu indikator penting karena mencerminkan akses dan partisipasi masyarakat dalam dunia pendidikan. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah, semakin besar peluang masyarakat untuk memperoleh keterampilan, pengetahuan, serta kesempatan kerja yang lebih baik. Di Kota Blitar, rata-rata lama sekolah terus diupayakan peningkatannya melalui pemerataan akses pendidikan dasar hingga menengah, penyediaan beasiswa, serta program pemberdayaan masyarakat berbasis pendidikan non-formal. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Pada masyarakat usia 15 tahun ke atas, Rata-rata Lama Sekolah Penduduk menunjukkan data fluktuatif sebagai berikut.

Tabel 2.18
Rata – Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun
Tahun 2020 – 2024

No.	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun	9,75	10,98	10,95	10,80	10,85

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

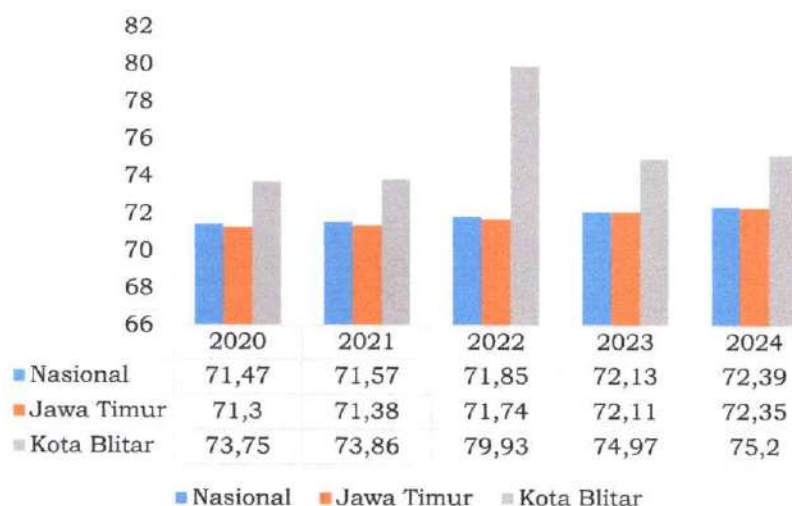
2.1.2.2. Kesehatan Untuk Semua

Pembangunan kesehatan merupakan aspek penting dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan

mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Pembangunan kesehatan adalah investasi jangka panjang yang memerlukan komitmen dari pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dengan meningkatkan akses, kualitas dan kesadaran akan pentingnya kesehatan, maka dapat menciptakan masyarakat yang lebih produktif dan sejahtera.

2.1.2.2.1.Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup adalah rata-rata jumlah tahun yang dapat dijalani oleh seseorang sejak lahir. Usia Harapan Hidup juga dapat diartikan sebagai rata-rata kesempatan atau waktu hidup yang tersisa. Usia Harapan Hidup merupakan salah satu indikator untuk menilai derajat kesehatan masyarakat. Usia harapan hidup yang tinggi menunjukkan bahwa taraf kesehatan dan kesejahteraan warga negara semakin baik.



Sumber: *Badan Pusat Statistik, 2025*

Gambar 2.19
Usia Harapan Hidup Tahun 2020 – 2024

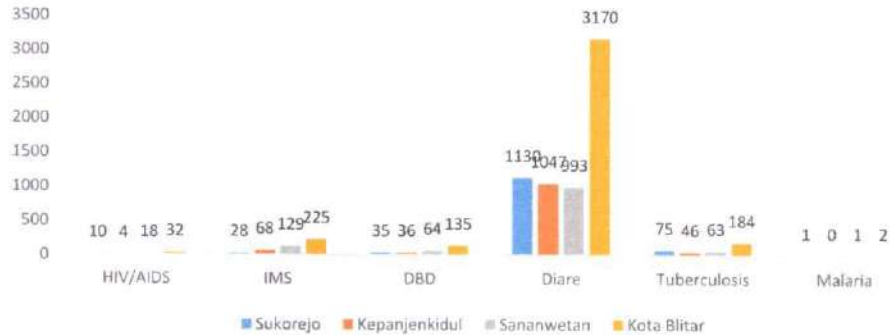
Usia Harapan Hidup (UHH) di Kota Blitar tahun 2024 mencapai 75,2 tahun, dapat diartikan bahwa seorang bayi akan menjalani hidup selama 75,2 tahun sejak dilahirkan. Selama kurun waktu lima tahun terakhir, angka usia harapan hidup di Kota Blitar konsisten berada di atas angka nasional dan provinsi. Hal ini menandakan adanya perkembangan positif dalam pembangunan derajat masyarakat melalui peningkatan layanan dan akses kesehatan kepada masyarakat.

2.1.2.2.2.Jumlah Kasus HIV/AIDS, IMS, DBD, Diare, TB dan Malaria

Jumlah kasus HIV/AIDS, infeksi menular seksual (IMS), demam berdarah dengue (DBD), diare, tuberkulosis (TB), dan malaria di Kota Blitar pada tahun 2024, terlihat adanya variasi yang signifikan antar kecamatan. Kecamatan Sukorejo mencatatkan jumlah kasus HIV/AIDS sebanyak 10, IMS 28 kasus, DBD 35 kasus, diare 1.130 kasus, TBC 75 kasus, dan malaria 1 kasus. Sementara itu, Kecamatan Kepanjenkidul memiliki 4 kasus HIV/AIDS, 68 kasus IMS, 36



kasus DBD, 1.047 kasus diare, 46 kasus TBC, dan tidak ada kasus malaria. Di Kecamatan Sananwetan, jumlah kasus HIV/AIDS mencapai 18 kasus, IMS 129 kasus, DBD 64 kasus, diare 993 kasus, TBC 63 kasus, dan 1 kasus malaria.



Sumber : *Badan Pusat Statistik, 2025*

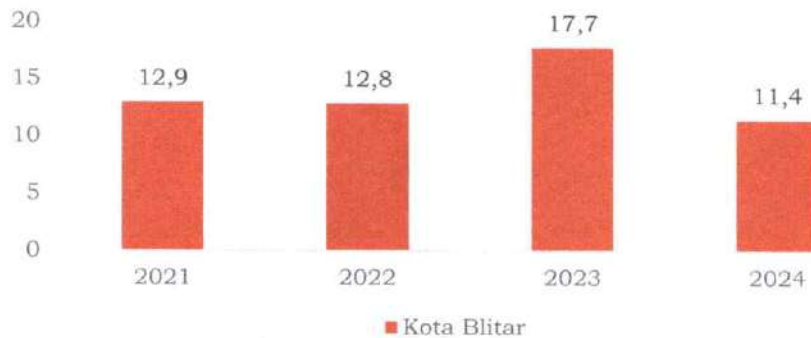
Gambar 2.20

Jumlah Kasus HIV/AIDS, IMS, DBD, Diare, TB dan Malaria

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa tingkat keparahan penyakit diare di Kota Blitar terlihat cukup tinggi, terutama di Kecamatan Sukorejo dan Kapanjenkidul. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti sanitasi yang kurang memadai atau kontaminasi air. Kedua, Kecamatan Sananwetan memiliki jumlah kasus HIV/AIDS dan IMS yang lebih tinggi dibandingkan dengan kecamatan lain, menunjukkan tingginya potensi penyebaran penyakit menular seksual di wilayah tersebut. Ketiga, keberadaan kasus TBC yang cukup signifikan di ketiga kecamatan menunjukkan perlunya upaya pencegahan dan pengobatan penyakit TBC. Sedangkan untuk kasus DBD, Kecamatan Sananwetan memiliki jumlah kasus yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain.

2.1.2.2.3. Prevalensi Stunting

Stunting terjadi karena adanya gangguan tumbuh kembang anak yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Stunting pada anak dapat terjadi karena kurangnya asupan gizi ibu saat hamil, atau kurangnya asupan gizi pada anak saat dalam masa pertumbuhan.



Sumber: *Dinas Kesehatan Kota Blitar, 2025.*

Gambar 2.21

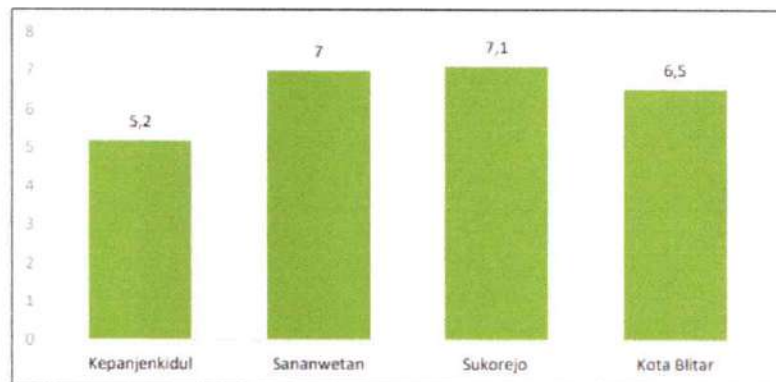
Prevalensi Balita Stunting Tahun 2021 – 2024

Prevalensi balita stunting dihitung dengan formula indikator jumlah balita stunting dibagi jumlah seluruh balita dikalikan 100 % (persen). Dalam menentukan prevalensi balita stunting ini mengikuti hasil perhitungan dari Kementerian Kesehatan RI untuk dipublikasikan. Berdasarkan data, prevalensi balita stunting selama kurun waktu 4 (empat) tahun menunjukkan data yang fluktuatif, pada tahun 2024 menurun menjadi sebesar 11,4 %.

Prevalensi stunting tidak hanya menggambarkan kondisi anak pada suatu wilayah, melainkan secara lebih umum dapat menggambarkan kondisi gizi, pemeliharaan kesehatan, pengasuhan, lingkungan, dan faktor sosial ekonomi masyarakat. WHO menetapkan standar prevalensi stunting harus di angka kurang dari 20 % (persen). Meskipun prevalensi balita stunting Kota Blitar berada di bawah standar WHO, prevalensi stunting merupakan salah satu indikator kinerja pemerintah yang terus ditekan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Dalam upaya pencegahan stunting, masih ditemukannya masyarakat yang kurang memahami pencegahan dan penanganan stunting sejak dini sehingga diperlukan strategi yang tepat melalui edukasi, sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat, utamanya bagi keluarga yang anggota keluarganya terdapat ibu hamil dan atau anak dalam masa pertumbuhan.

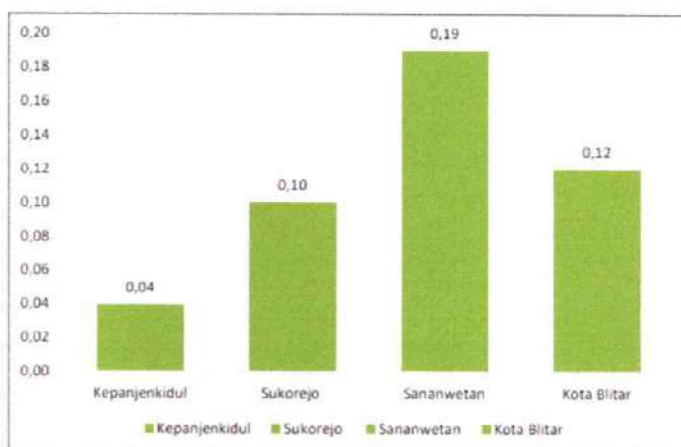
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak mengatur standar antropometri yang digunakan untuk mengukur atau menilai status gizi anak. Standar antropometri yang digunakan terdiri atas indeks Berat Badan menurut Umur (BB/U), Panjang Badan atau Tinggi Badan menurut Umur (PB/U atau TB/U), dan Berat Badan menurut Panjang Badan atau Tinggi Badan (BB/PB atau BB/TB). Klasifikasi penilaian status gizi menggunakan Indeks Antropometri sesuai dengan kategori status gizi pada WHO *Child Growth Standards* untuk anak usia 0-5 tahun dan WHO *Reference* 2007 untuk anak 5-18 tahun. Berikut disajikan dalam indikator antropometri BB/U, TB/U, dan BB/TB dengan jumlah balita yang ditimbang sebanyak 7.500 balita.



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Blitar, 2025

Gambar 2.22

Persentase Balita Berat Badan Kurang Kota Blitar Tahun 2024



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Blitar, 2025

Gambar 2.23

Persentase Balita Gizi Buruk Kota Blitar Tahun 2024

2.1.2.2.4. Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator penting untuk menilai derajat kesehatan ibu dan kualitas pelayanan kesehatan, khususnya selama masa kehamilan, persalinan, dan nifas. Tingginya angka kematian ibu mencerminkan masih adanya tantangan serius dalam sistem pelayanan kesehatan, terutama dalam hal akses, kualitas, dan ketepatan penanganan komplikasi kebidanan. Adapun capaian angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup Kota Blitar Tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.19

Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup Tahun 2020 – 2024

No.	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup	230,28	803,78	172,31	47,68	173,99

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Blitar, 2025

Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup di periode 2020–2024 menunjukkan tren yang fluktuatif, dengan lonjakan tajam pada 2021 (803,78) yang diduga akibat dampak pandemi, kemudian turun drastis pada 2022 (172,31) dan mencapai titik terendah pada 2023 (47,68). Namun, pada 2024 kembali meningkat menjadi 173,99, mencerminkan ketidakstabilan capaian dan perlunya penguatan sistem layanan kesehatan ibu secara berkelanjutan untuk mencegah kematian ibu yang dapat dicegah.

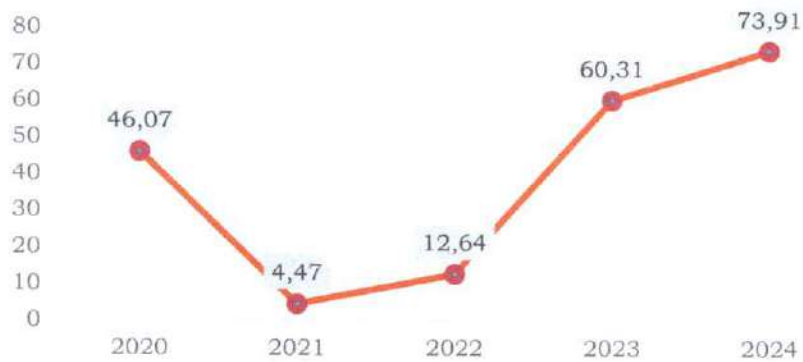
2.1.2.2.5. Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberculosis

Tuberculosis (TBC) adalah penyakit yang bersifat menular melalui udara, partikel dahak orang yang mengidap TBC aktif saat batuk, berbicara atau bersin. Penularan itu tidak langsung dapat dideteksi karena bakteri dapat bersifat laten (non aktif) pada saat seseorang mempunyai daya tahan



tubuh yang baik. Akan tetapi saat daya tubuhnya menurun maka TBC akan menyerang orang tersebut. TBC perlu mendapat perhatian khusus, karena seseorang yang sakit TBC dapat menular pada 10 – 15 orang per tahun.

Penanganan TBC sangat tergantung pada tingkat temuan penderita TBC di wilayah untuk dapat diambil tindakan baik preventif agar tidak terjadi penularan dengan dampak luas dan represif dengan tindakan pengobatan tuntas pada yang bersangkutan.



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Blitar, 2025

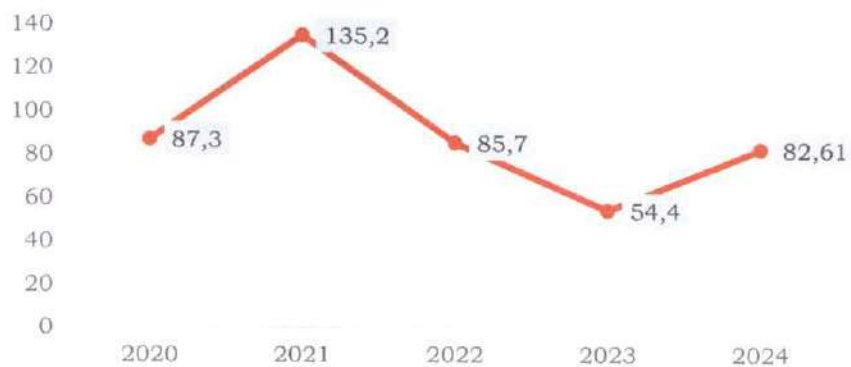
Gambar 2.24

Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus *Tuberculosis* Tahun 2020 – 2024

Tingkat temuan tidak akan berhasil optimal jika tidak diikuti dengan tingkat kesadaran masyarakat yang baik. Masyarakat harus mampu menemu kenali TBC beserta pola tindakan preventif dan represif. Tindakan preventifnya adalah selalu menjaga kesehatan pribadi, sedangkan tindakan represifnya adalah pengobatan secara tuntas.

2.1.2.2.6. Angka Keberhasilan Pengobatan *Tuberculosis*

Angka keberhasilan pengobatan TBC (*Success Rate Treatment Tuberculosis*) mengukur Jumlah semua kasus TBC yang sembuh dan pengobatan lengkap di antara semua kasus TBC yang diobati dan dilaporkan dalam satu tahun. Capaian keberhasilan pengobatan pada pasien *Tuberculosis* di Kota Blitar pada tahun 2024 telah mencapai 82,9 % (persen).



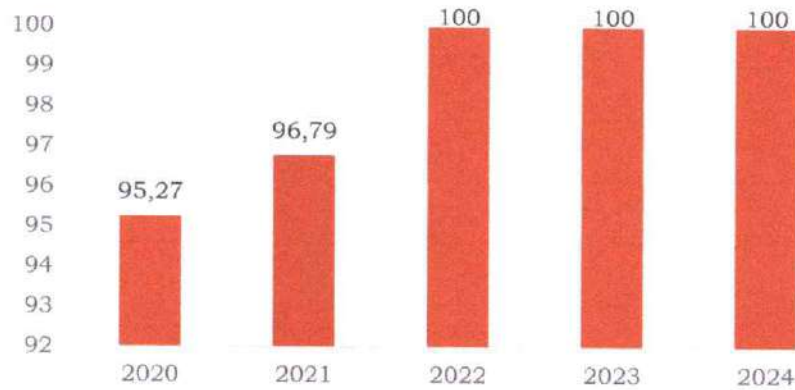
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Blitar, 2025

Gambar 2.25

Angka Keberhasilan Pengobatan *Tuberculosis* Tahun 2020 – 2024

2.1.2.2.7. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional

Cakupan kepesertaan JKN di Kota Blitar telah mencapai 100 % (persen) dari total penduduk terdaftar pada tahun 2022 sampai dengan 2024, menjadikan Blitar salah satu daerah terdepan dalam pencapaian *Universal Health Coverage* (UHC) dari BPJS Kesehatan.



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Blitar, 2025

Gambar 2.26

Angka Keikutsertaan Jaminan Kesehatan Nasional
Tahun 2020 – 2024

2.1.2.3. Pendidikan Berkualitas yang Merata

Pembangunan pendidikan merupakan aspek fundamental dalam kemajuan suatu bangsa. Pendidikan tidak hanya berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga menjadi pondasi bagi pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya. Dalam beberapa dekade terakhir, banyak negara berinvestasi dalam sektor pendidikan untuk menciptakan generasi yang kompeten, kreatif, dan mampu bersaing di era global.

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan pendidikan adalah akses yang merata terhadap pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah di berbagai wilayah telah berupaya menghilangkan hambatan seperti kemiskinan, ketidaksetaraan gender, dan keterbatasan infrastruktur yang seringkali menjadi penghalang bagi anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Program-program seperti beasiswa, sekolah gratis dan pembangunan fasilitas pendidikan menunjukkan dampak positif dalam meningkatkan mutu pendidikan di daerah.

Penyelenggaraan urusan pendidikan merupakan urusan wajib pelayanan dasar dan secara nasional diberlakukan Standar Pelayanan Minimal (SPM), yaitu ketentuan yang mengatur jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang berhak diperoleh setiap peserta didik secara minimal. Di bidang pendidikan, SPM dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap anak usia sekolah memperoleh layanan pendidikan dasar yang layak, berkualitas, dan merata. Integrasi indikator SPM ke dalam dokumen perencanaan pembangunan dilaksanakan untuk menjamin pencapaian target pelayanan dasar secara terstruktur, terukur, dan berkelanjutan. Penyelarasan indikator SPM ke dalam dokumen perencanaan tertuang dalam dokumen

perencanaan daerah dan secara teknis ke dalam dokumen strategis perangkat daerah untuk mencapai tujuan pendidikan secara optimal. Kebijakan bidang pendidikan di Kota Blitar diarahkan untuk pencapaian SPM sebagai respons terhadap tantangan pendidikan nasional serta dalam rangka mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), khususnya dalam bidang pendidikan berkualitas (SDG 4).

Selain mengintegrasikan rencana pembangunan dengan SPM, pemerintah mempedomani program prioritas urusan pendidikan yang menjadi mandatori dalam Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia tanggal 24 Januari 2025 Nomor: 1422/MDM.A/PR.07.05/2025 perihal Indikator Kinerja Urusan Pendidikan di Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang dirancang secara berkelanjutan dan searah dengan kebijakan dalam dokumen perencanaan pembangunan. Pelaksanaan dukungan program prioritas dalam perencanaan antara lain:

1. Penerapan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat
 - a. Pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi yang pelaksanaannya diatur melalui Peraturan Walikota Blitar nomor 51 Tahun 2019 tentang pendidikan Anti Korupsi;
 - b. Pada tahun 2021 telah dilaksanakan rintisan atas program Sekolah Religius, Nasionalis dan Berbudaya. Pada tahun 2022 ditetapkan melalui Peraturan Walikota Blitar Nomor 35 tahun 2022 tentang Penguatan Pendidikan karakter melalui program Sekolah yang Religius, Nasionalis dan Berbudaya. Program ini dirancang untuk membentuk karakter peserta didik sejak dini melalui pembiasaan perilaku positif dengan maksud menanamkan serta membentuk peserta didik yang berakhlak mulia, religius, cerdas, terampil, cinta tanah air, mandiri, mampu beradaptasi dengan lingkungannya, berwawasan luas dan berbudi pekerti luhur. Pelaksanaannya terintegrasi dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler melibatkan guru dan orang tua.
2. Dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis
Bentuk dukungan meliputi pemetaan infrastruktur pada satuan pendidikan utamanya keberadaan dapur sekolah, kerjasama dengan Dinas terkait untuk penyelenggaraan pelatihan taman asuh ramah anak di tahun 2025 dan di setiap satuan pendidikan telah memiliki program pembiasaan makanan sehat dan bergizi.
3. Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan

Selama kurun waktu 2021 – 2025, peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dilaksanakan melalui pembangunan unit sekolah baru dan pemeliharaan/rehabilitasi sekolah yang rusak. Fokus utamanya adalah menciptakan lingkungan belajar yang

aman bagi peserta didik, serta mendukung akses bagi anak berkebutuhan khusus.

4. Digitalisasi Sekolah

Dukungan pelaksanaan program ini dengan mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran dan manajemen pendidikan. Kegiatan utama mencakup penyediaan perangkat TIK, pelatihan literasi digital untuk guru dan siswa, serta optimalisasi *platform* pembelajaran dalam jaringan telah terpetakan dalam sub kegiatan di Dinas Pendidikan. Tujuannya adalah memperluas akses informasi dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Dalam rangka keberhasilan program ini Dinas pendidikan telah berkolaborasi dan bekerjasama tidak hanya dengan Perangkat Daerah terkait tetapi juga dengan Perguruan Tinggi dalam pelatihan dan bimbingan teknis bagi guru.

5. Pembelajaran Mendalam (*Deep Learning*)

Pendekatan pembelajaran yang menekankan pemahaman konsep secara menyeluruh, berpikir kritis, dan pemecahan masalah. Ciri khasnya adalah pembelajaran kontekstual, kolaboratif, dan berbasis proyek. Evaluasi dilakukan melalui portofolio dan refleksi, bukan hanya pengujian kognitif.

6. Sekolah Model Transformatif

Merupakan satuan pendidikan yang menjadi percontohan dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka dan transformasi pendidikan. Sekolah ini menerapkan praktik manajemen yang baik, pembelajaran berbasis proyek dan profil pelajar Pancasila, serta integrasi teknologi dan partisipasi komunitas dalam kegiatan sekolah. Pada tahun 2021 dilaksanakan program dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan adanya "Program Sekolah Penggerak". Keberlangsungan Sekolah Penggerak ini kemudian bertransformasi dengan peluncuran program baru yaitu sekolah yang menerapkan implementasi pembelajaran mendalam berbasis teknologi, seperti pengenalan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligent*) dan *coding* kepada peserta didik.

7. Penguatan Bimbingan Konseling di Sekolah

Program ini bertujuan memperkuat layanan psikososial siswa melalui peningkatan kuantitas dan kualitas guru Bimbingan Konseling. Fokus kegiatan meliputi pengangkatan guru Bimbingan Konseling sesuai rasio ideal (1:150 siswa), pelatihan profesional, dan integrasi layanan Bimbingan Konseling dengan isu perundungan, kekerasan, dan masalah sosial.

8. Wajib Belajar 13 (Tiga Belas) Tahun

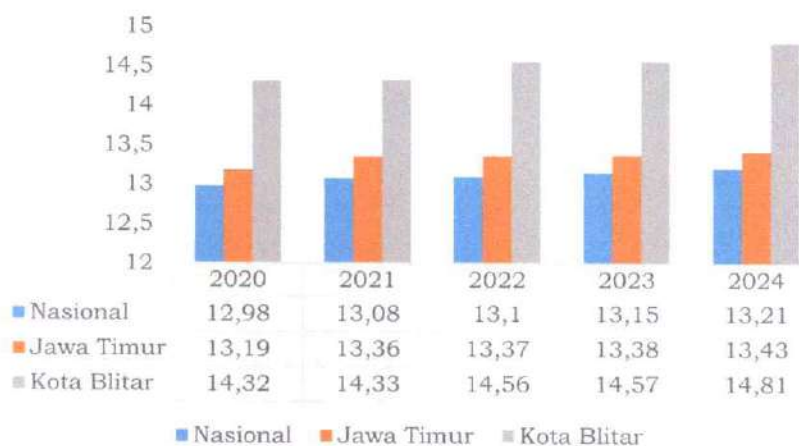
Ekspansi dari program Wajib Belajar 9 (sembilan) Tahun, yang kini mencakup PAUD 1 (satu) tahun hingga pendidikan menengah. Tujuannya menjamin setiap anak mengikuti pendidikan minimal 13 (tiga belas) tahun. Program ini didukung melalui dana BOS, program afirmasi, beasiswa, dan kerja sama lintas sektor.

9. Ketercukupan dan Kelayakan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

kondisi pendidikan saat ini. Harapan lama sekolah digunakan sebagai salah satu indikator untuk menilai kualitas pendidikan dan perkembangan sosial ekonomi suatu wilayah. Semakin tinggi nilai harapan lama sekolah, semakin besar peluang masyarakat untuk mengakses pendidikan yang lebih lama, yang biasanya berkorelasi dengan peningkatan kualitas hidup dan produktivitas.

Selain itu, harapan lama sekolah berkontribusi sebagai salah satu komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada dimensi pengetahuan. Sehingga dapat dikatakan bahwa angka harapan lama sekolah menjadi salah satu indikator strategis dalam mengukur ketercapaian kinerja pembangunan.

Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir, tren HLS mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Capaian HLS Kota Blitar tahun 2024 adalah 14,81, di atas capaian Nasional dan Provinsi Jawa Timur.



Sumber: *Badan Pusat Statistik, 2025*

Gambar 2.28
Harapan Lama Sekolah Tahun 2020 – 2024

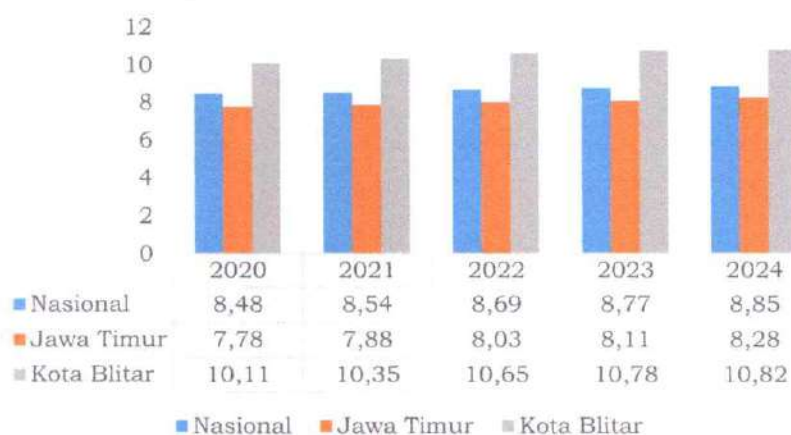
Angka Harapan Lama Sekolah memberikan gambaran tentang kualitas pendidikan masyarakat. Salah satu komponen yang dapat mengurangi angka HLS adalah Anak Tidak Sekolah (ATS). ATS merupakan tantangan serius dalam upaya mewujudkan pendidikan yang inklusif dan berkualitas di Kota Blitar. Berbagai upaya mengidentifikasi, mengatasi, dan mencegah kasus ATS dapat dilakukan guna memastikan setiap anak mendapatkan hak pendidikan yang layak.

Berdasarkan hasil verifikasi faktual oleh Dinas Pendidikan Kota Blitar, pada tahun 2024 terdapat 363 anak yang tergolong sebagai ATS. Angka ini menunjukkan penurunan signifikan dari data awal yang mencapai 900 anak. Penurunan ini merupakan hasil dari upaya verifikasi langsung di lapangan dan intervensi program yang tepat sasaran. Dari hasil verifikasi lanjutan atas 363 anak pada aplikasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terpetakan laporan pada Tabel 2.20 sebagai berikut.

Program ini mengatasi ketimpangan distribusi dan kekurangan tenaga pendidik serta meningkatkan kesejahteraan dan kompetensi guru. Strategi yang dilakukan di Kota Blitar untuk daya dukung adalah dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Penunjang Tugas (BPT) kepada guru dan tenaga kependidikan Non ASN yang bertugas pada satuan pendidikan negeri.

2.1.2.3.1. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) menggambarkan tingkat pencapaian setiap penduduk dalam kegiatan bersekolah. Semakin tinggi angka lamanya bersekolah, maka semakin tinggi pula jenjang pendidikan yang telah dicapai penduduk. Indikator RLS sangat relevan untuk dihitung capaiannya karena dapat menunjukkan kualitas sumber daya manusia di suatu wilayah.



Sumber: *Badan Pusat Statistik, 2025*

Gambar 2.27

Rata – Rata Lama Sekolah Tahun 2020 – 2024

RLS Kota Blitar secara konsisten menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke selama 5 (lima) tahun terakhir. Sampai dengan tahun 2024, RLS di Kota Blitar adalah 10,82 tahun, menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Kota Blitar menempuh pendidikan setara dengan kelas 1 (satu) SMA. Permasalahan yang masih sering dijumpai adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan tinggi serta kondisi ekonomi keluarga yang kurang mampu seringkali memaksa anak-anak untuk bekerja membantu keluarga daripada melanjutkan sekolah. Hal ini menyebabkan terdapat anak yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan hingga jenjang SMA atau melanjutkan ke perguruan tinggi.

2.1.2.3.2. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) digunakan untuk mengukur rata-rata jumlah tahun yang diharapkan dapat dihabiskan oleh seorang anak dalam sistem pendidikan formal. Indikator ini mencerminkan harapan lama waktu yang dihabiskan oleh anak-anak untuk bersekolah, mulai dari tingkat dasar hingga pendidikan tinggi, berdasarkan

Tabel 2.20
Jumlah Putus Sekolah Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah Tiap Provinsi (Kota Blitar) Tahun 2024/2025 Tingkat Sekolah Dasar

No	Kecamatan	Jumlah Siswa (Sekolah Negeri)		Jumlah Siswa (Sekolah Swasta)		Total
		L	P	L	P	
1	Kec. Sukorejo	1	1	0	0	2
2	Kec. Kepanjenkidul	1	0	0	1	2
3	Kec. Sananwetan	1	0	1	0	2
	Kota Blitar	3	1	1	1	6

Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, 2024

Beberapa faktor yang menjadi adanya anak yang tidak bersekolah antara lain:

- a. Faktor ekonomi (keterbatasan biaya pendidikan, kebutuhan membantu keluarga);
- b. Kurangnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan;
- c. Jarak sekolah atau aksesibilitas yang kurang memadai;
- d. Kondisi sosial seperti pernikahan dini atau anak bekerja;
- e. Disabilitas / anak berkebutuhan khusus.

Komitmen dalam pengentasan ATS melalui program-program strategis yang inklusif menjadi penentu guna memastikan tidak ada satu pun anak Kota Blitar yang tertinggal dari akses pendidikan yang layak dan bermutu. Misalnya dengan meningkatkan intensitas sosialisasi dan pelibatan masyarakat, menyediakan sistem monitoring berbasis data terintegrasi serta penguatan kolaborasi lintas sektor untuk menjangkau ATS di seluruh wilayah.

2.1.2.3.3. Angka Literasi/Numerasi

Informasi capaian literasi sekolah diperoleh dari salah satu instrumen Asesmen Nasional, yaitu Asesmen Kompetensi Minimum (AKM). Inti dari AKM adalah penilaian berdasarkan literasi membaca dan numerasi. Dengan mengukur literasi dan numerasi, asesmen nasional mendorong guru semua mata pelajaran untuk berfokus pada pengembangan kompetensi membaca dan berpikir logis dan sistematis. Adapun data capaian persentase satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen nasional untuk literasi membaca dan numerasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.21
Angka Literasi dan Numerasi Kota Blitar
Tahun 2023-2024

No	Indikator	Jenjang	Angka Literasi dan Numerasi	
			2023	2024
1	Literasi	SD	71,94	70,33
		SMP	84,03	85,77

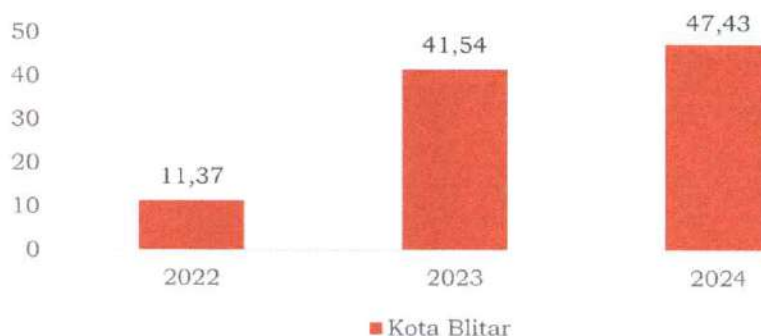
No	Indikator	Jenjang	Angka Literasi dan Numerasi	
			2023	2024
2	Numerasi	SD	54,19	59,00
		SMP	71,07	71,24

Sumber : Dinas Pendidikan Daerah Kota Blitar, 2025

2.1.2.3.4. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Literasi dikatakan sebagai kemampuan memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi dalam berbagai bentuk, merupakan pondasi untuk kemajuan individu dan masyarakat. Untuk mengetahui sejauh mana masyarakat suatu wilayah memiliki kemampuan literasi yang memadai, dapat diukur dengan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM). IPLM dirancang untuk mengukur dan mengevaluasi tingkat literasi masyarakat dalam berbagai aspek mencakup kemampuan literasi dasar, literasi fungsional, literasi informasi dan digital, literasi sosial dan budaya, serta aksesibilitas.

Jika dilihat dari perhitungan IPLM, saat ini Kota Blitar berada pada angka 47,43, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, dan menunjukkan tren meningkat selama 3 (tiga) tahun terakhir. Meskipun menunjukkan progres positif, tetapi masih diperlukan upaya untuk meningkatkan akses, kualitas, dan kesadaran literasi di seluruh lapisan masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat menjadi kunci untuk mencapai tujuan tersebut.



Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar, 2025

Gambar 2.29
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
Tahun 2022 – 2024

2.1.2.4. Perlindungan Sosial yang Adaptif

Pemerintah diharapkan dapat hadir secara proaktif dan adaptif dalam memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Dalam situasi yang terus berubah, terutama di era globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat, peran pemerintah menjadi semakin penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang diimplementasikan relevan dan efektif.

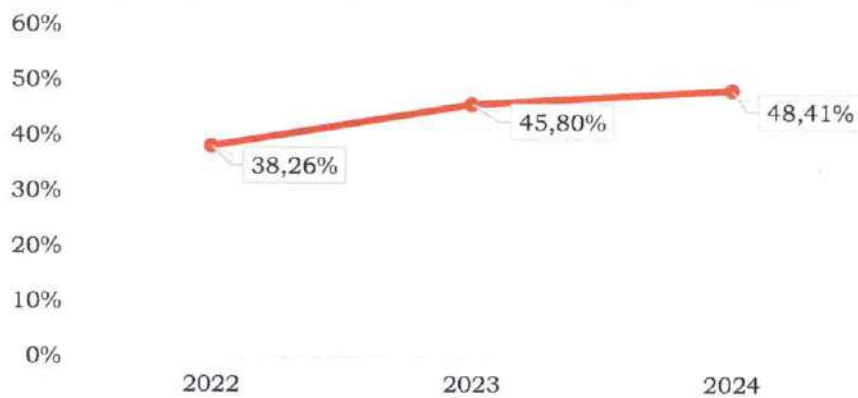
2

Perlindungan sosial yang adaptif merupakan langkah penting dalam membangun masyarakat yang lebih tangguh. Sistem perlindungan sosial yang adaptif dirancang untuk merespons secara cepat dan efektif terhadap berbagai tekanan yang dialami masyarakat, utamanya bagi kelompok masyarakat rentan.

2.1.2.4.1. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Jaminan sosial tenaga kerja merupakan program perlindungan sosial yang ditujukan untuk pekerja di Indonesia. Program ini bertujuan memberikan jaminan sosial kepada tenaga kerja dan keluarganya dalam menghadapi risiko ekonomi dan sosial, seperti kecelakaan kerja, penyakit, hari tua atau kehilangan pekerjaan.

Data capaian Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 2022-2024 adalah sebagai berikut:



Sumber: *Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota Blitar, 2025*

Gambar 2.30

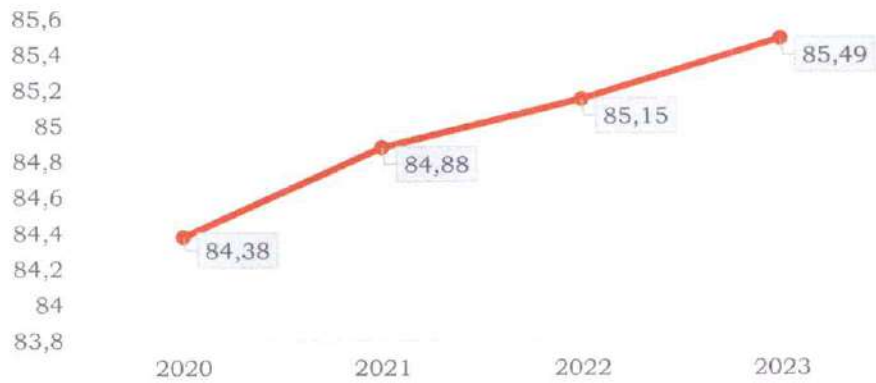
Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota Blitar Tahun 2022 – 2024

Komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi tenaga kerja tertuang dalam indikator pembangunan jangka panjang, yaitu pada tahun 2045 cakupan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja ditargetkan dapat mencapai 100 % (persen). Oleh karena itu, pemerintah perlu menyusun strategi untuk memperluas cakupan perlindungan sosial bagi tenaga kerja. Tujuannya adalah agar lebih banyak pekerja yang terlindungi dari berbagai risiko sosial dan ekonomi, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

2.1.2.5. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

2.1.2.5.1. Indeks Kerukunan Umat Beragama

Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) merupakan ruang diseminasi riset kebijakan berupa pemetaan kondisi kerukunan umat beragama. Adanya IKUB diharapkan dapat membuat berbagai rumusan atau kebijakan yang dapat membantu mencari solusi yang tepat bagi permasalahan-permasalahan yang terkait dengan keagamaan di masyarakat. Selain itu IKUB menjadi acuan bagi pemerintah dalam terus meningkatkan kualitas kerukunan di Kota Blitar.



Sumber: *Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2024*

Gambar 2.31

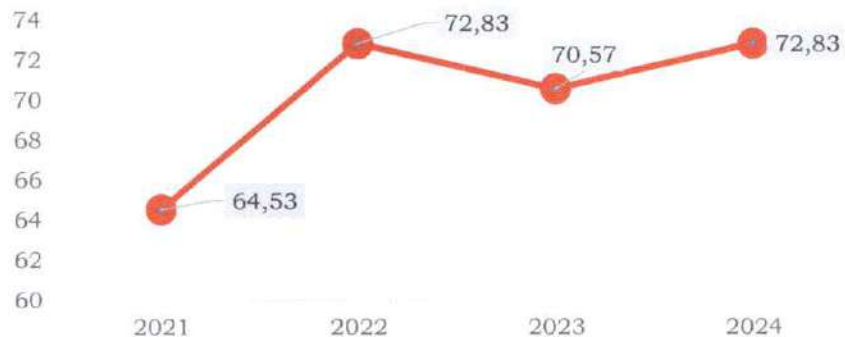
Indeks Kerukunan Umat Beragama Kota Blitar 2020-2023

Berdasarkan data di atas, capaian IKUB Kota Blitar menunjukkan tren kenaikan. Hal tersebut menggambarkan bahwa meskipun pada tahun 2020 terdapat pesta demokrasi pemilihan kepala daerah dan wabah Covid-19 yang bisa berpengaruh juga terhadap kondisi kerukunan umat beragama di Kota Blitar, namun IKUB Kota Blitar justru mengalami kenaikan. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa kerukunan umat beragama di wilayah Kota Blitar dapat terjaga dengan baik dan stabil meskipun harus melewati beberapa tantangan di tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan IKUB ini juga didukung oleh Kinerja FKUB Kota Blitar yang semakin harmonis dalam penataan peningkatan moderasi beragama dengan membangun, memelihara, dan memberdayakan kerukunan antar tokoh umat beragama.

2.1.2.6. Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif

2.1.2.6.1. Indeks Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak (IPA) menggambarkan capaian pembangunan perlindungan anak. IPA menjadi landasan dalam membuat program maupun kebijakan yang efektif dan efisien untuk menangani permasalahan khususnya terkait perlindungan anak, pemenuhan hak anak maupun perlindungan khusus anak.



Sumber : *Badan Pusat Statistik, 2025*

Gambar 2.32

Indeks Perlindungan Anak Kota Blitar Tahun 2021 - 2024

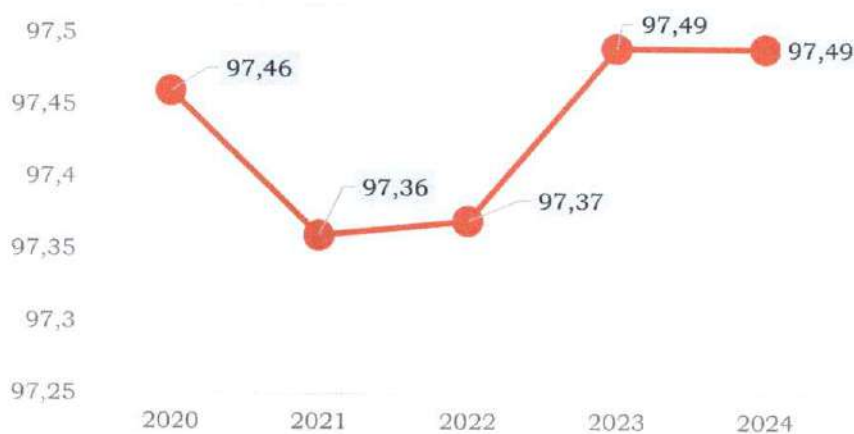
Capaian Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kota Blitar menunjukkan tren positif selama periode 2021–2024, dengan peningkatan signifikan dari 64,53 pada 2021 menjadi 72,83 pada 2022. Hal ini mencerminkan keberhasilan implementasi program perlindungan anak. Meskipun terjadi sedikit penurunan pada 2023 menjadi 70,57, hal ini segera direspons dengan perbaikan sehingga capaian 2024 kembali naik ke angka tertinggi sebelumnya, yaitu 72,83.

Dalam upaya meningkatkan nilai IPA Kota Blitar, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Blitar melaksanakan upaya pencegahan eksploitasi anak dengan memberikan edukasi dan pendampingan kepada warga yang menghadapi masalah keluarga, khususnya yang berpotensi memanfaatkan anak untuk kegiatan yang merugikan perkembangan fisik maupun mental mereka.

Meskipun terdapat fluktuasi dalam IPA, Pemerintah Kota Blitar menunjukkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan perlindungan anak melalui berbagai program dan inisiatif. Kolaborasi antara pemerintah, organisasi masyarakat, dan masyarakat luas diharapkan dapat terus memperbaiki indikator perlindungan anak di masa mendatang.

2.1.2.6.2. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan ukuran keberhasilan pembangunan kesetaraan gender dalam hal kualitas hidup laki-laki dan perempuan dari dimensi kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Capaian pembangunan manusia Kota Blitar di bidang kesetaraan gender semakin menunjukkan perbaikan. Hal ini dapat diketahui dari realisasi IPG Kota Blitar yang terus mengalami peningkatan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023.



Sumber : *Badan Pusat Statistik, 2025*

Gambar 2.33

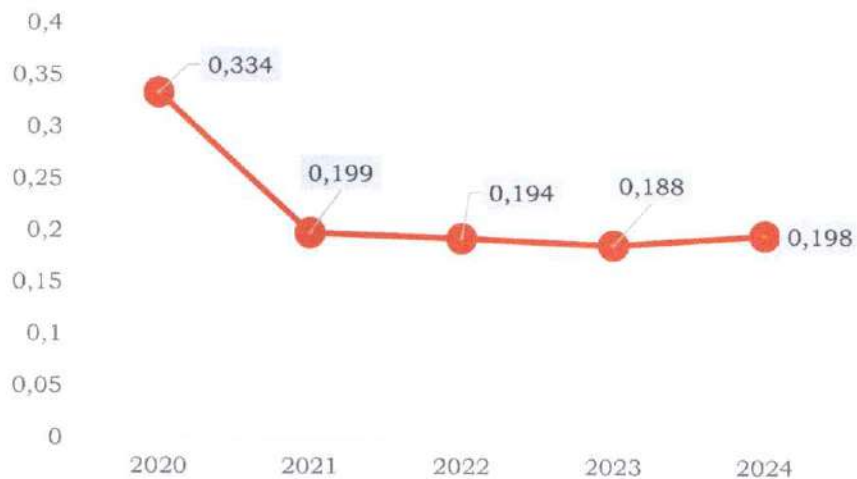
Indeks Pembangunan Gender Kota Blitar, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020 – 2023

Nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kota Blitar meningkat dari 97,36 pada tahun 2021 menjadi 97,49 pada

tahun 2023. Angka ini jauh diatas provinsi dan nasional pada tahun 2023 yang sebesar 92,15 dan 91,85. Tingginya capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) menunjukkan bahwa kesenjangan gender di Kota Blitar relatif kecil atau dengan kata lain telah terjadi kesetaraan dalam pembangunan antara laki – laki dan perempuan di Kota Blitar. Perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam hal kesejahteraan sosial ekonomi, akses pendidikan, layanan kesehatan, dan partisipasi politik berada dalam tingkat yang cukup setara.

2.1.2.6.3. Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur ketimpangan gender di berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, partisipasi politik dan ekonomi. Semakin rendah nilai IKG, semakin kecil ketimpangan gender yang ada di suatu daerah. Sebaliknya, semakin tinggi nilai IKG, semakin besar ketimpangan gender yang ada. Realisasi Indeks Ketimpangan Gender Kota Blitar tahun 2020 sampai tahun 2024 dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Gambar 2.34

Indeks Ketimpangan Gender Kota Blitar Tahun 2020 – 2024

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) tahun 2024 sebesar 0,198, naik 0,010 poin dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 0,188. Meningkatnya Indeks Ketimpangan Gender (IKG) terutama dipengaruhi oleh meningkatnya *gap* pada dimensi pemberdayaan dan dimensi pasar tenaga kerja. Perbaikan dimensi kesehatan reproduksi dipengaruhi oleh perbaikan indikator proporsi perempuan pernah kawin usia 15-49 tahun yang saat melahirkan hidup pertama berusia < 20 tahun (MHPK20) dari 0,155 pada tahun 2023 menjadi 0,154 pada tahun 2024.

Pemerintah Kota Blitar mempunyai komitmen yang kuat untuk mendorong pemberdayaan perempuan di Kota Blitar. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 menjadi landasan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan

implementasi kebijakan yang berkaitan dengan pengarusutamaan gender di wilayah Kota Blitar.

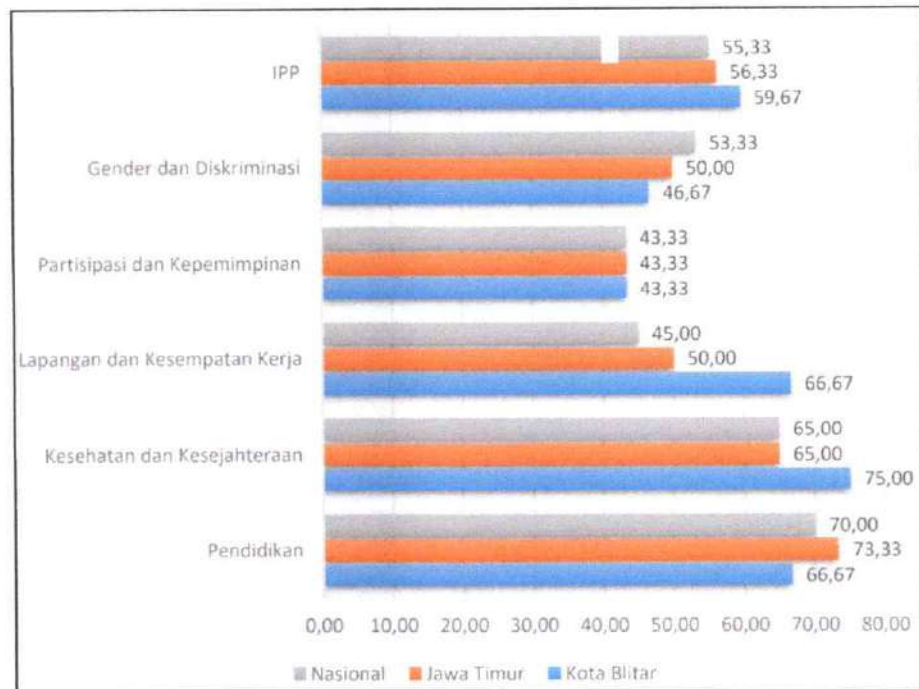
2.1.2.6.4. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)

Indeks Pembangunan Pemuda dirumuskan untuk memotret situasi pembangunan pemuda dalam disagregasi data yang memadai, baik dari segi tema maupun wilayah administrasi yang dicakup. IPP disusun berdasarkan tiga lapisan domain pembangunan pemuda yang menjadi ruang lingkup IPP, yaitu pembangunan individu, pembangunan kehidupan dan kesejahteraan, serta partisipasi dan diskriminasi terhadap pemuda di berbagai bidang. Melalui tiga lapisan ini, IPP menangkap aspek lintas bidang dari pembangunan pemuda dan mengakomodasi peran pemuda sebagai objek dan subjek pembangunan. Dalam kerangka penyusunan IPP, aspek-aspek pembangunan pemuda tersebut dikelompokkan ke dalam 5 (lima) domain dengan 15 (lima belas) indikator penyusunnya. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) merupakan alat ukur pembangunan pemuda di 5 (lima) domain dasar yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi. Adapun nilai domain Indeks Pembangunan Pemuda Kota Blitar tahun 2024 berdasarkan masing-masing domain adalah sebagai berikut :

Tabel 2.22
Nilai Domain Indeks Pembangunan Pemuda Kota Blitar,
Jawa Timur dan Nasional Tahun 2024

No.	Domain	Kota Blitar	Jawa Timur	Nasional
1.	Pendidikan	66,67	73,33	70,00
2.	Kesehatan dan Kesejahteraan	75,00	65,00	65,00
3.	Lapangan dan Kesempatan Kerja	66,67	50,00	45,00
4.	Partisipasi dan Kepemimpinan	43,33	43,33	43,33
5.	Gender dan Diskriminasi	46,67	50,00	53,33
Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)		59,67	56,33	55,33

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Blitar, 2025



Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Blitar, 2025

Gambar 2.35

Perbandingan Domain Indeks Pembangunan Pemuda Kota Blitar, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2024

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Kota Blitar, menunjukkan perkembangan yang positif. Hal ini ditunjukkan dengan capaian IPP sebesar 59,67 pada tahun 2024. Berdasarkan skala pengukuran 1-100, nilai indeks ini tergolong predikat sedang dan mencapai nilai yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan IPP Provinsi Jawa Timur dan Nasional.

Nilai masing-masing domain IPP Kota Blitar secara keseluruhan baik, akan tetapi pada domain pendidikan serta gender dan diskriminasi lebih rendah jika dibandingkan dengan provinsi dan nasional. Pada domain pendidikan, nilai Kota Blitar lebih rendah jika dibandingkan dengan provinsi dan nasional. Salah satu penyebabnya adalah masih rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi di Kota Blitar. Sedangkan pada domain gender dan diskriminasi, persentase pemuda yang sekolah menengah perlu ditingkatkan karena baru mencapai 53,79% dari jumlah keseluruhan pemuda pada usianya. Domain gender dan diskriminasi dapat ditingkatkan capaiannya dengan meningkatkan jumlah pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal. Hal ini sangat berkaitan dengan domain pendidikan di Kota Blitar melalui peningkatan pendidikan yang menyeluruh termasuk pendidikan lanjutan ke perguruan tinggi.

2.1.3. Aspek Daya Saing Daerah

2.1.3.1. Daya Saing Sumber Daya Manusia

2.1.3.1.1. Angka Ketergantungan

Rasio ketergantungan (*Dependency Ratio*) merupakan indikator yang secara kasar dapat digunakan untuk melihat

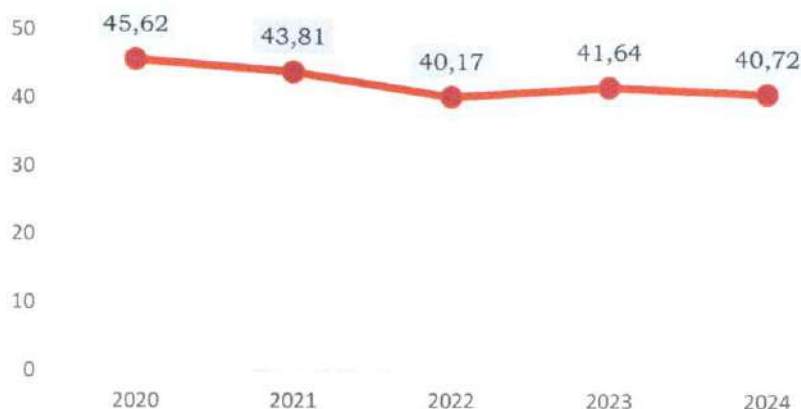
keadaan ekonomi suatu daerah. Rasio ketergantungan menunjukkan beban yang harus ditanggung oleh penduduk produktif (kelompok umur 15-64 tahun) terhadap penduduk tidak produktif (kelompok umur <15 tahun dan >65 tahun).

Angka Beban Ketergantungan yang semakin tinggi menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Tabel 2.23
Rasio Ketergantungan Kota Blitar Tahun 2020 – 2024

No	Kelompok Umur	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024 (*semester I)
1	0 - 14 - Umur Muda	25.114	37.594	32.448	34.716	33.155
2	15 - 64 - Umur Produktif	80.691	110.037	113.121	112.808	114.086
3	65 + - Umur Tua	11.701	10.613	12.989	12.257	13.298
4	Jumlah penduduk usia tidak produktif	36.815	48.207	45.437	46.973	46.453
5	Rasio ketergantungan	45,62	43,81	40,17	41,64	40,72

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2025



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar, 2025

Gambar 2.36

Rasio Ketergantungan Kota Blitar Tahun 2020 – 2024

Berdasarkan grafik di atas, rasio ketergantungan di Kota Blitar selama kurun waktu 2020 - 2024 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020, rasio ketergantungan naik menjadi 45,65 % (persen), kemudian turun pada tahun 2021 dan 2022 menjadi 40,17 % (persen). Pada tahun 2024, rasio ketergantungan mengalami kenaikan menjadi 40,72 % (persen). Hal ini menunjukkan bahwa selama kurun waktu 5 (lima) tahun setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 40 sampai dengan 46 penduduk non produktif. Angka rasio ketergantungan salah satunya dipengaruhi oleh kondisi demografi Kota Blitar yang relatif menunjukkan perkembangan positif.

Jika melihat data Badan Pusat Statistik (BPS), rasio ketergantungan terhadap usia produktif di Indonesia tercatat sebesar 40,72 % (persen) pada tahun 2024. Ini berarti ada sekitar 40-41 per 100 penduduk usia non-produktif di Indonesia bergantung kepada mereka yang berusia produktif.

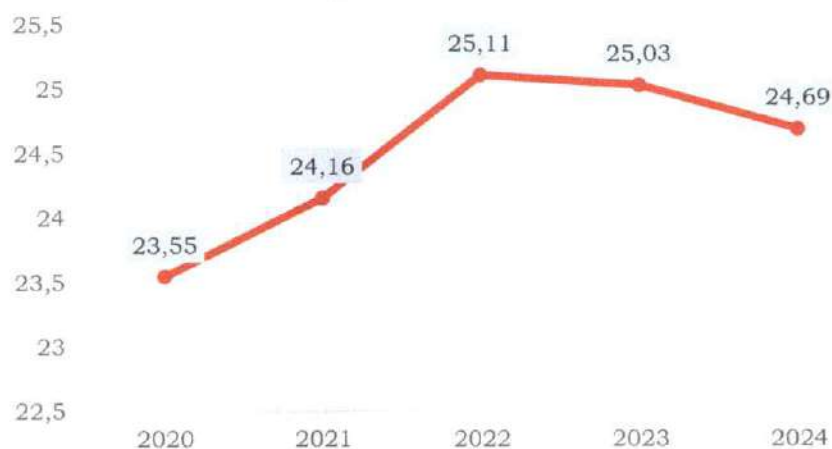
2.1.3.2. Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi

2.1.3.2.1. Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB

Sektor perdagangan (termasuk perdagangan besar dan eceran serta reparasi kendaraan) merupakan tulang punggung ekonomi Kota Blitar. Pada tahun 2023, sektor ini menyumbang sekitar 25,03% terhadap PDRB lokal, menjadikannya sektor terbesar dalam struktur ekonomi daerah. Tren tersebut berlanjut pada tahun 2024, di mana kontribusi sektor ini terkonsolidasi pada 24,69% dari total PDRB. Pertumbuhan tahunan sektor perdagangan pun sangat signifikan selama 2020–2024 menunjukkan lonjakan pertumbuhan sekitar 24,7% di tahun 2024, tertinggi dibandingkan sektor lainnya.

Dominasi sektor perdagangan didukung oleh aktivitas di pasar tradisional dan modern, UMKM, serta pelayanan reparasi kendaraan, yang mendapat dorongan dari berbagai even ekonomi lokal seperti *Ramadan Fest*. Kondisi ini memperlihatkan bahwa penguatan sektor perdagangan tidak hanya memberikan kontribusi besar bagi pertumbuhan PDRB, tetapi juga menjadi penggerak utama dinamika ekonomi serta penyerapan tenaga kerja di Kota Blitar.

Secara singkat sektor perdagangan adalah motor utama ekonomi Kota Blitar, menyumbang sekitar $\frac{1}{4}$ dari total PDRB, dengan pertumbuhan dua digit yang konsisten, memperkuat ketahanan ekonomi lokal.



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

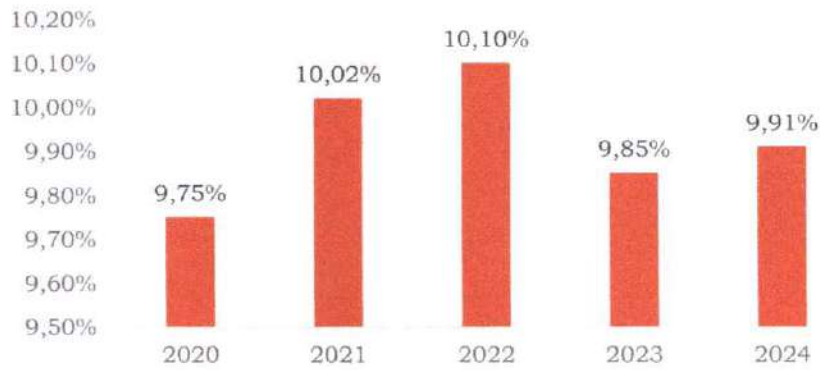
Gambar 2.37

Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Kota Blitar Tahun 2020 – 2024

2.1.3.2.2. Rasio PDRB Industri Pengolahan

Rasio PDRB Industri Pengolahan adalah proporsi atau persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu wilayah

dalam periode tertentu. Industri pengolahan mencakup kegiatan mengubah bahan baku atau bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang memiliki nilai tambah. Sektor ini sering dianggap sebagai tulang punggung perekonomian karena kemampuannya menciptakan lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Rasio PDRB Industri Pengolahan Kota Blitar dalam kurun waktu 5 (lima) tahun tersaji pada tabel berikut.



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

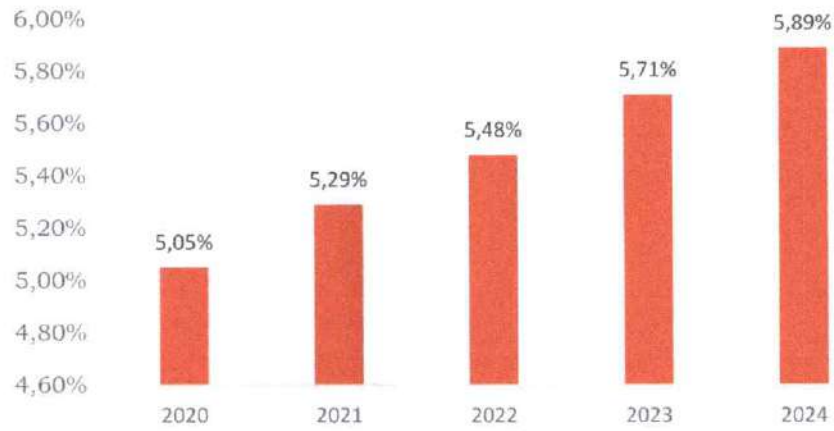
Gambar 2.38
Rasio PDRB Industri Pengolahan Kota Blitar Tahun 2020 – 2024

Interpretasi dari tabel di atas menunjukkan bahwa Rasio PDRB Industri Pengolahan di Kota Blitar dalam 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan rasio yang tinggi yang mengindikasikan bahwa sektor industri pengolahan memainkan peran penting dalam perekonomian di perkotaan. Industri pengolahan dianggap sebagai sektor yang dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan nilai tambah.

Dengan memahami rasio PDRB industri pengolahan, pemerintah dan pemangku kepentingan di Kota Blitar dapat merancang strategi untuk memperkuat sektor industri dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

2.1.3.2.3. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum

Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum adalah proporsi atau persentase kontribusi sektor akomodasi (perhotelan) dan penyediaan makanan serta minuman terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu wilayah dalam periode tertentu. Sektor ini merupakan bagian dari sektor pariwisata dan perdagangan, yang mencakup kegiatan seperti penyediaan penginapan (hotel, villa, hostel), restoran, kafe, dan usaha kuliner lainnya. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum Kota Blitar dalam kurun waktu 5 (lima) tahun tersaji pada tabel berikut:



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Gambar 2.39
Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan Minum Kota Blitar Tahun 2020 – 2024

Interpretasi dari tabel di atas menunjukkan Rasio yang tinggi mengindikasikan bahwa sektor akomodasi dan makan minum memiliki peran penting dalam perekonomian Kota Blitar sebagai kota tujuan destinasi pariwisata. Sampai dengan tahun 2024, jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Blitar menunjukkan peningkatan, utamanya dilihat dari data tamu wisatawan asing. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Blitar semakin dikenal di kancah internasional sebagai salah satu destinasi wisata bersejarah dan budaya yang menarik.

Peningkatan ini juga mencerminkan efektivitas promosi pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah, baik melalui media digital, even pariwisata, maupun kerja sama dengan pelaku industri pariwisata global. Selain itu, peningkatan daya tarik wisatawan turut berkontribusi mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui sektor pariwisata yang berkelanjutan sekaligus menjadi peluang strategis bagi Kota Blitar untuk meningkatkan investasi di bidang pariwisata.

Tabel 2.24
Pertumbuhan Investasi Penyediaan Akomodasi Makan Minum dan Jumlah Wisatawan 2021 - 2024

No	Uraian	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1	Pertumbuhan investasi penyediaan akomodasi makan minum (persen)	bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026			0,5
2	Jumlah tamu wisatawan asing (orang)	8	29	238	499

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Blitar, 2025 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar, 2025

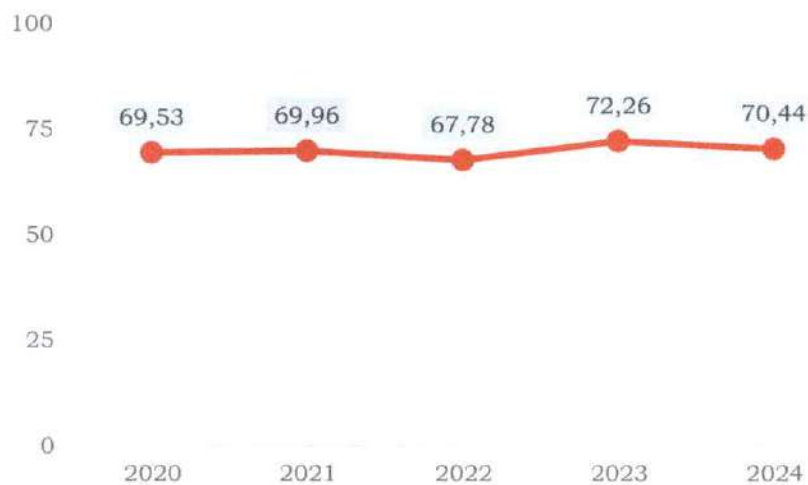
Sektor akomodasi dan makan minum sangat sensitif terhadap kondisi ekonomi, bencana alam, atau pandemi (seperti COVID-19), yang dapat memengaruhi kunjungan

wisatawan dan aktivitas konsumsi. Dengan memahami rasio PDRB akomodasi dan makan minum, pemerintah dan pemangku kepentingan di Kota Blitar dapat merancang strategi untuk mengembangkan pariwisata, meningkatkan kualitas destinasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis konsumsi.

2.1.3.2.4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, sering disebut sebagai TPAK, merupakan parameter yang digunakan untuk mengukur sejauh mana angkatan kerja berkontribusi terhadap jumlah penduduk usia sepuluh tahun ke atas dalam suatu wilayah. TPAK adalah indikator yang berguna untuk menganalisis ketersediaan tenaga kerja dalam suatu daerah. Semakin tinggi nilai TPAK, semakin baik kondisi ketenagakerjaan wilayah tersebut. Semakin tinggi TPAK berarti semakin banyak tenaga kerja yang siap berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah.

Selama periode 2020-2022, TPAK di Kota Blitar mengalami penurunan yang berkelanjutan setiap tahun, namun pada tahun 2023 nilai TPAK mengalami kenaikan dari 67,78 menjadi 72,26 % (persen). Tahun 2024 mengalami penurunan 70,24. Hal ini disebabkan kurangnya tenaga kerja yang disebabkan salah satunya migrasi tenaga kerja dari wilayah lain. Pemerintah Kota Blitar perlu mengantisipasi dengan memastikan penduduk usia kerja memiliki keterampilan yang dibutuhkan pasar kerja.



Sumber: *Badan Pusat Statistik, 2025*

Gambar 2.40
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Blitar
Tahun 2020 – 2024

Tabel 2.25
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Blitar Berdasarkan
Jenis Kelamin Tahun 2020 – 2024

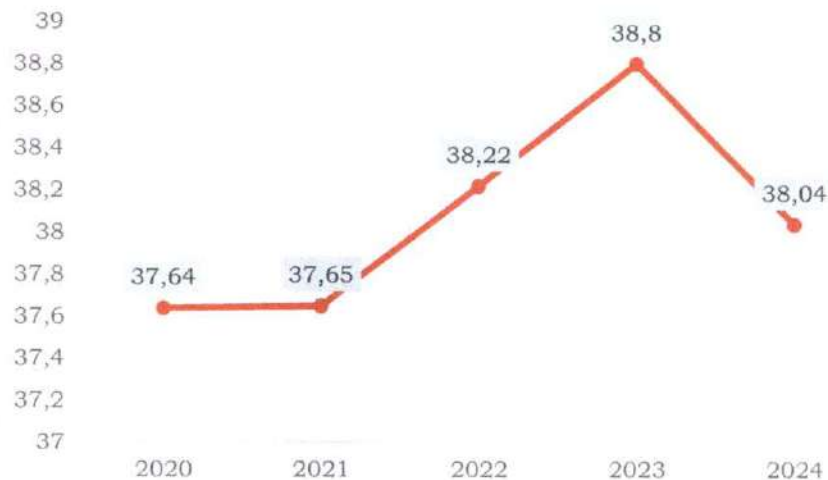
No.	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Laki-Laki	79,19	81,32	79,79	80,91	82,02
2.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	60,24	59,04	56,23	63,87	59,23
3.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	69,53	69,96	67,78	72,26	70,44

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

2.1.3.2.5. Proporsi Penyerapan Tenaga Kerja di Sektor Formal

Proporsi tenaga kerja yang terserap dalam sektor formal di Kota Blitar menunjukkan perkembangan yang positif dari tahun 2020 – 2023. Pada tahun 2024, tercatat sebanyak 38,08 % (persen) dari total penduduk yang bekerja, berstatus formal, sisanya 61,92 % (persen) bekerja di sektor informal. Angka tersebut mengalami sedikit penurunan dari tahun 2023 (38,80 % (persen)).

Meski mayoritas tenaga kerja masih berada di sektor informal, tren menuju peningkatan ketenagakerjaan formal ini mencerminkan perbaikan regulasi, peningkatan akses terhadap pekerjaan resmi, dan keberhasilan program pengembangan industri lokal. Dengan demikian, penyerapan tenaga kerja formal di Kota Blitar semakin tumbuh sebagai fondasi penting dalam meningkatkan kualitas lapangan kerja dan stabilitas ekonomi daerah.

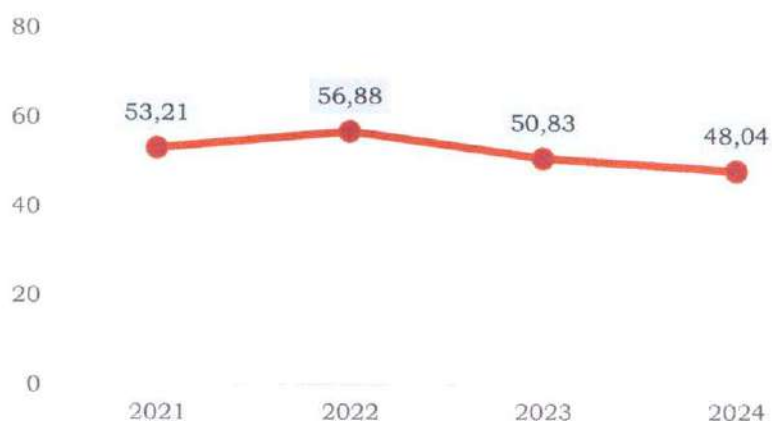


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Gambar 2.41
Proporsi Penyerapan Tenaga Kerja di Sektor Formal Tahun
2020- 2024

2.1.3.2.6. Indeks Inovasi Daerah (IID)

Indeks Inovasi Daerah (IID) merupakan sistem pengukuran dan penilaian terhadap penerapan pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah. Penilaian inovasi daerah adalah proses penilaian terhadap semua bentuk inovasi daerah menggunakan indikator Indeks Inovasi Daerah. Data Indeks Inovasi Daerah merupakan dokumen yang memberikan informasi dan data terkait pelaksanaan inovasi daerah yang telah berhasil dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah paling sedikit 2 (dua) tahun. Capaian IID Kota Blitar Tahun 2021 sampai tahun 2024 adalah sebagai berikut.



Sumber : *Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri, 2025*

Gambar 2.42

Indeks Inovasi Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2024

Strategi untuk mendukung Indeks Inovasi Daerah Kota Blitar:

1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk menciptakan tenaga kerja yang inovatif;
2. Membangun fasilitas pendukung inovasi, seperti inkubator bisnis dan pusat teknologi digital;
3. Kerjasama antara pemerintah, industri, akademisi dan masyarakat melalui pelaksanaan lomba inovasi;
4. Adanya perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) yang kuat untuk mendorong inovasi, seperti sosialisasi HKI.

2.1.3.2.7. ICOR (*Incremental Capital Output Ratio*)

ICOR (*Incremental Capital Output Ratio*) adalah indikator ekonomi yang digunakan untuk mengukur efisiensi investasi dalam menghasilkan output (produk domestik bruto/PDB). ICOR menunjukkan berapa banyak tambahan investasi (modal) yang dibutuhkan untuk menghasilkan tambahan satu unit output. Semakin rendah nilai ICOR, semakin efisien perekonomian suatu wilayah dalam menggunakan modal untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah dan analis ekonomi menggunakan ICOR untuk mengevaluasi seberapa efektif program pembangunan dan

investasi. ICOR juga sering dipakai dalam perencanaan ekonomi jangka menengah dan panjang.

Pada tahun 2024, angka ICOR sebesar 3,51, dan tergolong cukup efisien. Artinya, dengan setiap peningkatan investasi sebesar 3,51 % (persen) dari PDB, ekonomi mampu tumbuh sebesar 1 persen. Semakin kecil angka ICOR, semakin efisien investasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

2.1.3.2.8. Indeks Akses Keuangan Daerah

Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) menjadi salah satu instrumen penting untuk melihat sejauh mana masyarakat telah terhubung dengan layanan keuangan formal, baik melalui perbankan, koperasi, maupun lembaga keuangan non-bank. Pemerintah daerah bersama OJK dan instansi terkait terus berupaya mendorong peningkatan indeks ini melalui berbagai program, seperti perluasan literasi keuangan di tingkat sekolah dan komunitas, fasilitasi akses pembiayaan bagi pelaku UMKM, serta penguatan ekosistem pembayaran digital yang mudah dijangkau masyarakat. Pencapaian IKAD yang lebih tinggi diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal, mengurangi kesenjangan akses permodalan, serta membangun fondasi keuangan masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Kota Blitar.

Tabel 2.26

Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) Kota Blitar
Tahun 2022 - 2024

No.	Indikator	Tahun		
		2022	2023	2024
1.	Indeks Akses Keuangan Daerah	6,66	6,17	6,46

Sumber: *Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2025*

Jika dilihat perkembangannya selama tahun 2022-2024, IKAD Kota Blitar menunjukkan angka fluktuatif. Kondisi ini mencerminkan adanya dinamika dalam akses masyarakat terhadap layanan keuangan, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tingkat literasi keuangan, penetrasi layanan digital, dukungan pembiayaan bagi UMKM, serta kebijakan pemerintah daerah. Meskipun belum menunjukkan tren kenaikan yang stabil, capaian tahun 2024 memberikan sinyal positif bahwa upaya perluasan inklusi keuangan mulai menunjukkan hasil, sehingga ke depan perlu diperkuat melalui strategi kolaboratif antara pemerintah, OJK, dan lembaga jasa keuangan untuk menjaga konsistensi peningkatan IKAD.

2.1.3.2.9. Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK Daerah (RIPJPID) Kota Blitar 2025 – 2029

RIPJPID Kota Blitar dilakukan dalam kurun waktu lima tahun (2025-5029) dengan tema besar “Riset dan Inovasi untuk mewujudkan Kota Blitar yang Maju, Sehat dan Sejahtera menuju Kota Masa Depan”. Melalui penyusunan RIPJPID diharapkan dapat menjadi pondasi bagi sinergi

antar sektor, mendorong kolaborasi multi-disiplin dan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil memiliki arah yang jelas dan terukur, sesuai dengan visi dan misi pembangunan daerah. Melalui RIPJPID, daerah diharapkan tidak hanya berperan sebagai pelaksana, tetapi juga sebagai penggerak utama dalam menciptakan inovasi yang berdampak luas dan membawa manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Strategi riset dan inovasi daerah didasarkan pada kondisi ekosistem riset dan inovasi daerah Kota Blitar. Strategi ini selaras dengan analisis kesenjangan ekosistem riset dan inovasi daerah. Strategi ini memperkuat serta mengidentifikasi kebutuhan agar ekosistem riset dan inovasi daerah menjadi lebih baik. Secara lengkap, strategi riset dan inovasi IPTEK daerah Kota Blitar dijelaskan sebagai berikut :

- a. Strategi Pengembangan Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di daerah

Tabel 2.27
Strategi Pengembangan Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di daerah

No.	Aspek	Analisis Kesenjangan	Strategi
1.	Reformasi Kebijakan IPTEK Daerah	Belum adanya kebijakan reformasi kebijakan yang progresif.	Penyusunan dan Penerbitan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK Daerah 2025 – 2029.
2.	Pengembangan Infrastruktur dasar IPTEK	Fasilitas fisik dan laboratorium riset yang belum tersebar merata dan belum mendukung kebutuhan inovasi.	1. Penyediaan dan/atau peningkatan fasilitas riset dan inovasi yang mendukung pengembangan riset dan inovasi daerah dan Produk Unggulan Daerah (PUD). 2. Pembangunan Pusat – pusat riset studi
3.	Penataan Basis Data IPTEK	Belum adanya sistem informasi data riset yang terstandar dan mudah diakses.	Penyediaan dan/atau peningkatan Sistem Informasi data riset dan inovasi yang terintegrasi dan dapat diakses public yang berbasis pada data eksisting.
4.	Peningkatan Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual	Belum optimalnya sistem perlindungan hak cipta dan paten hasil inovasi lokal.	1. Penyediaan laboratorium dan/atau studio hak kekayaan intelektual di daerah dengan memanfaatkan infrastruktur yang

No.	Aspek	Analisis Kesenjangan	Strategi
			ada di BAPPERIDA atau fasilitas kelitbangan lainnya. 2. Pengajuan produk kelitbangan yang belum mendapat HAKI.

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar, 2025

b. Strategi Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi di Daerah

Tabel 2.28

Strategi Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi di Daerah

No.	Aspek	Analisis Kesenjangan	Strategi
1	Kolaborasi Antar Pemangku Kepentingan.	Belum terbangunnya kolaborasi antar pihak secara sistematis, minimnya forum integratif riset.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemetaan keunggulan dan potensi kolaborasi riset dan inovasi sesuai dengan permasalahan daerah dan produk unggulan daerah. 2. Skema/jaminan benefit untuk lembaga pelaku riset yang berkolaborasi. 3. Penguatan fungsi kelembagaan BRIDA Kota sebagai orkestrator riset dan inovasi (fungsi <i>assessment</i> terhadap kegiatan riset dan inovasi OPD). 4. Penguatan kolaborasi BRIDA Kota dengan perguruan tinggi maupun perusahaan/bisnis. 5. Evaluasi terhadap efektifitas dan dampak kolaborasi yang sudah dilaksanakan.
2	Penyediaan Sarana Pendukung Riset dan Inovasi	Sarana riset belum sesuai kebutuhan dan tidak tersebar merata antar lembaga.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan sistem informasi terintegrasi hasil riset dan inovasi yang mudah

No.	Aspek	Analisis Kesenjangan	Strategi
	IPTEK di Daerah		diakses Masyarakat. 2. Peningkatan fasilitasi akses terhadap perangkat lunak (<i>software/aplikasi</i>) untuk analisis riset dan inovasi. 3. Perpustakaan digital, <i>Co-working space</i> dan pusat pelayanan analisis data.
3	Kelembagaan dan SDM.	Minimnya dana inkubasi, belum ada model pelatihan dan pembinaan berkelanjutan berbasis kebutuhan kebutuhan UMKM.	Peningkatan dukungan pendanaan awal untuk inovator, dan program pembinaan pasca produksi yang aplikatif hingga pemasaran.

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar, 2025

c. Strategi Peningkatan Kemitraan Riset dan Inovasi Daerah
Tabel 2.29

Strategi Peningkatan Kemitraan Riset dan Inovasi Daerah

No.	Aspek	Analisis Kesenjangan	Strategi
1	Penerapan dan Penyebaran Inovasi.	Rendahnya infrastruktur komunikasi dan kurangnya dukungan program untuk penyebaran hasil inovasi.	<ol style="list-style-type: none">1. Optimalisasi pemanfaatan media sosial dan media Massa.2. Pelibatan <i>public figure</i> dalam difusi hasil riset dan inovasi.
2	Pemanfaatan Hasil Riset.	Belum tersedia mekanisme insentif pemanfaatan hasil riset oleh stakeholder lokal.	<ol style="list-style-type: none">1. Publikasi terbuka diseminasi hasil riset dan inovasi melalui SIDA Kota Blitar sehingga dapat diakses secara luas oleh perangkat daerah dan Masyarakat2. Peningkatan implementasi hasil riset dan inovasi melalui evaluasi dan monitoring penggunaan hasil riset dan inovasi oleh perangkat daerah.
3	Kemitraan dengan Stakeholder.	Belum ada struktur kelembagaan khusus yang mengelola dan memfasilitasi kemitraan riset secara profesional.	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi kemitraan yang sudah terjalin dan dampaknya.2. Pemetaan potensi dan kebutuhan riset dan inovasi dalam rangka pengembangan jejaring kerjasama riset dan inovasi antar <i>stakeholder (pentahelix)</i>.3. Pemetaan potensi kebutuhan kemitraan yang diinisiasi oleh badan usaha (BUMD, Swasta) untuk pengembangan sektor unggulan daerah.4. Jaminan benefit untuk mitra riset dan inovasi.

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar, 2025

d. Strategi Peningkatan Budaya Riset dan Inovasi di Daerah
Tabel 2.30

Strategi Peningkatan Budaya Riset dan Inovasi di Daerah

No.	Aspek	Analisis Kesenjangan	Strategi
1	Promosi dan Kampanye riset dan Inovasi daerah	Kurangnya promosi kreatif dan komunikasi publik yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat	Optimalisasi pemanfaatan media digital dan media Massa.
2	Apresiasi Prestasi riset dan Inovasi daerah	Ketiadaan sistem apresiasi yang sistematis dan terukur terhadap pelaku inovasi	1. Peningkatan apresiasi untuk para periset dan inventor; 2. Fasilitasi keberlanjutan inovasi.
3	Pengembangan Perusahaan Pemula berbasis riset	Minimnya inkubasi dan pembinaan bagi <i>startup</i> berbasis riset secara formal	1. Optimalisasi fungsi inkubator bisnis; 2. Peningkatan peran dalam pengembangan inkubator bisnis; 3. Peningkatan peran stakeholder non pemerintah dalam penyediaan inkubasi bisnis.
4	Pencatatan dan Perlindungan Pengetahuan	Belum ada sistem yang menjamin perlindungan dan pengembangan berkelanjutan terhadap pengetahuan lokal	1. Peningkatan kepedulian tentang KI kepada masyarakat; 2. Inventarisasi dan penyusunan basis data KI (pengetahuan dan teknologi) masyarakat terintegrasi; 3. Penguatan kolaborasi fasilitasi pengembangan KI (pengetahuan dan teknologi) Masyarakat; 4. Peningkatan kolaborasi pusat inovasi dan sentra KI dalam upaya inventarisasi dan fasilitasi perlindungan kekayaan

No.	Aspek	Analisis Kesenjangan	Strategi
			intelektual Masyarakat.

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar, 2025

e. Strategi penguatan keterpaduan Riset dan Inovasi Daerah

Tabel 2.31

Strategi Penguatan Keterpaduan Riset dan Inovasi Daerah

No	Aspek	Analisis Kesenjangan	Strategi
1	Pengembangan Riset dan Inovasi	Kegiatan riset belum diprioritaskan secara sistematis; minim sosialisasi dan pemetaan kebutuhan nyata masyarakat	Penetapan <i>roadmap</i> riset dan inovasi yang disusun partisipatif, peningkatan forum diskusi dan edukasi masyarakat, serta penambahan anggaran dan keberpihakan pada masyarakat.
2	Pengembangan Klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah	Belum ada struktur klaster inovasi formal dan kelembagaan pendukung yang kuat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis dan pemetaan produk unggulan daerah sebagai arah kebijakan pengembangan ekonomi daerah. 2. Inisiasi dan pengembangan riset dan inovasi dengan menindak lanjuti analisis dan peta produk unggulan daerah. 3. Inisiasi klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah.
3	Keselarasan implementasi Kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah	Keselarasan kebijakan masih perlu ditingkatkan dan diperkuat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkomunikasikan kebutuhan arah kebijakan riset dan inovasi pusat dan daerah melalui berbagai saluran. 2. Antisipasi dan sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat yang berdampak pada daerah.

No	Aspek	Analisis Kesenjangan	Strategi
4	Kendala Utama Riset	Tidak tersedia dukungan regulasi atau kebijakan pendampingan berkelanjutan untuk hasil riset	Pembentukan lembaga khusus seperti Klinik IKM, dukungan pemerintah yang kuat, penyamaan persepsi antar elemen, dan penguatan regulasi yang mendukung riset.
5	Tantangan Membangun Klaster Inovasi	Keterbatasan akses dan partisipasi masyarakat serta belum adanya peta jalan inovasi lokal	Pemetaan klaster pengembangan inovasi produk unggulan daerah.

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar, 2025

f. Strategi Penyelarasan Riset dan Inovasi Daerah dengan perkembangan Global

Tabel 2.32

Strategi Penyelarasan Riset dan Inovasi Daerah dengan Perkembangan Global

No.	Aspek	Analisis Kesenjangan	Strategi
1	Relevansi Isu Internasional	Kurangnya respons kebijakan lokal terhadap isu global yang berdampak langsung	Pemetaan tema dan penerbitan riset sesuai dengan isu global seperti perubahan iklim, energi terbarukan yang perlu menjadi prioritas riset inovasi daerah.
2	Penguatan Kerjasama Internasional	Belum ada kerangka kelembagaan dan pendanaan untuk mendukung kerjasama internasional	Melalui Pemetaan potensi kerjasama internasional dan Inisiasi penjajakan kerjasama riset internasional kolaborasi BRIN dan perguruan tinggi.
3	Dampak Kerjasama Internasional	Minimnya kolaborasi strategis dengan lembaga global dan akses pada sumber daya teknologi	Optimalisasi kolaborasi lintas sektor termasuk transfer teknologi dan investasi asing dalam inovasi daerah.
4	Arah Penyesuaian Global	Tidak tersedianya roadmap globalisasi inovasi	Penyusunan Rencana Aksi penyelarasan

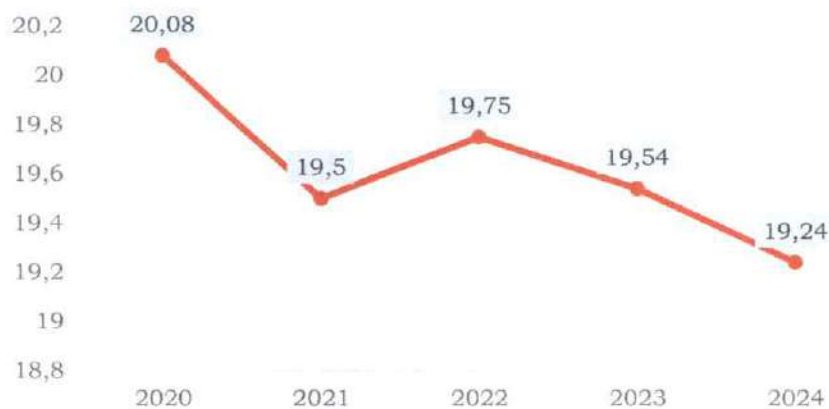
No.	Aspek	Analisis Kesenjangan	Strategi
		daerah serta kurangnya kapasitas SDM dalam menjawab tantangan global.	dengan tren global melalui forum diskusi, pelatihan SDM, sosialisasi dan skema kemitraan global yang konkret.

Sumber: *Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar, 2025*

2.1.3.3. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

2.1.3.3.1. Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PDRB)

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) merupakan komponen penting dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang mencerminkan besarnya investasi fisik yang dilakukan dalam satu wilayah, seperti pembangunan infrastruktur, pembelian mesin, peralatan dan pembangunan gedung. Sebagai persentase terhadap PDRB, PMTB menunjukkan seberapa besar porsi pertumbuhan ekonomi yang berasal dari kegiatan investasi tetap. Di Kota Blitar, proporsi PMTB terhadap PDRB menjadi indikator utama dalam menilai dinamika investasi daerah dan kapasitas produktif jangka panjang. Nilai persentase yang tinggi menandakan bahwa wilayah tersebut sedang aktif dalam kegiatan investasi produktif yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Sebaliknya, jika nilai PMTB rendah, hal ini mengindikasikan perlunya dorongan kebijakan untuk meningkatkan investasi sektor produktif guna memperkuat fondasi ekonomi lokal. Oleh karena itu, memantau tren PMTB sebagai persentase PDRB sangat penting untuk merumuskan strategi pembangunan yang efektif dan inklusif.



Sumber : *Badan Pusat Statistik, 2025*

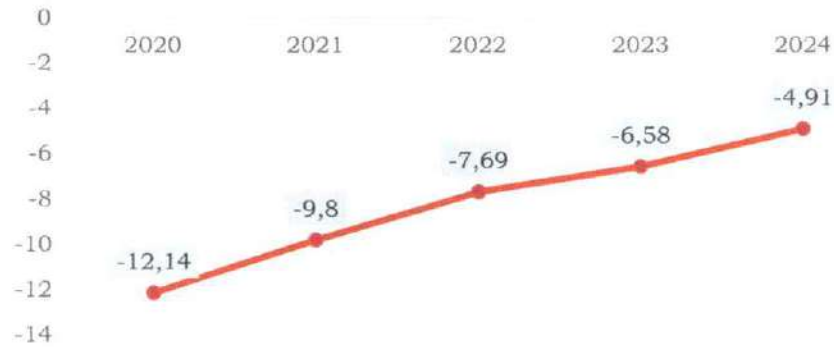
Gambar 2.43
Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PDRB) Kota Blitar
Tahun 2020 – 2024

2.1.3.3.2. Ekspor Barang dan Jasa

Kota Blitar mulai aktif menembus pasar internasional dengan ekspor produk unggulan UMKM. Pada Januari 2025, dua kontainer kendang djimbe maupun cherry blossom berhasil dikirim ke China sekitar 5.000 unit, dan kini bahkan



mencapai 4–5 kontainer per bulan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat bersama pelaku UMKM dan HIPMI secara aktif membina pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas dan volume produksi agar mencapai standar global. Selain itu, berbagai komoditas lokal seperti kerajinan batok, batik, belimbing, ikan koi, kopi green bean, cokelat cair dan furnitur telah memiliki potensi ekspor.



Sumber : *Badan Pusat Statistik, 2025*

Gambar 2.44

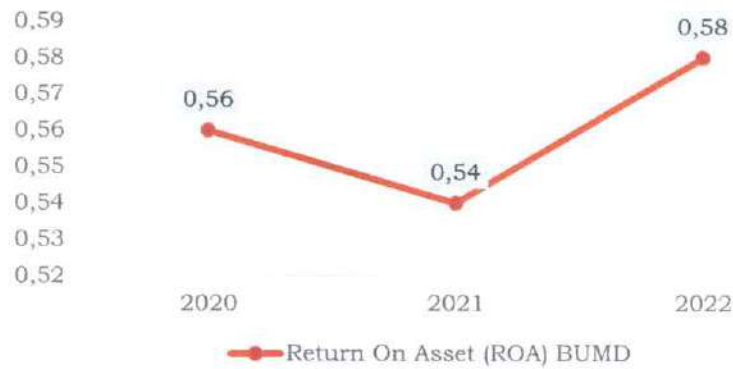
Ekspor Barang dan Jasa Kota Blitar Tahun 2020 – 2024

2.1.3.3.3. *Return On Asset (ROA) BUMD*

Return on Asset (ROA) merupakan indikator keuangan yang digunakan untuk mengukur seberapa efisien suatu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam menghasilkan laba dari total aset yang dimilikinya. Semakin tinggi nilai ROA, semakin baik kemampuan BUMD dalam mengelola asetnya untuk memperoleh keuntungan.

Di Kota Blitar, ROA BUMD menjadi salah satu parameter penting dalam mengevaluasi kinerja keuangan dan operasional perusahaan daerah. ROA yang positif dan stabil mencerminkan efektivitas manajemen dalam mengoptimalkan aset perusahaan untuk menciptakan nilai ekonomi bagi daerah. Sebaliknya, nilai ROA yang rendah atau negatif dapat mengindikasikan penggunaan aset yang kurang produktif atau efisiensi operasional yang perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan pemantauan berkala terhadap ROA serta mendorong perbaikan tata kelola dan inovasi bisnis di lingkungan BUMD agar kinerja keuangan lebih sehat dan berdampak positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kota Blitar memiliki 2 BUMD yang masih beroperasi, yaitu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan Perusahaan Umum Daerah BPR Kota Blitar (Bank Kota Blitar). Kedua BUMD perlu dikelola secara profesional, efisien, agar dapat menghasilkan laba tinggi sehingga berpeluang menyumbang dividen ke Pendapatan Asli Daerah (PAD). ROA juga menjadi indikator bagi pemerintah daerah untuk menilai apakah perlu meningkatkan modal, melakukan pengawasan ketat, atau bahkan melakukan privatisasi.



Sumber : Sekretariat Daerah Kota Blitar, 2025

Gambar 2.45

Return On Asset (ROA) BUMD Kota Blitar Tahun 2020 – 2022

2.1.3.3.4. Perkembangan Koperasi

Melihat roda perputaran perekonomian di Kota Blitar selama kurun waktu tiga tahun terakhir, tidak dapat dipungkiri bahwa peran koperasi dan Usaha Mikro di Kota Blitar cukup signifikan bagi perekonomian daerah. Di samping perannya bagi penggerak perekonomian daerah, koperasi dan usaha mikro juga terbukti merupakan pelaku usaha yang cukup mandiri, kukuh, fleksibel yang sudah cukup teruji terutama di saat krisis berlangsung seperti pandemi covid-19 saat ini, selain koperasi dan usaha mikro juga menjadi jantung ekonomi rakyat dan pelopor tumbuhnya ekonomi kerakyatan.

Perkembangan koperasi di Kota Blitar menunjukkan tren positif seiring komitmen kuat pemerintah daerah serta berbagai inovasi strategis. Sampai dengan tahun 2025, koperasi di Kota Blitar tercatat sebanyak 283 koperasi dengan rincian 9 koperasi Syariah dan 274 koperasi Non Syariah. Dari total tersebut, 104 di antaranya dinyatakan aktif dengan melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) setiap tahunnya.

Data koperasi aktif di Kota Blitar disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.33
Daftar Koperasi Aktif di Kota Blitar Tahun 2025

No.	Nama Koperasi	Keterangan
1	KOPERASI WANITA "PUTERI GELORA"	Aktif
2	Primer Koperasi Pegawai Republik Indonesai "MEKAR" SMEA NEGERI BLITAR	Aktif
3	KOPERASI KONSUMEN (KPRI) MERAH DELIMA FORSMA	Aktif
4	KOPERASI KONSUMEN "KPRI STM NEGERI BLITAR"	Aktif
5	Primer Koperasi Pegawai Republik Indonesia "MEKAR MULIA" SMP Negeri 4 Blitar	Aktif
6	KOPERASI "WANITA MELATI ARUM WANGI"	Aktif

No.	Nama Koperasi	Keterangan
7	KOPERASI WANITA "ARGA DEWI MANDIRI"	Aktif
8	Koperasi Aneka Usaha Cipta Karya Kotamadya Blitar	Aktif
9	KOPERASI SIMPAN PINJAM "BINA USAHA MANDIRI"	Aktif
10	Primer Koperasi Pegawai Republik Indonesia "SUBUR" SMP NEGERI 3 BLITAR	Aktif
11	Koperasi Serba Usaha "AL FAIDA"	Aktif
12	KOPERASI SERBA USAHA (KSU) "YASMIN"	Aktif
13	Primer Koperasi Pegawai Republik Indonesia "GATI" SMP NEGERI 9 BLITAR	Aktif
14	Primer Koperasi Pegawai Republik Indonesia "BHAKTI PRAJA" PEMDA KODYA BLITAR	Aktif
15	Primer Koperasi Pegawai Republik Indonesia "SEKAR SARI" SMP NEGERI 5 BLITAR	Aktif
16	Primer Koperasi Pegawai Republik Indonesia KPPDK LPA BLITAR	Aktif
17	KOPERASI SIMPAN PINJAM "CENTRA DANA ABADI"	Aktif
18	Primer Koperasi Pegawai Republik Indonesia "SWAKERTA RAHARJA" KANTOR DEP. KOPERASI KODYA Blitar	Aktif
19	Koperasi Serba Usaha "BAROKAH"	Aktif
20	Primer Koperasi Pegawai Republik Indonesia "SEJAHTERA" SMP 2 Blitar	Aktif
21	KOPERASI SERBA USAHA "ARTHA KRIDHA USAHA"	Aktif
22	Primer Koperasi Pegawai Republik Indonesia "USAKO" PERTANAHAN KODYA BLITAR	Aktif
23	PRIMER KOPERASI KEPOLISIAN RESOR KOTA BLITAR	Aktif
24	Primer Koperasi Pegawai Republik Indonesia "SERBA GUNA" SMA NEGERI 2 BLITAR	Aktif
25	KOPERASI KONSUMEN ABDI PRAJA SEJAHTERA	Aktif
26	KOPERASI WANITA "DEWI KUNTHI"	Aktif
27	Primer Koperasi Pegawai Republik Indonesia "HUSADA" BLITAR	Aktif
28	KOPERASI WANITA "SRI REJEKI"	Aktif
29	KOPERASI WANITA "SRIKANDI"	Aktif
30	Primer Koperasi Pegawai Republik Indonesia "SEJAHTERA" KANTOR DEP. AGAMA KODYA BLITAR	Aktif
31	Primer Koperasi Pegawai Republik Indonesia "SUPRIADI" SMP NEGERI 7 BLITAR	Aktif
32	KOPERASI WANITA "BELIMBING"	Aktif

No.	Nama Koperasi	Keterangan
33	Koperasi Guru dan Karyawan STM Islam Blitar	Aktif
34	KOPERASI PRODUSEN ASUMI OEKIL MANDIRI	Aktif
35	Primer Koperasi Pegawai Republik Indonesia "PEMBANGUNAN" SMP NEGERI 1 BLITAR	Aktif
36	Primer Koperasi Pegawai Republik Indonesia "TEGAS" BLITAR	Aktif
37	Primer Koperasi Pegawai Republik Indonesia "WIJAYA KUSUMA" Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kotamadya Blitar	Aktif
38	Koperasi Simpan Pinjam "KARYA BHAKTI"	Aktif
39	Primer Koperasi Pegawai Republik Indonesia "MAKMUR" SMP Negeri 6 Blitar	Aktif
40	Koperasi Konsumen Syariah An Nisa Kota Blitar	Aktif
41	Primer Koperasi Pegawai Republik Indonesia "HANGUDI MAKMUR" SMP NEGERI 8 BLITAR	Aktif
42	Primer Koperasi Pegawai Republik Indonesia "ARTA KARYA" BLITAR	Aktif
43	Primer Koperasi Pegawai Republik Indonesia "BINA SEJAHTERA" Blitar	Aktif
44	Koperasi Serba Usaha Pegawai PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. "SWADHARMA"	Aktif
45	Koperasi Serba Usaha Mitra Sejahtera	Aktif
46	Primer Koperasi Pegawai Republik Indonesia "MANFAAT MAN" Blitar	Aktif
47	KOPERASI PONDOK PESANTREN "NURUL ULUM"	Aktif
48	Koperasi Pegawai Republik Indonesia "Sejahtera"	Aktif
49	Koperasi Serba Usaha Pedagang Pasar "SUBUR"	Aktif
50	Primer Koperasi Pegawai Republik Indonesia "PATRIA UTAMA KARYA"	Aktif
51	Primer Koperasi Pegawai Republik Indonesia KPPDK PENGADILAN NEGERI BLITAR	Aktif
52	KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH "AR-ROHMAH SEJAHTERA ABADI"	Aktif
53	Primer Koperasi Pegawai Republik Indonesia "LESTARI" SMA NEGERI 1 BLITAR	Aktif
54	PRIMKOPPABRI Kab/Kodya Blitar	Aktif
55	KOPERASI SIMPAN PINJAM "EKA YOGA PRATAMA"	Aktif

No.	Nama Koperasi	Keterangan
56	Primer Koperasi Pegawai Republik Indonesia "MINA SATWA TANI" Blitar	Aktif
57	KOPERASI SIMPAN PINJAM "ABADI JAYA MULYA"	Aktif
58	KOPERASI WANITA "KARTINI"	Aktif
59	Koperasi Serba Usaha Hillsi	Aktif
60	PRIMKOPPABRI Kab/Kodya Blitar	Aktif
61	KOPERASI WANITA "WENTAR"	Aktif
62	Koperasi Serba Usaha "SYARIAH MUHAMMADIYAH BLITAR"	Aktif
63	KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH "NURUL RIZQU NISA"	Aktif
64	KOPERASI WANITA "TURI"	Aktif
65	KOPERASI SIMPAN PINJAM "ARTHA MITRA SENTOSA"	Aktif
66	KOPERASI BINA USAHA EKONOMI KELUARGA AISYIYAH AS SAKINAH	Aktif
67	Koperasi Pondok Pesantren Bustanul Mutaallimat	Aktif
68	KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH RIADHOTUT THOLIBAT CABEAN SEJAHTERA"	Aktif
69	Primer Koperasi Pegawai Republik Indonesia "PATRIA HUSADA" Dinas Kesehatan Kotamadya Blitar	Aktif
70	Koperasi Serba Usaha "TRI GUNA BHAKTI"	Aktif
71	Primer Koperasi Pegawai Republik Indonesia "PASANG" Kejaksaan Negeri Blitar	Aktif
72	Primer Koperasi Kartika Merak 08	Aktif
73	PRIMER KOPERASI KARTIKA BADAH HITAM	Aktif
74	KOPERASI WANITA "MEKAR JAYA"	Aktif
75	Primer Koperasi Pegawai Republik Indonesia "PERINDAG-97" KANTOR DEP. PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTAMADYA BLITAR	Aktif
76	Koperasi Mitra Usaha "WAHANA PATRIA" Kotamadya Blitar	Aktif
77	KOPERASI WANITA "PERTIWI"	Aktif
78	Koperasi Karyawan MAYANGKARA ARTHA	Aktif
79	Koperasi Serba Usaha "TAMAN HANGUDI JAYA" Kota Blitar	Aktif
80	Koperasi Serba Usaha "BERGAS"	Aktif
81	Koperasi Simpan Pinjam Setia Bhakti	Aktif
82	KOPERASI KONSUMEN (KSU) "SURYA PATRIA JAYA"	Aktif
83	KOPERASI WANITA "RAYUNG WULAN"	Aktif
84	KOPERASI SIMPAN PINJAM "ADHI ARTHA JAYA"	Aktif

No.	Nama Koperasi	Keterangan
85	Koperasi Simpan Pinjam Mulyo Agung	Aktif
86	Koperasi Simpan Pinjam Bhakti Mulya Jaya	Aktif
87	KOPERASI SIMPAN PINJAM "ARTHA AGUNG ABADI"	Aktif
88	KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH NUR CHOIRUNISA SEJAHTERA	Aktif
89	KOPERASI WANITA "KARYA MANDIRI"	Aktif
90	Primer Koperasi Pegawai Republik Indonesia KPPDK LAPAS BLITAR	Aktif
91	KOPERASI WANITA "PUTRI PATRIA"	Aktif
92	KOPERASI SERBA USAHA "SRI REJEKI"	Aktif
93	Koperasi Serba Usaha PURNABHAKTI TELKOM	Aktif
94	Koperasi Karyawan "PAGUYUPAN"	Aktif
95	Koperasi PEGAWAI KANTOR CABANG TELEKOMUNIKASI Blitar	Aktif
96	KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) "MITRA ARTA"	Aktif
97	Koperasi Unit Desa "BINA TARUNA MANDIRI"	Aktif
98	KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH DARUL MUTTAQIN KAUMAN	Aktif
99	Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia Kotamadya Blitar	Aktif
100	KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH NUR ROHMAH SEJAHTERA	Aktif
101	Koperasi Serba Usaha "TOBA SEJAHTERA"	Aktif
102	Koperasi Simpan Pinjam Katalisma	Aktif
103	Koperasi Serba Usaha "GAMMA USAHA" Kotamadya Blitar	Aktif
104	KOPERASI BERDIKARI SUKSES MANDIRI INDONESIA	Aktif

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Blitar, 2025

Memasuki tahun 2025, implementasi Instruksi Presiden terkait Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi salah satu fokus Pemerintah Kota Blitar. Sebanyak 21 koperasi di tiap kelurahan dibentuk guna memperkuat produktivitas, ketahanan pangan, serta daya saing UMKM lokal. Secara keseluruhan, Kota Blitar mempertahankan arah kebijakan progresif dalam pengembangan koperasi, dari pemberdayaan UMKM dan modernisasi sistem hingga kolaborasi akademik dan percepatan pembentukan koperasi kelurahan. Namun, perhatian serius juga diperlukan terhadap kesehatan administratif dan keberlanjutan operasional koperasi agar lebih banyak koperasi yang aktif, legal dan berdampak ekonomi nyata bagi masyarakat.

Dalam hal pengembangan usaha mikro, Pemerintah Kota Blitar secara aktif memperkuat ekosistem usaha mikro melalui sejumlah program strategis. Dalam praktek lapangan, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan dan pendampingan manajerial sejak tahun 2025, yang berfokus pada manajemen keuangan, strategi pemasaran digital dan persiapan memasuki pasar global. Program ini dibarengi akses permodalan dan fasilitasi perizinan untuk memastikan UMKM lebih siap bersaing di pasar nasional maupun internasional.

Sampai dengan tahun 2025, jumlah usaha mikro yang dibina sejumlah 2380 orang berdasarkan data Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja. Pembinaan ini termasuk pemberian dukungan fasilitasi pemasaran produk usaha. Dari jumlah tersebut, 1767 usaha telah memiliki NIB atau Nomor Induk Berusaha. Sedangkan data usaha mikro yang naik kelas adalah sejumlah 275, menunjukkan adanya perkembangan dalam upaya pembinaan usaha mikro di Kota Blitar.

Berikut disajikan capaian kinerja penyelenggaraan urusan koperasi dan usaha mikro pada tahun 2024.

Tabel 2.34
Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi dan Perkembangan Usaha Mikro Tahun 2024

No	Indikator	2024
1	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	18,8
2	Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	9,28
3	Pertumbuhan Wirausaha	4,2

Sumber: *Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Blitar, 2025*

2.1.3.4. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

2.1.3.4.1. Indeks Infrastruktur Daerah

Indeks Infrastruktur Daerah adalah indikator untuk mengukur kinerja kualitas infrastruktur daerah yang terdiri dari indeks infrastruktur pekerjaan umum dan *Level of Service (LoS)*. Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum merupakan ukuran kinerja infrastruktur pekerjaan umum yang meliputi infrastruktur bina marga (jaringan jalan, jembatan dan trotoar), infrastruktur sumber daya air (jaringan irigasi dan sumber mata air), dan infrastruktur cipta karya (sarana sanitasi, air minum, gedung pemerintah dan jaringan drainase). Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2020 sebesar 85,08 dan di tahun 2024 sebesar 90,46. Layanan perhubungan yang diukur dengan *LoS* juga mengalami kenaikan dari tahun 2020 dengan 0,4778 (C) menjadi 0,283

(B) di tahun 2024. Di mana semakin kecil nialinya maka kinerja layanan perhubungan semakin baik.

Tabel 2.35
Indeks Infrastruktur Daerah Kota Blitar
Tahun 2020 – 2024

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Infrastruktur Daerah	59,62	62,23	61,10	61,69	63,41
1.1.	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	85,08	88,69	87,08	88,02	90,46
1.2.	Level Of Service	C v/c rasio 0,4778	C v/c rasio 0,4778	C v/c rasio 0,4778	B v/c rasio 0,2595	B v/c rasio 0,283

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Dinas Perhubungan Kota Blitar, 2025

Selain kinerja tersebut, kualitas infrastruktur di Kota Blitar juga ditandai oleh penyelenggaraan jalan yang relatif baik dengan tingkat kemantapan jalan kota yang tinggi, meskipun masih terdapat beberapa ruas yang memerlukan perbaikan dan pemeliharaan rutin. Pemerintah Kota Blitar secara bertahap melakukan rehabilitasi dan peningkatan kualitas jalan, termasuk pembangunan saluran drainase pendukung untuk mengurangi genangan air saat musim hujan. Upaya ini juga dibarengi dengan pengaturan lalu lintas dan perbaikan sarana penunjang seperti rambu, marka jalan, serta penerangan jalan umum guna meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan.

Kondisi jalan dari tahun 2020 sampai tahun 2024 bisa dilihat pada tabel berikut;

Tabel 2.36
Kondisi Jalan Tahun 2020 – 2024

No	Kondisi Jalan	2020		2021		2022		2023		2024	
		km	%	km	%	km	%	km	%	km	%
1	Baik	204,949	77,6	190,454	72,2	156,212	59,2	228,637	91,0	113,2	45,06
2	Sedang	55,595	21,1	64,463	24,4	102,015	38,6	17,623	7,0	118,89	47,30
3	Rusak	3,423	1,3	9,050	3,4	5,740	2,2	5,040	2,0	19,21	7,64
Total		263,967	100	263,967	100	263,967	100	251,300	100	251,03	100

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar, 2025

Tabel 2.37
Kondisi Kemantapan Jalan
Tahun 2020 – 2024

No	Kondisi	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Kemantapan Jalan	98,7	96,6	97,8	98,0	92,47

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar, 2025

Perubahan panjang jalan disebabkan ada perubahan Surat Keputusan Walikota Blitar tahun 2017 dari 263,967

km, diubah dengan Surat Keputusan Walikota Blitar tahun 2024 menjadi 251,300 km dengan mengeluarkan jalan nasional dan jalan provinsi. Sehingga untuk selanjutnya daerah hanya mencatat jalan kota sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.

Kualitas penyelenggaraan urusan infrastruktur juga didukung dengan peningkatan kualitas perhubungan yang ditunjang oleh sarana dan prasarana perhubungan. Adapun data perlengkapan jalan di Kota Blitar disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.38
Data Perlengkapan Jalan Tahun 2020 – 2024

No	Jenis Perlengkapan Jalan	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Penerangan Jalan Umum	Unit	5.590	5.864	5.994	6.041	6.096
2	Rambu Lalu Lintas	Unit	2.727	2.987	2.996	3.004	3.004
3	Traffic Light & Ptcl	Unit	29	29	29	32	32
4	Warning Light	Unit	72	84	89	90	90
5	Cctv	Unit	22	23	23	23	23
6	Marka Jalan	Unit	123.755	123.755	123.755	123.755	123.755
7	Cermin Tikungan	Unit	47	60	60	67	70
8	Guarddrill	Unit		275	275	275	275
9	Deliniator	Unit	175	175	175	175	175
10	Paku Marka	Unit	995	995	1.345	1.345	1.345

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Blitar, 2025

2.1.3.4.2. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan

Rumah tangga berpenghasilan rendah di Indonesia kini makin dibantu dalam mendapatkan hunian yang layak dan terjangkau melalui berbagai program nasional seperti Program Sejuta Rumah, BSPS, SSB, dan inisiatif kolaboratif seperti NAHP dengan Bank Dunia untuk mendukung hunian hijau dan tahan gempa. Di tingkat daerah, Kota Blitar aktif memberikan stimulan rumah layak huni, termasuk perbaikan, maupun pembangunan melalui prinsip gotong royong antara pemerintah dan masyarakat.

Tabel 2.39
Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	78,70	80,19	81,89	83,26	79,03

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar, 2025

Akses hunian layak adalah hunian yang memenuhi persyaratan rumah layak huni berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang No. 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat, hunian terjangkau dihitung dari *backlog* kepemilikan dan hunian, sedangkan hunian berkelanjutan adalah hunian yang terpenuhi PSU berdasarkan peraturan daerah tentang perumahan dan kawasan permukiman Kota Blitar.

Selama tahun 2020 sampai dengan 2023 persentase persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat telah menempati hunian yang memenuhi standar kelayakan, seperti struktur bangunan yang kokoh, akses terhadap air bersih, sanitasi yang memadai, serta biaya hunian yang proporsional dengan pendapatan. Pemerintah Kota Blitar terus mendorong peningkatan kualitas permukiman melalui program bantuan stimulan perumahan, perbaikan rumah tidak layak huni, serta penyediaan infrastruktur dasar. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan permukiman yang sehat, aman, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi rumah tangga berpenghasilan rendah.

2.1.3.5. Stabilitas Ekonomi Makro

2.1.3.5.1. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

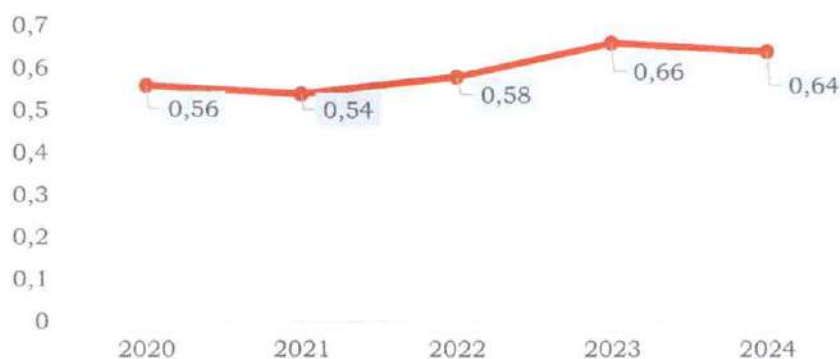
Pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang paling potensial dalam memperbesar porsi PAD. Pajak memainkan peran yang penting dalam proses untuk menghasilkan penerimaan dan untuk menjalankan berbagai aktivitas dalam perekonomian. Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan di wilayah tersebut kepada pemerintah daerah tanpa adanya imbalan langsung yang seimbang yang sifatnya dapat dipaksakan berdasarkan aturan perundangan yang berlaku.

Rasio pajak daerah terhadap PDRB adalah perbandingan antara penerimaan pajak daerah dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah. Rasio ini digunakan untuk mengukur kontribusi pajak daerah terhadap PDRB. Rasio pajak daerah yang tinggi menunjukkan kemampuan pemerintah dalam memungut pajak dari aktivitas ekonomi. Rasio pajak daerah yang tinggi juga dapat meningkatkan kondisi ekonomi karena pajak yang dikumpulkan lebih banyak.

Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kota Blitar dalam 5 (lima) tahun terakhir berada di kisaran 0,54%-0,66%. Angka ini lebih kecil apabila dibandingkan dengan Rasio Pajak Daerah Indonesia 2020-2022 yang berkisar 1,2%-1,3%. Namun apabila dibandingkan dengan rata-rata Rasio Pajak Daerah kabupaten/kota lain di Jawa Timur 2020-2022, Rasio Pajak Daerah Kota Blitar masih berada di atas rata-

rata di mana rata-rata Rasio Pajak Daerah kabupaten/kota lain di Jawa Timur 2020-2022 berada di 0,29%-0,32%.

Salah satu cara meningkatkan rasio pajak daerah adalah menaikkan tarif, namun Pemerintah Kota Blitar masih memperhatikan dampaknya terhadap kondisi ekonomi, kebijakan yang diambil harus bersifat jangka panjang, bukan untuk mengejar target penerimaan dalam jangka pendek.



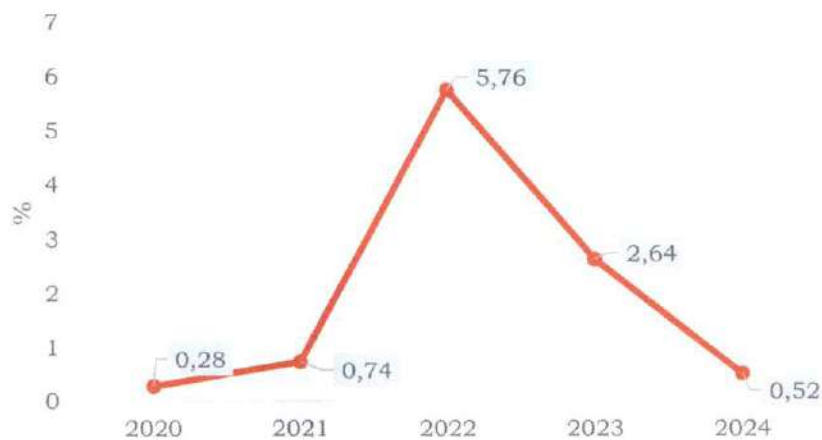
Sumber: *Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah, 2025*

Gambar 2.46

Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kota Blitar 2020-2024

2.1.3.5.2. Tingkat Inflasi

Tingkat inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum, dimana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat atau turunnya daya jual mata uang suatu negara. Dampak inflasi adalah menurunnya kesejahteraan masyarakat, tidak stabilnya perekonomian, timbulnya keresahan masyarakat, biaya hidup semakin meningkat. Selain itu inflasi juga berdampak pada daya beli masyarakat. Semakin tinggi inflasi semakin rendah nilai uang dan semakin rendah daya belinya. Tingkat inflasi Kota Blitar pada akhir tahun 2024 mencapai 0,52% (persen). Angka ini masih jauh dibawah tingkat inflasi Indonesia yang sebesar 1,57% (persen) dan tingkat inflasi Jawa Timur 1,51% (persen).



Sumber: *Badan Pusat Statistik, 2025*

Gambar 2.47

Tingkat Inflasi Kota Blitar 2020-2024

2.1.3.5.3. Persentase Peningkatan Investasi

Sebagai salah satu indikator penting dalam mengukur pertumbuhan ekonomi daerah, perkembangan investasi perlu diamati secara berkala. Kota Blitar, dalam 5 (lima) tahun terakhir, mengalami dinamika yang cukup signifikan dalam hal pertumbuhan investasi. Adapun data investasi di Kota Blitar dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.40
Persentase Peningkatan Investasi Kota Blitar
Tahun 2020-2024

No	Indikator kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Realisasi Investasi (Triliyun Rupiah)	0,1671	0,25846	0,34522	0,38506	0,43273
2	Persentase peningkatan investasi	-37,15	54,67	33,57	11,54	12,38

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP, 2025

Dalam 5 (lima) tahun terakhir, pertumbuhan investasi di Kota Blitar menunjukkan pola yang fluktuatif dengan tren menurun setelah sempat melonjak tajam. Pada tahun 2020, investasi mengalami penurunan signifikan sebesar -37,15% (persen) yang kemungkinan besar disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19. Namun, tahun 2021 mencatat lonjakan pertumbuhan investasi hingga 54,67% (persen), menandakan adanya pemulihan ekonomi yang cukup kuat. Tren ini tidak bertahan lama, karena pada tahun 2022 pertumbuhan investasi menurun menjadi 33,57% (persen), dan kembali turun drastis menjadi 11,54% (persen) pada 2023. Meskipun pada 2024 terjadi sedikit peningkatan menjadi 12,38% (persen), laju pertumbuhannya sangat kecil, yaitu hanya sebesar 0,84% (persen) dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa setelah masa pemulihan, pertumbuhan investasi di Kota Blitar cenderung melambat dan mendekati stagnan. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih agresif dari pemerintah daerah dalam menarik investor.

Fluktuasi investasi di Kota Blitar dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu :

1. Faktor Kebijakan

- Kekuatan
 - a. Kebijakan implementasi OSS-RBA dalam pengurusan izin usaha lebih memudahkan proses perizinan pelaku usaha;
 - b. Peran aktif DPMPSTSP dalam memberikan pendampingan kepada pelaku usaha dalam pengurusan izin usaha dan pelaporan LKPM;
 - c. Keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang mempermudah Masyarakat dalam mengurus keperluan dokumen usahanya.

- Kelemahan
 - a. Tingkat kepatuhan legalitas pelaku usaha khususnya UMKM masih rendah;
 - b. Tingkat pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha mengenai pelaporan LKPM masih rendah, sehingga mengakibatkan data realisasi investasi masih kurang secara statistik, dibandingkan dengan aktivitas ekonomi yang sebenarnya;
 - c. Belum adanya kebijakan daerah mengenai insentif dan kemudahan penanaman modal.
2. Faktor Ekonomi
- Kekuatan
 - a. Inflasi terkendali dan daya beli masyarakat masih stabil;
 - b. Kontribusi investasi yang berasal dari usaha kecil mengalami kenaikan, khususnya pada sektor perdagangan dan pariwisata;
 - c. Koperasi, BPR dan program kredit UMKM dari perbankan masih hadir dalam membantu modal usaha pelaku usaha.
 - Kelemahan
 - a. Wilayah kota yang kecil mengakibatkan keterbatasan pasar dan nilai perekonomian yang kecil juga sehingga terkadang menjadi faktor kurang menariknya Kota Blitar bagi investor besar;
 - b. Belum berkembangnya sektor industri di Kota Blitar karena keterbatasan lahan;
 - c. Fluktuasi harga bahan baku, bahan bakar dan bahan lainnya berpengaruh terhadap proses produksi pelaku usaha yang ada.
3. Faktor Daya Tarik
- Kelebihan
 - a. Potensi disektor pariwisata Kota Blitar masih banyak yang bisa dikembangkan;
 - b. Dukungan pemerintah terhadap produk-produk lokal kota Blitar, menimbulkan daya saing yang kompetitif di pasar nasional dan internasional.
 - Kelemahan
 - a. Kegiatan promosi investasi yang masih minim dilakukan;
 - b. Kawasan tematik yang dapat menarik perhatian masyarakat/calon investor belum dikembangkan secara khusus dan terorganisir;
 - c. Keterbatasan lahan di wilayah Kota Blitar, menjadi faktor sulitnya mengembangkan sektor usaha di Kota Blitar lebih besar lagi.

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil dan inklusif, Kota Blitar perlu menerapkan strategi investasi berkelanjutan yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan nilai investasi, tetapi juga memperhatikan

aspek lingkungan, sosial, dan tata Kelola. Adapun strategi tersebut yaitu :

- Diversifikasi Sektor :
 - Melakukan identifikasi dan kajian kembali untuk menemukan peluang sektor unggulan terbaru yang bisa dikembangkan untuk investasi;
 - Mengembangkan sektor pariwisata yang sekarang sudah dimiliki agar lebih besar lagi seperti pengembangan agrowisata, industry kreatif;
 - Pengembangan kawasan tematik investasi;
 - Berkolaborasi dengan daerah lain untuk turut saling mendukung pengembangan investasi daerah.
- Kemudahan izin
 - Penciptaan inovasi terbaru yang lebih efektif dan efisien dalam membantu Masyarakat mengurus izin usaha mereka;
 - Melakukan penguatan layanan di Mal Pelayanan Publik Kota Blitar;
 - Lebih aktif dalam pendampingan pengurusan izin usaha;
 - Melakukan digitalisasi dan integrasi layanan perizinan yang masih dilakukan secara manual;
 - Melakukan perbaikan kebijakan, SOP dan SP agar lebih ringkas sesuai dengan perkembangan izin yang ada.
- Insentif
 - Penerbitan kebijakan daerah mengenai pemberian insentif dan kemudahan berusaha;
 - Perbantuan dalam promosi produk investasi secara digital maupun konvensional;
 - Melakukan fasilitasi kerjasama antara investor besar dan pelaku usaha mikro kecil.
- Promosi Aktif
 - Melakukan *update* secara berkala peta potensi investasi Kota Blitar;
 - Secara aktif melakukan promosi melalui media sosial dinas maupun pemerintah kota;
 - Menyelenggarakan dan mengikuti forum / expo investasi;
 - Melakukan kemitraan dengan pelaku media lokal Kota Blitar untuk publikasi yang lebih luas;
 - Memasukan data potensi kota Blitar di Peta Potensi yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Investasi / BKPM.

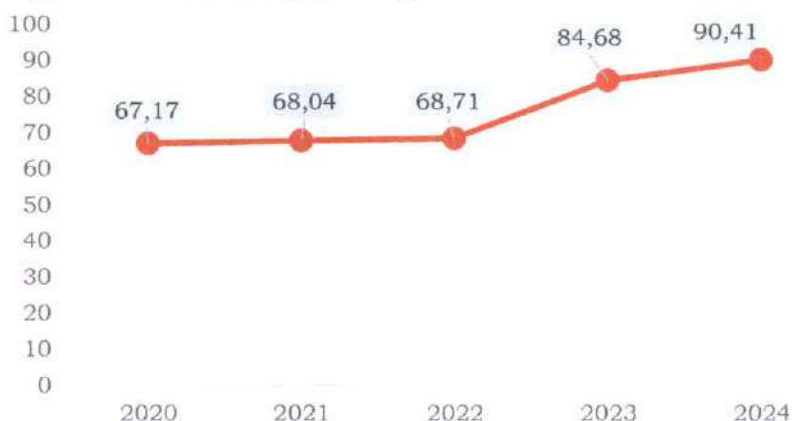
2.1.4. Aspek Pelayanan Umum

2.1.4.1. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

2.1.4.1.1. Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana perbaikan tata statistik kelola pemerintahan telah

dilaksanakan oleh instansi pemerintah, yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Semakin tinggi nilai Indeks Reformasi Birokrasi, maka semakin efektif dan efisien pengelolaan tata pemerintahan, bersih dari KKN dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Kota Blitar selama periode 2020–2024 menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan dalam hal reformasi birokrasi sebagaimana tertuang pada grafik berikut.



Sumber: Sekretariat Daerah, 2025

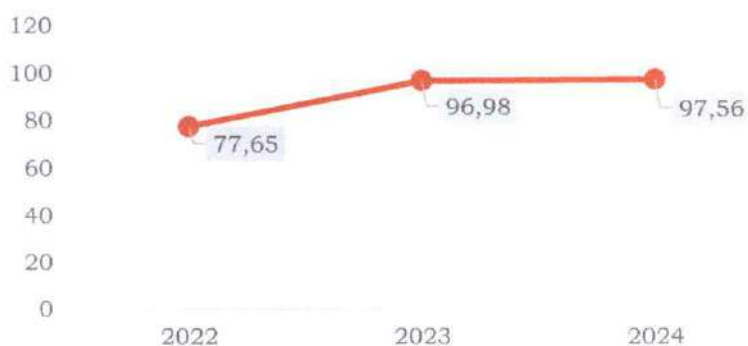
Gambar 2.48

Indeks Reformasi Birokrasi Kota Blitar 2020-2024

Secara keseluruhan, Kota Blitar berhasil melakukan transformasi signifikan dalam reformasi birokrasi dalam lima tahun terakhir. Ini menunjukkan bahwa dengan komitmen yang kuat dan strategi yang tepat, pembenahan birokrasi bisa berjalan lebih cepat dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

2.1.4.1.2. Indeks Reformasi Hukum

Reformasi Hukum adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang hukum dalam upaya penataan regulasi yang berkualitas bersih dan akuntabel pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Indeks Reformasi Hukum adalah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan dan penguatan sistem regulasi nasional.



Sumber: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2025

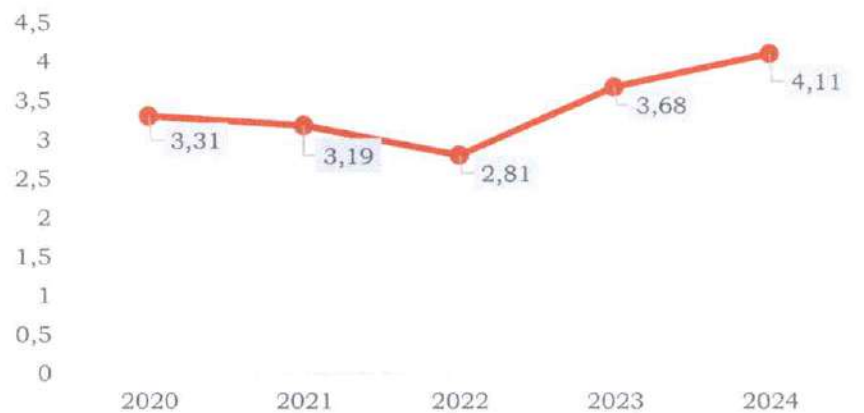
Gambar 2.49

Indeks Reformasi Hukum Kota Blitar 2022-2024

Capaian Indeks Reformasi Hukum Kota Blitar tahun 2023 meningkat 19,33 persen jika dibandingkan dengan tahun 2022. Hal ini disebabkan pada tahun 2023 telah terbangun aplikasi JDIH yang terintegrasi dengan portal JDIHN dan meningkatnya keterlibatan pejabat fungsional analis hukum dalam melakukan evaluasi produk hukum di daerah.

2.1.4.1.3. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan nilai pelaksanaan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE (Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE).



Sumber: Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik, 2025

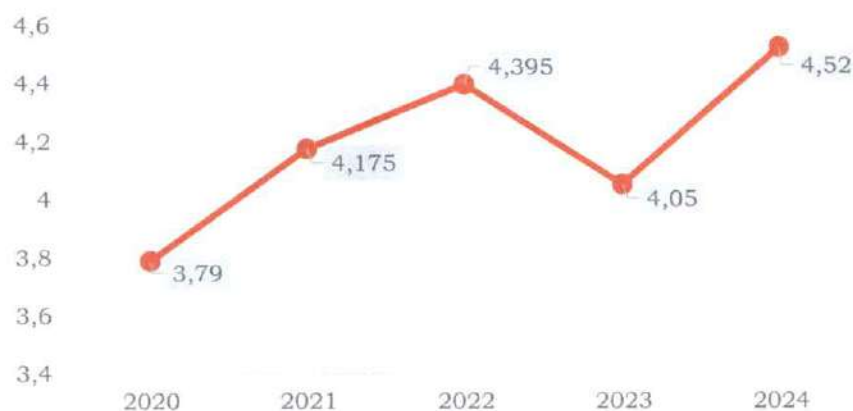
Gambar 2.50

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Blitar 2020-2024

Pemerintah Kota Blitar berhasil menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik dengan meraih predikat “Sangat Baik” dalam Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2024. Indeks SPBE Pemerintah Kota Blitar mencapai 4,11 sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) Republik Indonesia No. 663 Tahun 2024 terkait Hasil Evaluasi SPBE pada Instansi Pusat dan Daerah yang diterbitkan pada 31 Desember 2024. Capaian ini menandakan bahwa tingkat pemanfaatan teknologi informasi oleh instansi pemerintah semakin baik, proses administrasi dan pelayanan publik menjadi lebih efisien, transparan dan akuntabel serta kualitas layanan publik meningkat, misalnya lebih cepat, mudah diakses secara *online* dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

2.1.4.1.4. Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik (IPP) merupakan indikator untuk mengukur kinerja pelayanan publik di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Terdapat 6 (enam) aspek yang menjadi dasar penilaian berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017. Enam aspek tersebut adalah kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi pelayanan publik dengan kategori terdiri dari A, A-, B, B-, C, C-, D, E, dan F.



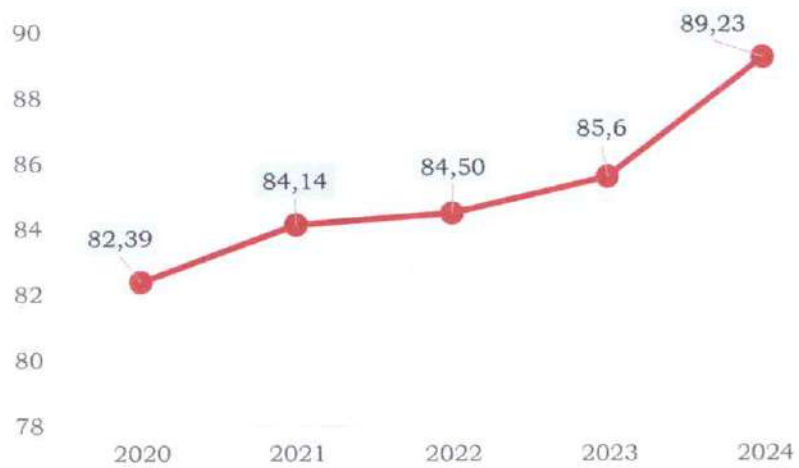
Sumber: *Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2025*

Gambar 2.51
Indeks Pelayanan Publik Kota Blitar 2020-2024

Capaian IPP Kota Blitar tahun 2024 yaitu 4,52 dengan kategori Pelayanan Prima (A) di mana kategori tersebut merupakan kategori terbaik. Dengan capaian kategori A tersebut, Kota Blitar dinilai sangat prima dalam menerapkan seluruh aspek dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.1.4.1.5. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah. Nilai IKM yang tinggi mencerminkan kepuasan masyarakat yang baik terhadap layanan publik, sementara nilai yang rendah menunjukkan perlunya perbaikan sistem pelayanan.



Sumber: Sekretariat Daerah Kota Blitar, 2025

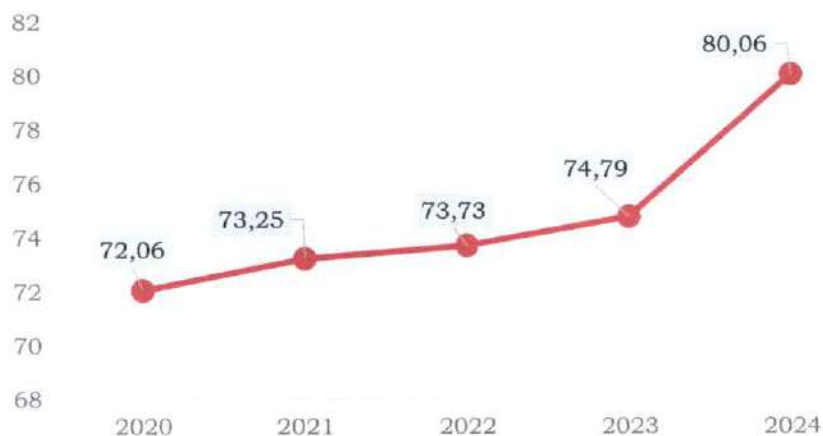
Gambar 2.52

Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Blitar 2020-2024

Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kota Blitar diperoleh dari hasil survei IKM/SKM pada tahun berkenaan, dimana capaian pada tahun 2024 termasuk kategori Sangat Berhasil. Berdasarkan data capaian tahun 2020 hingga 2024, IKM Kota Blitar menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, mencerminkan adanya komitmen dari Pemerintah Kota Blitar dalam meningkatkan mutu layanan publik secara berkelanjutan.

2.1.4.1.6. Nilai SAKIP

Pencapaian Nilai SAKIP Kota Blitar diperoleh dari hasil evaluasi atas implementasi SAKIP oleh evaluator Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun berkenaan. Tujuan dari evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilaksanakan dalam rangka mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil.



Sumber : Sekretariat Daerah Kota Blitar, 2025

Gambar 2.53

Nilai SAKIP Kota Blitar Tahun 2020 - 2024

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Blitar tahun 2024 mendapatkan nilai sebesar 80,06 dengan predikat A. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja adalah “memuaskan”, yaitu instansi pemerintah dan unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.

2.1.4.1.7. Opini BPK atas LKPD

WTP atau Wajar Tanpa Pengecualian (*unqualified opinion*) adalah predikat tertinggi yang diberikan oleh auditor eksternal, dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan, terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah. Predikat ini diberikan bilamana penyajian laporan keuangan sudah dilakukan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku (SAP).

Tabel 2.41

Opini BPK atas LKPD Kota Blitar Tahun 2020 - 2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Opini BPK atas LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : Inspektorat Daerah Kota Blitar, 2025

Pemerintah Kota Blitar telah memperoleh Opini WTP atas LKPD sejak tahun 2010 secara berturut-turut dan menjadi satu-satunya Pemerintah Daerah di Jawa Timur yang mendapatkan predikat tersebut sebanyak 14 kali berturut-turut. Hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Kota Blitar sejak tahun 2010 secara konsisten menerapkan tata kelola keuangan yang baik, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dokumen anggaran, pengawasan dan pertanggungjawabannya.

2.1.4.1.8. Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah

Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai kualitas perencanaan pembangunan di tingkat daerah, termasuk kualitas pengendalian dan evaluasi. IPPD mengukur sejauh mana suatu daerah telah menyusun dan melaksanakan rencana pembangunan secara efektif dan efisien.

Tabel 2.42

Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar Tahun 2022 - 2024

No.	Indikator	2022	2023	2024
1.	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	97,54	91,93	99,15

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar, 2025

Secara umum, IPPD Kota Blitar berada pada kategori sangat tinggi selama tiga tahun terakhir. Ini menunjukkan bahwa proses perencanaan pembangunan daerah secara umum sudah berjalan baik, terstruktur, dan sesuai dengan kaidah perencanaan yang berlaku.

Adapun faktor pendorong tercapainya indikator kinerja tersebut antara lain :

1. Pelaksanaan program prioritas pembangunan yang berjalan sesuai visi misi kepala daerah;
2. Adanya upaya untuk melakukan reviu target kinerja pada perencanaan tahun berjalan.

Walaupun sudah melampaui target kinerja, namun terdapat permasalahan yang dihadapi yaitu :

1. Terdapat beberapa data capaian sasaran dan tujuan Perangkat Daerah pembentuk Indeks Perencanaan Pembangunan yang belum dapat disajikan, sehingga realisasi target kinerja belum dihitung secara keseluruhan;
2. Terdapat beberapa indikator sasaran Perangkat Daerah yang tingkat capaian kerjanya masih rendah seperti Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Lahan dan Indeks Ketahanan Daerah.

Dari permasalahan tersebut, rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam upaya peningkatan capaian kinerja selanjutnya adalah :

1. Melakukan koordinasi secara intensif dengan Perangkat Daerah terkait data capaian kerjanya;
2. Penguatan strategi dan program kegiatan prioritas yang mendukung percepatan pencapaian indikator sasaran Indeks Kualitas Air, Indeks kualitas lahan dan Indeks Ketahanan Daerah; dan
3. Melakukan perbaikan terhadap penetapan target dalam dokumen perencanaan tahunan maupun dalam rencana aksi setiap Perangkat Daerah dengan memastikan target yang ditetapkan telah berdasarkan capaian kinerja tahun sebelumnya, realistis dan menantang.

2.1.4.1.9. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Tingkat Maturitas (*Maturity Level*) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam bagian ini menggambarkan tingkatan atau struktur kematangan penyelenggaraan SPIP dengan karakteristik yang berbeda antara satu tingkat dengan tingkat lainnya. Adapun capaian Maturitas SPIP Kota Blitar Tahun 2020 - 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.43
Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Kota Blitar Tahun 2020 - 2024

No.	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Maturitas SPIP	Terdefinisi (3)	Terdefinisi (3)	BPKP tidak melaksanakan QA	Terdefinisi (3)	Terdefinisi (3,026)

Sumber : Inspektorat Daerah Kota Blitar, 2025

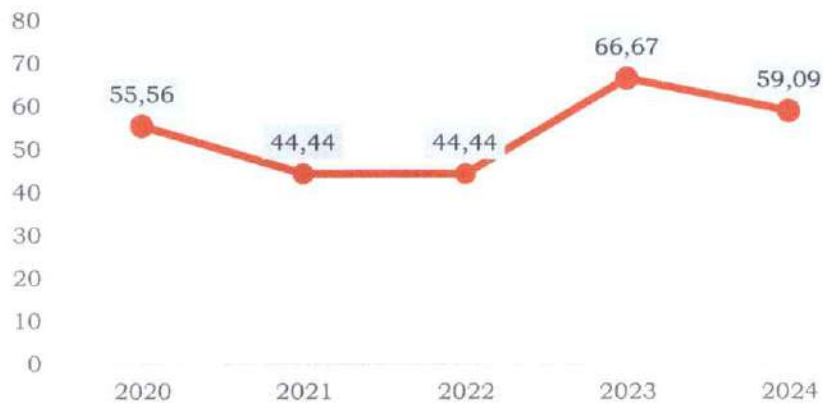
Kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP Kota Blitar Level 3. Kapabilitas APIP Level 3 mengindikasikan kemampuan APIP di lingkungan Inspektorat Kota Blitar telah sanggup melakukan penilaian tentang efisiensi, efektivitas, ekonomis terhadap suatu kegiatan, serta mampu memberikan

konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal. Sedangkan Maturitas SPIP Level 3 mengindikasikan bahwa Pemerintah Kota Blitar telah melaksanakan praktik pengendalian internal dan telah terdokumentasi dengan baik. Sebagai bentuk pengendalian intern, Pemerintah Kota Blitar telah menetapkan Pedoman Pengelolaan Risiko melalui Peraturan Walikota Blitar Nomor 63 Tahun 2021. Berdasarkan pedoman pengelolaan risiko diharapkan unit pengendali risiko baik tingkat Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah maupun unit pelaksanaannya dapat mengidentifikasi, menganalisa dan mengendalikan risiko yang muncul mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dokumen anggaran, pengawasan dan pertanggungjawabannya.

2.1.4.2. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

2.1.4.2.1. Persentase Penegakan Perda dan Perkada

Penegakan Perda dan Perkada adalah aspek penting dalam memastikan bahwa kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah daerah dapat berjalan efektif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Capaian persentase penegakan perda di Kota Blitar menunjukkan seberapa baik Pemerintah Kota Blitar dalam menegakkan aturan dan memastikan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang telah ditetapkan. Berikut adalah realisasi persentase penegakan Perda di Kota Blitar selama lima tahun terakhir.



Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar, 2025

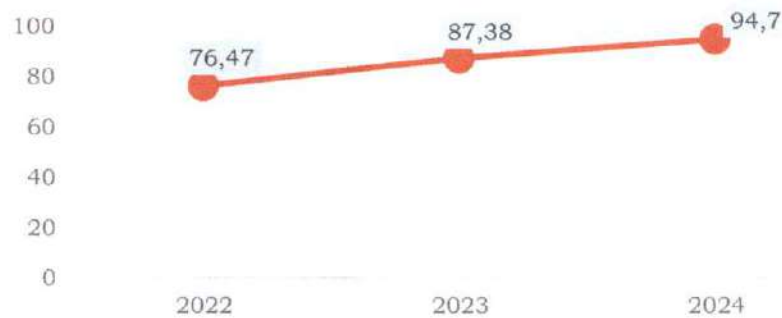
Gambar 2.54
Persentase Penegakan Perda dan Perkada
Tahun 2020 - 2024

Pada tahun 2024 capaian penegakan Perda dan Perkada mencapai 59,09% (persen). Peningkatan kinerja terhadap penegakan Perda dan Perkada dilaksanakan melalui evaluasi dan penyesuaian kebijakan dalam rangka mengatasi masalah yang menghambat penegakan Perda dan Perkada pada tahun sebelumnya. Pemerintah melalui perangkat daerah terkait terus berusaha memperbaiki dan mengoptimalkan penegakan Perda dan Perkada dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih

baik. Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kinerja ke depannya, diperlukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan koordinasi dengan *stakeholder* terkait dalam penegakan Perda/Perkada serta penguatan sosialisasi kepada masyarakat.

2.1.4.2.2. Persentase Capaian Aksi HAM

Capaian Aksi Hak Asasi Manusia (HAM) di Kota Blitar mengalami peningkatan yang signifikan selama tiga tahun terakhir. Peningkatan persentase capaian aksi HAM di Kota Blitar dari 76,47% (persen) pada tahun 2022 menjadi 94,7% (persen) pada tahun 2024 menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Blitar dalam mengimplementasikan aksi HAM secara progresif.



Sumber : Kementerian Hukum dan HAM, 2025

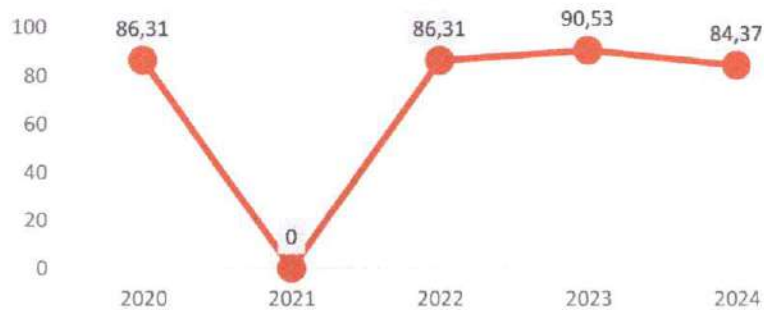
Gambar 2.55

Persentase Capaian Aksi HAM Tahun 2022 - 2024

Realisasi persentase capaian aksi HAM tahun 2024 yang mencapai 94,7% (persen), dengan peningkatan sebesar 7,32 poin dari tahun 2023 menunjukkan bahwa Kota Blitar hampir memenuhi seluruh target aksi HAM yang direncanakan. Keberhasilan ini perlu dipertahankan dengan terus memperkuat kebijakan, kolaborasi dan sosialisasi agar implementasi HAM semakin optimal dan merata di seluruh aspek kehidupan masyarakat.

2.1.4.2.3. Indeks Demokrasi Indonesia

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Indikator ini didapatkan melalui kompilasi berbagai fenomena terkait demokrasi yang terjadi di suatu daerah.



Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar, 2025

Gambar 2.56

IDI Kota Blitar Tahun 2020 - 2024

Berdasarkan data di atas, diperoleh informasi bahwa pada tahun 2021 capaian IDI Kota Blitar yaitu 0 (nol). Kondisi tersebut karena adanya kebijakan baru yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri Nomor 200/2202/SJ tentang Penyesuaian Pokja IDI Provinsi dan Sosialisasi IDI Metode terbaru. Adanya aturan tersebut membuat penilaian IDI di daerah ditarik oleh Provinsi, sehingga pada tahun 2021 Kota Blitar tidak melakukan penilaian IDI. Sedangkan pada tahun 2023 capaian IDI Daerah Kota Blitar mengalami kenaikan 4,22 poin jika dibandingkan tahun 2022 menjadi 90,53.

Adapun kebijakan dan strategi Pemerintah Kota Blitar dalam mempertahankan ketercapaian Indeks Demokrasi Indonesia yaitu tingginya komitmen pemerintah untuk menjaga proses pemilu dan pluralisme, menjaga nilai-nilai demokrasi, partisipasi politik masyarakat, budaya politik masyarakat dan kebebasan sipil. Selain itu pemerintah juga melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat untuk menumbuhkan atau membiasakan untuk berbeda pendapat dan saling menerima serta tenggang rasa.

2.1.4.2.4. Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) merupakan satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola penyelenggaraan trantibum yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam periode tertentu. Urgensi dari IPKKU adalah untuk melihat dan memastikan secara utuh apakah pengelolaan maupun pemberdayaan Satpol PP dalam membantu penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dari level provinsi sampai kabupaten/kota telah mendapatkan dukungan kebijakan, dukungan program maupun dukungan lainnya.

Tabel 2.44

Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kota Blitar Tahun 2023 - 2024

No	Indikator	2023	2024
1	Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	98,52

Sumber : Kementerian Dalam Negeri, 2025

Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kota Blitar mengalami penurunan dari 100 pada tahun 2023 menjadi 98,52 pada tahun 2024. Penurunan IPKKU dipengaruhi oleh melemahnya penegakan Peraturan Daerah (Perda), penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, dan sistem akuntabilitas. Jika tidak segera diperbaiki, kondisi ini bisa berdampak pada meningkatnya gangguan ketertiban serta berkurangnya rasa aman masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu segera melakukan langkah-langkah strategis, mulai dari

peningkatan efektivitas penegakan Perda, optimalisasi sistem pemantauan ketertiban, serta memperbaiki akuntabilitas pengelolaan ketentraman dan ketertiban umum secara menyeluruh.

2.1.4.2.5. Indeks Rasa Aman

Indeks Rasa Aman adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat keamanan yang dirasakan oleh masyarakat dalam suatu wilayah. Indeks ini mencakup berbagai aspek, seperti keamanan dari kejahatan, bencana alam, serta stabilitas sosial dan politik. Tujuan utama dari pengukuran ini adalah untuk memahami persepsi masyarakat terhadap kondisi keamanan di lingkungan mereka, yang selanjutnya dapat menjadi dasar bagi pemerintah dan pihak terkait dalam merumuskan kebijakan dan strategi peningkatan keamanan.

Pengukuran Indeks Rasa Aman biasanya dilakukan melalui survei yang melibatkan berbagai variabel, antara lain Keamanan dari Kejahatan, Keamanan dari Bencana Alam, Kesejahteraan Sosial, Perlindungan atas Kebhinekaan. Pengukuran atas Indeks Rasa Aman pada tahun 2024 sebesar 76,6.

2.1.4.2.6. Angka Partisipasi Masyarakat dalam Proses Politik

Pada Pemilu serentak 14 Februari 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Blitar mencatat tingkat partisipasi pemilih yang sangat tinggi, mencapai 85,14 persen dari total daftar pemilih (DPT, DPTb, dan DPK) sejumlah 120.742 orang, atau sekitar 102.832 pemilih yang menggunakan hak suaranya.

Hal ini merupakan angka partisipasi tertinggi di Kota Blitar sejak Pemilu langsung pertama pada tahun 2004. Keberhasilan ini didorong oleh sosialisasi intensif dari KPU yang menargetkan kalangan Gen Z dan milenial, serta pemilihan petugas KPPS dari rentang usia produktif (17-55 tahun). Secara keseluruhan, Pemilu 2024 di Kota Blitar berlangsung dengan tingkat kehadiran pemilih yang tinggi, menunjukkan tingginya kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.

2.1.4.3. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

2.1.4.3.1. Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah. IDSD terdiri dari empat komponen pembentuk daya saing yaitu lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar dan ekosistem inovasi. Keempat komponen tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam 12 pilar daya saing.

Tabel 2.45
Indeks Daya Saing Daerah Kota Blitar Tahun 2022 - 2024

No	Indikator	2022	2023	2024
1	Indeks Daya Saing Daerah	3,42	3,84	4,05

Sumber : *Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2025*

Nilai IDSD Kota Blitar menunjukkan tren positif dan konsisten meningkat selama tiga tahun terakhir, dari 3,42 pada tahun 2022 menjadi 4,05 pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan adanya perbaikan dari berbagai sektor termasuk infrastruktur, sumber daya manusia, ekonomi dan inovasi. Dengan langkah-langkah strategis dan kolaborasi yang baik dengan stakeholder terkait, Kota Blitar memiliki potensi untuk terus meningkatkan daya saingnya untuk menjadi kota yang maju dan kompetitif.

2.1.5. Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Blitar Tahun 2020-2024

Tabel 2.46
Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Blitar Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	KINERJA TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
I	ASPEK DAYA SAING DAERAH						
1	Indeks Harmoni Indonesia	Indeks	Survei dilakukan pada tahun 2025				
2	Indeks Kota Layak Huni	Indeks	Data belum pernah dirilis				
3	Tingkat Inflasi	%	0,28	0,74	5,76	2,64	0,52
4	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	Belum dilaksanakan perhitungan				80,00
5	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	%	-37,15	54,67	33,57	11,54	12,38
6	ICOR (Incremental Capital Output Ratio)	Rasio	Data belum pernah dirilis				3,51
7	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	23,55	24,16	25,11	25,03	24,69
8	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	5,05	5,29	5,48	5,71	5,89
9	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	9,75	10,02	10,10	9,86	9,91
10	Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PDRB)	%	20,08	19,50	19,75	19,54	19,24
11	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	69,53	69,96	67,78	72,26	70,44
12	Indeks Inovasi Daerah	Angka	NA	53,21	56,88	50,83	48,04
13	Proporsi Jumlah Usaha Mikro	%	Data belum pernah dirilis				8,04
14	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	%	NA	NA	NA	NA	93,29

2

NO	INDIKATOR	SATUAN	KINERJA TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
15	Proporsi Penyerapan Tenaga Kerja di Sektor Formal	%	37,64	37,65	38,22	38,80	38,04
16	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	Data belum pernah dirilis				2,90
17	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	NA	NA	3,42	3,84	4,05
18	Persentase pemanfaatan digital pada sektor ekonomi	%	Data belum pernah dirilis				9,88
19	Angka Partisipasi Masyarakat dalam Proses Politik	%	Tidak dilaksanakan Pemilu/Pilkada				85,14
20	Angka Ketergantungan	%	45,62	43,81	40,17	41,64	40,72
21	Return On Asset (ROA) BUMD	%	0,56	0,54	0,58	NA	-0,045
22	Ekspor Barang dan Jasa	% PDRB	-12,14	-9,80	-7,69	-6,58	-4,91
23	Realisasi investasi (Triliun Rupiah)	triliun rupiah	0,1671	0,25846	0,34522	0,38506	0,43273
24	Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	NA	NA	6,66	6,17	6,46
25	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,56	0,54	0,58	0,66	0,64
II	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI						
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	66,52	61,75	64,15	67,58	64,94
2	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kumulatif	TON CO2 EQ	NA	7.607,37	176.604,99	593.725,15	650.775,49
3	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Angka	106,73	108,28	110,10	109,04	71,51
4	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	73,38	68,69	74,57	79,25	80,80
5	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	92,10	97,69	97,73	97,78	98,01
6	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,49	0,31	0,4	0,43	0,47
7	Indeks Kualitas Udara	Indeks	82,63	83,76	85,9	85,83	89,79

NO	INDIKATOR	SATUAN	KINERJA TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
8	Indeks Kualitas Air	Indeks	56,32	51,58	59,73	67,78	56,11
9	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	54,23	38,52	31,5	33,51	34,13
10	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	%	5,44	6,25	7,21	6,11	5,42
11	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,26	-0,04	0,20	0,77	0,45
12	Rasio Penduduk	%	100,53	99,24	99,18	99,40	99,00
13	Kepadatan Penduduk	Orang/km ²	4861	4859	4868	4813	4835
14	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	NA	NA	NA	NA	14,00
15	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	%	10,94	11,10	11,18	11,42	11,99
16	Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	88,4	88,6	89,0	90,0	90,5
17	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	6,45	6,55	7,15	8,21	8,45
18	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Indeks	Data belum pernah dirilis				71,90
III	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	-2,28	4,28	5,22	5,29	5,33
2	Tingkat Kemiskinan	%	7,78	7,89	7,37	7,30	6,75
3	Rasio Gini	Indeks	0,344	0,37	0,381	0,397	0,353
4	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	78,88	79,27	80,15	80,78	81,44
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,68	6,61	5,39	5,24	5,11

NO	INDIKATOR	SATUAN	KINERJA TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
6	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	97,46	97,36	97,37	97,49	97,49
7	Usia Harapan Hidup (UHH)	tahun	74,39	74,46	74,71	74,97	75,20
8	PDRB Per Kapita	Juta Rupiah	45,09	47,33	51,59	55,52	59,33
9	Indeks Pelestarian Budaya	Indeks	Data belum pernah dirilis				
10	Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat	Indeks	Perhitungan dilaksanakan pada tahun 2018 dengan capaian 0,699				
11	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	Data SSGI belum rilis	12,9	12,8	17,7	11,4
12	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	Perhitungan dilaksanakan mulai tahun 2025				62,23
13	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,32	14,33	14,56	14,57	14,81
14	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	10,11	10,35	10,65	10,78	10,82
15	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	Nilai	NA	62,92	64,49	71,94	70,33
16	Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	NA	74,12	77,77	84,03	85,77
17	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	Nilai	NA	41,67	47,04	54,19	59,00
18	Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	NA	74,12	77,77	71,07	71,24
19	Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai	Data belum pernah dirilis				59,67
20	Indeks Pembangunan Olahraga	Indeks	Data belum pernah dirilis				
21	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	NA	64,53	72,83	70,57	70,57

2

NO	INDIKATOR	SATUAN	KINERJA TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
22	Angka kematian ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	Angka	230,28	803,78	172,31	47,68	173,99
23	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun	tahun	9,75	10,98	10,95	10,80	10,85
24	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,334	0,199	0,194	0,188	0,198
25	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	%	95,27	96,79	100	100	100
26	Indeks Zakat Nasional (IZN)	Poin	Data belum pernah dirilis				0,40
27	Angka keberhasilan pengobatan tuberculosis	%	87,3	135,2	85,7	54,4	82,61
28	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberculosis	%	46,07	4,47	12,64	60,31	73,91
29	Indeks Kerukunan Umat Beragama	%	84,38	84,88	85,15	85,49	85,49
30	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	NA	NA	NA	16,34	16,59
31	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	NA	NA	11,37	41,54	47,43
32	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	60,24	59,04	56,23	63,87	59,23
33	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	NA	NA	38,26	45,80	48,41
IV	ASPEK PELAYANAN UMUM						
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	67,17	68,04	68,71	84,68	90,41
2	Indeks Demokrasi Indonesia	%	86,31	0	86,31	90,53	84,37
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	82,39	84,14	84,50	85,60	89,23
4	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3,79	4,175	4,395	4,05	4,52

NO	INDIKATOR	SATUAN	KINERJA TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
5	Indeks Rasa Aman	Angka	Data belum pernah dirilis				
6	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	Angka	NA	NA	NA	100	98,52
7	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	78,70	80,19	81,89	83,26	79,03
8	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	Terdefinisi (3)	Terdefinisi (3)	Tidak dilaksanakan QA	Terdefinisi (3)	Terdefinisi (3,026)
9	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks	NA	NA	97,54	91,93	99,15
10	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Angka	72,06	73,25	73,73	74,79	80,06
11	Indeks Pemerintahan Digital Indonesia	Indeks	Data belum pernah dirilis				
12	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Nilai	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian
13	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	55,56	44,44	44,44	66,67	59,09
14	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	3,31	3,19	2,81	3,68	4,11
15	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	NA	NA	77,65	96,98	97,57
16	Persentase Capaian Aksi HAM	%	NA	NA	76,47	87,38	94,70
V	INDIKATOR KINERJA KUNCI						
A	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar						
a	Pendidikan						
1	Persentase warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (APS)	%	NA	81,66	95,32	86,06	83,75

NO	INDIKATOR	SATUAN	KINERJA TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
2	Persentase warga negara usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	%	NA	98,84	98,71	98,40	99,96
3	Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	%	NA	41,38	36,64	36,41	41,06
4	Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	NA	62,92	64,49	71,94	70,33
5	Rata-rata kemampuan literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	NA	74,12	77,77	84,03	85,77
6	Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	NA	41,67	47,04	54,19	59,00
7	Rata-rata kemampuan numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	NA	74,12	77,77	71,07	71,24
8	Proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	NA	93,81	90,83	83,80	82,07
9	Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1/D IV	%	NA	89,80	89,53	87,06	87,07
10	Iklm keamanan SD	Nilai	NA	74,26	78,64	79,29	81,95
11	Iklm keamanan SMP	Nilai	NA	74,26	79,73	80,63	78,26
12	Iklm kebinekaan SD	Nilai	NA	61,51	75,33	79,24	80,58
13	Iklm kebinekaan SMP	Nilai	NA	61,51	73,84	81,30	77,68
14	Iklm inklusivitas SD	Nilai	NA	55,01	61,07	60,90	65,29
15	Iklm inklusivitas SMP	Nilai	NA	55,01	64,38	69,43	68,21
b	Kesehatan						

NO	INDIKATOR	SATUAN	KINERJA TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
1	Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 kelahiran hidup	230,28	803,78	172,31	47,68	173,99
2	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	%	100	100	100	100	100
3	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	%	100	100	100	100	100
4	Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	%	100	100	100	100	100
5	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100	100	100	100	100
6	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	%	92,85	92,85	100	100	100
7	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	%	100	100	100	100	100
8	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100
9	Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	%	100	100	100	100	100
10	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	%	100	100	100	100	100
11	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	%	100	100	100	100	100
12	Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	%	100	100	100	100	100

2

NO	INDIKATOR	SATUAN	KINERJA TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
13	Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar	%	120,88	100	100	100	100
14	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita	%	Data SSGI belum rilis	12,9	12,8	17,7	11,4
c	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
1	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir kewenangan Kab/kota	%	bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026				97,84
2	Persentase Luas layanan irigasi multikomoditas kewenangan kab/kota	%	bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026				63,56
3	Persentase Kondisi irigasi kewenangan kab/kota	%	bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026				63,56
4	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	%	bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026				99,54
5	Persentase penduduk yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	%	bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026				8,45
6	Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota	%	bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026				100
7	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	%	98,7	96,6	97,8	98	92,35

NO	INDIKATOR	SATUAN	KINERJA TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
8	Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja kualifikasi operator/teknisi/analisis	%	30	82,2	100	100	100
9	Persentase Pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	%	bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026				55
10	Jumlah hari layanan penerbitan KKPR berusaha/non berusaha (sesuai kewenangan) yang terbit/dilayani Pemerintah Daerah	hari	bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026				78
11	Persentase penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kab/Kota	%	bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026				100
d	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						
1	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100	100	100	100
2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	100	100	100	100	100
3	Persentase Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	%	72,2	78,09	98,35	7,64	33,52
4	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	%	bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026				17,69

NO	INDIKATOR	SATUAN	KINERJA TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
5	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	%	bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026				100
e	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat						
1	Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas yang dilaksanakan oleh Satpol PP	%	100	100	100	100	100
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	44,44	44,44	44,44	66,67	59,09
3	Jumlah PPNS pada Satpol PP	orang	4	4	5	5	4
4	Persentase SOP yang tersedia dalam penegakan Perda dan perkada serta Penyelenggaraan Tibumtranmas	%	100	100	100	100	100
5	Persentase Jumlah Sarana prasarana minimal yang digunakan sebagai penunjang dalam penegakan perda dan perkada serta penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat	%	100	100	100	100	100
6	Persentase jumlah anggota Satpol PP yang telah mengikuti diklat dasar	%	42,86	46,67	48,84	36,21	65,63
7	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100	100	100
8	Persentase warga negara dan aparatur yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	KINERJA TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
9	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	100	100
10	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	%	bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026				0 (Tidak menyusun)
11	Persentase penanganan pra bencana	%	bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026				100
12	Persentase penanganan pasca bencana	%	bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026				0 (Tidak menyusun)
13	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	%	bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026				100
14	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100	100
f	Sosial						
1	Persentase korban bencana alam, sosial dan non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100
2	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	100	100
3	Persentase Pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar panti sesuai standar	%	bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026				100

NO	INDIKATOR	SATUAN	KINERJA TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
	Pesentase Penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi	%	bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026				13,25
	Pesentase Penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	%	bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026				100
	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	100	100
7	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026				-
8	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	100	100
9	Persentase gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	100	100
10	Jumlah pemutahiran data fakir miskin dan kelompok rentan yang dilakukan selama satu tahun	%	bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026				100
11	Persentase pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana kabupaten/kota pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar	%	bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026				100
12	Persentase Potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) perorangan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar	%	bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026				100

NO	INDIKATOR	SATUAN	KINERJA TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
	Persentase sarana prasarana bagi korban bencana kabupaten/kota yang disediakan sesuai standar	%	bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026				100
	Persentase sarana prasarana yang disediakan sesuai standar untuk pelayanan sosial di luar panti	%	bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026				100
B	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar						
a	Tenaga Kerja						
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	100	100	100	60	100
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	8,68	88,63	87,74	87,97	9,85
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp/Orang	45.179,13	10.863.609,30	23.277.195,07	25.278.788,78	25.038.520,505
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	%	1,77	100	100	43,39	21,46
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	%	66,67	92,42	89,96	82,06	51,45
b	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak						
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	97,46	97,36	97,37	97,49	97,49
2	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,334	0,199	0,194	0,188	0,198

NO	INDIKATOR	SATUAN	KINERJA TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
3	Persentase ARG Daerah	%	31,01	18,32	37,23	34,24	33,80
4	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang mendapatkan layanan komprehensif	%	bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026				100
5	Persentase perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang mendapatkan layanan komprehensif	%	bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026				100
c	Pangan						
1	Persentase Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	%	bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026				12,5
2	Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten/Kota	Nilai 0-100	bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026				88,87
3	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026				-
4	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	%	bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026				100
d	Pertanahan						
1	Terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertipikat yang dilakukan melalui mediasi	%	100	100	100	100	100
2	Ditetapkannya Hak Atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah	%	bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026				85
3	Terpetakannya seluruh bidang tanah dalam satu desa atau kelurahan lengkap secara berkualitas	%	100	100	100	100	100
4	Persentase Luas Peta Nilai Tanah yang telah dimanfaatkan dalam pelayanan BPHTB	%	90,63	90,63	90,63	90,21	90,12
e	Lingkungan Hidup						

NO	INDIKATOR	SATUAN	KINERJA TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kabupaten/Kota	Nilai	66,52	61,75	64,15	67,58	64,94
2	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	%	bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026				61,7
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kab/Kota	%	34,25	38,33	33	32,5	65
f	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
1	Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026				100
2	Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026				100
3	Persentase Akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026				100
4	Persentase Akta kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026				99,63
5	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	%	bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026				99,11
6	Jumlah Data Profil Kependudukan yang disusun	dokumen	bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026				2
7	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	%	bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026				18,6
g	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
1	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	%	bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026				100

NO	INDIKATOR	SATUAN	KINERJA TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
2	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	%	bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026				100
h	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
1	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	%	2,03	2,14	1,92	1,91	1,93
2	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	%	74,31	74,17	72,75	74,56	64,75
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026				8,11
4	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Kelahiran per 1000 WUS 15 -19 tahun	bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026				17,3
5	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Nilai 0-100	bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026				65,89
i	Perhubungan						
1	Konektivitas Kabupaten/Kota	%	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
2	Persentase kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan Kabupaten/Kota	%	bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026				88,31
j	Komunikasi dan Informatika						
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	KINERJA TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
2	Persentase Perangkat Daerah (PD) di tingkat Kabupaten/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	%	bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026				100
3	Persentase Perangkat Dearah yang Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD)	%	bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026				20
k	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah						
1	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	%	bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026				18,8
2	Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	%	bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026				9,28
3	Pertumbuhan Wirausaha	%	bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026				4,2
1	Penanaman Modal						
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	%	-37,15	54,67	33,56	11,5	12,38
2	Realisasi Total terhadap Target Investasi	%	bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026				100
m	Kepemudaan dan Olahraga						
1	Persentase Pemuda yang pernah mengikuti pelatihan/kursus/training dan memperoleh sertifikat	%	bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026				0,25
2	Persentase Atlet yang berasal dari kab/kota yang masuk Pelatda Provinsi	%	bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026				Tidak Dilaksanakan Pelatda
n	Statistik						
1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026				2,65
o	Persandian						
1	Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah	%	Belum dilaksanakan perhitungan		39,40	46,51	59,95

NO	INDIKATOR	SATUAN	KINERJA TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
p	Kebudayaan						
1	Persentase Jumlah Warisan Budaya yang dilestarikan	%	bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026				Belum ditetapkan Warisan Budaya
2	Persentase Jumlah Cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang didaftarkan	%	bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026				Belum ditetapkan Cagar Budaya dan Warisan Budaya
3	Persentase Jumlah Tenaga Kebudayaan yang memperoleh sertifikasi profesi dibidang kebudayaan	%	bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026				Belum tersedia tenaga kebudayaan
q	Perpustakaan						
1	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2021		47,49	51,43	52,4
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	NA	NA	11,37	41,54	47,43
r	Kearsipan						
1	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada lingkup Pemerintahan Daerah	Nilai	NA	NA	80,17	84,75	91,59
C	Urusan Pilihan						
a	Kelautan dan Perikanan						
1	Produksi Perikanan Budi Daya	%	bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026				100,57
b	Pariwisata						
1	Pertumbuhan Investasi Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	%	bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026				0,5

NO	INDIKATOR	SATUAN	KINERJA TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
2	Pertumbuhan Tamu Wisatawan Asing (Hotel Berbintang Non Bintang)	%	bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026				-
3	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual	%	bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026				-
c	Pertanian						
1	Peningkatan produksi tanaman pangan	%	bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026				-38,03
2	Peningkatan Produksi Hortikultura	%	bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026				0,1
3	Peningkatan Produksi komoditas Peternakan	%	bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026				4,19
4	Luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	%	bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026				-
5	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (diperoleh dari surveylance penyakit dari 5 PHMS)	%	bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026				100
d	Kehutanan						
e	Energi dan Sumber Daya Mineral						
f	Perdagangan						
1	Nilai Total Penjualan Perdagangan Antar Wilayah pada kab/kota	%	bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026				Tidak menghitung
2	Persentase alat ukur takaran timbangan dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	15,38	62,28	56,27	42,61	48,17
g	Perindustrian						
1	Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi: 1. Pertumbuhan PDRB Sektor Industri	%	bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026				75

NO	INDIKATOR	SATUAN	KINERJA TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
	Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota 2. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Kabupaten/Kota 3. Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota 4. Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota 5. Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota						
2	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor	%	bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026				11,2
3	Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah menindaklanjuti hasil rekomendasi pengawasan dibandingkan dengan jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah dilakukan pengawasan	%	bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026				-
4	Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang memiliki tingkat kepatuhan minimal 'Baik' dibandingkan seluruh jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang sudah dilakukan pembinaan	%	bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026				-
5	Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat, dan terkini	%	bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026				-
h	Transmigrasi						

NO	INDIKATOR	SATUAN	KINERJA TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
D	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan						
a	Perencanaan						
1	Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah	%	bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026				-
b	Keuangan						
1	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan Melalui TKD	%	bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026				30,51
2	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	3,7	4,18	17	18,47	18,04
3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	%	bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026				94,85
4	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	%	bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026				-5,31
5	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	%	bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026				33,13
6	Persentase Penurunan SILPA	%	bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026				-27,76
c	Kelembagaan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan						
1	Nilai Indeks Implementasi NSPK manajemen ASN	indeks	bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026				77,49
d	Penelitian dan Pengembangan						
1	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan daerah	%	bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026				40
2	Rasio Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah	Rasio	bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026				35

NO	INDIKATOR	SATUAN	KINERJA TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
e	Fungsi Pengawasan						
1	Opini Laporan Keuangan (10 tahun terakhir)	Kategori / Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3	3	BPKP tidak melaksanakan QA	3	Terdefinisi (3.026)
3	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Nilai	2	2	3	3	Terintegrasi (3.195)
4	Manajemen Risiko Indeks	Nilai	bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026				2,966
5	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	%	bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026				93,75
f	Fungsi Pengadaan						
1	Pemanfaatan Sistem Pengadaan	poin	bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026				27,49
2	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	poin	bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026				15
3	Tingkat Kematangan UKPBJ	poin	bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026				8:9
g	Hubungan dengan Perwakilan Daerah						
1	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Tepat/Tidak Tepat	bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026				Tepat
2	Persentase Penetapan RanPerda Tahun N	%	bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026				100
h	Pelayanan Publik						
1	Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun N	Nilai	bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026				98,19

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar 2025, data diolah

2.1.6. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada RKPD Kota Blitar tahun 2025 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

Secara definisi, pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Adapun ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, disebut dengan SPM.

Berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasara, terdiri atas:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- e. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
- f. Sosial.

Pencapaian SPM Tahun 2024 dijelaskan sebagai dalam uraian sebagai berikut.

• Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pendidikan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan terdiri atas 2 layanan dasar yaitu :

- Pendidikan Anak Usia Dini, Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini merupakan Peserta Didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun
- Pendidikan Dasar, dan Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan Dasar merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun
- Pendidikan Kesetaraan Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan Kesetaraan merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.

Tabel 2.47
Realisasi SPM Urusan Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	2022	2023	2024
1	Pendidikan Anak Usia Dini	100%	95,38%	100%
2	Pendidikan Dasar	99,71%	97,93%	100%
3	Pendidikan Kesetaraan	98.80 %	100%	100%

No	Jenis Pelayanan Dasar	2022	2023	2024
	Indeks Capaian SPM	99,50%	97,77%	100%
	Kategori IP SPM	Tuntas Paripurna	Tuntas Utama	Tuntas Paripurna

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Blitar, 2025

- Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan, jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah terdiri atas :

- Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;
- Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;
- Pelayanan Kesehatan Ibu Baru Lahir;
- Pelayanan Kesehatan Balita;
- Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar;
- Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif;
- Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut;
- Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi;
- Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus;
- Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat;
- Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis;
- Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus*)

Pencapaian SPM Urusan Kesehatan tahun 2024 mengalami peningkatan di semua jenis pelayanan dasar dan telah mencapai 100 persen.

Tabel 2.48
Realisasi SPM Urusan Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	2022	2023	2024
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	91,08%	98,53%	100%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	85,53%	99,06%	100%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	84,93%	99,76%	100%
4	Pelayanan Kesehatan Balita	65,72%	94,40%	100%
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	99,33%	98,71%	100%
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100%	100%	100%
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	94,79%	95,94%	100%
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	83,75%	100%	100%

No	Jenis Pelayanan Dasar	2022	2023	2024
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100%	100 %	100%
10	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	82,00%	100%	100%
11	Pelayanan Kesehatan dengan Orang Terduga TBC	92,02%	100%	100%
12	Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh (HIV)	98%	100%	100%
Indeks Pencapaian SPM		89,76%	98,87%	100%
Kategori IP SPM		Tuntas Madya	Tuntas Utama	Tuntas Paripurna

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Blitar, 2025

- Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, jenis pelayanan dasar pada SPM Pekerjaan Umum terdiri atas :

- Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari – Hari;
- Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Minum Domestik.

Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengalami peningkatan di semua jenis pelayanan dasar. Indeks Pencapaian SPM berhasil bertahan 100% (persen) atau Tuntas Paripurna pada tahun 2024.

Tabel 2.49
Realisasi SPM Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Jenis Pelayanan Dasar	2022	2023	2024
1	Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari – Hari	98,37%	100%	100%
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Minum Domestik	98,55%	100%	100%
Indeks Pencapaian SPM		98,46%	100%	100%
Kategori IP SPM		Tuntas Utama	Tuntas Paripurna	Tuntas Paripurna

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Blitar, 2025

- Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor

29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, jenis Pelayanan Dasar pada SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman kabupaten/kota terdiri atas:

- Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana; dan
- Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah.

Capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman telah mencapai 100% (persen) atau tuntas paripurna selama tahun 2022-2024.

Tabel 2.50
Realisasi SPM Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

No	Jenis Pelayanan Dasar	2022	2023	2024
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	100%	100%	100%
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah	100%	100%	100%
Indeks Pencapaian SPM		100%	100%	100%
Kategori IP SPM		Tuntas Paripurna	Tuntas Paripurna	Tuntas Paripurna

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Blitar, 2025

- Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota, jenis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Tramtibumlinmas daerah terdiri atas:

- Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
- Pelayanan informasi rawan bencana;
- Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;

- Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Capaian SPM kategori Ketentraman dan Ketertiban Umum tahun 2024 konsisten menunjukkan capaian 100 %.

Tabel 2.51
Realisasi SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Jenis Pelayanan Dasar	2022	2023	2024
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	94,67%	100%	100%
2	Pelayanan informasi rawan bencana	100%	100%	100%
Indeks Pencapaian SPM		97,34 %	100%	100%
Kategori IP SPM		Tuntas Utama	Tuntas Paripurna	Tuntas Paripurna
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	100%
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	100%
Indeks Pencapaian SPM		100%	100%	100%
Kategori IP SPM		Tuntas Paripurna	Tuntas Paripurna	Tuntas Paripurna
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	97%	100%
Indeks Pencapaian SPM		100%	97%	100%
Kategori IP SPM		Tuntas Paripurna	Tuntas Utama	Tuntas Paripurna

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Blitar, 2025

- Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Sosial

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang Sosial, jenis Pelayanan Dasar pada SPM Sosial terdiri atas:

- Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti sosial;
- Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti sosial;
- Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti sosial;
- Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial;
- Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana.

Capaian SPM urusan sosial telah mencapai 100% (persen) atau tuntas paripurna pada tahun 2022 - 2024.

Tabel 2.52
Realisasi SPM Urusan Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	2022	2023	2024
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti sosial	100%	100%	100%
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti sosial	100%	100%	100%
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti sosial	100%	100%	100%
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial	100%	100%	100%
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana	100%	100%	100%
Indeks Pencapaian SPM		100%	100%	100%
Kategori IP SPM		Tuntas Paripurna	Tuntas Paripurna	Tuntas Paripurna

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Blitar, 2025

Pemerintah Kota Blitar berkomitmen melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu, dimana peran posyandu lebih luas dari layanan kesehatan ibu dan anak menjadi lembaga kemasyarakatan yang turut menyelenggarakan 6 (enam) layanan dasar. Hal tersebut dilaksanakan melalui pembentukan kelembagaan posyandu, peningkatan kapasitas kader dan pengurus, peningkatan akses dan mutu layanan, serta mengintegrasikan program lintas sektor untuk mendukung percepatan penurunan stunting, anak tidak sekolah, akses sanitasi dan air minum aman, perumahan layak huni, kesejahteraan sosial.

2.2. Gambaran Keuangan Daerah

Bab ini menganalisis kondisi keuangan Pemerintah Daerah Kota Blitar. Untuk memberikan gambaran pengelolaan keuangan daerah periode 2020-2024 dengan kinerjanya dilanjutkan dengan gambaran proyeksi keuangan periode 2026-2030. Periode 2020-2024 merupakan fase strategis yang mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan, belanja, serta pembiayaan secara akuntabel dan efisien, khususnya di tengah tantangan fiskal akibat pandemi dan tekanan ekonomi nasional. Kinerja keuangan dalam periode ini menggambarkan bagaimana kebijakan fiskal yang diterapkan bertumpu pada prinsip kehati-hatian dan optimalisasi sumber daya lokal. Analisis atas indikator kunci seperti efektivitas PAD, efisiensi belanja, keseimbangan belanja operasi dan modal, serta kemandirian fiskal menunjukkan capaian dan kendala yang menjadi pembelajaran penting. Misalnya, tren menurunnya efisiensi serta tingginya proporsi belanja operasi menandakan perlunya reformulasi strategi belanja agar lebih produktif. Di sisi lain, peningkatan rasio ketergantungan transfer menunjukkan pentingnya penguatan kapasitas fiskal daerah.

Proyeksi keuangan untuk periode 2026–2030 bertujuan memberikan dasar bagi perumusan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah yang lebih adaptif dan realistis. Dengan mempertimbangkan tren pendapatan daerah, belanja, dan pembiayaan pada lima tahun sebelumnya, estimasi proyeksi disusun secara makro dengan pendekatan teknokratik, serta mempertimbangkan dinamika ekonomi nasional dan potensi daerah. Proyeksi ini diharapkan menjadi alat bantu dalam menyusun prioritas program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan kemampuan fiskal, sekaligus sebagai upaya memperkuat kesinambungan pembangunan dan stabilitas fiskal daerah. Dengan kata lain, proyeksi ini bukan hanya alat perhitungan, tetapi juga instrumen perencanaan yang strategis untuk memastikan tercapainya pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berbasis potensi riil daerah.

2.2.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Secara umum kinerja keuangan masa lalu (tahun anggaran 2020-2024) Kota Blitar menunjukkan besarnya kemampuan anggaran Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk melakukan pembangunan. Hasil analisis digunakan untuk menghitung kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dalam rangka mendanai pembangunan di Kota Blitar. Kapasitas riil kemampuan daerah yang didasarkan pada kekuatan Pendapatan Asli Daerah dan dana transfer maupun bantuan keuangan dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai pembangunan daerah.

Penilaian kinerja keuangan daerah di masa lalu

merupakan langkah strategis dalam memastikan efektivitas pengelolaan keuangan publik, sekaligus menjadi pijakan bagi perencanaan dan pengambilan kebijakan di masa mendatang. Evaluasi terhadap realisasi keuangan sebelumnya membantu pemerintah daerah melihat sejauh mana kemampuan fiskal digunakan secara efisien, adil, dan berkelanjutan. Selain itu, penilaian ini juga berfungsi untuk:

- a. Mengukur kapasitas keuangan daerah dalam membiayai pelayanan publik;
- b. Mengetahui efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran;
- c. Menilai kesehatan fiskal secara umum;
- d. Mendeteksi potensi risiko fiskal di masa mendatang.

Metode yang digunakan untuk melakukan Analisis Rasio Keuangan Daerah sebagaimana dianjurkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 yang dapat dijadikan rujukan antara lain:

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah : mengukur sejauh mana PAD dapat membiayai belanja daerah tanpa tergantung transfer pusat;
2. Rasio Efektivitas PAD : mengukur kemampuan daerah dalam merealisasikan target PAD;
3. Rasio Efisiensi Belanja Daerah : mengukur efisiensi pengeluaran dalam mencapai *output* pelayanan publik;
4. Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja : untuk mengetahui seberapa besar belanja rutin dibanding belanja pembangunan;
5. Rasio Ketergantungan Fiskal : menggambarkan ketergantungan terhadap dana transfer pusat.

Dengan melakukan penilaian secara objektif melalui rasio-rasio ini, pemerintah daerah tidak hanya sekedar mengulas masa lalu, tetapi menyiapkan fondasi keuangan yang lebih baik, sehat, dan berkelanjutan. Evaluasi ini juga menjadi dasar dalam menyusun RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, dan RKPD secara lebih terukur dan akuntabel.

2.2.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan lain yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Sub bab ini menganalisis kinerja pelaksanaan APBD periode sebelumnya berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Blitar tahun 2020 – 2024. Analisis dilakukan sesuai struktur APBD yang meliputi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah selama masa 1 (satu) tahun anggaran sebagai cerminan dari pelaksanaan kebijakan Anggaran untuk penyelenggaraan

program-program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama periode tertentu, serta sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah dengan membandingkan capaian kinerja keuangan daerah dengan cara melakukan perhitungan rasio dalam mengukur kemampuan keuangan daerah, hal tersebut berguna untuk menggambarkan kinerja pemerintah daerah.

Pemerintah Daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib melaporkan pertanggungjawaban keuangan atas sumber daya yang dihimpun dari masyarakat sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya. Ada beberapa cara untuk mengukur Kinerja Keuangan Daerah salah satunya yaitu dengan menggunakan Rasio Kinerja Keuangan Daerah, melalui analisis rasio keuangan berdasarkan pengukuran capaian kinerja keuangan merupakan bagian penting dalam proses pengendalian manajemen keuangan pemerintahan daerah. Pengukuran capaian kinerja digunakan untuk menilai akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah untuk pelayanan publik, yaitu bukan hanya sekedar kemampuan menunjukkan bahwa uang publik telah dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan dalam menunjukkan bahwa uang tersebut telah dibelanjakan secara efisien dan efektif.

Selanjutnya berdasarkan data dan informasi capaian realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024 dilakukan analisis rasio keuangan daerah untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan perbandingan data keuangan yang terdapat dalam laporan keuangan. Rasio-rasio yang umum digunakan:

- a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah: mengukur kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan dan pembangunan dari pendapatan asli daerah (PAD);
- b. Rasio Efektivitas: mengukur sejauh mana target pendapatan daerah tercapai;
- c. Rasio Efisiensi: mengukur perbandingan antara biaya yang dikeluarkan dengan pendapatan yang diterima daerah;
- d. Rasio Keserasian: mengukur keseimbangan antara belanja modal (investasi) dengan belanja operasional;
- e. Rasio Ketergantungan Keuangan: mengukur tingkat ketergantungan daerah pada transfer dari pemerintah pusat.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber yang diperlukan oleh daerah atau rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian, mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan dana eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah dan demikian pula

sebaliknya. Besaran dalam tingkat/rasio kemandirian dalam keuangan di suatu Pemerintahan Daerah berpengaruh pada bagaimana pola hubungan yang dilakukan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan dan pengelolaan keuangan. Berikut adalah tabel tentang rasio kemandirian dengan pola hubungan keuangan Pemerintah:

Tabel 2.53
Rasio Kemandirian dengan Pola Hubungan Keuangan Pemerintah

No	Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian	Pola Hubungan
a	Sangat Rendah	> 0 – 25%	Instruktif
b	Rendah	> 25-50%	Konsultatif
c	Sedang	>50-75%	Partisipatif
d	Tinggi	>75-100%	Delegatif

Sumber: *Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar, 2025*

Selanjutnya berdasarkan data dan informasi capaian realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.54
Realisasi PAD dan Dana Eksternal dengan Pola Hubungan Keuangan Pemerintah Tahun 2020-2024

Tahun	PAD	Transfer Pusat+ Provinsi+Pinjaman	%	Pola Hubungan
2020	174.590.638.443	688.978.396.667	25,34%	konsultatif
2021	297.618.527.754	713.998.274.152	41,68%	konsultatif
2022	156.268.172.004	754.236.961.873	20,72%	instruktif
2023	171.554.840.691	747.967.798.768	22,94%	instruktif
2024	169.566.103.316	761.173.069.106	22,28%	instruktif

Sumber: *Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar, 2025*

Selama 5 (lima) tahun terakhir, Kota Blitar belum menunjukkan perbaikan signifikan dalam kemandirian fiskal. Tingginya transfer dari pusat dan provinsi dibanding PAD mengindikasikan bahwa sebagian besar pembiayaan kegiatan daerah masih bertumpu pada dana eksternal. Hal ini mengurangi fleksibilitas fiskal dan otonomi daerah dalam pengambilan keputusan strategis. Pola hubungan yang dominan bersifat instruktif menunjukkan urgensi peningkatan kapasitas fiskal daerah agar dapat mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat dan mendorong otonomi keuangan yang lebih berkelanjutan.

Rasio efektivitas keuangan daerah adalah ukuran kinerja pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan yang direncanakan. Rasio ini menunjukkan seberapa baik pemerintah daerah mencapai target pendapatan mereka. Semakin tinggi rasionya, semakin efektif kinerja keuangan daerah tersebut. Rasio efektivitas keuangan daerah mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah direncanakan, dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi daerah. Rasio ini

merupakan indikator penting untuk menilai kinerja pengelolaan keuangan daerah.

Tabel 2.55
Realisasi dan Target PAD Kota Blitar
Tahun 2020-2024

Tahun	Realisasi PAD	Target PAD	%
2020	174.590.638.443	135.002.799.612	129,3
2021	297.618.527.754	182.713.636.574	162,9
2022	156.268.172.004	175.944.656.797	88,8
2023	171.554.840.691	168.359.025.901	101,9
2024	169.566.103.316	175.385.104.298	96,7

Sumber: *Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar, 2025*

Berdasarkan data dimaksud dapat dijelaskan bahwa tahun 2020-2021 menunjukkan kinerja sangat efektif, realisasi PAD melampaui target lebih dari 25% (persen). Hal itu terjadi karena perencanaan target yang konservatif sebagai dampak pandemi covid-19, akan tetapi di sisi lain terjadi peningkatan penerimaan signifikan yang bersumber dari penghargaan pemerintah Pusat atas kinerja pengendalian pandemi yang tidak masuk dalam perencanaan sebelumnya. Tahun 2022 terjadi penurunan tajam ke rasio 88,8% (persen). Ini menunjukkan realisasi lebih rendah dari target yang terjadi karena gangguan ekonomi secara nasional dan global yang berdampak belum optimalnya pelaksanaan pemungutan PAD. Tahun 2023 kondisi membaik kembali (101,9% (persen)). Hal ini menunjukkan bahwa pemulihan kinerja ekonomi yang berdampak pada pemulihan kinerja PAD dan target yang lebih realistis. Tahun 2024 sedikit di bawah target (96,7% (persen)), namun masih dalam batas toleransi efektivitas. Tidak tercapainya target terutama bersumber pada pendapatan pelayanan kesehatan pada RSUD Mardi Waluyo. Diperlukan evaluasi terhadap kinerja RSUD Mardi Waluyo agar dilakukan optimalisasi potensi.

Rasio efisiensi keuangan daerah adalah ukuran yang menunjukkan seberapa baik pemerintah daerah dalam menggunakan anggaran untuk mencapai hasil yang diinginkan. Rasio ini membandingkan antara biaya (belanja) yang dikeluarkan dengan pendapatan yang diperoleh. Semakin rendah rasio efisiensi, semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah karena menunjukkan bahwa biaya yang dikeluarkan lebih sedikit untuk menghasilkan pendapatan yang sama atau bahkan lebih.

Tabel 2.56
Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kota Blitar
Tahun 2020-2024

Tahun	Realisasi Belanja	Realisasi Pendapatan	%	Presentasi Efisiensi
2020	868.055.395.687	880.876.905.111	99%	Kurang
2021	986.004.395.437	1.041.505.261.947	95%	Kurang

Tahun	Realisasi Belanja	Realisasi Pendapatan	%	Presentasi Efisiensi
2022	1.037.630.983.106	918.568.210.281	113%	Tidak efisiensi
2023	958.762.098.374	928.568.700.012	103%	Tidak efisiensi
2024	975.535.861.773	939.885.037.335	104%	Tidak efisiensi

Sumber: Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar, 2025

Berdasarkan data tersebut, tahun 2020–2021 menunjukkan kinerja keuangan cukup efisien hingga efisien. Belanja lebih rendah dari pendapatan, artinya pengelolaan fiskal cukup baik. Sedangkan tahun 2022–2024 menunjukkan tren tidak efisien, belanja melebihi pendapatan. Ini bisa disebabkan oleh target pendapatan tidak tercapai atau terlalu tinggi belanjanya sehingga terjadi belanja defisit yang didanai dari pembiayaan daerah. Beberapa kebijakan yang perlu diperhatikan kedepan yaitu :

- a. Melakukan review/peninjauan belanja daerah agar lebih berbasis kinerja dan *outcome*;
- b. Memperkuat manajemen pendapatan, terutama PAD, agar belanja tidak bertumpu pada transfer;
- c. Mengendalikan belanja rutin dan non-prioritas untuk menjaga efisiensi fiskal.

Rasio keserasian keuangan daerah adalah ukuran yang digunakan untuk menilai keseimbangan antara belanja rutin (operasional) dan belanja pembangunan (modal) dalam anggaran suatu daerah. Rasio ini membantu untuk memahami bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi anggarannya dan apakah alokasi tersebut sudah optimal untuk mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.57

Rasio Belanja Operasioanal terhadap Total Belanja Kota Blitar Tahun 2020-2024

Tahun	Belanja Operasi	Total Belanja Daerah	%
2020	724.635.646.540	868.055.395.687	83,48
2021	842.312.587.981	986.004.395.437	85,43
2022	874.420.007.001	1.037.630.983.106	84,27
2023	819.710.314.933	958.762.098.374	85,50
2024	841.102.355.843	975.535.861.772	86,22

Sumber: Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar, 2025

Berdasarkan data tersebut, rata-rata belanja operasional berada di atas 83% (persen) dari total belanja, menunjukkan masih cukup tingginya dominasi belanja rutin (gaji, barang dan jasa, pemeliharaan dan belanja lain-lain). Artinya, hanya sekitar 14-17% (persen) anggaran dialokasikan untuk belanja pembangunan (modal) setiap tahun. Semakin naik tiap tahun, dari 83,48% (persen) (2020) menjadi 86,22% (persen) (2024), menunjukkan tren penguatan belanja rutin ini berpotensi mengurangi ruang fiskal untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan

publik. Hal itu terjadi karena banyaknya program prioritas daerah yang bersifat belanja barang jasa yang diberikan kepada masyarakat secara langsung dan bersifat rutin mengikat, misalnya: belanja bantuan rastrada, belanja iuran jaminan kesehatan masyarakat, belanja fasilitasi pendidikan dasar, dan lain-lain. Kedepan beberapa kebijakan yang perlu dilakukan pemerintah antara lain : peningkatan efisiensi belanja operasional dan mendorong pergeseran ke belanja pembangunan yang produktif dan pendekatan penganggaran berbasis kinerja agar belanja operasional berdampak langsung ke pelayanan publik.

Rasio ketergantungan keuangan daerah adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar suatu daerah bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat atau pemerintah provinsi untuk membiayai kegiatannya. Rasio ini dihitung dengan membandingkan total pendapatan transfer daerah dengan total pendapatan daerah. Semakin tinggi rasionya, semakin besar ketergantungan daerah pada sumber pendapatan eksternal, dan semakin rendah kemandirian keuangannya.

Tabel 2.58

Rasio PAD terhadap Total Pendapatan Kota Blitar tahun 2020-2024

Tahun	PAD	Total Pendapatan	%
2020	174.590.638.443	706.286.266.667	24,72%
2021	297.618.527.754	743.886.734.193	40,01%
2022	156.268.172.004	762.300.038.277	20,50%
2023	171.595.683.831	756.973.016.180	22,67%
2024	169.566.103.316	770.318.934.019	22,01%

Sumber: Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar, 2025

Berdasarkan data dapat dijelaskan bahwa tingkat ketergantungan cukup tinggi (rata-rata PAD < 30% (persen) dari total pendapatan). Tahun 2021 menunjukkan rasio terbaik (40,01% (persen)) merupakan kemandirian tertinggi, terjadi karena optimalisasi PAD yang bersumber dari pelayanan RSUD Mardi Waluyo. Tahun 2022–2024, rasio kembali menurun hingga sekitar 20–22% (persen) menunjukkan tingkat ketergantungan meningkat. Kinerja PAD belum konsisten. Perlu upaya memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui inovasi sumber pendapatan lokal. Kebijakan yang perlu menjadi perhatian antara lain: Perlu strategi untuk diversifikasi sumber PAD, terutama dari sektor potensial daerah. Penguatan basis pajak daerah dan peningkatan pelayanan publik untuk mendorong kepatuhan. Meningkatkan kapasitas aparatur pajak daerah & teknologi sistem informasi keuangan. Selain itu alternatif pembiayaan kreatif perlu menjadi pemikiran pemerintah daerah. Pembiayaan kreatif APBD adalah strategi pengelolaan keuangan daerah yang bertujuan untuk mengoptimalkan sumber pembiayaan di luar pendapatan dan transfer reguler, namun tetap sesuai aturan perundang-undangan. Ini dilakukan agar daerah mampu membiayai pembangunan secara mandiri, berkelanjutan, dan inovatif.

2.2.1.1.1. Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah

Kinerja pelaksanaan APBD secara utuh dapat dilihat dari realisasi APBD tahun 2020-2024 yang disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2.59
Realisasi APBD Kota Bitar Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
I	PENDAPATAN					
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH					
	Pendapatan Pajak Daerah	37.530.670.036	38.279.290.179	45.120.805.461	56.381.185.255	54.179.720.917
	Pendapatan Retribusi Daerah	6.681.655.444	6.383.791.892	6.777.531.073	7.830.222.821	107.123.314.608
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.041.098.840	829.819.053	885.196.947	1.042.119.575	979.436.641
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	129.337.214.124	252.125.626.629	103.484.638.523	106.342.156.180	7.283.631.148
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	174.590.638.444	297.618.527.754	156.268.172.004	171.595.683.831	169.566.104.314
2	PENDAPATAN TRANSFER					
	Transfer Pemerintah Pusat					
	Dana Bagi Hasil	81.234.742.965	110.933.535.218	130.286.308.030	92.510.557.565	89.902.080.000
	Dana Alokasi Umum	400.918.516.000	393.968.854.000	392.628.749.070	417.003.510.313	443.238.812.000
	Dana Alokasi Khusus – Fisik	29.818.682.165	28.333.707.798	18.028.861.209	9.770.554.691	26.140.002.027
	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	48.102.622.342	49.103.022.963	54.940.729.877	67.415.695.578	62.034.580.679
	Dana Insentif Daerah	56.837.217.000	36.309.878.000	56.255.400.000	53.546.779.000	32.033.190.000

2

No	Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	616.911.780.472	618.648.997.979	652.140.048.186	640.247.097.147	653.348.664.706
	Transfer Antar Daerah					
	Pendapatan Bagi Hasil	70.229.057.195	93.669.717.173	90.589.850.687	106.195.788.000	106.082.874.400
	Bantuan Keuangan	1.837.559.000	1.679.559.000	11.507.063.000	1.524.913.621	1.741.530.000
	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah	72.066.616.195	95.349.276.173	102.096.913.687	107.720.701.621	107.824.404.400
	Jumlah Pendapatan Transfer	688.978.396.667	713.998.274.152	754.236.961.873	747.967.798.768	761.173.069.106
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH					
	Pendapatan Lainnya	17.307.870.000	29.888.460.041	8.063.076.404	9.005.217.413	9.145.864.913
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (24)	17.307.870.000	29.888.460.041	8.063.076.404	9.005.217.413	9.145.864.913
	JUMLAH PENDAPATAN	880.876.905.111,23	1.041.505.261.947	918.568.210.281	928.568.700.012	939.885.037.335
II	BELANJA					
I	BELANJA OPERASI					
	Belanja Pegawai	293.925.147.875	314.975.285.655	323.977.811.820	314.865.852.902	346.522.094.817
	Belanja Barang dan Jasa	377.654.652.693	481.177.955.698	500.986.799.380	443.446.489.987	430.109.209.209
	Belanja Hibah	38.493.073.000	24.921.294.253	25.885.473.481	40.770.317.144	45.820.694.832
	Belanja Bantuan Sosial	14.015.883.398	21.238.052.375	23.569.922.320	20.627.654.900	18.650.356.985
	Belanja Bantuan Keuangan	546.889.575	0	0	0	0
	Jumlah Belanja Operasi	724.635.646.540	842.312.587.981	874.420.007.001	819.710.314.933	841.102.355.843

No	Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	
2	BELANJA MODAL						
	Belanja Tanah	627.630.320	4.885.684.000	880.732.430		2.696.905.689	
	Belanja Peralatan dan Mesin	51.660.497.640	58.792.600.288	68.037.519.911	26.322.308.618	20.744.067.013	
	Belanja Gedung dan Bangunan	28.630.154.933	22.340.709.027	27.666.316.129	62.954.436.910	55.789.927.363	
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	26.271.196.591	41.901.570.605	61.355.000.064	45.263.635.846	51.349.969.945	
	Belanja Aset Tetap Lainnya	3.281.295.801	2.936.121.510	2.938.194.732	2.097.644.616	1.541.538.234	
	Belanja Aset Lainnya	4.337.818.430	0	0	0	199.622.250	
	Jumlah Belanja Modal	114.808.593.714	130.856.685.430	160.877.763.265	136.638.025.990	132.322.030.494	
	3	BELANJA TIDAK TERDUGA					
		Belanja Tidak Terduga	28.611.155.432	12.835.122.027	2.333.212.840	2.413.757.451	2.111.475.435
Jumlah Belanja Tidak Terduga		28.611.155.432	12.835.122.027	2.333.212.840	2.413.757.451	2.111.475.435	
	Jumlah Belanja	868.055.395.687	986.004.395.437	1.037.630.983.106	958.762.098.374	975.535.861.772	
	Surplus/Defisit	12.821.509.425	55.500.866.509	(119.062.772.825)	(30.193.398.361)	(35.650.824.436)	
III	PEMBIAYAAN						
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN						
	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	174.663.656.285	187.384.483.475	239.941.987.648	119.053.885.988	73.994.318.147	
	Penciran Dana Cadangan	0	0	0	10.000.000.000	15.000.000.000	
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	21.112.716	56.637.663	175.827.798	133.830.522	107.349.416	
	Jumlah Penerimaan	174,684,769,001	187,441,121,138	240,117,815,446	129,187,716,511	89,101,667,563	

No	Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	25.000.000.000	0
	Penyertaan Modal (Investasi)	0	3.000.000.000	2.000.000.000	0	0
	Pemerintah Daerah					
	Pembayaran Pokok Utang	121.794.950				0
	Jumlah Pengeluaran	121.794.950	3.000.000.000	2.000.000.000	25.000.000.000	0
	PEMBIAYAAN NETTO	187.283.801.241	184.441.121.138	238.117.815.446	104.187.716.510	89.101.667.563
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	187.384.483.476	239.941.987.647	119.055.042.621	73.994.318.149	53.450.843.127	

Sumber: Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bitar, 2025

Pendapatan Asli Daerah (PAD) tumbuh positif rata-rata 10,93% (persen), namun fluktuatif, capaian tertinggi tahun 2021 (naik menjadi Rp297M) bersumber dari peningkatan "Lain-lain PAD yang sah" pendapatan layanan kesehatan pada RSUD Mardi Waluyo. Capaian terendah tahun 2022 (turun Rp156 M). Penurunan signifikan terjadi pada komponen Lain-lain PAD yang sah kembali pada kinerja semula serta pajak daerah yang mengalami penurunan karena pelemahan ekonomi dampak pandemi covid-19 sehingga pungutan pajak daerah banyak mengalami pengurangan karena penerapan kebijakan insentif pajak dan retribusi oleh Pemerintah Kota Blitar. Pajak Daerah tumbuh stabil (7,22% (persen)), menunjukkan tren positif dan potensi sebagai sumber PAD yang konsisten. Retribusi Daerah justru anomali di 2024 (melonjak tajam) karena terjadi penyesuaian klasifikasi kodefikasi pendapatan pelayanan kesehatan RSUD Mardi Waluyo dari rekening PAD Lain-Lain yang sah bergeser ke rekening retribusi daerah. Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan stagnan dan menurun (-1,7% (persen)) mengindikasikan potensi yang belum optimal. Sedangkan Lain-lain PAD yang sah fluktuatif, menurun drastis di 2024 dampak penyesuaian klasifikasi dan kodefikasi rekening.

Pada pos pendapatan transfer, transfer pemerintah pusat relatif stagnan dengan pertumbuhan negatif kecil (-0,96% (persen)). Dana Alokasi Umum (DAU) tumbuh lambat (1,38% (persen)) namun tetap menjadi sumber dominan. Dana Alokasi Khusus (DAK Fisik) turun tajam (-48,6% (persen)) yang berdampak pada belanja modal infrastruktur. Dana Alokasi Khusus (DAK) semakin sulit diperoleh karena penentuan kegiatan (lokasi prioritas) dan besaran nilai ditentukan oleh masing masing Kementerian teknis. Selanjutnya Dana Insentif Daerah (DID) atau Insentif Fiskal sifatnya juga tidak tetap atau fluktuatif, karena diberikan berdasarkan prestasi daerah. Prioritas pembangunan nasional yang dilaksanakan di tiap-tiap tahun menjadi faktor yang menentukan kriteria daerah penerima dana insentif fiskal. Pemerintah Kota Blitar berkomitmen tetap meningkatkan kinerja setiap tahun agar dapat mempertahankan potensi mendapatkan apresiasi berupa dana insentif fiskal.

Transfer antar daerah tumbuh rata-rata 6,46% (persen). Cenderung stabil dan naik perlahan, terutama dari Pendapatan Bagi Hasil. Bantuan Keuangan fluktuatif, tahun 2022 naik drastis karena adanya program/ kegiatan spesifik yaitu apresiasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur atas capaian kinerja WTP (wajar tanpa pengecualian) sebanyak 10 (sepuluh) kali berturut-turut. Sedangkan untuk Lain-lain pendapatan yang sah relatif kecil kontribusinya (<1% (persen)), tapi tumbuh 3,2% (persen) per tahun. Tidak signifikan secara fiskal, namun perlu dikelola akuntabel. Secara umum jumlah total pendapatan naik dari Rp880 M (2020) menjadi Rp939 M (2024). Kondisi ini menunjukkan

pertumbuhan cukup lambat, hanya 0,29% (persen). Kenaikan terbesar terjadi di 2021, disebabkan lonjakan PAD. Setelah 2021, tren cenderung stagnan menunjukkan potensi pendapatan perlu digali secara optimal.

Rata-rata pertumbuhan realisasi belanja daerah Kota Blitar Tahun 2020 - 2024 dapat diketahui melalui tabel berikut: Belanja operasi masih mendominasi struktur belanja daerah ($\pm 85\%$ (persen) dari total belanja). Komponen utamanya yaitu Belanja Pegawai relatif stabil dengan pertumbuhan 2,40% (persen). Ini mencerminkan pengelolaan SDM yang cukup terkendali namun masih cukup mendominasi. Perlu diantisipasi kebijakan pemerintah terkait belanja wajib pegawai yang maksimal 30% (persen) mulai tahun 2027. Belanja barang dan jasa mengalami peningkatan hingga 6,68% (persen), tapi sempat turun pada 2023 dan 2024. Hal itu bisa merupakan indikasi efisiensi atau penghematan operasional. Belanja Hibah & Bantuan Sosial meningkat signifikan (hibah tumbuh 8,40% (persen), bantuan sosial 16,67% (persen)). Khususnya tahun 2023-2024 karena adanya belanja hibah kepada KPU, Bawaslu, Polri dan TNI untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024. Sedangkan belanja bantuan sosial cenderung fluktuatif sesuai kebutuhan masyarakat. Ini menunjukkan arah belanja yang semakin responsif terhadap sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Belanja Modal mengalami tren berfluktuasi, dengan pertumbuhan rata-rata 7,28% (persen). Namun, angkanya masih jauh di bawah belanja operasi. Belanja gedung/bangunan dan infrastruktur (jalan, irigasi, jaringan) naik tajam pada 2022-2024, menunjukkan upaya penguatan infrastruktur terutama untuk penyediaan gedung pendidikan SMP 6 dan gedung pelayanan kelurahan. Belanja Tanah dan Aset Tetap Lainnya kecil, tapi belanja tanah tumbuh tajam (165,49% (persen)), akuisisi lahan digunakan untuk pengembangan infrastruktur jalan.

Belanja Tidak Terduga (BTT) mengalami penurunan drastis hingga -44,5% (persen), dari Rp28,6 M di 2020 menjadi Rp2,1 M di 2024. Ini menunjukkan membaiknya kondisi darurat pasca pandemi Covid-19 dan perencanaan yang lebih presisi. Total belanja naik dari Rp868 M (2020) ke Rp975 M (2024), tumbuh rata-rata 3,74% (persen). Pertumbuhan ini moderat, menandakan stabilitas fiskal meskipun ada tekanan kebutuhan belanja.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa struktur belanja masih didominasi belanja operasi, mengindikasikan bahwa sebagian besar anggaran masih untuk kegiatan rutin, bukan investasi. Keseimbangan belanja operasi terhadap belanja modal perlu terus ditingkatkan agar pembangunan fisik dan pelayanan publik bisa lebih maksimal. Terdapat tren positif dalam peningkatan belanja modal strategis, khususnya infrastruktur, yang patut dilanjutkan. Penurunan belanja tidak terduga mencerminkan perbaikan kondisi dan efektivitas perencanaan

Penerimaan pembiayaan sumber utama penerimaan adalah SiLPA, namun menunjukkan tren menurun tajam: dari Rp187,38 M (2020) turun menjadi Rp53,45 M (2024), dengan rata-rata pertumbuhan negatif 21,99% (persen). Hal ini mengindikasikan bahwa sisa anggaran tiap tahun semakin kecil, bisa karena efisiensi belanja meningkat atau kondisi kapasitas fiskal yang sedang menurun. Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah jumlahnya kecil tapi tumbuh tinggi (83,76% (persen)), meskipun kontribusinya secara total tidak signifikan. Pencairan Dana Cadangan dilakukan di 2023 (Rp10 M) dan di 2024 (Rp15 M) digunakan untuk pendanaan pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024. Total Penerimaan Pembiayaan menurun rata-rata 17,55% (persen), menandakan ketergantungan pada sumber pembiayaan non-reguler makin berkurang.

Pengeluaran Pembiayaan, relatif kecil dan tidak konsisten. Beberapa poin penting yaitu Penyertaan Modal Daerah terjadi pada tahun 2021 dan 2022 karena kebutuhan investasi penyesuaian struktur modal BUMD. Pembentukan dana cadangan di 2023 untuk penyediaan anggaran pilkada serentak tahun 2024.

Pembiayaan netto menunjukkan penurunan tajam dari Rp187 M tahun 2020 ke Rp68,5 M tahun 2024, dengan rata-rata pertumbuhan negatif 14,4% (persen). Menurunnya pembiayaan netto ini dapat diartikan sebagai kemampuan daerah makin mengandalkan pendapatan riil, bukan dari pembiayaan atau juga karena terbatasnya kapasitas pembiayaan, sehingga mengandalkan anggaran tahun berjalan semata.

Perlu diambil kebijakan kedepan untuk mengatasi keterbatasan kapasitas pembiayaan daerah. Kreativitas finansial APBD merujuk pada upaya pemerintah daerah untuk mencari sumber pembiayaan di luar pendapatan daerah yang rutin (seperti pajak dan retribusi) serta dana perimbangan dari pemerintah pusat. Tujuannya adalah untuk mengatasi keterbatasan anggaran dan mempercepat pembangunan daerah. Beberapa contoh kreativitas finansial yang bisa dilakukan antara lain:

- a. Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU): Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan pihak swasta untuk membangun infrastruktur atau menyediakan layanan publik, dengan skema investasi dan bagi hasil yang saling menguntungkan;
- b. Pembiayaan Kreatif: Ini mencakup berbagai skema pembiayaan seperti penerbitan obligasi daerah, pemanfaatan barang milik daerah yang tidak terpakai, atau mencari pinjaman dari lembaga keuangan dengan persyaratan yang lebih fleksibel;
- c. Sinergi Pendanaan: Menggabungkan berbagai sumber pendanaan, baik dari APBD maupun non-APBD, untuk membiayai program prioritas. Misalnya, menggabungkan dana APBD dengan bantuan dari pemerintah pusat, dana hibah, atau investasi swasta;

- d. Pengelolaan Aset Daerah: Memaksimalkan potensi pendapatan dari aset-aset daerah, seperti tanah, bangunan, atau kekayaan alam, melalui pengelolaan yang lebih profesional dan transparan;
- e. Peningkatan Efisiensi Anggaran: Mencari cara untuk mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran, sehingga dana yang tersedia bisa dialokasikan secara lebih efektif.

2.2.1.1.2. Neraca Daerah

Adapun neraca daerah tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.60
Neraca Daerah Tahun 2020 – 2024
Pemerintah Kota Blitar

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
1	ASET	2.595.047.554.204,28	2.842.396.924.943,55	2.838.091.886.965,55	2.854.039.588.941,53	2.690.051.138.693,09
	A. Aset Lancar	255.432.695.030,48	285.865.718.417,84	159.058.746.982,34	107.606.083.454,56	89.199.258.541,50
	B. Investasi Jangka Panjang	25.317.569.753,02	28.766.959.869,59	29.770.167.704,33	28.372.892.367,90	25.056.371.011,12
	C. Aset Tetap	2.301.260.267.656,95	2.515.598.532.461,44	2.627.019.789.512,93	2.705.472.064.884,33	2.561.792.928.299,59
	D. Aset Lainnya	13.037.021.763,83	12.165.714.194,68	22.243.182.765,95	12.588.548.234,74	14.002.580.840,88
	JUMLAH ASET	2.595.047.554.204,28	2.842.396.924.943,55	2.838.091.886.965,55	2.854.039.588.941,53	2.690.051.138.693,09
2	KEWAJIBAN	29.578.335.382,16	55.845.165.025,21	29.871.922.680,45	31.928.250.270,80	38.001.068.205,93
	A. Kewajiban Jangka Pendek	29.578.335.382,16	55.845.165.025,21	29.871.922.680,45	31.928.250.270,80	38.001.068.205,93
	B. Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	29.578.335.382,16	55.845.165.025,21	29.871.922.680,45	31.928.250.270,80	38.001.068.205,93
3	EKUITAS	2.565.469.218.822,12	2.786.551.759.918,34	2.808.219.964.285,10	2.837.111.338.670,73	2.835.905.585.183,14
	A. Ekuitas	2.565.469.218.822,12	2.786.551.759.918,34	2.808.219.964.285,10	2.837.111.338.670,73	2.835.905.585.183,14
	JUMLAH EKUITAS	2.565.469.218.822,12	2.786.551.759.918,34	2.808.219.964.285,10	2.837.111.338.670,73	2.835.905.585.183,14
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01

Sumber: Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar, 2025

Dari data tersebut dapat dijelaskan bahwa total aset meningkat dari Rp2,59 triliun (2020) menjadi puncaknya Rp2,85 triliun (2023), kemudian turun signifikan pada 2024 menjadi Rp2,69 triliun. Penurunan Rp163 miliar (5,7% (persen)) di tahun 2024 ini terjadi karena adanya reklasifikasi aset serta pengalihan hak dan penghapusan atas aset yang sudah tidak dapat dimanfaatkan. Aset Lancar naik 2020–2021, tapi turun tajam pada 2022–2024 dari Rp285 miliar (2021) ke Rp89 miliar (2024), disebabkan realisasi belanja tinggi, menurunnya kas dan piutang daerah, atau efisiensi likuiditas jangka pendek. Investasi Jangka Panjang stabil dan tumbuh sampai 2022, namun turun tajam di 2023–2024 (dari Rp29,8 miliar ke Rp25,1 miliar), disebabkan pencairan investasi atau penyesuaian nilai wajar. Aset Tetap mengalami peningkatan konsisten sampai 2023, lalu menurun signifikan di 2024 dari Rp2,71 triliun ke Rp2,56 triliun, sebab penghapusan aset dan pengalihan hak aset kepada kementerian/lembaga. Aset Lainnya cenderung fluktuatif, dengan lonjakan besar di 2022 (Rp22,2 miliar) lalu kembali turun disebabkan terjadi reklasifikasi pencatatan aset.

Total Kewajiban meningkat signifikan dari Rp29,5 miliar (2020) ke Rp38 miliar (2024). Kewajiban masih seluruhnya jangka pendek. Tidak ada kewajiban jangka panjang tercatat; ini menunjukkan konservatisme fiskal atau ketergantungan pada pendanaan non-hutang. Peningkatan utang jangka pendek bisa menunjukkan ketegangan arus kas atau peningkatan komitmen belanja yang belum dibayar di akhir tahun. Ekuitas meningkat stabil dari Rp2,56 triliun (2020) menjadi Rp2,83 triliun (2024). Penurunan aset di 2024 tidak signifikan memengaruhi ekuitas, menunjukkan bahwa sebagian besar perubahan berada pada komponen lancar dan tidak menimbulkan kerugian bersih.

Berdasarkan analisa atas data historis maka perlu pendalaman terhadap pencatatan aset tetap dan aset lancar, khususnya terkait belanja modal dan penghapusan aset. Evaluasi struktur pembiayaan jangka pendek agar tidak terlalu membebani kas dan optimalisasi aset daerah untuk mendukung pendapatan dan menjaga struktur neraca tetap sehat.

2.2.2. Kerangka Pendanaan

2.2.2.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah

Proyeksi pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah Kota Blitar untuk periode 2025–2029 disusun berdasarkan pendekatan historis dan analisis tren pertumbuhan komponen pendapatan, belanja, serta pembiayaan daerah selama tahun 2020–2024. Proyeksi ini mengasumsikan bahwa kondisi perekonomian nasional dan daerah telah sepenuhnya pulih dari dampak pandemi Covid-19, serta

memperhitungkan stabilitas fiskal dan arah kebijakan makro ekonomi nasional.

Pendapatan daerah Kota Blitar masih didominasi oleh Pendapatan Transfer, terutama Dana Perimbangan yang berasal dari APBN. Dana ini mencakup Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), yang dialokasikan guna mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal dan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan kontribusi yang masih terbatas, meskipun secara umum menunjukkan tren pertumbuhan yang positif.

Belanja daerah diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, dengan prioritas pada sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, serta perlindungan sosial. Alokasi belanja tiap urusan disusun berdasarkan dukungan urusan terhadap pencapaian target kinerja daerah. Penetapan anggaran tetap mengacu pada ketentuan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), yang menekankan pada peningkatan kemandirian fiskal daerah, efisiensi belanja, dan transparansi pengelolaan keuangan.

Selain itu, proyeksi ini juga mempertimbangkan kondisi terkini, antara lain:

- a. Perubahan kebijakan transfer fiskal dari pusat, termasuk skema penyaluran DAK yang semakin berbasis kinerja (*performance-based budgeting*);
- b. Penguatan sistem informasi pemerintahan dan digitalisasi keuangan daerah;
- c. Stabilitas inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional pasca pandemi;
- d. Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui pemanfaatan aset daerah dan pembiayaan kreatif (*creative financing*).

Dengan memperhatikan kemampuan dan potensi fiskal daerah, proyeksi pendapatan dan belanja ini diharapkan menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan fiskal jangka menengah yang sehat, kredibel, dan adaptif terhadap dinamika pembangunan. Selanjutnya, struktur APBD menyesuaikan proyeksi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Blitar tahun 2025-2029 disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.61
Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun 2026-2030

No	Uraian	Baseline Tahun 2024	Proyeksi Tahun				
			2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	PENDAPATAN						
A	PENDAPATAN ASLI DAERAH						
	Pendapatan Pajak Daerah	54.179.720.917,80	96.773.830.000,00	97.321.608.000,00	97.821.608.000,00	98.294.824.000,00	100.964.940.000,00
	Pendapatan Retribusi Daerah	107.123.314.608,00	106.860.928.000,00	121.945.588.000,00	122.195.588.000,00	122.295.588.000,00	124.368.901.000,00
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	979.436.641,76	1.212.000.000,00	1.225.000.000,00	1.250.000.000,00	1.235.000.000,00	1.261.212.000,00
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	7.283.631.148,88	5.340.361.000,00	5.874.397.000,00	5.975.000.000,00	5.985.000.000,00	6.284.250.000,00
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	169.566.103.316,44	210.187.119.000,00	226.366.593.000,00	227.242.196.000,00	227.810.412.000,00	232.879.303.000,00
B	PENDAPATAN TRANSFER						
1	Transfer Pemerintah Pusat						
	Dana Bagi Hasil	89.902.080.000,00	90.543.031.000,00	92.353.891.620,00	92.353.891.620,00	94.277.000.000,00	83.985.352.000,00
	Dana Alokasi Umum	443.238.812.000,00	456.999.804.000,00	466.139.800.080,00	466.139.800.080,00	466.389.800.080,00	479.849.794.200,00
	Dana Alokasi Khusus - Fisik	26.140.002.027,00	4.322.138.000,00	29.247.138.000,00	4.172.138.000,00	16.597.138.000,00	3.947.138.000,00
	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	62.034.580.679,00	63.003.277.000,00	63.003.277.000,00	63.003.277.000,00	63.003.277.000,00	63.003.277.000,00
	Insentif Daerah	32.033.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	653.348.664.706,00	614.868.250.000,00	650.744.106.700,00	625.669.106.700,00	640.267.215.080,00	630.785.561.200,00
2	Transfer Antar Daerah						
	Pendapatan Bagi Hasil	106.082.874.400,00	65.340.625.000,00	66.647.437.500,00	66.897.437.500,00	67.980.386.250,00	68.325.278.000,00

No	Uraian	Baseline Tahun 2024	Proyeksi Tahun				
			2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Bantuan Keuangan	1.741.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah	107.824.404.400,00	65.340.625.000,00	66.647.437.500,00	66.897.437.500,00	67.980.386.250,00	68.325.278.000,00
	Jumlah Pendapatan Transfer	761.173.069.106,00	680.208.875.000,00	717.391.544.200,00	692.566.544.200,00	708.247.601.330,00	699.110.839.200,00
	C LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH						
	Pendapatan Lainnya	9.145.864.913,42	9.300.000.000,00	9.500.000.000,00	9.600.000.000,00	9.750.000.000,00	9.750.000.000,00
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	9.145.864.913,42	9.300.000.000,00	9.500.000.000,00	9.600.000.000,00	9.750.000.000,00	9.750.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	939.885.037.335,86	899.695.994.000,00	953.258.137.200,00	929.408.740.200,00	945.808.013.330,00	941.740.142.200,00
2	BELANJA						
	A BELANJA OPERASI						
	Belanja Pegawai	346.522.094.817,00	367.222.111.290,00	367.346.023.707,00	371.844.033.595,00	366.938.999.777,00	377.200.341.164,00
	Belanja Barang dan Jasa	430.109.209.209,71	463.652.724.506,00	441.843.066.911,00	453.402.563.558,00	462.823.852.538,00	467.890.804.035,00
	Belanja Hibah	45.820.694.832,00	19.837.261.065,00	11.505.927.268,00	21.692.930.505,00	44.428.007.588,00	11.875.114.036,00
	Belanja Bantuan Sosial	18.650.356.985,00	18.149.600.000,00	43.074.600.000,00	17.999.600.000,00	34.558.938.000,00	20.963.490.000,00
	Jumlah Belanja Operasi	841.102.355.843,71	868.861.696.861,00	863.769.617.886,00	864.939.127.658,00	908.749.797.903,00	877.929.749.235,00
	B BELANJA MODAL						
	Belanja Tanah	2.696.905.689,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Peralatan dan Mesin	20.744.067.013,00	19.843.041.000,00	20.856.215.000,00	17.832.063.825,00	18.770.593.500,00	12.482.444.677,00
	Belanja Gedung dan Bangunan	55.789.927.363,00	27.924.153.000,00	38.055.606.000,00	44.574.927.731,00	26.527.945.350,00	68.518.861.500,00
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	51.349.969.945,00	29.710.354.000,00	46.704.829.650,00	42.447.086.178,00	44.565.531.000,00	25.710.354.026,00
	Belanja Aset Tetap Lainnya	1.541.538.234,00	547.116.000,00	557.322.000,00	560.000.000,00	560.000.000,00	560.000.000,00
	Belanja Aset Lainnya	199.622.250,00	175.000.000,00	275.000.000,00	280.500.000,00	280.500.000,00	280.500.000,00
	Jumlah Belanja Modal	132.322.030.494,00	81.199.664.000,00	106.448.972.650,00	105.694.577.734,00	90.704.569.850,00	107.552.160.203,00

No	Uraian	Baseline Tahun 2024	Proyeksi Tahun				
			2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
C	BELANJA TIDAK TERDUGA						
	Belanja Tidak Terduga	2.111.475.435,00	5.879.963.396,00	5.952.500.000,00	6.049.300.000,00	5.963.000.000,00	6.143.500.000,00
	Jumlah Belanja Tidak Terduga	2.111.475.435,00	5.879.963.396,00	5.952.500.000,00	6.049.300.000,00	5.963.000.000,00	6.143.500.000,00
	Jumlah Belanja	975.535.861.772,71	955.941.324.257,00	976.171.090.536,00	976.683.005.392,00	1.005.417.367.753,00	991.625.409.438,00
	SURPLUS/DEFISIT	-35.650.824.436,85	-56.245.330.257,00	-22.912.953.336,00	-47.274.265.192,00	-59.609.354.423,00	-49.885.267.238,00
	3	PEMBIAYAAN					
A	PENERIMAAN PEMBIAYAAN						
	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	73.994.318.147,86	56.245.330.257,00	47.912.953.336,00	62.274.265.192,00	29.609.354.423,00	49.885.267.238,00
	Pencairan Dana Cadangan	15.000.000.000,00	0,00	0,00		30.000.000.000,00	0,00
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	107.349.416,58	0,00	0,00			0,00
	Jumlah Penerimaan	89.101.667.564,44	56.245.330.257,00	47.912.953.336,00	62.274.265.192,00	59.609.354.423,00	49.885.267.238,00
B	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00					
	Pembentukan Dana Cadangan	0,00		15.000.000.000,00	15.000.000.000,00		0,00
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00		10.000.000.000,00			0,00
	Jumlah Pengeluaran	0,00	0,00	25.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	89.101.667.564,44	56.245.330.257,00	22.912.953.336,00	47.274.265.192,00	59.609.354.423,00	49.885.267.238,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	53.450.843.127,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber : Sumber: Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar, 2025

Berdasarkan data historis dan analisa tren perkembangan tahun 2020-2024 diproyeksikan sebagai berikut. Total pendapatan daerah diproyeksikan dalam tren fluktuatif untuk periode lima tahun kedepan. Pendapatan Daerah Kota Blitar tahun 2025-2030 diproyeksikan tumbuh rata-rata sebesar 2,13% (persen). Tahun 2026 diperkirakan turun dari *baseline* realisasi tahun 2024, lalu naik perlahan sampai 2030. Penurunan pada 2026 menjadi indikasi perlunya kehati-hatian dalam asumsi pertumbuhan ekonomi dan proyeksi transfer pusat. Ketergantungan yang tinggi menyebabkan Kota Blitar menjadi daerah rentan terhadap fluktuasi fiskal nasional yang dipengaruhi oleh faktor eksternal.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan mengalami tren positif dan konsisten naik dari Rp169,57 M (2024) ke Rp232,88 M (2030). Kenaikan signifikan di 2026 (naik $\pm 24\%$ (persen)), terutama didorong oleh lonjakan Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Fokus ke depan terutama untuk digitalisasi pajak dan *updating* basis data pajak, penyederhanaan retribusi, efisiensi pelayanan publik, dan reformasi tarif berbasis nilai manfaat. Hasil pengelolaan kekayaan daerah naik perlahan ($\pm 3-5\%$ (persen) per tahun), namun kontribusinya sangat kecil ($< 1\%$ dari PAD). Potensi besar jika pemerintah daerah mengelola aset secara produktif (optimalisasi BUMD, kerja sama pemanfaatan aset). Kontribusi PAD terhadap total pendapatan meningkat dari 18% (persen) (2024) menjadi hampir 25% (persen) (2030) hal itu diharapkan menjadi sinyal perbaikan kemandirian fiskal. Perlu pengawasan ketat agar target PAD realistis, tidak sekadar asumsi di atas kertas, dan ditopang oleh kebijakan dan reformasi nyata di lapangan.

Pendapatan transfer pusat fluktuatif di tahun 2026-2030, naik di tahun 2027, kemudian turun 2028, naik lagi di tahun berikutnya. Tren pergerakan cenderung tidak stabil, dipengaruhi DAK dan insentif daerah. Dinamika geopolitik global seperti ketegangan kawasan Asia Timur, fluktuasi harga energi dunia, serta dampak lanjutan dari perang dagang antara negara-negara besar telah memberikan tekanan pada kinerja fiskal nasional. Hal ini berdampak langsung terhadap struktur belanja negara, termasuk alokasi transfer ke daerah. Pada 2025, pemerintah pusat menerapkan strategi fiskal yang lebih ketat, dengan fokus pada efisiensi belanja dan selektivitas dalam penyaluran dana transfer. Hal ini dipicu oleh penurunan penerimaan negara dari sektor perdagangan dan pajak ekspor, sebagai akibat dari pelemahan permintaan global dan penurunan harga komoditas. Di sisi lain, potensi penyesuaian skema DAK dan pemanfaatan insentif fiskal berbasis kinerja (*performance-based transfer*) juga menjadi tantangan dan peluang. Daerah dengan perencanaan yang responsif dan tata kelola yang baik cenderung tetap memperoleh prioritas. Untuk itu meskipun diproyeksikan secara pesimis akan tetapi Pemerintah Kota Blitar berkomitmen untuk selalu

memberikan upaya terbaik untuk mendapatkan apresiasi berupa insentif fiskal dan dana DAK.

Dana Bagi Hasil (DBH) tahun 2026–2030 diproyeksikan naik bertahap mulai dari Rp83,9 M sampai akhirnya 94,2 M. Tren perubahan cenderung stabil (meningkat moderat), kecuali 2030 sedikit turun. Perlu menjadi perhatian bahwa DBH sangat dipengaruhi oleh PNPB dan penerimaan perpajakan nasional sehingga faktor eksternal seperti harga komoditas & pertumbuhan ekonomi nasional menjadi penentu utama atas kinerja alokasi ke daerah. Dana Alokasi Umum (DAU) meningkat stabil dari Rp443,24M di tahun 2024 ke Rp479,84M pada akhir periode tahun 2030. Kenaikan sejalan dengan asumsi pertumbuhan kebutuhan dasar dan indeks fiskal daerah. DAU menjadi komponen terbesar, mencerminkan kebutuhan dasar pelayanan tetap ditopang pusat. DAK cenderung diproyeksikan fluktuatif mulai 2026 sampai 2030 dipengaruhi oleh DAK Fisik yang sangat tergantung tema nasional misalnya infrastruktur, pendidikan, kesehatan sehingga bisa fluktuatif akibat pergeseran prioritas pusat. Sedangkan DAK Non fisik cenderung stagnan, antara lain BOSP, TPG, Tamsil dan BOK Kesehatan karena merupakan mandatory spending untuk layanan dasar. Mengindikasikan peran *spending-based allocation* makin kuat (terutama untuk pendidikan dan kesehatan). Insentif fiskal diproyeksikan dengan pendekatan konservatif. Insentif fiskal ini berbasis kinerja (pelayanan publik, kinerja belanja, reformasi birokrasi dan tematik lain berdasarkan prioritas pusat). 0 (nol) di proyeksi mencerminkan pendekatan konservatif atau ketidakpastian. Pendapatan Bagi Hasil mengalami penurunan drastis dari Rp106M (*baseline* realisasi tahun 2024) dan lalu tumbuh moderat hingga 2030. Penurunan yang tajam tersebut terjadi karena perubahan klasifikasi bagi hasil PKB dan BBNKB menjadi skema pajak berupa opsen PKB dan Opsen BBNKB.

Secara agregat proyeksi pendapatan daerah dilakukan secara konservatif. Proyeksi konservatif memang aman secara fiskal, namun bisa memengaruhi ruang fiskal jika kenyataan lebih tinggi dan tidak diserap optimal. Untuk mengatasi keterbatasan kapasitas APBD dan meningkatkan kualitas pembangunan Pemerintah Kota Blitar perlu mengembangkan pembiayaan kreatif APBD. Pembiayaan kreatif bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada APBD, mempercepat pembangunan infrastruktur dan program prioritas, serta meningkatkan efisiensi dan kualitas proyek. Beberapa alternatif yang dapat dilakukan antara lain : Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah untuk membiayai proyek infrastruktur, kerja sama dengan lembaga keuangan, atau skema pembiayaan inovatif lainnya

Di sisi belanja tren total belanja meningkat moderat dari Rp975,5 miliar (*baseline* tahun 2024) dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 0,3%–1% (persen) per tahun. Namun, belanja tidak diimbangi oleh pendapatan, yang menyebabkan defisit anggaran terjadi setiap tahun. Belanja operasional

masih mendominasi struktur belanja (rata-rata 80–90% dari total belanja). Tren naik-turun ringan, tergantung pada komponen internal, misalnya belanja barang dan jasa fluktuatif. Belanja pegawai pada tahun 2024 sebesar Rp346,52 M naik jadi Rp377,20 M pada tahun 2030 dengan kecenderungan kenaikan stabil $\pm 1-2\%$ (persen) per tahun. Kenaikan ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah No. 15/2019 tentang gaji ASN dan proyeksi rekrutmen ASN. Hal yang perlu diantisipasi reformasi birokrasi dan ketentuan terkait belanja wajib pegawai. Belanja barang dan jasa merupakan cerminan dari kebutuhan layanan publik dan biaya administrasi. Belanja Hibah & Bantuan Sosial juga fluktuatif. Kondisi ini bisa karena sifat hibah yang berbasis prioritas tematik/tahun berjalan, diantaranya untuk pendanaan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2029.

Belanja modal tahun 2024 sebesar Rp132,32 M diproyeksikan fluktuatif dengan peoyeksi tertinggi tahun 2030 sebesar Rp107,55 M. Belanja modal bersifat adaptif terhadap program infrastruktur yang berbasis pada usulan, prioritas daerah dan kemampuan pembiayaan. Belanja modal rata-rata 10–15% (persen) dari total belanja, perlu diantisipasi terkait ketentuan belanja wajib infrastruktur minimal 40% (persen) yang diterapkan paling lambat tahun 2027. Belanja Gedung & Bangunan dan Jalan, Irigasi, Jaringan dominan, tetapi fluktuatif tergantung proyek besar. Beberapa rencana belanja modal yang akan di prioritaskan periode 2026-2030 antara lain: pemenuhan infrastruktur dasar perkotaan (jalan, sistem transportasi, perumahan, sanitasi, persampahan, jaringan komunikasi), jaringan drainase dan irigasi untuk pengendalian luapan air sungai, pembangunan destinasi wisata buatan, pembangunan kawasan perdagangan dan industri, fasilitas umum serta ruang pelayanan publik lainnya. Belanja modal tanah direncanakan untuk akuisisi hak untuk pengembangan pengelolaan persampahan dan pembangunan fasilitas umum lainnya. Penurunan belanja peralatan dan mesin hingga tahun 2030 merupakan indikasi efisiensi atau minimnya pengadaan baru. Pengadaan peralatan mesin skala besar diprioritaskan untuk penunjang pelayanan umum misalnya jaringan pengelolaan persampahan, jaringan komunikasi, jaringan transportasi dan jaringan utilitas lainnya.

Belanja Tidak Terduga (BTT) naik signifikan sejak 2026 (*baseline* 2024 realisasi sebesar Rp2,1 M dan dianggarkan stabil sebesar Rp4 M). Penyediaan BTT sebagai *standby budget* sebagai antisipasi risiko lebih tinggi atau penyesuaian kebijakan belanja kontinjensi. Proyeksi realistis dengan mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 1/2022 tentang HKPD dan kesiapsiagaan fiskal untuk penanggulangan bencana, kedaruratan, atau *force majeure*.

Surplus/Defisit anggaran terjadi di setiap tahun yang direncanakan. Defisit diperkirakan pada kisaran 2% (persen) sampai 4% (persen) dan dikendalikan stabil dalam besaran tersebut. Menunjukkan strategi belanja masih dalam batas

fiskal wajar, namun tetap perlu penguatan pendapatan daerah (PAD & transfer). Untuk menutup defisit anggaran tersebut direncanakan penerimaan pembiayaan daerah terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) dan Pencairan Dana Cadangan. Sementara itu, Pengeluaran pembiayaan daerah diproyeksikan di tahun 2027 dan 2028 pada komponen penyertaan modal BUMD baru dan pembentukan dana cadangan dalam rangka persiapan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2029, yang kemudian di tahun 2029 dicairkan pada penerimaan pembiayaan pencairan dana cadangan.

Secara umum proyeksi APBD tahun 2026-2030 disimpulkan bahwa belanja operasi mendominasi, terutama karena gaji ASN dan layanan dasar. Belanja modal diarahkan untuk mendukung infrastruktur prioritas nasional. Kebijakan nasional seperti RPJMN, UU HKPD, dan PP ASN berpengaruh besar terhadap struktur belanja. Perlu diperhatikan terkait Evaluasi efektivitas belanja hibah & sosial, optimalkan proposal DAK & bantuan keuangan, selalu menjaga rasio belanja modal >20% (persen) untuk menjaga kualitas belanja pembangunan serta mendorong efisiensi belanja barang & jasa tanpa menurunkan pelayanan.

2.3. Permasalahan dan Isu Strategis

Perumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis merupakan dasar untuk menyesuaikan dengan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih, yang selanjutnya dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Isu strategis merupakan tantangan atau peluang yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi masyarakat di masa mendatang. Analisis terhadap isu strategis menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan solusi atas berbagai kondisi tidak ideal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka menengah. Sedangkan permasalahan pembangunan daerah menggambarkan menggambarkan kinerja daerah atau kondisi masyarakat yang belum ideal.

2.3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan dengan melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) perangkat daerah dan mengacu pada hasil evaluasi capaian kinerja berdasarkan urusan serta dielaborasi dengan berbagai permasalahan riil yang dihadapi perangkat daerah.

2.3.1.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan yang akan menjadi masukan bagi penentuan sasaran pembangunan jangka menengah Kota Blitar dirumuskan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Permasalahan pembangunan yang dirumuskan secara holistik-tematik ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa masalah pokok sebagai berikut:

1. Rata – rata lama sekolah penduduk Kota Blitar yang masih 10,82 atau setingkat kelas 2 SMA, belum mencapai target yang ditetapkan yaitu rata rata lama sekolah 12 tahun atau lulus SMA;
2. Pemerintah Kota Blitar tidak bisa menjamin semua warganya untuk masuk sekolah setingkat SMA, karena Sekolah Tingkat Menengah merupakan kewenangan provinsi;
3. Tingkat kemiskinan yang masih tinggi di angka 9,86 8(ribu jiwa) atau 6,75 % (persen) dari seluruh jumlah penduduk Kota Blitar;
4. Tingkat prevalensi stunting yang masih diangka 17,7% (persen) dalam angka nasional, sementara hitungan daerah pada angka 6,87% (persen). Perbedaan angka prevalensi stunting antara nasional dan daerah disebabkan adanya perbedaan model perhitungan daerah dan nasional;
5. Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Blitar yang masih tinggi yaitu di angka 5,11%(persen);
6. Tingginya angka ketimpangan pendapatan Kota Blitar yaitu 0,353;
7. Rendahnya tingkat pemanfaatan digital dalam sektor pemasaran produk Kota Blitar;
8. Masih belum terintegrasinya data data perangkat daerah terutama data pelayanan, yang seharusnya sudah dapat digunakan secara interoperabilitas antar perangkat daerah;
9. Masih rendahnya Pendapatan Asli Daerah, sehingga ketergantungan finansial atau anggaran pembangunan daerah masih pada level 80% (persen) kepada pemerintah pusat;
10. Menurunnya kuantitas SDM ASN dan kualitas yang belum memadai, diperkuat dengan komposisi struktural dalam tubuh Pemerintah Daerah Kota Blitar dapat mengakibatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan;
11. Masih banyaknya pengamen dan pengemis di perempatan yang ada lampu lalu lintas, menunjukkan rendahnya ketertiban umum;
12. Belum terpilahnya sampah dari rumah tangga mengakibatkan semua sampah masih terbuang ke TPA, sedangkan kemampuan tampung TPA dengan semua sampah terbuang ke TPA diperkirakan hanya tinggal 4 tahun saja;

13. Meskipun hampir seluruh rumah tangga di Kota Blitar telah memiliki akses sanitasi layak (99,21% (persen) tahun 2023), namun akses terhadap sanitasi aman masih sangat rendah, hanya sekitar 8,45% (persen) pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan perlunya pergeseran target dari sanitasi layak menuju sanitasi aman sesuai standar nasional, termasuk sistem pengolahan lumpur tinja (LLTT) yang efektif;
14. Masih terdapatnya kawasan kumuh 62 Ha, seharusnya pada akhir tahun 2026 ditargetkan sudah 0% (persen) tapi masih ada 1,9% (persen) dalam kondisi kumuh;
15. Masih terdapat rumah yang berlokasi di sempadan sungai, yang mana merupakan area yang tidak diperkenankan untuk rumah tinggal maupun bangunan lainnya diluar ketentuan. Rumah yang berada di area sempadan sangat rawan terjadinya bencana selain itu juga dapat mengganggu fungsi dari sungai;
16. Masih minimnya moda transportasi massal, sehingga memperbanyak penggunaan kendaraan pribadi yang berakibat semakin besarnya potensi penambahan polusi udara dan peningkatan emisi gas karbon;
17. Mulai dirasakannya dampak perubahan iklim, terdapat 5 kelurahan yang mengalami penurunan permukaan air tanah, sehingga masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih dari sumur pompanya oleh karena semakin meningkatnya alih fungsi lahan sehingga mengurangi daerah resapan air;
18. Belum optimalnya penanganan pencemaran air terutama yang disebabkan oleh limbah domestik, industri tahu, dan peternakan;
19. Rendahnya Indeks Kualitas Lahan (IKL) Kota Blitar tahun 2024 yaitu sebesar 34,13 akibat minimnya tutupan vegetasi pohon keras, alih fungsi lahan pertanian, dan belum optimalnya ruang terbuka hijau yang menyebabkan penurunan daya dukung lingkungan serta meningkatnya risiko banjir dan degradasi ekosistem;
20. Penyelenggaraan penataan ruang di Kota Blitar masih berada di peringkat 20 dari 38 kabupaten/kota sehingga perlu memperhatikan aspek pemanfaatan ruang terutama dalam hal penerbitan KKPR dan perizinan-perizinan lanjutan dari KKPR.

2.3.2. Isu Strategis

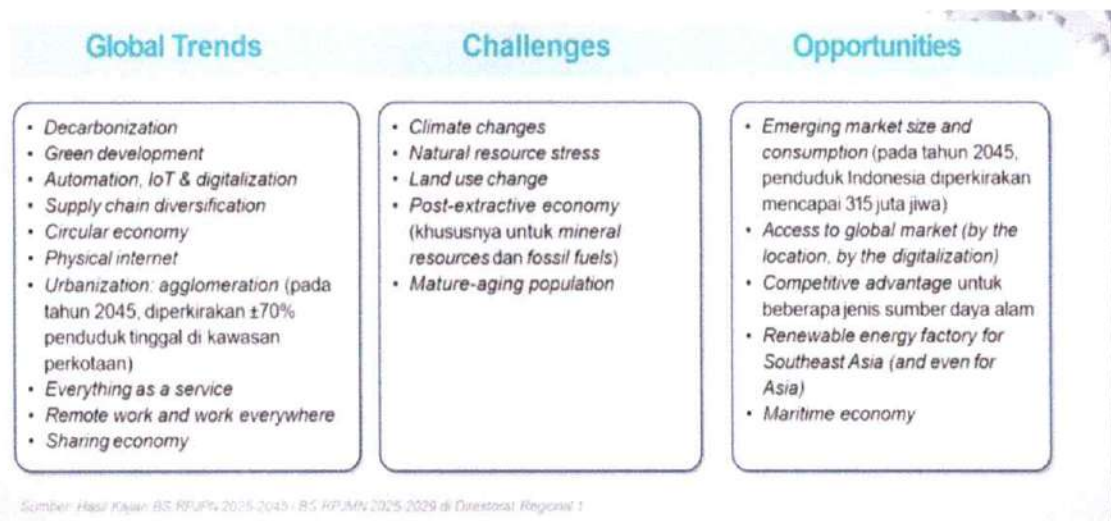
Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Isu strategis daerah akan menggambarkan dinamika lingkungan eksternal baik skala regional, nasional,

maupun internasional yang berpotensi memberi dampak terhadap daerah dalam kurun waktu jangka menengah.

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

2.3.2.1. Isu Internasional

Beberapa isu strategis internasional yang dapat mempengaruhi dunia dalam jangka panjang sebagaimana disampaikan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam hasil kajian RPJMN 2025 – 2029 sebagaimana gambar 2.57 Kecenderungan Global meliputi.



Gambar 2.57
Kecenderungan Global

2.3.2.1.1. Isu strategis Global yang Disebutkan dalam RPJMN 2025 – 2029

Ada 10 Isu Strategis dalam RPJMN 2025 – 2029 yaitu :

1. Decarbonization;
2. *Green Development*;
3. *Automation, Internet of Things and Digitalization*;
4. Diversifikasi Rantai Suplai;
5. Ekonomi Sirkular;
6. *Physical Internet*;
7. Aglomerasi;
8. Segala Sesuatu adalah Layanan;
9. *Remote Work is Everywhere* : Tren Kerja Jarak Jauh yang Meningkatkan;
10. *Sharing Economy*.

2.3.2.1.2. Sustainable Development Goals (SDG's)

Konsep Sustainable Development Goals (SDGs) dicanangkan untuk melanjutkan konsep tujuan

pembangunan *Millennium Development Goals* (MDGs) yang belum tercapai. Tujuan MDGs yang belum tercapai. Dengan menetapkan tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Tahun 2016-2030 antara lain:

1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya dimana-mana;
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan;
3. Pastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua segala usia;
4. Menjamin kualitas pendidikan inklusif, adil dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua;
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;
6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan air dan sanitasi untuk semua;
7. Menjamin akses ke energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modern untuk semua;
8. Mempromosikan pertumbuhan yang berkelanjutan, inklusif dan berkelanjutan ekonomi, kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua;
9. Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi;
10. Mengurangi kesenjangan di dalam dan antar negara;
11. Membuat kota-kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;
12. Pastikan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan;
13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
14. Melestarikan dan berkelanjutan menggunakan samudra, laut dan sumber daya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan;
15. Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat, berkelanjutan mengelola hutan, memerangi desertifikasi, dan menggantikan dan membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati;
16. Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan; dan
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

2.3.2.1.3. Pemanasan Global dan Perubahan Iklim Global (Global Warming & Climate Change)

Pemanasan global atau *global warming* merupakan kondisi dimana terjadi kenaikan suhu rata-rata secara bertahap di daratan, lautan dan maupun di atmosfer bumi. Pemanasan global dialami oleh seluruh dunia termasuk di Indonesia, bahkan di Kota Blitar. Penyebab Pemanasan global juga dapat mengakibatkan perubahan iklim (*climate change*) secara pelan tapi pasti. Semakin cepat peningkatan panas bumi maka akan terjadi pula percepatan terjadinya perubahan iklim. Penyebab terjadinya pemanasan global antara lain:

1. Meningkatnya gas rumah kaca;
2. Efek rumah kaca;
3. Polusi sampah plastik yang tidak dapat di daur ulang;
4. Penggunaan listrik yang boros;
5. Polusi udara akibat asap industri pabrik;
6. Penebangan pohon, kerusakan dan pembakaran hutan;
7. Penggunaan CFC secara berlebihan.

2.3.2.1.4. Dunia tanpa batas (*Bordesless*)

Dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan dunia seakan akan tanpa batas. Kejadian di belahan bumi utara pada saat yang sama dapat dilihat dan menjadi perhatian belahan dunia bagian selatan. Dunia tanpa batas ini serig disebut dengan globalisasi. Globalisasi adalah keterhubungan dan keterkaitan antar manusia dan bangsa di seluruh dunia yang membuat batas-batas suatu negara seakan akan menjadi sempit. Globalisasi tidak hanya sekedar berlaku pada dunia komunikasi dan informasi, akan tetapi juga gaya hidup, perekonomian, hak asasi manusia dan sebagainya.

Perdagangan internasional yang dijembatani dengan teknologi, memudahkan proses transaksi tanpa tatap muka tanpa uang tunai, semua transaksi dilakukan memanfaatkan teknologi. Semua perubahan pasti akan ada dampak positif dan negatifnya. Dampak positif dari globalisasi adalah adanya perubahan tata nilai dan sikap, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih cepat dan memungkinkan terjadinya tingkat kehidupan yang lebih baik. Sementara dampak negatifnya adalah luntarnya nilai budaya asli, terjadinya perubahan gaya hidup dan eksploitasi sumber daya alam yang akan mempercepat kerusakan lingkungan.

2.3.2.1.5. Krisis Global

Krisis global dapat disebabkan karena adanya gangguan rantai pasokan sumber daya, eskalasi konflik bersenjata antar negara, serangan terhadap infrastruktur penting dan gangguan pasokan pangan, atau terjadi pandemi. 66% (persen) dari responden pakar dunia berkeyakinan bahwa krisis global dapat disebabkan karena

cuaca ekstrem, sementara 53% (persen) responden menyatakan bahwa resiko global dapat disebabkan informasi yang menyesatkan yang diciptakan *artificial intelligence*.

Krisis global dapat mengakibatkan krisis ekonomi yang sangat berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia dan secara lokalitas akan sangat berpengaruh pada perkembangan ekonomi Kota Blitar.

2.3.2.2. Isu Strategis Nasional

2.3.2.2.1. Isu Strategis Nasional Indonesia dengan memperhatikan RPJPN 2025 - 2045

Tahun 2024 Pemerintah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN) 2025 - 2045, yang kemudian dipergunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2025 - 2045. Visi RPJPN Indonesia Emas 2045 menetapkan 5 sasaran utama yaitu :

1. Pendapatan per kapita setara negara maju;
2. Kemiskinan menuju 0% (persen) dan ketimpangan berkurang;
3. Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat;
4. Daya saing sumber daya manusia meningkat;
5. Intensitas emisi GRK menurun menuju Net Zero Emission.

Selanjutnya dalam rangka merealisasikan visi Indonesia Emas 2045 tersebut maka dicanangkan proses transformasi yang meliputi:

- a. Transformasi Sosial;
- b. Transformasi Ekonomi;
- c. Transformasi Tata Kelola;
- d. Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia;
- e. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi;
- f. Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan;
- g. Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan;
- h. Kestinambungan Pembangunan.

Sejalan dengan arah kebijakan nasional, Provinsi Jawa Timur menyusun arah kebijakannya dalam RPJPD Jawa Timur dengan 6 (enam) isu besar dalam bentuk misi yaitu:

- a. Transformasi Sosial;
- b. Transformasi Ekonomi;
- c. Transformasi Tata Kelola;
- d. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi;
- e. Pembangunan wilayah, penyediaan sarana dan prasarana berwawasan lingkungan;
- f. Pembangunan yang berkelanjutan.

2.3.2.2.2. Pembangunan Infrastruktur

Indonesia membutuhkan pembangunan infrastruktur yang kuat untuk membantu proses pertumbuhan ekonomi, meningkatkan konektivitas, produktivitas dan mewujudkan pemerataan pembangunan. Berdasarkan data, Indonesia menempati peringkat ke-72 dalam *World Bank's Logistics Performance Index* pada tahun 2018 dan Index Pembangunan Infrastruktur Global pada tahun 2019 menduduki peringkat ke-40. Oleh karena itu, Indonesia harus meningkatkan investasi dalam pembangunan infrastruktur untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi nasional. Isu strategis nasional dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia dalam 20 tahun ke depan adalah untuk meningkatkan investasi dalam pembangunan infrastruktur dan memastikan tercapainya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Berikut adalah penjelasan lebih rinci:

1. Investasi dalam Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur menjadi fokus utama dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Namun, investasi dalam pembangunan infrastruktur masih diperlukan agar tercapai peningkatan kualitas infrastruktur yang memadai. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan investasi dalam pembangunan infrastruktur untuk mencapai target tersebut;

2. Meningkatkan Konektivitas

Meningkatkan konektivitas menjadi salah satu strategi dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Hal ini mencakup peningkatan pada jaringan transportasi, khususnya transportasi darat, laut dan udara untuk melepaskan ketergantungan yang besar pada jalan raya;

3. Pemerataan Pembangunan

Pemerataan pembangunan menjadi hal utama dalam upaya pembangunan infrastruktur di Indonesia. Infrastruktur harus dibangun dengan merata di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di daerah-daerah terpencil dan terisolasi yang sebelumnya belum tersentuh oleh pembangunan;

4. Meningkatkan Inovasi Teknologi

Meningkatkan inovasi teknologi menjadi salah satu usaha dalam melakukan perbaikan infrastruktur yang lebih efisien dan murah. Penerapan teknologi AI, IoT, dan *Big Data* dalam pengembangan infrastruktur akan mempercepat dan mempermudah proses konstruksi. Selain itu, teknologi baru yang lebih ramah lingkungan dan biayanya rendah juga dapat membantu memperbaiki kebijakan pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia, isu strategis nasional perlu menjadi perhatian utama

selama 20 tahun ke depan. Pemerintah Indonesia harus terus meningkatkan investasi dan melakukan inovasi teknologi agar infrastruktur dapat berfungsi secara maksimal dan membantu memajukan negara. Di samping itu, pemerataan pembangunan juga perlu diprioritaskan untuk menjamin kemajuan dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia

2.3.2.2.3. Lingkungan Hidup

Indonesia harus menghadapi tantangan besar dalam menjaga lingkungan hidup dan mengatasi perubahan iklim, dimana beberapa wilayah di Indonesia mengalami bencana alam yang mempengaruhi kesehatan, ekonomi dan lingkungan masyarakat. Di tahun 2018, Indonesia menempati peringkat ke-2 di dunia dalam jumlah sampah plastik yang masuk ke laut, dengan total lebih dari 3,2 juta ton. Oleh karena itu, upaya untuk menjaga lingkungan dan melakukan tindakan pencegahan dalam mengatasi perubahan iklim menjadi isu strategis nasional yang harus diperhatikan. Isu strategis nasional tentang lingkungan hidup di Indonesia adalah pencegahan dan penanganan perubahan iklim serta mengatasi masalah pencemaran lingkungan yang semakin serius. Berikut adalah penjelasan lengkap beserta data dan fakta terkait isu strategis nasional lingkungan hidup di Indonesia:

1. Perubahan Iklim;
2. Pencemaran Lingkungan;
3. Pengelolaan Sumber Daya Alam;
4. Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca.

Dalam isu strategis nasional lingkungan hidup, perlu adanya sinergi dan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk menjaga keberlangsungan lingkungan hidup yang lebih baik. Pembangunan berkelanjutan seharusnya menjadi tujuan dalam setiap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam 20 tahun ke depan.

2.3.2.2.4. Pemberdayaan Ekonomi

Pemerintah Indonesia telah menetapkan target untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi tingkat kemiskinan. Namun, Indonesia masih memerlukan pemberdayaan ekonomi untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Berdasarkan data Kementerian Perekonomian, jumlah pengangguran terbuka di Indonesia pada tahun 2024 mencapai 4,82% (persen). Sehingga diperlukan upaya berkelanjutan untuk menciptakan lapangan kerja baru dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di masa depan. Isu strategis nasional tentang pemberdayaan ekonomi di Indonesia meliputi peningkatan kesempatan kerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pengembangan sektor ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Berikut adalah penjelasan lengkap beserta data dan fakta terkait isu strategis nasional pemberdayaan ekonomi di Indonesia:

1. Peningkatan Kesempatan Kerja;
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
3. Pengembangan Sektor Ekonomi Berkelanjutan dan Inklusif;
4. Pengurangan Ketimpangan Ekonomi dan Regional.

Dalam isu strategis nasional pemberdayaan ekonomi di Indonesia, perlu adanya kerjasama antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi, meningkatkan kualitas SDM dan mengembangkan sektor ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Hal ini penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan memberdayakan seluruh warga negara Indonesia.

2.3.2.2.5. Pertahanan Keamanan

Indonesia memerlukan upaya untuk meningkatkan pertahanan keamanan, mengingat peningkatan risiko dari ancaman seperti terorisme dan konflik antarnegara. Upaya meningkatkan keamanan dan stabilitas menjadi isu strategis nasional yang mendapat perhatian serius. Isu strategis nasional Indonesia dalam 20 tahun ke depan meliputi berbagai hal penting yang secara signifikan mempengaruhi kehidupan manusia dan pembangunan nasional. Dengan pemikiran strategis yang tepat, Indonesia berupaya untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan stabilitas dan kesejahteraan rakyatnya di masa depan. Isu strategis keamanan nasional di Indonesia meliputi upaya penanggulangan terorisme, perlindungan terhadap kedaulatan negara dan peningkatan kemampuan pertahanan negara. Berikut adalah penjelasan lengkap beserta data dan fakta terkait isu strategis keamanan nasional di Indonesia:

1. Penanggulangan Terorisme;
2. Perlindungan Terhadap Kedaulatan Negara;
3. Peningkatan Kemampuan Pertahanan Negara;
4. Pemberantasan Narkoba.

Dalam isu strategis keamanan nasional di Indonesia, perlu adanya sinergi antara lembaga-lembaga terkait untuk meningkatkan kemampn dalam menjaga dan melindungi negara dari ancaman-ancaman yang ada. Hal tersebut meliputi peningkatan kerjasama antara TNI, Polri, BNPT dan instansi lainnya, serta meningkatkan kemampuan intelijen untuk mendeteksi potensi terorisme dan ancaman lainnya.

2.3.2.3. Isu Strategis Provinsi Jawa Timur

Isu strategis Jawa Timur memperhatikan tahapan pertama dari RPJPD Provinsi Jawa Timur 2025-2045, meliputi:

1. Pemantapan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah;
2. Penanggulangan kemiskinan dengan perluasan kesempatan kerja, perluasan akses layanan dasar untuk meningkatkan kualitas hidup, perluasan akses pasar kerja untuk pekerjaan yang layak, perluasan

akses fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan bagi masyarakat miskin, pengembangan program-program ekonomi dan kewirausahaan serta program-program yang efektif untuk mengatasi kemiskinan;

3. Pengembangan sumber daya manusia berkualitas melalui peningkatan akses pendidikan, kesehatan dan standar hidup yang layak dan berkualitas.
4. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan yang baik. Penguatan kualitas tata kelola pemerintah dan pelayanan publik difokuskan untuk perbaikan kualitas tata kelola pemerintahan dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan serta menyederhanakan prosedur administratif dan meningkatkan kualitas pelayanan publik;
5. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan terhadap bencana alam dengan mengutamakan prinsip pembangunan berkelanjutan;
6. Kedaulatan Pangan dan Peningkatan Kesejahteraan Petani.

2.3.2.4. Telaahan / Isu Kebijakan Daerah

2.3.2.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Blitar Tahun 2025 - 2045

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar juga mempedomani Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar. Hal ini bertujuan agar terwujud keselarasan antara sasaran dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah dengan tujuan, kebijakan, rencana struktur ruang dan rencana pola ruang serta indikasi program. Adapun muatan RTRW secara umum diuraikan pada bagian ini.

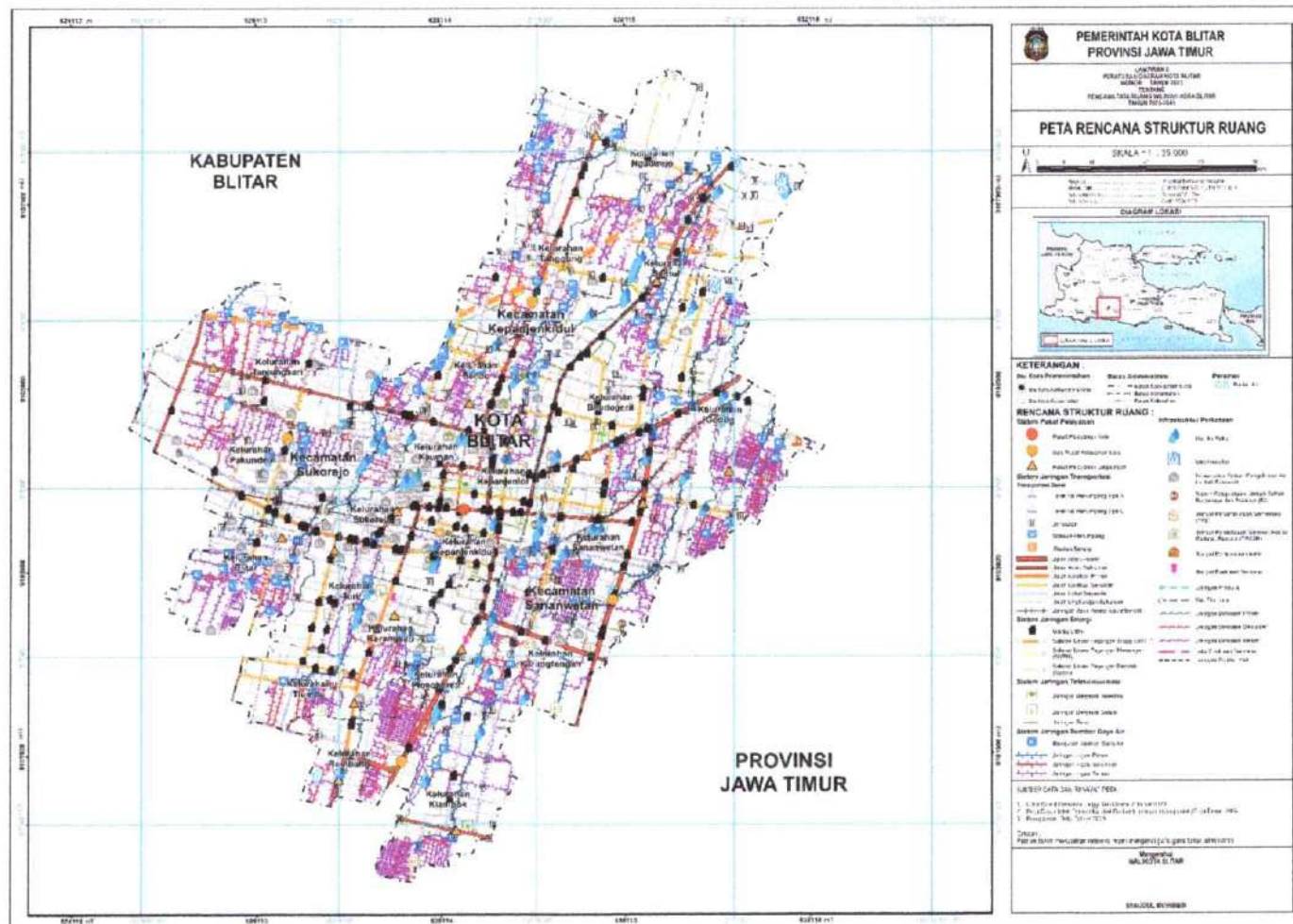
a. Rencana Struktur Ruang

Rencana struktur ruang wilayah Kota adalah rencana susunan pusat-pusat permukiman (sistem perkotaan wilayah Kota yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya) dan sistem jaringan prasarana wilayah kota yang dikembangkan untuk melayani kegiatan skala kota, dan mengintegrasikan wilayah kota. Sistem perkotaan wilayah tersebut di atas dapat berupa pusat perekonomian, rencana kota baru, simpul ekonomi baru dan/atau koridor ekonomi baru yang dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan ruang, keberlanjutan pembangunan dan ketahanan masyarakat.

Rencana struktur ruang wilayah kota dirumuskan dengan kriteria:

- a. Berdasarkan strategi penataan ruang wilayah kota;
- b. Mempertimbangkan kebutuhan pengembangan dan pelayanan wilayah kota dalam rangka mendukung kegiatan sosial ekonomi dan pelestarian lingkungan;
- c. Mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kota;

- d. Mengacu rencana struktur ruang wilayah nasional (RTRW nasional dan rencana rincinya), rencana struktur ruang wilayah provinsi (RTRW provinsi), serta memperhatikan rencana struktur ruang wilayah kota/kota yang berbatasan;
- e. Pusat kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kota memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Mengadopsi pusat-pusat kegiatan yang kewenangan penetapannya berada pada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi yang berada di wilayah kota bersangkutan;
 - 2) Memuat penetapan pusat pelayanan kawasan (PPK) serta pusat pelayanan lingkungan (PPL);
 - 3) Harus berhirarki dan/atau berjejaring di dalam ruang wilayah kota serta saling terkait menjadi satu kesatuan sistem perkotaan; dan
 - 4) Mempertimbangkan cakupan pelayanan bagi kawasan perkotaan dan Kawasan perdesaan yang berada dalam wilayah kota, yang meliputi pusat layanan dan peletakan jaringan prasarana wilayah kota yang menunjang keterkaitan fungsional antar pusat pelayanan.
- f. Dapat ditransformasikan ke dalam penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk 20 (dua puluh) tahun; dan
- g. Mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2025

Gambar 2.58
Peta Rencana Struktur Ruang Kota Blitar

b. Rencana Pola Ruang

Rencana pola ruang wilayah kota adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kota yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budi daya dirumuskan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Berdasarkan pada strategi penataan ruang wilayah kota;
2. Mempertimbangkan alokasi ruang wilayah kota dalam rangka mendukung kegiatan sosial ekonomi dan pelestarian lingkungan;
3. Mengacu rencana pola ruang wilayah nasional (RTRW nasional dan rencana rincinya), rencana pola ruang wilayah provinsi, kondisi eksisting dan dokumen rencana sektoral terbaru;
4. Dapat ditransformasikan ke dalam penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk 20 (dua puluh) tahun; dan
5. Mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

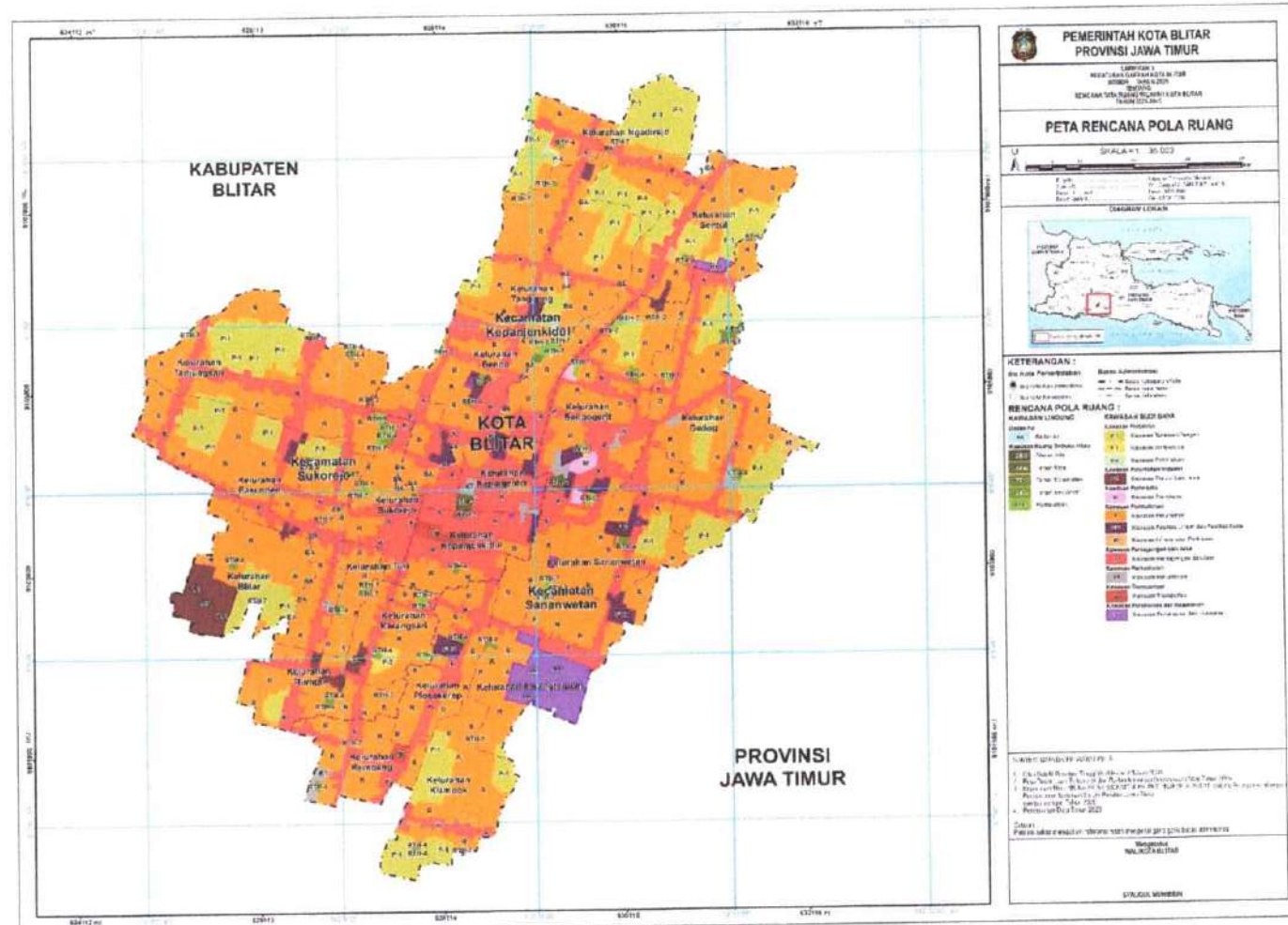
Penyusunan rencana pola ruang wilayah kota Blitar telah mengacu pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota, rencana pola ruang Kota Blitar akan dijabarkan sebagai berikut:

A. Kawasan Lindung

1. Badan Air (BA)
2. Ruang Terbuka Hijau (RTH)

B. Kawasan Budi Daya

1. Kawasan Pertanian (P)
2. Kawasan Peruntukan Industri (KPI)
3. Kawasan Pariwisata (W)
4. Kawasan Permukiman (PM)
5. Kawasan Perdagangan dan Jasa (K)
6. Kawasan Perkantoran (KT)
7. Kawasan Transportasi (TR)
8. Kawasan Pertahanan dan Keamanan (HK)



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2025

Gambar 2.59
Peta Rencana Pola Ruang Kota Blitar

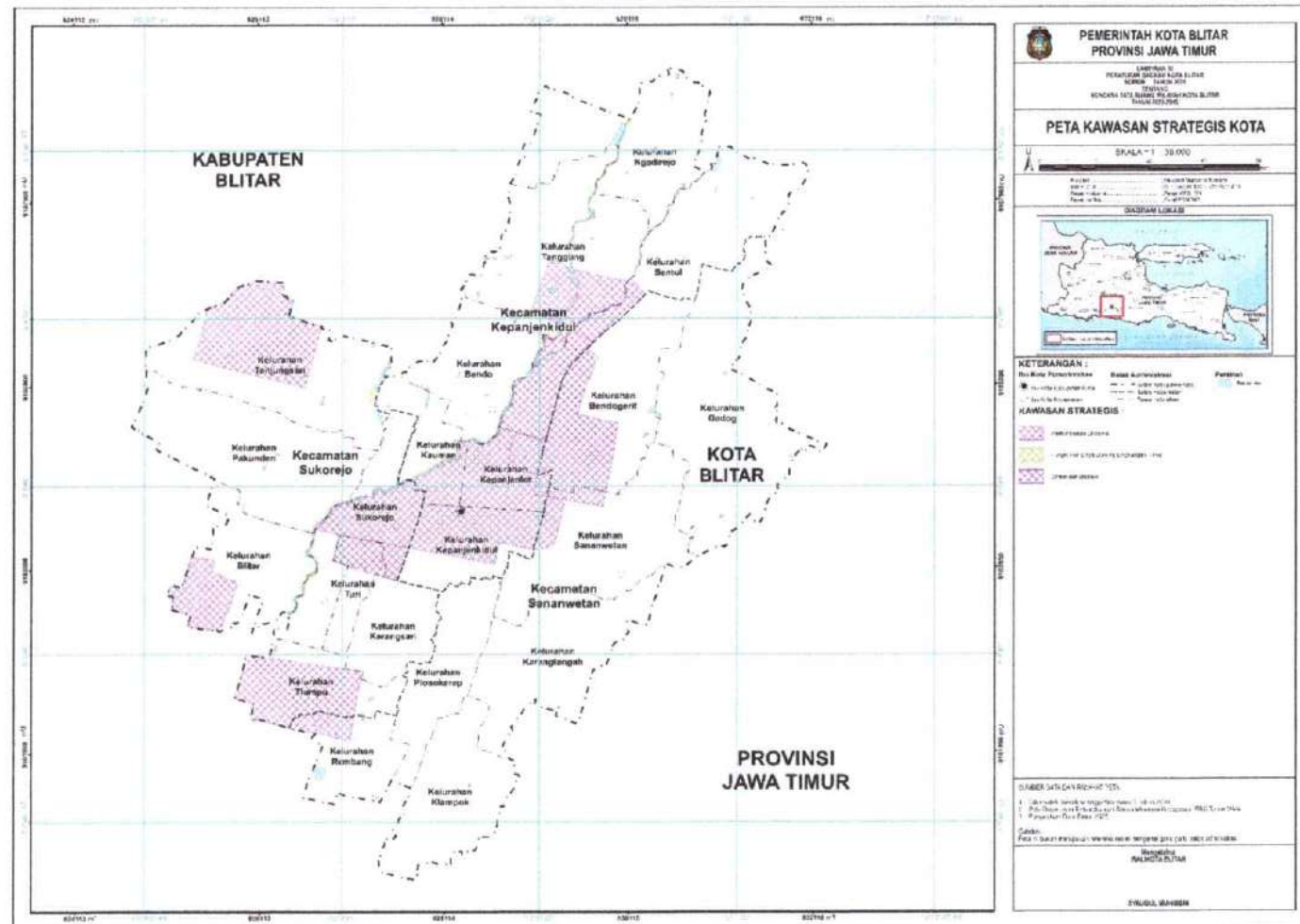
2

c. Kawasan Strategis Kota

Kawasan strategis kota merupakan bagian wilayah kota yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup wilayah kota di bidang ekonomi, sosial budaya, sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, dan/atau lingkungan hidup. Delineasi kawasan strategis kota berbentuk poligon dan bersifat indikatif. Nilai strategis kawasan strategis kota dirumuskan berdasarkan kriteria:

- a. Mendukung tujuan penataan ruang wilayah kota;
- b. Tidak bertentangan dengan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kota;
- c. Berdasarkan nilai strategis dari aspek eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi penanganan kawasan;
- d. Kesepakatan masyarakat berdasarkan kebijakan terhadap tingkat kestrategisan kawasan yang akan ditetapkan di wilayah kota;
- e. Berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kota;
- f. Memperhatikan faktor-faktor di dalam tatanan ruang wilayah kota yang memiliki kekhususan;
- g. Menyebutkan dan memperhatikan kawasan strategis nasional yang ada di wilayah kota;
- h. Dapat berhimpitan dengan kawasan strategis nasional, namun harus memiliki kepentingan/kekhususan yang berbeda serta harus ada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang jelas;
- i. Mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah dan kemampuan pemerintah daerah kota untuk bekerja sama dengan badan usaha dan/atau masyarakat;
- j. Dapat merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis lainnya yang sesuai dengan kepentingan pembangunan wilayah kota; dan
- k. Mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kawasan strategis Kota Blitar terdiri dari kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya serta kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2025

Gambar 2.60
Peta Rencana Kawasan Strategis Kota Blitar

d. Isu Strategis

Isu strategis wilayah merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan penataan ruang daerah dimasa yang akan datang. Isu strategis wilayah di Kota Blitar antara lain:

1. Rencana pengembangan sistem jaringan persampahan wilayah lintas kab./kota: Blitar yang melayani Kota Blitar dan Kabupaten Blitar;
2. Rencana pembangunan Pasar Agro yang merupakan salah satu amanah dari Perpres 109 tahun 2020 terkait program strategis nasional belum dapat dilakukan;
3. Pembangunan Double Track jalur kereta api di jalur Jawa Selatan termasuk melewati Kota Blitar tertuang dalam rencana Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia No. 9 tahun 2022 tentang Proyek Strategis Nasional;
4. Konversi lahan tidak terbangun menjadi terbangun karena adanya perubahan pemanfaatan ruang dari non terbangun menjadi terbangun. Banyak tumbuhnya kawasan perumahan;
5. Pengembangan wisata kompleks Makam Bung Karno, Perjuangan PETA dan Kampung Wisata Kreatif termuat dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 sebagai dasar Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020;
6. Penemuan situs Cagar Budaya baru yakni Situs Gedog Baru di Kota Blitar menambah koleksi Cagar Budaya dimana hal tersebut berpengaruh pada ketersediaan SK Cagar Budaya di Kota Blitar ini;
7. Rencana Pengembangan Jalan Tol Tulungagung-Blitar-Kepanjen (Agungblijen) termuat dalam Keputusan Menteri PUPR Nomor 367/KPTS/M/2023;
8. Adanya perbedaan batas administrasi dalam Permendagri no 44 tahun 2018, batas yang digunakan dalam RTRW kota yang ditetapkan pada tahun 2011, dan batas administrasi pada RTRW Provinsi yang ditetapkan pada tahun 2019;
9. Beberapa mata air teridentifikasi mengering.

Isu-isu strategis di Kota Blitar akan diakomodir ke dalam pertimbangan penyusunan rencana sebagai berikut:



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2025

Gambar 2.61
Isu Strategis Kota Blitar

e. Potensi

Potensi Wilayah adalah kemampuan suatu daerah yang berupa sumber daya yang dapat diambil manfaatnya untuk dikembangkan sehingga dapat meningkatkan kemampuan wilayah yang bersangkutan. Potensi Kota Blitar antara lain:

1. Potensi Ekonomi Wilayah

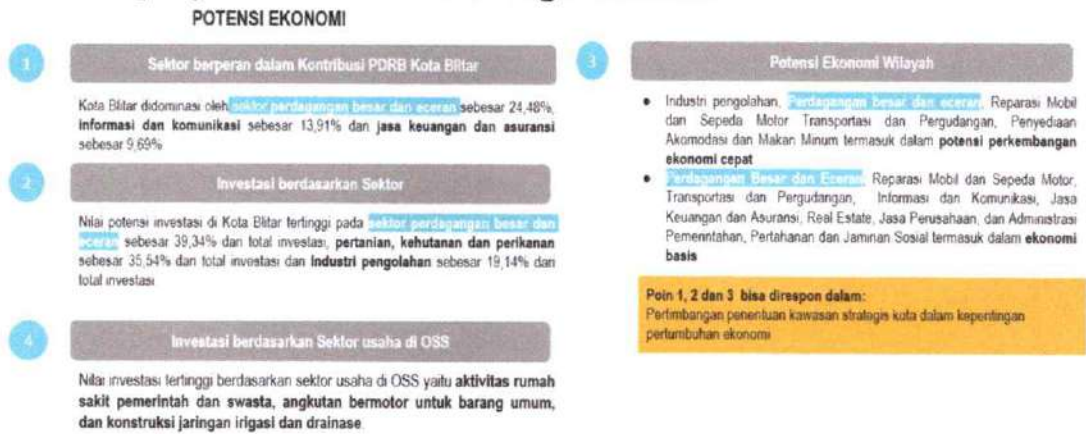
Potensi ekonomi wilayah di Kota Blitar sebagai berikut:

1. Kota Blitar didominasi oleh sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 24,48% (persen), informasi dan komunikasi sebesar 13,91% (persen) dan jasa keuangan dan asuransi sebesar 9,69% (persen);
2. Nilai potensi investasi di Kota Blitar tertinggi pada sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 39,34% (persen) dari total investasi, pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 35,54% (persen) dari total investasi dan Industri pengolahan sebesar 19,14% (persen) dari total investasi;
3. Industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor transportasi dan pergudangan, penyediaan

akomodasi dan makan minum termasuk dalam potensi perkembangan ekonomi cepat;

4. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan, Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi, Real Estate, Jasa Perusahaan, dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial termasuk dalam ekonomi basis;
5. Nilai investasi tertinggi berdasarkan sektor usaha di OSS yaitu aktivitas rumah sakit pemerintah dan swasta, angkutan bermotor untuk barang umum, dan konstruksi jaringan irigasi dan drainase.

Potensi-potensi ekonomi wilayah di Kota Blitar akan diakomodir ke dalam pertimbangan penyusunan rencana sebagai berikut:



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2025

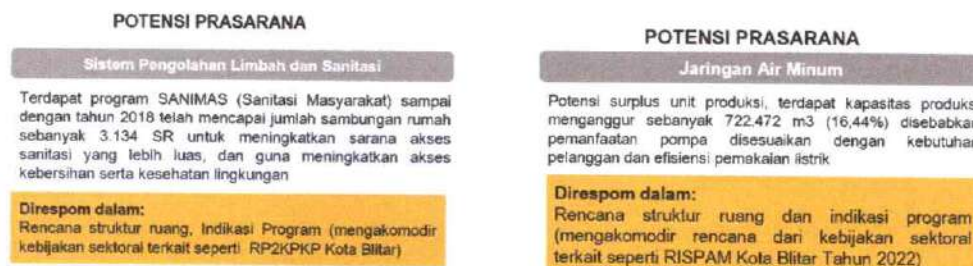
Gambar 2.62
Potensi Ekonomi Kota Blitar

2. Potensi Sarana dan Prasarana

Potensi sarana dan prasarana di Kota Blitar sebagai berikut:

1. Terdapat program SANIMAS (Sanitasi Masyarakat) sampai dengan tahun 2018 telah mencapai jumlah sambungan rumah sebanyak 3.134 SR untuk meningkatkan sarana akses sanitasi yang lebih luas, dan guna meningkatkan akses kebersihan serta kesehatan lingkungan;
2. Potensi surplus unit produksi, terdapat kapasitas produksi menganggur sebanyak 722.472 m³ (16,44% (persen)) disebabkan pemanfaatan pompa disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan dan efisiensi pemakaian listrik.

Potensi-potensi sarana dan prasarana di Kota Blitar akan diakomodir ke dalam pertimbangan penyusunan rencana sebagai berikut :



Sumber : *Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2025*

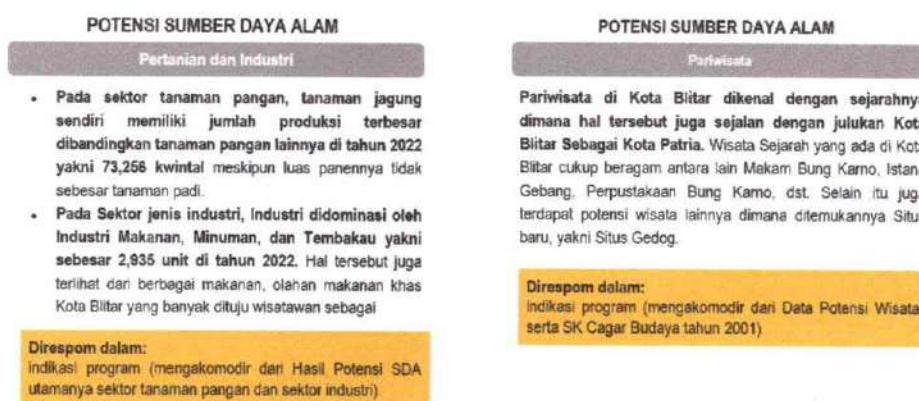
Gambar 2.63
Potensi Sarana dan Prasarana Kota Blitar

3. Potensi Sumber Daya Alam

Potensi sumber daya alam di Kota Blitar sebagai berikut:

1. Pada sektor tanaman pangan, tanaman jagung sendiri memiliki jumlah produksi terbesar dibandingkan tanaman pangan lainnya di tahun 2022 yakni 73,256 kuintal meskipun luas panennya tidak sebesar tanaman padi. Hal tersebut tentunya berpotensi sebagai pengembangan tanaman pangan dari hulu hingga hilirnya nanti jika dikelola secara optimal;
2. Pada Sektor industri, industri didominasi oleh industri makanan, minuman, dan tembakau yakni sebesar 2,935 unit di tahun 2022. Sektor tersebut tentunya apabila disertai dukungan baik dari pihak swasta dan pemerintah, atau pihak lainnya akan mampu menambah PAD Kota Blitar kedepan;
3. Pariwisata di Kota Blitar dikenal dengan sejarahnya dimana hal tersebut juga sejalan dengan julukan Kota Blitar Sebagai Kota Patria. Wisata Sejarah yang ada di Kota Blitar cukup beragam antara lain Makam Bung Karno, Istana Gebang, Perpustakaan Bung Karno, dan sebagainya. Selain itu juga terdapat potensi-potensi wisata lainnya dimana ditemukannya Situs baru, yakni Situs Gedog.

Potensi sumber daya alam di Kota Blitar akan diakomodir ke dalam pertimbangan penyusunan rencana sebagai berikut:



Sumber : *Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2025*

Gambar 2.64
Potensi Sumber Daya Alam Kota Blitar

4. Potensi Fisik Wilayah

Potensi fisik wilayah di Kota Blitar sebagai berikut:

1. Kota Blitar didominasi oleh klasifikasi pengembangan tinggi sebesar 73,76% (persen) dari total luas wilayah. Sehingga dapat mendukung untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya;
2. Status daya dukung air di Kota Blitar adalah belum terlampaui yang berarti kebutuhan air masih di bawah ketersediaan air. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat nilai surplus yang besar dari ketersediaan air di Kota Blitar sehingga masih bisa digunakan untuk keperluan kegiatan budidaya lainnya.

f. Permasalahan

Permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan wilayah dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan penataan ruang. Berikut permasalahan di Kota Blitar:

1. SK Cagar Budaya yang belum diperbaharui dimana untuk yang terakhir ada pada Keputusan Walikota Blitar Nomor 24 Tahun 2001 tentang Penetapan Lokasi Benda Cagar Budaya di Wilayah Kota Blitar sebagai Obyek Wisata Daerah. Lokasi yang tercantum ada 10 lokasi, antara lain Makam Proklamator RI Bung Karno Jalan Mayjen Sungkono, Rumah Ibu Wardoyo, Jalan Sultan Agung, Taman Makam Pahlawan Raden Wijaya Jalan Shodanco Supriyadi, Komplek Monumen PETA Jalan Shodanco Supriyadi, Makam Aryo Blitar Jalan Pamungkur Blitar, Komplek Makam Pangeranan, Jalan Jalan Shodanco Blitar Jalan Sultan Agung, Komplek Pendopo Kabupaten Blitar dan Alon - Alon Jalan Semeru, Rumah Dinas Walikota Blitar Jalan Shodanco Supriyadi, Rumah Dinas Dan Yon 511 Jalan Panglima Sudirman, Kompleks Bangunan PGSD Jalan Mayjen Sungkono;
2. Masih kecilnya minat masyarakat untuk menggunakan angkutan kota sehingga armada yang ada beralih penggunaannya untuk angkutan sekolah;
3. Kondisi Terminal Tipe C Kota Blitar yang terbengkalai. Ada rencana untuk difungsikan

- sebagai tempat tunggu ojek online dan angkutan wisata;
4. Belum optimalnya pemanfaatan terminal barang diukur dari capaian retribusi pada semester pertama tahun 2023 yang masih jauh dari target;
 5. Terjadi perubahan lahan tidak terbangun menjadi perumahan yang masif di Kota Blitar. Perubahan lahan paling besar terjadi di Kecamatan Sananwetan. Jenis perubahan paling besar yang terjadi adalah perkebunan menjadi perumahan;
 6. Status daya dukung bahan pangan di Kota Blitar adalah terlampaui yang berarti kebutuhan pangan melebihi ketersediaan pangan. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Blitar berpotensi tidak tercukupi kebutuhan bahan pangannya;
 7. Belum optimalnya pemanfaatan IPLT Kota Blitar, dimana kondisi saat ini ritase yang masuk masih sedikit;
 8. Jika dilihat dari pelanggan PLN, belum optimalnya pemenuhan pelayanan PLN di Kecamatan Sukorejo sebesar -12,69% (persen) dari total jumlah KK dan Kecamatan Sananwetan sebesar -9,67% (persen) dari total jumlah KK;
 9. Terdapat 15,02% (persen) SPAM non Aktif dari keseluruhan SPAM terbangun;
 10. Data tampung TPA Ngegong overload;
 11. Kerusakan bangunan sumber daya air;
 12. Bahaya bencana banjir lahar.
- g. Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota
1. Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kota Blitar
Tujuan penataan ruang wilayah kota dirumuskan dengan kriteria:
 - a. Mendukung tujuan penataan ruang yang tercantum pada RTR (Rencana Tata Ruang) di atasnya (RTRW nasional dan rencana rincinya, serta RTRW provinsi dan rencana rincinya) melalui keterpaduan antar sektor, wilayah, dan masyarakat;
 - b. Mewujudkan aspek keruangan yang harmonis dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
 - c. Mengakomodasi fungsi dan peran kota yang telah ditetapkan dalam RTRW nasional, serta RTRW provinsi;
 - d. Memperhatikan isu strategis, potensi unggulan dan karakteristik wilayah kota;
 - e. Jelas, spesifik, terukur dan dapat dicapai dalam jangka waktu perencanaan 20 (dua puluh) tahun; dan
 - f. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Sejalan dengan tujuan penataan ruang provinsi dan tujuan pembangunan sektoral Kota Blitar, tujuan penataan ruang wilayah Kota Blitar dirumuskan sebagai berikut:

“MEWUJUDKAN KOTA BLITAR SEBAGAI PUSAT PELAYANAN PERDAGANGAN DAN JASA REGIONAL DAN KOTA WISATA YANG DIDUKUNG OLEH INDUSTRI PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN DAN PERKEBUNAN YANG PRODUKTIF DAN BERKELANJUTAN.”

Kata Kunci:

1. Pelayanan Perdagangan Jasa

Adanya pengembangan dan peningkatan pariwisata di Kota Blitar secara langsung akan berimbas pada sektor perdagangan dan jasa, dimana sektor inilah yang akan mendukung pariwisata yang ada. Banyaknya pengunjung tentu membutuhkan berbagai kebutuhan yang tentunya dapat disediakan melalui adanya perdagangan dan jasa disekitar lokasi wisata tersebut. Dimana dalam 20 (dua puluh) tahun kedepan pelayanan perdagangan jasa tidak hanya dalam lingkup regional saja, diharapkan juga dapat melayani pada skala nasional. Hal tersebut juga didukung dengan ditetapkannya Kota Blitar sebagai Pusat Kegiatan Wilayah dalam RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043 serta transformasi Kota Blitar yang mampu menjadi simpul transit dan pusat distribusi komoditas unggulan.

2. Kota Wisata

Kota Blitar disebut sebagai Kota Patria karena aspek patriotik dan sejarah-sejarah kebangsaan dan kepahlawanan sangatlah kental di kota ini. Peninggalan-peninggalan sejarah dan tapak tilas perjuangan para pahlawan banyak terdapat di Kota Blitar. Hal ini dimanfaatkan Kota Blitar sebagai daerah wisata, selain guna mengenang jasa pahlawan juga untuk menumbuhkan dan meningkatkan rasa kepahlawanan dan kebangsaan, cinta tanah air kepada masyarakat luas pada umumnya dan kepada para generasi bangsa terutama pemuda-pemudi Kota Blitar pada khususnya. Wisata kebangsaan juga berkaitan dengan wisata religius yang ada di Kota Blitar, dimana terdapat makam gantung Djojodigda, Masjid Ar-Rahman serta Masjid Agung Blitar. Selain itu juga merupakan Pengembangan Kota Wisata yang ada pada Kota Blitar juga merupakan arahan dari RTRW Nasional, Arahan Peraturan Presiden Nomor

80 Tahun 2019, RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043 serta penetapan ODTW lingkup sejarah dalam RIPPARDA Jawa Timur Tahun 2017-2032.

3. Industri Pengolahan Pertanian dan Perkebunan
Pengembangan sektor pertanian dan Perkebunan akan mendukung keberlanjutan ketahanan pangan utamanya bagi Kota Blitar. Dimana diharapkan nantinya pengembangan tidak hanya didukung dari sisi produksi saja melainkan sampai pada proses pengolahan industrinya baik dalam sektor pertanian serta perkebunannya. Hal tersebut juga sesuai dengan arahan RTRW Nasional yang menyatakan Kota Blitar diarahkan sebagai kawasan andalan Kediri-Tulungagung-Blitar yang berfokus pada pengembangan pertanian, perkebunan, industri, perikanan, dan pariwisata.

4. Produktif dan Berkelanjutan

Produktif dalam artian mampu memberikan hasil yang optimal dengan meningkatkan produktivitas pertanian perkotaan maupun kegiatan lain yang mampu memberikan nilai tambah bagi Kota Blitar. Selain itu produktif juga menggambarkan suatu kegiatan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien yang tentunya juga terukur dimana akan mengikuti arus yang semakin dinamis. Sedangkan berkelanjutan dimaksudkan agar Kota Blitar tidak hanya memperhatikan generasi saat ini dalam tata ruang, namun juga bagaimana kota dapat tetap nyaman bagi generasi di masa yang akan datang dengan memperhatikan lingkungan.

2. Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kota Blitar

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah kota ditetapkan kebijakan dan strategi perencanaan penataan ruang wilayah. Kebijakan penataan ruang wilayah kota dirumuskan dengan kriteria:

1. Mampu menjabarkan tujuan penataan ruang wilayah kota;
2. Mampu menjawab isu strategis di wilayah kota;
3. Mempertimbangkan kebijakan pengembangan wilayah kota;
4. Mempertimbangkan kebijakan pengembangan kawasan strategis kota;
5. Mempertimbangkan kapasitas sumber daya yang dimiliki;
6. Mempertimbangkan kebijakan peruntukan ruang pada sempadan pantai, sungai, situ, danau, embung, waduk, dan mata air; dan
7. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Sejalan dengan tujuan penataan ruang wilayah Kota Blitar, kebijakan penataan ruang wilayah Kota Blitar dirumuskan sebagai berikut:

1. Pengembangan fungsi kota dalam mewujudkan peran regional;
 2. Pengembangan pusat pelayanan kegiatan dan memperkuat interkoneksi antar kawasan;
 3. Pengembangan wisata kebangsaan dan wisata lainnya;
 4. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana lingkungan permukiman;
 5. Peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung;
 6. Pengembangan pertanian dan perkebunan perkotaan serta industri pengolahannya;
 7. Optimalisasi peran ruang terbuka hijau kota;
 8. Pelestarian bangunan cagar budaya;
 9. Pengembangan kawasan budi daya terbangun yang mempertimbangkan efisiensi pemanfaatan ruang;
 10. Pengembangan kawasan strategis kota untuk mengoptimalisasi potensi kawasan;
 11. Pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan produktif; dan
 12. Peningkatan ketahanan ruang untuk mengurangi risiko bencana.
3. Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota Blitar

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah kota ditetapkan kebijakan dan strategi perencanaan penataan ruang wilayah. Strategi penataan ruang wilayah kota dirumuskan dengan kriteria:

1. Menjabarkan kebijakan penataan ruang wilayah kota;
2. Harus dapat dijabarkan secara spasial dalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah kota;
3. Berfungsi sebagai arahan bagi penyusunan indikasi program utama 5 (lima) tahunan dalam RTRW Kota;
4. Berfungsi sebagai dasar penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota;
5. Jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan; dan
6. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Strategi penataan ruang akan direspon oleh rencana struktur ruang dan rencana pola ruang.

Rencana struktur ruang Kota Blitar tidak terlepas dari fungsi dan peranan Kota Blitar dalam lingkup regional dan nasional, isu strategis wilayah, potensi dan permasalahan wilayah, serta tujuan penataan ruang Kota Blitar. Rencana pola ruang

Kota Blitar mengarah pada alokasi lahan yang berorientasi pada kawasan pengembangan atau budidaya dan pentingnya perlindungan terhadap kawasan lindung.

Kebijakan dan strategi Kota Blitar dijabarkan sebagai berikut:

1. Kebijakan 1: Pengembangan fungsi kota dalam mewujudkan peran regional, memiliki strategi penataan ruang sebagai berikut:
 - a. mengembangkan kegiatan perdagangan pelayanan regional;
 - b. mengarahkan pengembangan sektor-sektor ekonomi strategis dengan mengutamakan usaha ekonomi kerakyatan;
 - c. mengembangkan sektor pendukung perekonomian yang melayani kawasan regional;
 - d. meningkatkan penyediaan fasilitas kota yang mempunyai skala pelayanan regional;
 - e. meningkatkan aksesibilitas pelayanan skala regional; dan
 - f. mengembangkan kerjasama lintas wilayah dalam wilayah pengembangan blitar untuk memantapkan pelayanan dan pengembangan regional dalam berbagai sektor kegiatan.
2. Kebijakan 2: Pengembangan pusat pelayanan kegiatan dan memperkuat interkoneksi antar kawasan, memiliki strategi penataan ruang sebagai berikut:
 - a. memantapkan dan mengembangkan pusat pelayanan kota, sub pusat pelayanan kota dan pusat pelayanan lingkungan yang terintegrasi dan saling melengkapi;
 - b. memantapkan peran pusat pelayanan kota yang mampu melayani skala internal kota dan regional;
 - c. mengembangkan sub pusat pelayanan kota yang mendukung peran pusat pelayanan kota sebagai pusat perdagangan jasa, pariwisata dan pelayanan umum skala regional;
 - d. mengembangkan pusat pelayanan lingkungan pada masing-masing kawasan permukiman di kelurahan;
 - e. meningkatkan aksesibilitas jaringan jalan yang mendorong interaksi kegiatan antar bagian wilayah kota;
 - f. memisahkan pergerakan antar kota dan pergerakan dalam kota; dan
 - g. meningkatkan pelayanan dan integrasi antar moda transportasi yang mendukung tumbuh dan berkembangnya pusat pelayanan kota dan sub pusat pelayanan kota dan wilayah di sekitarnya.

3. Kebijakan 3: Pengembangan wisata kebangsaan dan wisata lainnya, memiliki strategi penataan ruang sebagai berikut:
 - a. meningkatkan dan mengembangkan objek wisata kebangsaan dan objek wisata lainnya;
 - b. mengembangkan dan melestarikan potensi budaya lokal masyarakat sebagai daya tarik wisata;
 - c. meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan pariwisata;
 - d. meningkatkan promosi dan pemasaran wisata;
 - e. mengembangkan roadmap pariwisata; dan
 - f. meningkatkan kerjasama pariwisata lintas wilayah.
4. Kebijakan 4: Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana lingkungan permukiman, memiliki strategi penataan ruang sebagai berikut:
 - a. meningkatkan kualitas permukiman dan perumahan diutamakan untuk kawasan permukiman kumuh;
 - b. memenuhi kebutuhan perumahan yang layak dan sehat, baik oleh pemerintah maupun melalui kerjasama investasi swasta;
 - c. mendistribusikan sarana lingkungan di setiap pusat kegiatan sesuai fungsi kawasan dan hirarki pelayanan;
 - d. mengembangkan prasarana jaringan listrik dan sumber energi listrik alternatif;
 - e. mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi yang berbasis informasi pada kawasan pelayanan publik;
 - f. mengoptimalkan pendayagunaan dan pengelolaan sumber daya air untuk menjaga ketersediaan serta keberlanjutan sumber daya air;
 - g. mengoptimalkan sistem pengelolaan persampahan terpadu dengan teknik-teknik yang berwawasan lingkungan serta pemanfaatan persampahan;
 - h. mengembangkan prasarana pengolahan air minum;
 - i. meningkatkan kualitas air bersih menjadi air minum pada kawasan-kawasan pelayanan umum;
 - j. meningkatkan prasarana pengelolaan air limbah rumah tangga yang berbasis komunal; dan
 - k. mengoptimalkan fungsi jaringan.
5. Kebijakan 5: Peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung, memiliki strategi penataan ruang sebagai berikut:

!

- a. melestarikan kawasan resapan air untuk menjaga ketersediaan sumberdaya air;
 - b. pengendalian perubahan kawasan lindung melalui pembatasan pembangunan di lahan produktif;
 - a. mengembalikan fungsi kawasan lindung yang telah rusak atau pemanfaatannya yang telah menyimpang; dan
 - b. mengelola kawasan lindung secara terpadu.
6. Kebijakan 6: Pengembangan pertanian dan perkebunan perkotaan serta industri pengolahan, memiliki strategi penataan ruang sebagai berikut:
- a. meningkatkan dan mengembangkan kawasan agrowisata di bagian selatan kota;
 - b. mengembangkan kawasan pertanian dan perkebunan serta industri pengolahannya;
 - c. meningkatkan sarana dan prasarana pertanian dan perkebunan serta industri pengolahannya; dan
 - d. mendorong peran serta masyarakat dan swasta pengelolaan kawasan pertanian dan perkebunan serta industri pengolahannya.
7. Kebijakan 7: Optimalisasi peran ruang terbuka hijau kota, memiliki strategi penataan ruang sebagai berikut:
- a. mempertahankan fungsi dan menata ruang terbuka hijau yang ada;
 - b. mengembalikan ruang terbuka hijau yang telah beralih fungsi;
 - c. meningkatkan ketersediaan ruang terbuka hijau meliputi lapangan olahraga terbuka, taman kota, taman lingkungan, sabuk hijau, jalur hijau jalan, sempadan, dan inovasi penyediaan RTH lainnya;
 - d. pengembangan ruang terbuka hijau dengan desain ramah lingkungan untuk meningkatkan fungsi keberlanjutan; dan
 - e. mendorong peran serta masyarakat dan swasta dalam penyediaan dan pengelolaan ruang terbuka hijau kota.
8. Kebijakan 8: Pelestarian kawasan cagar budaya, memiliki strategi penataan ruang sebagai berikut:
- a. menetapkan bangunan-bangunan yang memiliki nilai sejarah sebagai bangunan cagar budaya;
 - b. melakukan pemeliharaan dan revitalisasi bangunan cagar budaya kota;
 - c. mengembangkan potensi kawasan cagar budaya untuk kepentingan sejarah, ilmu pengetahuan, kebudayaan, kepariwisataan dan ekonomi masyarakat; dan

- d. mendorong peran serta masyarakat dalam upaya melestarikan bangunan dan kawasan cagar budaya.
9. Kebijakan 9: Pengembangan kawasan budidaya terbangun yang mempertimbangkan efisiensi pemanfaatan ruang, memiliki strategi penataan ruang sebagai berikut:
- a. mengembangkan kawasan budidaya terbangun secara vertikal di kawasan pusat kota;
 - b. mendistribusikan pengembangan perumahan yang diarahkan pada kawasan selatan kota;
 - c. meningkatkan pembangunan permukiman vertikal;
 - d. mengendalikan alih fungsi lahan menjadi permukiman;
 - e. mencegah, merehabilitasi dan merevitalisasi kawasan permukiman kumuh;
 - f. mengembangkan dan menata kawasan perdagangan secara merata sesuai dengan fungsi pelayanan kawasan; dan
 - g. mengembangkan ruang-ruang kawasan yang proporsional dengan sistem insentif dan disinsentif.
10. Kebijakan 10: Pengembangan kawasan strategis kota untuk mengoptimalkan potensi kawasan, memiliki strategi penataan ruang sebagai berikut:
- a. mengembangkan kawasan pusat perdagangan dan jasa pusat kota sebagai kawasan strategis pertumbuhan ekonomi;
 - b. mengembangkan kawasan yang mewakili karakteristik dan penanda budaya kota sebagai kawasan strategis sosial budaya;
 - c. mengembangkan kawasan yang mendukung keseimbangan lingkungan kota sebagai kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
 - d. mendorong peran dan fungsi masing-masing kawasan strategis untuk mencapai tujuan penataan ruang kota.
11. Kebijakan 11: Pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan produktif, memiliki strategi penataan ruang sebagai berikut:
- a. menetapkan kawasan pertanian pangan berkelanjutan dalam rangka perlindungan lahan pangan; dan
 - b. mengendalikan alih fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan.
12. Kebijakan 11: Peningkatan Ketahanan Ruang untuk Mengurangi Risiko Bencana, memiliki strategi penataan ruang sebagai berikut:
- a. meningkatkan pengendalian dan pengawasan pembangunan pada kawasan rawan bencana;

- b. mengembangkan sistem mitigasi bencana;
- c. menetapkan kawasan rawan bencana melalui sistem zonasi kawasan rawan bencana;
- d. mengembangkan jalur dan ruang evakuasi bencana pada kawasan rawan bencana.

2.3.2.4.2. Telaahan terhadap Isu Strategis KLHS RPJMD Kota Blitar

Perumusan terhadap isu strategis pembangunan berkelanjutan Kota Blitar merupakan salah satu tahapan penting dalam kajian KLHS. Perumusan isu strategis pembangunan berkelanjutan dilakukan dengan cara menggali dan mengkaji data – data sekunder yang ada seperti dokumen KLHS RTRW, Rancangan Teknokratik RPJMD Kota Blitar 2025 – 2029 dan berdasarkan identifikasi capaian tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB), serta dokumen kajian lainnya. Selain itu dengan menggali informasi data primer yang dilakukan melalui kegiatan wawancara, diskusi, lokakarya, dan FGD dengan (*stakeholders*) pihak- pihak yang memiliki kompetensi terhadap kondisi Kota Blitar, baik atas nama individu maupun lembaga.

Penyusunan isu strategis menggunakan pertimbangan hasil rumusan skenario dan masukan saran yang disepakati dari kegiatan uji publik yang menghasilkan isu pembangunan berkelanjutan paling strategis jangka menengah Kota Blitar. Isu Pembangunan Berkelanjutan paling strategis tersebut meliputi :

1. Daya saing sumber daya manusia;
2. Pengentasan kemiskinan;
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan (*Good Governance*);
4. Penguatan ekonomi lokal berbasis wisata kebangsaan;
5. Peningkatan keamanan dan kenyamanan kota;
6. Minimalisasi degradasi lingkungan;
7. Peningkatan infrastruktur dasar permukiman;
8. Peningkatan mitigasi bencana perkotaan;
9. Indikator yang telah ada dalam RPJMD tetapi belum mencapai target adalah mendorong pencapaian indikator tersebut agar dapat mencapai target nasional;
10. Indikator yang memiliki data tetapi belum ada dalam target RPJMD dan belum mencapai target nasional;
11. Indikator yang belum memiliki data dan ada target yang ditetapkan secara nasional.

2.3.2.4.2.1. Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan Pilar Sosial

Pilar sosial mencakup lima tujuan pada pembangunan berkelanjutan, yaitu Tujuan 1 mengakhiri segala bentuk kemiskinan; Tujuan 2 menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik serta meningkatkan pertanian berkelanjutan; Tujuan 3 menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia; Tujuan 4 menjamin pendidikan yang inklusif dan merata serta mempromosikan belajar sepanjang hayat; dan Tujuan 5

mencapai kesejahteraan gender dan memberdayakan kaum perempuan. Dikaitkan dengan kondisi lingkungan hidup, maka yang termasuk dalam pilar ini antara lain kondisi daya dukung pangan yang terkait dengan lahan kawasan pertanian serta tingkat kerentanan dan adaptasi perubahan iklim. Berikut adalah rumusan isu strategis TPB pilar sosial di Kota Blitar :

Tabel 2.62
Rumusan Isu Strategis TPB Pilar Sosial Kota Blitar

TPB PILAR SOSIAL	ISU STRATEGIS
Tujuan 1 mengakhiri segala bentuk kemiskinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proporsi peserta Program Jaminan Sosial 2. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan 3. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan 4. Persentase rumah tangga kumuh perkotaan
Tujuan 2 menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik serta meningkatkan pertanian berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prevalensi stunting 2. Prevalensi malnutrisi 3. Prevalensi anemia pada ibu hamil 4. Prevalensi konsumsi pangan
Tujuan 3 menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) 2. Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai SPM
Tujuan 4 menjamin pendidikan yang inklusif dan merata serta mempromosikan belajar sepanjang hayat	<p>Proporsi anak-anak dan remaja:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika. 2. Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan assesmen nasional
Tujuan 5 mencapai kesejahteraan gender dan memberdayakan kaum perempuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah kebijakan responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan 2. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di

TPB PILAR SOSIAL	ISU STRATEGIS
	parlemen tingkat daerah

Sumber: *Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2025, data diolah*

2.3.2.4.2.2. Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan Pilar Ekonomi

Pilar ekonomi mencakup 5 (lima) tujuan pada pembangunan berkelanjutan, yaitu Tujuan 8 (delapan) meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua; Tujuan 9 (sembilan) membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi; Tujuan 10 (sepuluh) mengurangi kesenjangan intra dan antar negara; dan Tujuan 17 (tujuh belas) menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Tabel 2.63
Rumusan Isu Strategis TPB Pilar EkonoI Kota Blitar

TPB PILAR EKONOMI	ISU STRATEGIS
Tujuan 8 (delapan) meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua	1. Persentase tenaga kerja informal 2. Jumlah peningkatan usaha industri pariwisata dalam proporsi terhadap total usaha
Tujuan 17 (tujuh belas) menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan	Proporsi penduduk terlayani <i>mobile broadband</i> (Proporsi RT RW Terlayani Internet)

Sumber: *Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2025, data diolah*

2.3.2.4.2.3. Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan Pilar Lingkungan

Pilar lingkungan mencakup 6 (enam) tujuan pada pembangunan berkelanjutan, yaitu Tujuan 6 (enam) menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua; Tujuan 11 (sebelas) menjadikan kota dan permukiman yang inklusif, aman tangguh dan berkelanjutan; Tujuan 12 (dua belas) menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan; Tujuan 13 (tiga belas) mengatasi langkah segera untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya dan Tujuan 15 (lima belas) pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan. Rumusan isu pembangunan berkelanjutan strategis berdasarkan pilar lingkungan dijabarkan pada tabel berikut :



Tabel 2.64
Rumusan Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis
berdasarkan Pilar Lingkungan

TPB PILAR LINGKUNGAN	ISU STRATEGIS
Tujuan 6 (enam) Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua	1. Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan 2. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak
Tujuan 11 (sebelas) menjadikan kota dan permukiman yang inklusif, aman tangguh dan berkelanjutan	Indeks Risiko Bencana (IRB)

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2025, data diolah

2.3.2.4.2.4. Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan Pilar Hukum dan Tata Kelola Kelembagaan

Pilar hukum dan tata kelola mencakup satu tujuan pada pembangunan berkelanjutan berdasarkan pilar hukum dan tata kelola digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.65
Rumusan Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis
berdasarkan Pilar Hukum dan Tata Kelola

TPB PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA	ISU STRATEGIS
Tujuan 16 (enam belas) Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua dan membangun lembaga yang efektif, bertanggungjawab, dan inklusif di semua tingkatan	1. Persentase penggunaan <i>e-procurement</i> terhadap belanja pengadaan 2. Proporsi anak umum dibawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2025, data diolah

2.3.2.4.3. Telaahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kota Blitar 2025 – 2045

Isu Strategis Pembangunan Jangka Panjang Kota Blitar Tahun 2025 – 2045 adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan sumberdaya manusia yang berkualitas didasari moral dan kekuatan religius;
2. Antisipasi tenaga kerja, alih dari sumber daya manusia ke teknologi;
3. Transformasi pasar dari konvensional menuju digital;
4. Ekonomi yang harus tumbuh dari waktu ke waktu;
5. Dua kutub pertumbuhan ekonomi di Blitar Raya;

6. Ancaman kemiskinan dan Kawasan kumuh;
7. Tuntutan pelayanan PEMDA secara digital terintegrasi;
8. Pembangunan karakter nasional dari Bumi Bung Karno;
9. Ancaman menurunnya kualitas lingkungan hidup, perubahan iklim dan bencana alam;
10. Pentingnya pembangunan daerah yang berkelanjutan;
11. Pelayanan sanitasi, air minum yang aman;
12. Pelayanan persampahan dan pengurangan sampah dari hulu.

Visi RPJPD Kota Blitar Tahun 2025 – 2045 adalah :
“KOTA CERDAS, INKLUSIF, MAJU DAN BERKELANJUTAN”

1. “Cerdas”, dimaksudkan Kota Blitar menjadi Kota Cerdas yakni cerdas sosial, cerdas ekonomi, cerdas pemerintah daerah, cerdas infrastruktur dan cerdas lingkungan dalam bentuk transformasi sosial, transformasi ekonomi, transformasi tata kelola yang didukung dengan ketahanan lingkungan.
2. “Inklusif”, yaitu pembangunan Kota Blitar dibangun atas dasar kesetaraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat. Kesetaraan dan keadilan atas semua sektor pembangunan pendidikan, kesehatan, pelayanan dasar, pelayanan umum dan juga sektor ekonomi yang meliputi kesempatan berusaha dan kesempatan mendapatkan penghasilan.
3. “Maju”, yaitu selalu bergerak terdepan dalam setiap perkembangan, meraih kondisi yang selalu lebih baik dari waktu ke waktu dengan pandangan jauh ke depan.
4. “Berkelanjutan”, yaitu baik dari sisi manajemen pemerintahan maupun sisi pengelolaan ruang. Dari sisi manajemen pemerintahan berkelanjutan dimaksudkan adanya keberlanjutan manajemen pemerintahan daerah dalam 4 (empat) tahapan suksesi, mengingat RPJPD ini meliputi 4 (empat) tahapan periodisasi. Sedangkan dari sisi pengelolaan ruang adalah pelaksanaan pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan hidup. Pembangunan yang dilakukan dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup dengan meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Selanjutnya untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Kota Blitar, ditetapkan 4 (empat) sasaran dengan 5 (lima) indikator yang dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 2.66
Sasaran Visi Kota Blitar

VISI	SASARAN	INDIKATOR
Kota cerdas, inklusif, maju dan berkelanjutan	Peningkatan pendapatan per kapita	PDRP per Kapita (Rp juta)
		Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (%)
	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	Tingkat kemiskinan (%)
		Rasio Gini
Peningkatan daya saing sumber daya manusia	Indek Pembangunan Manusia	
Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	

Sumber: *Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar 2025, data diolah*

Agar tingkat keberhasilan Visi Pembangunan Kota Blitar dapat terukur maka visi dioperasionalkan dalam misi dan arah kebijakan 4 (empat) tahap pembangunan 5 (lima) tahunan atau pembangunan jangka menengah daerah. Misi pembangunan jangka panjang ditetapkan dalam 5 (lima) misi sebagai berikut:

1. Membangun SDM Kota Blitar yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing (Transformasi Sosial), dengan mewujudkan masyarakat yang sehat, berpendidikan, serta memiliki kompetensi sehingga mempunyai daya saing di dunia kerja didampingi kebijakan perlindungan sosial yang proporsional dan berkeadilan.
2. Mengembangkan Ekosistem Ekonomi dan Inovasi Kota Blitar Secara Berkelanjutan (Transformasi Ekonomi), dengan membangun ekosistem ekonomi yang bertransformasi dari konvensional menuju digital didukung oleh riset dan inovasi secara berkelanjutan.
3. Digitalisasi Pelayanan Publik Kota Blitar (Transformasi Tata Kelola), melalui penyelenggaraan pelayanan pemerintah pada semua bidang dengan berbasis digital yang mengintegrasikan semua bidang pelayanan dengan pola interoperabilitas sehingga mewujudkan pelayanan pemerintahan yang prima cepat, inklusif dan berkeadilan.
4. Mewujudkan Kota Blitar yang Nyaman, Damai, Berketahanan Sosial dan Budaya Didasari Kekuatan Religius serta Jiwa Nasionalisme dan Patriotisme, dengan pengembangan dan peningkatan tertib sosial dalam semua sektor kehidupan masyarakat dan pengembangan demokratisasi yang dinamis didasari

nasionalisme, patriotisme serta kerukunan beragama masyarakat Kota Blitar mewujudkan Kota Blitar yang nyaman, damai disertai berketahanan sosial dan budaya.

5. Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar Berkelanjutan, Berwawasan Lingkungan dan Berketahanan Ekologi, dengan menciptakan kekuatan beradaptasi secara terus menerus melalui pembangunan berkelanjutan mewujudkan Kota Blitar peduli terhadap lingkungan dan berketahanan menghadapi bencana ekologi.

Sedangkan kebijakan untuk periode I (2025 – 2029) diarahkan pada :

1. Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial;
2. Pengembangan Ekonomi inklusif serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja;
3. Tata kelola pemerintahan yang tepat fungsi dan penyederhanaan regulasi;
4. Memperkuat ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, kelembagaan demokrasi dan penataan kebijakan pendukung stabilitas ekonomi daerah;
5. Penyediaan infrastruktur berkualitas dan berwawasan lingkungan hidup.

2.3.2.5. Penelaahan terhadap RPJMD Daerah Lainnya

Penyusunan RPJMD juga memperhatikan dokumen RPJMD daerah lainnya agar tercipta keterpaduan pembangunan jangka menengah daerah dengan daerah sekitar, atau dalam satu wilayah kepulauan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan atau dengan daerah lain yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Kabupaten Blitar adalah satu – satunya daerah perbatasan yang melingkupi wilayah Kota Blitar. Ada beberapa isu strategis yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD antara lain :

1. Kualitas Sumber Daya Manusia
Tuntutan terhadap terwujudnya SDM berkualitas khususnya generasi muda dalam menyongsong Indonesia Emas 2045;
2. Pertumbuhan Ekonomi
Optimalisasi pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan potensi dan sumber daya lokal, berwawasan lingkungan hidup dan didukung oleh infrastruktur yang mantap;
3. Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik
Peningkatan kinerja birokrasi dan pelayanan publik;
4. Ketertarikan dan ketertiban
Terjaganya ketenteraman, ketertiban serta kebebasan beragama dalam kehidupan masyarakat.

Arah pembangunan secara umum direpresentasikan dalam rumusan visi dan misi. Adapun visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Blitar disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.67
Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Blitar Periode 2025 – 2029

Visi	Misi
Kabupaten Blitar Berdaya dan Berjaya	Membangun generasi muda berkualitas, berakhlak, sehat jasmani dan rohani, berpendidikan yang baik dan keluarga sehatera yang siap menyongsong Indonesia Emas
	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal didukung infrastruktur yang mantap, berwawasan lingkungan, berpihak dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat maupun dunia usaha, ramah gender serta tangguh bencana
	Meningkatkan kinerja birokrasi dan pelayanan publik berbasis elektronik yang akuntabel dan bebas korupsi, bersifat melayani serta peka terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat
	Menjamin ketentraman, ketertiban serta kebebasan beragama dalam kehidupan bermasyarakat dan pelaksanaan pembangunan

Sumber: *Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar 2025, data diolah*

Kerjasama Kabupaten – Kota Blitar menjadi salah satu isu strategis yang dapat dipertimbangkan dalam RPJMD Kabupaten Blitar dan RPJMD Kota Blitar sehingga perencanaan jangka menengah Kabupaten – Kota Blitar dapat secara sinergis dirumuskan dalam rangka penanganan permasalahan baik sosial, ekonomi maupun pengembangan infrastruktur wilayah terutama di wilayah – wilayah perbatasan. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Blitar 2013 – 2031, beberapa hal yang terkait dengan Kota Blitar di antaranya sebagai berikut :

1. Strategi Pengembangan sistem jaringan transportasi guna menunjang pertumbuhan dan pemerataan pembangunan wilayah melalui mengembangkan jalan kolektor primer yang menghubungkan Kota Blitar ke Pantai Serang dan menyatu dengan JLS;
2. Pengembangan kawasan pariwisata sebagai penunjang pengembangan agroindustri di Kabupaten Blitar dilaksanakan dengan strategi salah satunya adalah mengembangkan obyek wisata unggulan di Kabupaten

- Blitar dengan bekerjasama dengan Kota Blitar diantaranya pada wisata makam Bung Karno dengan Candi Penataran dan beberapa obyek wisata potensial;
3. Pengembangan trayek angkutan penumpang yang menghubungkan Kota Blitar dengan lokasi-lokasi wisata yang terdapat di Blitar Selatan, yaitu :
 - a) Kota Blitar – Kademangan – Bakung – Goa Umbul Tuk – Pantai Pangji;
 - b) Kota Blitar – Kademangan – Wonotirto – Pantai Tambakrejo;
 - c) Kota Blitar – Sutojayan – Panggungrejo – Pantai Serang;
 - d) Kota Blitar – Sutojayan – Binangun – Wates – Pantai Jolosutro;
 4. Rencana sistem air minum kota diantaranya berupa pipanisasi dari Sumber air Rambut Monte dan Dandang ke Kota Blitar.
 5. Titik rawan bencana Gunung Kelud di Kecamatan Kanigoro dengan jalur dan ruang evakuasi di Balai Desa Papungan, Balai Desa Kuningan, Klampok Kota Blitar, Boro Tuliskriyo Sanankulon, Balai Kelurahan dan Kecamatan Kanigoro, Masjid Tegalrejo, Putuk, Masjid Kr. Sono, Monggalan, dan selatan Bendungan Serut;
 6. Pengembangan kawasan perumahan skala besar diarahkan di Desa Maliran Kecamatan Ponggok dan kawasan-kawasan yang berada di sekitar perbatasan Kota Blitar seperti di Kecamatan Sanankulon, Kecamatan Nglegok, Kecamatan Garum, Kecamatan Kademangan, Kecamatan Kanigoro dan Kecamatan Talun;
 7. Pengembangan TPA Regional, yang melayani Kota Blitar dan Kabupaten Blitar.

2.3.2.6. Penetapan Isu Strategis

Kriteria penetapan isu-isu strategis mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Kriteria yang digunakan ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2.68
Kriteria Penetapan Isu Strategis

No	Kriteria	Keterangan
1.	Memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan Nasional	Isu tersebut mempunyai keterkaitan dengan kebijakan nasional, kementerian dan lembaga serta provinsi
2.	Merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah	Isu tersebut merupakan tugas dan tanggung jawab sesuai kewenangan Pemerintah Kota Blitar
3.	Dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat	Isu tersebut memiliki pengaruh yang kuar dan cakupan yang luas, baik negatif maupun positif

No	Kriteria	Keterangan
4.	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	Isu tersebut berkaitan dengan fungsi dan peran untuk mendorong penguatan terhadap penerapan kebijakan dan program pembangunan
5.	Kemungkinan atau kemudahan untuk ditangani	Penanganan isu tersebut mudah dilakukan secara kebijakan, regulasi, dan sumber daya manusia dalam jangka menengah (5 tahun)
6.	Memiliki kesesuaian dengan Tema RPJMD	Isu tersebut mendukung tema RPJMD

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Berdasarkan permasalahan pembangunan yang dihadapi, telaahan isu internasional, isu/kebijakan nasional, isu/kebijakan provinsi, isu/kebijakan Kota Blitar, dan telaahan RPJMD daerah sekitar, serta KLHS Rancangan Teknokratik RPJMD Kota Blitar, maka ditetapkan isu-isu strategis Kota Blitar, sebagai berikut:

a. Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas

Keberhasilan Kota Blitar mencapai Indeks Pembangunan Manusia yang tinggi pada angka 81,44 menunjukkan bahwa Kota Blitar sudah pada jalur yang tepat dalam penyelenggaraan pendidikan, Kesehatan dan peningkatan kesejahteraan warganya. Akan tetapi Upaya pembangunan manusia harus terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Blitar khususnya untuk meningkatkan daya saing.

Daya saing manusia ditentukan oleh tingkat pendidikan, kompetensi dan kondisi kesehatan. Tingkat Pendidikan Masyarakat minimal harus lulus Tingkat menengah dengan berbekal kompetensi bidang yang diminati. Salah satu faktor pendukung keberhasilan pendidikan di Kota Blitar adalah adanya program sekolah gratis untuk tingkat SD dan SMP, dan bantuan biaya sekolah untuk pelajar SMA dan mahasiswa perguruan tinggi yang berasal dari keluarga miskin.

Sementara itu, Kesehatan juga menjadi faktor penting penentu daya saing manusia. Kualitas kesehatan sudah harus mendapat perhatian sejak dalam kandungan ibu, sebab kesehatan kandungan akan berpengaruh pada kelahiran dan kondisi lahir menentukan jejak awal kondisi kesehatan manusia. Oleh karena itu, kebijakan meningkatkan kesehatan ibu hamil dan janin sehat, meningkatkan kualitas kesehatan balita, anak anak dan remaja menjadi *urgent*.

Kualitas pembangunan manusia juga diukur dari Usia Harapan hidup (UHH). Usia Harapan Hidup (UHH) ditentukan oleh kualitas kesehatan, semakin berkualitas kesehatan masyarakat maka Usia Harapan Hidup (UHH) juga akan semakin panjang.

b. Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran

Salah satu indikator yang paling sering dilihat dari keberhasilan pembangunan adalah penurunan tingkat kemiskinan. Kemiskinan tidak dapat dihindari oleh level pemerintahan apapun dan negara manapun, akan tetapi dapat diminimalisasi atau dikurangi dengan kebijakan yang tepat. Teori kebijakan yang dianut oleh pemerintah dalam mengurangi kemiskinan adalah meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi pengeluaran masyarakat didukung dengan memprioritaskan kebijakan penguatan pendapatan dan subsidi untuk warga miskin diprioritaskan pada daerah-daerah yang paling banyak berstatus miskin atau disebut dengan kantong-kantong kemiskinan.

3 (tiga) kebijakan itu harus didasarkan pada data yang valid dan akurat berbasis keluarga dan jiwa dengan tercatat nama disertai dengan alamat serta data-data yang dapat menggambarkan kondisi keluarga atau individu yang dikaitkan dengan faktor-faktor penyebab kemiskinan (*By Name By Address By Case*). Dengan demikian akan dapat terpantau secara jelas perkembangan level kesejahteraan baik status keluarga maupun individunya.

Mengurangi pengangguran tidak semudah teori dengan menyediakan lapangan pekerjaan. Sering kali tersedia lapangan pekerjaan karena dianggap kelas rendah, maka penduduk lokal enggan meraihnya karena faktor gengsi. Penduduk lokal inginnya bekerja pada pekerjaan yang dipandang terhormat, akan tetapi penduduk lokal tidak mempunyai tingkat pendidikan dan kompetensi yang dibutuhkan oleh formasi pekerjaan yang dianggap terhormat. Oleh karena itu, mengurangi pengangguran harus dimulai dengan peningkatan budaya masyarakat yang bangga bekerja dalam bidang apa saja daripada terlihat menganggur. Selanjutnya adalah meningkatkan pendidikan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan meningkatkan kompetensi tenaga kerja sesuai dengan bidang pekerjaannya.

Pada sisi dunia usaha, pemerintah daerah perlu melakukan pendekatan terkait formasi jenis kompetensi yang dibutuhkan. Kemudian pemerintah daerah bisa melakukan pelatihan peningkatan kompetensi sesuai kebutuhan dunia kerja baik pada pencari kerja maupun pekerja. Selain itu pemerintah daerah bisa memberikan fasilitasi investasi untuk membuka peluang kerja yang formasi tenaga kerja dimiliki oleh kebanyakan warga masyarakatnya.

Untuk dapat melakukan pengurangan pengangguran data *By Name By Address By Case* (BNBABC) juga menjadi faktor penting.

c. Penguatan Daya Saing Ekonomi Masyarakat berbasis Potensi Lokal

Isu strategis berkaitan dengan daya saing ekonomi masyarakat berbasis pada potensi lokal mempunyai 3 aspek yaitu :

1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menuju kemandirian fiskal daerah

Pembangunan daerah sangat bergantung pada kemampuan keuangan daerah. Sebagaimana telah diketahui bahwa ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat sangat dominan yaitu sebesar 80% (persen), maka apabila disimulasikan tidak ada dana transfer maka pemerintah Kota Blitar akan *kollaps*. Sebab Pendapatan asli daerahnya tidak mampu untuk membiayai operasional pemerintahan daerah yang paling minim yaitu terpenuhinya gaji pegawai. Oleh karena itu, peningkatan pendapatan asli daerah harus didorong minimal mampu pada angka 300 M – 350 M sebagaimana mandatori untuk pembayaran gaji pegawai baik ASN maupun pejabat politiknya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah berasal dari pajak dan retribusi daerah. Pajak dan retribusi daerah bermula dari pelayanan pemerintah daerah. Maka selain peningkatan perolehan dengan perluasan wilayah layanan dan eliminasi kebocoran yang kesemuanya dikenal dengan intensifikasi, pemerintah daerah harus mampu melakukan ekstensifikasi. Ekstensifikasi adalah Upaya Upaya membuka sumber sumber pendapatan baru untuk peningkatan PAD.

Kunci dari perluasan masyarakat membayar retribusi dan pajak adalah pemerintah daerah harus menggerakkan semua sendi kehidupan usaha masyarakat mulai dari yang mikro sampai dengan besar. Menggerakkan sumber daya ekonomi untuk dikonsumsi daerah lain, sehingga banyak uang yang berasal dari luar daerah beredar di Kota Blitar.

2. Usaha dan produksi yang harus naik kelas dengan pasar regional dan nasional yang disertai peningkatan produktivitas ekonomi kreatif

Usaha masyarakat harus naik kelas, dari mikro menjadi kecil, menengah dan besar. Usaha masyarakat harus memperluas area pemasaran dari lokal, regional, nasional dan internasional. Sudah banyak produksi Kota Blitar yang bergerak menapaki pemasaran internasional, seperti produk kendang Jembe, Produk Batik Mawar Putih juga hasil budidaya tanaman hias. Sementara itu banyak juga produk yang sudah terpasarkan di level nasional seperti kerajinan kayu dalam bentuk mainan dan alat musik, sambel pecel dan sebagainya.

Usaha dan produksi dapat naik kelas jika mampu mempertahankan dan meningkatkan kualitas produk,

kontinuitas produksi dan kapabilitas memenuhi peningkatan permintaan. Untuk dapat memenuhi kondisi tersebut maka usaha dan produksi Masyarakat harus diperkuat dengan kelembagaan, manajerial dan permodalan usaha yang baik. Selanjutnya perluasan pasar dilakukan dengan pemasaran digital.

Potensi ekonomi kreatif di Kota Blitar sangat menjanjikan terutama pada sektor seni pertunjukan, kriya, kuliner, fesyen. Sedangkan sektor sektor yang dimungkinkan berkembang baik adalah desain interior, film, video, fotografi, desain komunikasi visual, dan periklanan. Akan tetapi saat ini area pemasarannya masih terbatas di Kota Blitar, ke depan harus dapat diperluas area pemasarannya meliputi kota dan Kabupaten Blitar bahkan provinsi dan nasional. Sebab keterbatasan area pemasaran akan mengakibatkan persaingan dalam daerah sendiri sehingga peluang pendapatannya juga akan sangat terbatas.

Penguatan produktifitas ekonomi kreatif harus didukung kebijakan daerah yang kuat terutama pada sisi promosi dan pemasaran. Penciptaan ruang ruang bebas akses internet dan tempat tempat kerja yang bersifat terbatas dan temporary seperti *co working space* akan sangat berarti untuk *start up* di bidang ekonomi kreatif. Ruang ruang bebas untuk pertemuan anak anak muda ataupun para pengusaha mikro untuk berbagi ide dan kreatifitas antar sesama mereka, akan banyak membantu meningkatkan kreatifitas peningkatan produksi dan jaringan pemasaran yang lebih luas

3. Penguatan Pariwisata berbasis Wisata Kebangsaan

Blitar identik dengan Bung Karno, sebab Ir. Sukarno Sang Proklamator kemerdekaan Indonesia dan Presiden pertama Indonesia dimakamkan di Kota Blitar. Idiom “Jangan sekali kali mengaku menjadi orang Indonesia seutuhnya apabila belum berterima kasih pada Sang Proklamator dengan cara mendoakan langsung di pusaranya”, harus selalu digaungkan untuk menjadi daya tarik Kota Blitar.

Keputusan Walikota Blitar yang menetapkan 14 Pebruari sebagai Hari Cinta Tanah air juga perlu untuk dikumandangkan seantero Indonesia agar memperkuat nilai Kota Blitar sebagai Kota Wisata Kebangsaan.

Wisata kebangsaan akan lebih menguat apabila Pembangunan Museum Peta dapat terlaksana. Pembangunan Museum Peta bisa dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Blitar tanpa menunggu bantuan pemerintah pusat. Akan tetapi upaya pembangunan oleh pemerintah pusat harus tetap diupayakan agar nantinya dapat menjadi museum nasional. Sehingga daya tariknya menjadi lebih luas dan kunjungan wisatanya diharapkan dapat meningkat secara

signifikan mengimbangi wisata kebangsaan dan religi ke Makam Bung Karno.

Potensi yang belum tergarap adalah wisata kebangsaan yang berbasis kesejarahan dalam bentuk cagar budaya. Banyak cagar budaya di Kota Blitar yang harus ditonjolkan untuk menjadi spot- spot destinasi wisata kebangsaan dengan penguatan pada *Story Telling*. Misalnya Kawasan jalan Soedancho Supriyadi dengan aksesoris Kebon Rojo. Kawasan Kampung Mataraman sebagai pintu masuk Kota Blitar menggunakan kereta api. Temuan baru Candi Gedog dan Candi Karang Tengah juga berpotensi mendatangkan kunjungan arkeologi yang cukup banyak. Mengingat Candi Gedog dan dan Candi Karang Tengah diduga adalah area tempat tinggal dan pusat Blitar di Jaman Kerajaan Kadiri dan Singosari sampai Majapahit. Untuk itu masih diperlukan kebijakan yang berkelanjutan setiap tahapannya.

d. Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan

Isu strategis berkaitan dengan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan mempunyai 5 (lima) aspek yaitu:

1. Pelayanan Sanitasi dan Air Minum yang Aman

Kebijakan nasional yang menetapkan pelayanan sanitasi aman dan air minum aman menuntut perubahan target dalam pembangunan daerah dari layak menjadi aman. Sanitasi aman dan air minum aman memang sudah seharusnya menjadi standart pelayanan minimal, sebab faktor ketersediaan sanitasi dan air minum yang aman sangat berpengaruh pada kesehatan dasar masyarakat.

Kondisi sanitasi aman secara sederhana adalah untuk tempat penampungan tinja atau septik tanknya terdaftar dalam Layanan Lumpur Tinja Terdaftar (LLTT) dan secara berkala dilakukan penyedotan atas lumpur tinjanya. Sedangkan air bersih aman standar paling sederhana adalah air minum yang didapat dari jaringan perpipaan, artinya air minum yang diperoleh dari PDAM atau saluran perpipaan air minum yang dikelola oleh kelompok masyarakat. Untuk itu harus ada kebijakan untuk memperkuat Upaya pelayanan sanitasi aman dan air minum yang aman.

Kondisi yang agak sulit dan harus segera ditangani adalah pembuang air limbah rumah tangga baik dari dapur maupun kamar mandi yang dibuang ke drainase penampung air hujan. Untuk ini perlu ada kebijakan *extra ordinary* yang direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk mengolah limbah ini dengan baik dengan basis lingkungan semacam septik komunal untuk air limbah rumah tangga (*Grey Water*).

2. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan Bangunan Gedung

Kondisi saat ini indeks infrastruktur dalam status tinggi, kondisi ini seyogyanya dapat dipertahankan atau bahkan nilainya dapat mencapai lebih tinggi. Untuk dapat menjadi Kota yang menarik dikunjungi dan dapat menarik investasi, *performance* Kota Blitar harus selalu Nampak bersih, rapi dan indah untuk dinikmati. Tidak terlihat kabel-kabel yang tidak terorganisir dengan baik. Tidak terdapat pedestrian yang lubang-lubang, tidak rata dan tidak ada fasilitas penunjuk untuk tunanetra. Pedestrian yang nyaman untuk jalan kaki dan menjadi spot foto yang menarik akan tetapi tetap bersahabat dengan lingkungan hidup. Terdapat taman-taman kota dengan berbagai tema yang menarik dikunjungi. Tempat-tempat olahraga yang juga bisa menjadi destinasi atau sebaliknya destinasi wisata yang melibatkan *sport* didalamnya.

Yang perlu menjadi catatan dalam kurun waktu tahap RPJMD ini, banyak bangunan gedung pemerintah baik fasilitas perkantoran, pendidikan, kesehatan, kecamatan dan kelurahan sudah memerlukan pemeliharaan. Kebijakan penambahan gedung atau relokasi gedung kantor kelurahan juga akan menimbulkan biaya pemeliharaan, sehingga manajemen pemeliharaan gedung negara harus betul-betul direncanakan dengan manajemen waktu dan kualitas pekerjaan pemeliharaan yang baik, sehingga tidak terjadi inefisiensi anggaran daerah.

Infrastruktur pelayanan umum seperti jalan dan pedestrian, fasilitas olahraga, taman, penerangan jalan umum, CCTV dan sebagainya harus selalu dilakukan pemeliharaan setiap waktu. Penyediaan anggaran untuk pemeliharaan harus selalu disediakan dengan kerangka panganggaran tersedia saat dibutuhkan.

3. Pelayanan Persampahan dan Pengurangan Sampah dari Hulu

Pelayanan sampah oleh Pemerintah Kota Blitar dengan model saat ini hanya akan bertahan maksimal 4 (empat) tahun yang akan datang jika tidak ada penambahan *Cell* penampungan sampah. Kondisi itu dapat diatasi jika dilakukan pengolahan sampah dengan pemilahan mulai dari hulu yaitu rumah tangga atau usaha penghasil sampah. Kebijakan penambahan *Cell* di TPA sifatnya hanya seperti bom waktu, yaitu mengulur waktu untuk menjadi masalah besar lagi. Kebijakan penambahan *Cell* di TPA sulit dilakukan karena lahan yang tersedia di TPA tidak ada, artinya jika kebijakan penambahan *Cell* yang dipilih maka harus membuka TPA baru.

Kebijakan pengaturan pengolahan sampah sejak di hulu perlu dilakukan segera untuk mengurangi timbulan sampah yang terbuang ke TPA. Kebijakan itu

mengatur sampah yang di produksi Rumah Tangga dan tempat usaha yang dibuang secara terpisah antara sampah organik dan sampah anorganik. Untuk efektifitas pelaksanaan Pemerintah Kota Blitar dapat mengoptimalkan tugas pengirit sampah dan kelompok kelompok bank sampah. Pada Konteks waktu terbatas sampai dengan tahun tahun 2028 dapat mengoptimalkan Kerjasama yang terbentuk dengan USAID dalam program SELARAS.

4. Minimalisasi Degradasi Lingkungan

Dampak perubahan iklim global sudah sangat terasa di Kota Blitar dengan indikasi dari menurunnya sumber air permukaan yang ditengarai dari sumur warga yang tidak lagi dapat diambil dengan pompa air. Agar tidak terjadi perluasan dampak, maka perlu diterapkan kebijakan peduli lingkungan yang benar benar serius dengan melibatkan semua lapisan masyarakat. Pembuatan lubang lubang biopori pada setiap tanah pekarangan dan tanah terbuka meskipun kapasitas tidak optimal tapi bisa membantu menambah cadangan air tanah. Pembuatan sumur sumur resapan untuk menampung air hujan agar tidak langsung terbuang ke sungai akan sangat berpengaruh pada penambahan cadangan air tanah. Pembuatan sumur resapan ini bisa dilakukan oleh pemerintah daerah dengan membuat sumur resapan dengan konstruksi yang baik terutama pada daerah daerah yang rawan genangan saat hujan. Ada 2 (dua) keuntungan yang diperoleh yaitu (1) mengurangi bahkan mengatasi tingkat dan lama genangan, (2) menjadi cadangan air bawah tanah.

Perluasan ruang terbuka hijau juga menjadi sangat penting dengan penanaman pohon di sepanjang jalan besar tentunya dengan pola regenerasi pohon-pohon yang mengganggu lalu lintas dengan pola terencana. Penanaman pohon pohon di lahan lahan tidak terpakai atau pekarangan pekarangan dengan pohon produktif akan banyak membantu memenuhi kebutuhan konsumsi buah-buahan.

Hal penting yang bisa dilakukan Pemerintah Kota Blitar adalah *rebuilding* melakukan pemeliharaan Gedung kantornya dengan merombak menjadi *green building* yaitu gedung kantor yang hemat energi dan dapat optimal menyumbang oksigen dengan pemberian tanaman tanaman baik secara vertikal maupun horizontal

5. Antisipasi Kebencanaan

Posisi Kota Blitar yang berada pada lereng Gunung Kelud dengan Kali Lahar yang membelah Kota Blitar menimbulkan potensi bencana dengan skala yang tidak dapat diprediksi, tergantung skala letusan, jenis dan volume material yang dikeluarkan. Dalam kajian Sejarah sudah beberapa kali letusan Gunung Kelud yang membawa aliran lava sampai ke Kota

Blitar. Akan tetapi pada letusan terakhir, Kuasa Ilahi membebaskan Kota Blitar dari Material letusan. Dengan dampak yang tidak dapat diprediksi inilah diperlukan dana cadangan yang diperlukan sewaktu waktu jika Kota Blitar terdampak.

Dana cadangan juga berfungsi untuk menangani peristiwa bencana lain seperti longsor, angin puting beliung, banjir dan sebagainya. Dengan adanya anggaran yang disiapkan untuk dipergunakan sewaktu waktu, dapat menjaga kredibilitas dan kepercayaan masyarakat atas hadirnya pemerintah daerah saat dibutuhkan

e. Satu Data

Nasional sudah menetapkan kebijakan Satu Data Indonesia (SDI), Kota Blitar mempunyai kewajiban untuk mendukung kebijakan tersebut. Kebijakan satu data menjadi hal yang *urgent* dilakukan untuk reformasi *mindset* pembangunan yang seperti biasanya "*Business as Usual*" menjadi pembangunan yang berbasis data. Semua proses pembangunan yang berbasis data mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi hasil berbasis data.

Satu data Kota Blitar juga harus dalam konteks dapat dibagipakaikan antar perangkat daerah untuk mempermudah perangkat dalam proses pembangunan dan melaksanakan pelayanan.

Satu data Kota Blitar juga harus mampu mempermudah dan menyederhanakan pelayanan pada masyarakat. Pelayanan perangkat daerah dapat dilakukan pada masyarakat cukup dengan identitas diri pemohon.

f. Pelayanan Pemerintah menuju *Smart Governance*

Pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah baik pusat, provinsi maupun Kota Blitar selama ini terpisah pisah dan membuat masyarakat kesulitan saat membutuhkan. Kesulitan mencari tahu tempat pelayanan dan kesulitan dengan berbagai berkas yang harus dibawa sebagai persyaratan. Untuk mempermudah pelayanan pemerintah di berbagai tingkatan itu, Pemerintah Kota Blitar perlu mengajak semua penyedia layanan pemerintah untuk sepakat memberi pelayanan yang masih berbasis pelayanan langsung pada satu tempat atau satu atap.

Pelayanan akan mudah dilakukan dan pemerlu layanan juga akan dipermudah jika persyaratan berkasnya disederhanakan atau bahkan dapat dilakukan dengan ketersediaan data yang dapat dibagipakaikan.

g. Penciptaan Wilayah Aman dan Kondusif serta Perlindungan Masyarakat

Salah satu syarat utama sebuah kota untuk menjadi magnet bagi investor adalah wilayah yang aman dan kondusif. Investasi membutuhkan situasi yang dapat menjamin kepastian mendapatkan keuntungan. Wilayah

yang aman dari gangguan baik lingkungan sekitar maupun faktor-faktor eksternal akan menjamin proses bisnis atas investasi berjalan seperti yang direncanakan. Wilayah yang kondusif baik dari kebijakan pemerintah daerah maupun dari situasi masyarakatnya pasti akan mendukung percepatan pencapaian target bisnis untuk memperoleh hasil atau keuntungan.

Kebijakan pemerintah daerah yang stabil tidak berubah ubah, yang peduli pada usaha masyarakat bersumber pada kebijakan para pejabat politik. Oleh karena itu, salah satu faktor kondusifitas daerah ditentukan oleh tingkat pendidikan politik rakyat dalam berdemokrasi. Sedangkan keamanan akan terbentuk oleh faktor-faktor yang saling terkait yaitu kepolisian, pemerintah daerah, pengusaha dan masyarakat. Masing-masing harus memberikan kontribusi positif untuk dapat membentuk kondisi dan situasi daerah yang aman.

Perlindungan pada anak atau perempuan dari kekerasan rumah tangga selama ini dikenal dengan tugas urusan perlindungan perempuan dan anak. Sehingga seolah-olah perlindungan anak dan perempuan ini menjadi tugas dari satu perangkat daerah saja, seharusnya juga menjadi tugas banyak pihak dengan pola integratif. Upaya perlindungan anak dan perempuan harus dimulai dari level terendah di struktur organisasi penunjang pemerintahan yaitu Rukun Tetangga dan Rukun Warga. RT dan RW didukung oleh kader – kader yang ada di masyarakat selevel kelurahan misalnya kader keluarga berencana, posyandu, jumantik dan sebagainya. Semua yang ada di level masyarakat harus mempunyai jalur komunikasi dengan kelurahan khususnya seksi ketentraman dan ketertiban kelurahan dan kecamatan. Jalur koordinasi pencegahan, penanganan dan tindak lanjut kejadian harus sampai pada dinas teknis bahkan sampai kepala daerah. Kecepatan antisipasi dan tindakan di level masyarakat akan dapat mengurangi kejadian kejadian kekerasan terhadap anak dan perempuan.

Pada konteks yang berbeda, kebakaran dikategorikan dalam musibah karena tidak masuk dalam kategori bencana, dampaknya sangat besar terhadap kehidupan masyarakat. Kebakaran rumah/tempat usaha atau permukiman dapat mengakibatkan sebuah keluarga berstatus menjadi miskin setelah kebakaran. Kecepatan penanganan kebakaran menjadi faktor penentu besarnya kerugian yang ditimbulkan. Kecepatan reaksi terhadap laporan kebakaran sangat terganung pada manusia dan peralatan yang dimiliki oleh satuan pemadam kebakaran Kota serta kemudahan akses pada obyek kebakaran. Karena intensitas kejadian kebakaran yang relatif rendah mengakibatkan kebijakan penyiapan peralatan kebakaran menjadi sangat minim. Akses di permukiman yang rawan terjadi kebakaran tidak bisa dilalui oleh mobil pemadam kebakaran. Untuk antisipasi besarnya kerugian oleh

kebakaran maka perlu dibuat kebijakan yang komprehensif untuk mengantisipasi kejadian

h. Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan menjadi perhatian utama dalam mengantisipasi ancaman baru tentang krisis pangan dunia. Pangan yang cukup, aman dan bergizi menjamin hak dasar manusia untuk hidup sehat dan produktif. Ketahanan pangan juga berperan dalam menjaga stabilitas sosial dan politik, mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta mendukung kemandirian. Sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan ikut menjaga lingkungan dan kelestarian pertanian dalam jangka panjang.

BAB III

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

- 3.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
- 3.1.1. Visi dan Misi RPJMD Kota Blitar 2025 – 2029
- 3.1.1.1. Visi

Rumusan visi merupakan kondisi yang akan diwujudkan pada akhir periode perencanaan. Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih merupakan visi Pembangunan Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai Misi yang diemban. Visi ini selanjutnya dijabarkan dalam Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah.

Kota Blitar memberikan peran yang positif dalam menopang pembangunan di Jawa Timur dan nasional. Pemerintah Kota Blitar telah memberikan kontribusi positif pada pembangunan misalnya dapat dilihat dari tingkat kemiskinan sebesar 6,75% dengan tingkat kemiskinan ekstrem 0% dibawa rata-rata provinsi dan nasional serta Indeks Pembangunan Manusia pada angka 81,44 di atas rata-rata provinsi dan nasional. Selain itu, penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan di Kota Blitar telah berjalan dengan baik sehingga tidak menimbulkan gejolak yang mengakibatkan terganggunya pembangunan di daerah, regional maupun nasional. Pelaksanaan APBD yang oleh Badan Pemeriksa Keuangan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 15 tahun berturut turut serta prestasi positif di berbagai sektor dan urusan lainnya memberikan gambaran bahwa Kota Blitar telah memberikan kontribusi positif dalam pembangunan Jawa Timur maupun nasional.

Untuk dapat mempertahankan kondisi yang sangat baik tersebut, maka dibutuhkan pandangan visioner yang dapat meningkatkan kinerja Pemerintah Kota Blitar menuju prestasi yang lebih baik dalam mendukung semua program provinsi dan nasional. Pandangan visioner itu ditentukan dari Visi Calon Walikota dalam Pilkada tahun 2024. Berdasarkan hasil pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 maka Visi yang dipilih adalah visi Walikota terpilih yang kemudian dipergunakan sebagai visi pembangunan Kota Blitar dalam RPJMD tahun 2025 – 2029 adalah:

**“KOTA BLITAR YANG MAJU, SEHAT DAN SEJAHTERA
MENUJU KOTA MASA DEPAN”**

Dengan penjelasan sebagai berikut :

KOTA BLITAR, didefinisikan sebagai :

Meliputi seluruh wilayah dan isinya, artinya Kota Blitar dan seluruh warganya yang berada di dalam satu kawasan dalam

batas – batas tertentu yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar.

MAJU, didefinisikan sebagai :

Terwujudnya Kota Blitar yang selalu bergerak terdepan dalam setiap perkembangan, meraih kondisi yang selalu lebih baik dari waktu ke waktu dengan pandangan jauh ke depan. Dengan berbagai capaian pembangunan ekonomi, infrastruktur, tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik pada periode sebelumnya, maka Pemerintah Kota Blitar akan terus berusaha menjadi yang terbaik khususnya meningkatkan pembangunan ekonomi, pembangunan infrastruktur meliputi infrastruktur fisik dan infrastruktur digital, serta memastikan pembangunan daerah dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan dan dampak terhadap kualitas lingkungan. Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan dukungan SDM aparatur dan sistem pelayanan yang terintegrasi akan berdampak positif pada peningkatan partisipasi publik, yang berorientasi memberikan kemudahan, pelayanan yang prima serta terpenuhinya kebutuhan pelayanan masyarakat di berbagai bidang.

SEHAT, didefinisikan sebagai:

Terwujudnya kota yang bukan hanya bebas penyakit, tetapi kota yang memberikan kesempatan kepada warganya untuk hidup sehat secara fisik, mental dan sosial melalui kebijakan pelayanan dan partisipasi aktif masyarakat

SEJAHTERA, Terwujudnya peningkatan lebih lanjut atas kondisi makmur yang tidak hanya berdimensi material atau jasmaniah, tetapi juga spiritual atau rohaniah, yang memungkinkan rakyat menjadi manusia yang utuh dalam mencapai cita-cita ideal, dan berpartisipasi dalam proses pembangunan secara kreatif, inovatif, dan konstruktif dalam tata kehidupan yang aman dan tentram, rukun dan damai, di samping terpenuhinya kebutuhan dasar sandang, pangan, papan, pendidikan, dan lapangan kerja, juga bebas mengumpulkan pikiran dan pendapat, bebas dari ketakutan dan belenggu diskriminasi, serta bebas dari penindasan, dengan sumber daya manusia yang makin berkualitas secara fisik, psikis maupun intelektualitas. Keterpaduan antara dimensi tersebut diharapkan melahirkan kesejahteraan yang paripurna, serta membentuk kebanggaan yang tinggi bagi masyarakat Kota Blitar untuk melahirkan masa depan yang aman tentram damai sentosa dan makmur.

MENUJU, didefinisikan sebagai :

Upaya untuk mencapai tujuan – tujuan dengan rencana dan strategi yang terukur.

KOTA MASA DEPAN, didefinisikan sebagai :

Terwujudnya Kota Blitar sebagai kota layak huni yang aman dan nyaman, kota cerdas berdaya saing dan berbasis teknologi, berbasis keunggulan ekonomi dan budaya lokal, yang dibangun atas dasar kesetaraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat serta berkelanjutan.

3.1.1.2. Misi

Misi merupakan upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Visi “Kota Blitar yang Maju, Sehat dan Sejahtera menuju Kota Masa Depan” akan diwujudkan dengan 5 (lima) misi yaitu :

1. Mewujudkan Blitar Kota Pancasila yang Aman, Religius dan Nasionalis;
2. Mewujudkan Kota Blitar Sehat dan Sejahtera;
3. Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar yang Berkelanjutan dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berbasis *Smart Governance*;
4. Mengembangkan Potensi Pendidikan, Pemuda dan Perempuan sebagai Generasi Emas yang Cerdas dan Berkarakter;
5. Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar sebagai Kota Perdagangan, Jasa, Pariwisata, dan Industri.

Untuk mencapai kualitas perencanaan yang berkelanjutan, maka pada setiap tingkatan perencanaan harus selaras dan konsisten, dimana RPJMD sebagai perencanaan jangka menengah 5 (lima) tahun harus selaras dengan RPJPD sebagai perencanaan jangka panjang 20 (dua puluh) tahun. Keselarasan hubungan antara misi RPJPD dengan misi RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Keselarasn Misi pada RPJPD Kota Blitar 2025 – 2045 dengan Misi RPJMD Kota Blitar 2025 – 2029

Misi RPJPD 2025 – 2045	Misi RPJMD 2025 - 2029
Misi 4 : Mewujudkan Kota Blitar yang Nyaman, Damai, Berketahanan Sosial dan Budaya Didasari Kekuatan Religius serta Jiwa Nasionalisme dan Patriotisme	Misi 1: Mewujudkan Blitar Kota Pancasila yang Aman, Religius dan Nasionalis
Misi 4 : Mewujudkan Kota Blitar yang Nyaman, Damai, Berketahanan Sosial dan Budaya Didasari Kekuatan Religius serta Jiwa Nasionalisme dan Patriotisme	Misi 2 : Mewujudkan Kota Blitar Sehat dan Sejahtera
Misi 1 : Membangun SDM Kota Blitar yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing	
Misi 3 : Digitalisasi Pelayanan Publik Kota Blitar	Misi 3 : Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar yang Berkelanjutan dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berbasis <i>Smart Governance</i>
Misi 5 : Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar Berkelanjutan, Berwawasan Lingkungan dan Berketahanan Ekologi	
Misi 1 : Membangun SDM Kota Blitar yang Cerdas,	Misi 4 : Mengembangkan Potensi Pendidikan, Pemuda dan

Misi RPJPD 2025 – 2045	Misi RPJMD 2025 - 2029
Sehat dan Berdaya Saing	Perempuan sebagai Generasi Emas yang Cerdas dan Berkarakter
Misi 2 : Mengembangkan Ekosistem Ekonomi dan Inovasi Kota Blitar Secara Berkelanjutan	Misi 5 : Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar sebagai Kota Perdagangan, Jasa, Pariwisata, dan Industri

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar 2025, data diolah

Keselarasan perencanaan juga harus dilakukan antar tingkat pemerintahan dimana RPJMD Kota Blitar harus mendukung Program Pemerintah Pusat maupun Provinsi Jawa Timur. Untuk itu Misi RPJMD Kota Blitar juga harus selaras dengan Nawa Bhakti Satya Provinsi Jawa Timur dan Asta Cita dalam RPJMN. Dimana keselarasan RPJMD Kota Blitar dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur dilakukan dengan proses penyusunan secara simultan dan terkoordinasi. Keselarasan RPJMD Kota Blitar dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur dan RPJMN dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Keselarasan Misi RPJMD Kota Blitar 2025 – 2029 dengan Nawa Bhakti Satya Provinsi Jawa Timur dan Asta Cita

MISI RPJMD KOTA BLITAR 2025-2029	NAWA BHAKTI SATYA JAWA TIMUR	ASTACITA
Mewujudkan Blitar Kota Pancasila yang Aman, Religius dan Nasionalis	<p>Jatim Harmoni - Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif melalui Pengembangan Nilai-nilai Kesalehan Sosial, Berjiwa Pancasila, Pengarusutamaan Gender, serta Memajukan Seni, Budaya dan Prestasi Olahraga</p> <p>Jatim Lestari - Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan</p>	<p>Asta Cita 1 - Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan HAM</p> <p>Asta Cita 8 - Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur</p>

MISI RPJMD KOTA BLITAR 2025-2029	NAWA BHAKTI SATYA JAWA TIMUR	ASTACITA
<p>Mewujudkan Kota Blitar Sehat dan Sejahtera</p>	<p>Jatim Sejahtera - Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan melalui Perlindungan Sosial yang Adaptif, Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Pedesaan dengan Pendekatan Lintas sectoral - Spasial Berbasis Data Terpadu</p> <p>Jatim Agro - Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan</p> <p>Jatim Sehat - Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan untuk semua (<i>health for all</i>) yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan, serta sinergis dengan perwujudan <i>Universal Health Coverage</i> (UHC)</p>	<p>Asta Cita 2 - Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;</p> <p>Asta Cita 6 - Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan</p> <p>Asta Cita 4 - Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas</p>

MISI RPJMD KOTA BLITAR 2025-2029	NAWA BHAKTI SATYA JAWA TIMUR	ASTACITA
<p>Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar yang Berkelanjutan dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berbasis <i>Smart Governance</i></p>	<p>Jatim Berkah Amanah - Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif</p> <p>Jatim Akses - Memperkuat konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur transportasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan</p> <p>Jatim Lestari - Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup melalui Peningkatan Kualitas Lingkungan, dan Ketahanan Iklim dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan</p>	<p>Asta Cita 3 - Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi</p> <p>Asta Cita 7 - Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan</p> <p>Asta Cita 8 - Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur</p>
<p>Mengembangkan Potensi Pendidikan, Pemuda dan Perempuan sebagai Generasi Emas yang Cerdas dan Berkarakter</p>	<p>Jatim Harmoni - Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif melalui Pengembangan Nilai-nilai Kesalehan Sosial, Berjiwa Pancasila, Pengarusutamaan Gender, serta Memajukan Seni, Budaya dan Prestasi Olahraga;</p> <p>Jatim Cerdas - Memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan dan akses Pendidikan untuk semua (<i>Education for all</i>) yang berkualitas, merata, dan berkeadilan;</p>	<p>Asta Cita 4 - Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas</p> <p>Asta Cita 8 - Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur;</p>

MISI RPJMD KOTA BLITAR 2025-2029	NAWA BHAKTI SATYA JAWA TIMUR	ASTACITA
Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar sebagai Kota Perdagangan, Jasa, Pariwisata, dan Industri	Jatim Kerja – Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas melalui Peningkatan Kewirausahaan, Iklim Investasi dan Stabilitas Ekonomi	<p>Asta Cita 2 - Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru</p> <p>Asta Cita 3 - Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;</p> <p>Asta Cita 5 - Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri</p>

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar 2025, data diolah

3.1.2. Tujuan dan Sasaran

Untuk mewujudkan misi, dijelaskan dengan tujuan berupa pernyataan yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi selama lima tahun yang didasarkan pada isu-isu analisis strategis dengan indikator kinerja tujuan, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian tujuan yang akan dicapai selama lima tahun dan secara bertahap dapat diurai pencapaiannya setiap tahun.

Berdasarkan lima misi yang telah ditetapkan, maka masing-masing misi diuraikan dengan pernyataan tujuan dan indikator tujuannya. Dalam memformulasikan tujuan pembangunan lima tahun kedepan, selain memperhatikan hal tersebut juga memperhatikan pencapaian sasaran visi pembangunan dalam RPJPD Tahun 2025-2045.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari tujuan yang diformulasikan spesifik, mudah dicapai, rasional memperhatikan isu strategis daerah, disertakan pula indikator kinerja sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan dicapai selama lima tahun dan secara bertahap dapat diurai pencapaiannya setiap

tahun. Sasaran pembangunan diturunkan dari tujuan yang merupakan rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan pembangunan RPJMD. Dalam melakukan formulasi sasaran pembangunan tersebut, Pemerintah Kota Blitar dalam menyusun sasaran pembangunan juga memperhatikan arah pembangunan yang termaktub pada RPJPD Kota Blitar Tahun 2025 – 2045 sehingga apa yang telah menjadi arah pembangunan 20 tahun kedepan tetap terjaga. Memperhatikan hal tersebut, maka dalam penentuan indikator sasaran pembangunan, Pemerintah Kota Blitar juga memperhatikan Indikator Utama Pembangunan (IUP) yang termuat pada RPJPD Kota Blitar Tahun 2025 – 2045 sebagai salah satu upaya untuk mencapai mengawal pencapaian target IUP di tiap tahapan pembangunan.

3.1.2.1. Tujuan dan Sasaran Misi Mewujudkan Blitar Kota Pancasila yang Aman, Religius dan Nasionalis

Untuk membangun Kota Blitar yang aman bagi warganya dan pengunjungnya, kuat, mandiri, dan harmonis, serta memastikan keberlanjutan pembangunan, kerukunan umat beragama dan nasionalisme merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Untuk itu tujuan dan indikator misi Mewujudkan Blitar Kota Pancasila yang Aman, Religius dan Nasionalis adalah :

Tabel 3.3
Tujuan dan Sasaran Misi Mewujudkan Blitar Kota Pancasila yang Aman, Religius dan Nasionalis

Tujuan / Sasaran	Indikator
Terwujudnya kehidupan yang harmonis di masyarakat melalui penguatan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat	Indeks Harmoni Indonesia
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam politik dan pembangunan daerah	Indeks Demokrasi Indonesia
Terwujudnya jaminan rasa aman pada masyarakat	Indeks Rasa Aman
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Indeks Ketentraman dan Ketertiban
Terwujudnya kota yang berketahanan bencana	Indeks Risiko Bencana (IRB)

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar 2025, data diolah

Tujuan pembangunan yang pertama yaitu Terwujudnya kehidupan yang harmonis di masyarakat melalui penguatan nilai – nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, merupakan upaya mendukung pencapaian misi RPJMD Kota Blitar Tahun 2025-2029 dikarenakan seluruh kegiatan pembangunan membutuhkan dukungan stabilitas daerah yang diperlihatkan melalui keharmonisan masyarakat di

semua sektor serta dukungan seluruh lapisan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

Selanjutnya, jaminan rasa aman sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, stabil dan produktif. Dengan situasi dan kondisi daerah yang aman, setiap individu dapat menjalankan aktivitasnya dengan nyaman, berkontribusi dalam pembangunan dan menikmati hak dan kebebasan mereka secara optimal. Selain itu jaminan situasi aman dan nyaman bagi setiap orang yang datang dan berusaha di Kota Blitar akan dapat mendukung terwujudnya Kota Blitar yang inklusif dan dapat menjadi daya tarik bagi para investor untuk berinvestasi di Kota Blitar.

3.1.2.2. Tujuan dan Sasaran Misi Mewujudkan Kota Blitar Sehat dan Sejahtera

Kesehatan adalah faktor utama untuk dapat melakukan aktifitas dan produktifitas. Upaya pembangunan kesehatan masyarakat serta jaminan kesehatan bagi semua warganya menjadi tujuan yang sangat penting bagi pembangunan setiap daerah. Pemerintah Kota Blitar mengutamakan sektor kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pemerataan dan peningkatan kualitas layanan kesehatan bagi semua masyarakat.

Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Blitar, Pemerintah Kota Blitar berkomitmen untuk memberantas kemiskinan yang mencakup berbagai dimensi, tidak hanya terkait keterbatasan ekonomi tetapi juga kesenjangan sosial, marginalisasi kelompok rentan, maupun keterbatasan akses terhadap layanan infrastruktur dasar. Pada periode 2025-2029, ditetapkan dua target utama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pertama, menurunkan tingkat kemiskinan di Kota Blitar sebagai langkah strategis untuk memastikan bahwa lebih banyak penduduk dapat memenuhi kebutuhan hidup layak sekaligus memperoleh perlindungan sosial yang adaptif untuk menjamin keberlangsungan hidup masyarakat dalam menghadapi berbagai risiko dan krisis. Kedua, meningkatkan kualitas ketahanan keluarga. Dengan ketahanan keluarga yang kuat dapat menjadi pondasi utama dalam membangun masyarakat yang sejahtera.

Dalam rangka mewujudkan misi Mewujudkan Kota Blitar Sehat dan Sejahtera, dirumuskan tujuan dan sasaran beserta indikator pencapaiannya pada tahun 2025 – 2029 sebagai berikut :

Tabel 3.4
Tujuan dan Sasaran Misi Mewujudkan Kota Blitar Sehat dan Sejahtera

Tujuan / Sasaran	Indikator
Meningkatnya Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Sehat	Usia Harapan Hidup
Terwujudnya Kesehatan yang Merata	Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM)
	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita
Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Tingkat Kemiskinan
Meningkatnya Kualitas Hidup dan Ketangguhan Sosial Masyarakat	Indeks Kesejahteraan Sosial (IKeSos)
	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar 2025, data diolah

Tujuan pembangunan meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat yang sehat merupakan salah satu upaya mendukung pencapaian dari sasaran visi ketiga RPJPD Kota Blitar 2025 – 2045 yaitu Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia.

Sedangkan tujuan pembangunan meningkatnya kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu upaya mendukung pencapaian sasaran visi kedua RPJPD Kota Blitar 2025 – 2045 yaitu Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan.

3.1.2.3. Tujuan dan Sasaran Misi Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar yang Berkelanjutan dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berbasis *Smart Governance*

Pembangunan berkelanjutan adalah konsep yang menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan. Kota berkelanjutan adalah kota yang dirancang untuk mengatasi dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi melalui perencanaan kota dan pengelolaan kota. Dalam konteks ini, inisiatif berkelanjutan dicapai dengan membangun alternatif ramah lingkungan ke dalam infrastruktur kota serta memastikan bahwa sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara bijaksana tanpa mengorbankan kebutuhan generasi mendatang. Pada periode 2025 - 2029, ditetapkan target utama yaitu Mewujudkan pembangunan kota yang layak huni serta Penurunan Emisi GRK.

Misi mewujudkan tata kelola pemerintahan merupakan elemen kunci dalam mencapai tujuan dan sasaran lima tahun Walikota dan Wakil Walikota. *Smart governance* adalah konsep tata kelola pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk

meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam mengambil keputusan. Melalui misi ini, Pemerintah Kota Blitar bertekad untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparan, partisipatif, inovatif, akuntabel dan berbasis teknologi demi meningkatkan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.

Dalam upaya mencapai keberhasilan misi Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar yang Berkelanjutan dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berbasis *Smart Governance*, dirumuskan tujuan dan sasaran beserta indikator pencapaiannya pada tahun 2025 – 2029 sebagai berikut :

Tabel 3.5
Tujuan dan Sasaran Misi Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar yang Berkelanjutan dan Tata Kelola Pemerintahan yang berbasis *Smart Governance*

Tujuan / Sasaran	Indikator
Terwujudnya Pembangunan Kota Nyaman dan Layak Huni	Indeks Kota Layak Huni
	Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) Kumulatif
Terwujudnya fasilitas perkotaan yang berkelanjutan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur
Meningkatnya kualitas permukiman	Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan
Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah
Meningkatnya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi
Terwujudnya pelayanan pemerintahan yang berkualitas dan terintegrasi	Indeks Pemerintahan Digital Indonesia
	Indeks Pelayanan Publik
	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Terwujudnya manajemen pemerintahan yang profesional	Opini BPK atas Laporan Keuangan
	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah
	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar 2025, data diolah

Tujuan pembangunan terwujudnya pembangunan kota nyaman dan layak huni beserta sasarnya, merupakan salah satu upaya mendukung pencapaian dari sasaran visi RPJPD Kota Blitar Tahun 2025 – 2045 keempat yaitu Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

Tujuan pembangunan meningkatnya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel merupakan upaya mendukung pencapaian dari seluruh sasaran visi RPJPD Kota Blitar Tahun 2025 – 2045 dikarenakan seluruh kegiatan pembangunan membutuhkan dukungan pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan berintegritas serta dukungan seluruh lapisan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Sedangkan penentuan sasaran pembangunan selain memperhatikan upaya pencapaian tujuan dari misi mempertimbangkan pula sasaran yang tertuang dalam RPJPD Kota Blitar tahun 2025 - 2045. Memperhatikan hal tersebut maka sasaran yang telah ditetapkan selaras dengan sasaran kesebelas yaitu Terwujudnya Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif serta sasaran kedua belas Terwujudnya Pelayanan Publik Terpadu Satu Data berbasis Teknologi Informasi pada RPJPD Kota Blitar Tahun 2025 – 2045.

3.1.2.4. Tujuan dan Sasaran Misi Mengembangkan Potensi Pendidikan, Pemuda dan Perempuan sebagai Generasi Emas yang Cerdas dan Berkarakter

Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan modal dasar tercapainya Visi Kota Blitar 2045, Visi Jawa Timur Sejahtera 2045 dan Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu dalam RPJMD 2025 – 2029 pembangunan sumberdaya manusia dilaksanakan dengan memberikan setiap individu kesempatan untuk mengembangkan potensi dan kemampuan agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan melalui peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan kualitas pemuda, pengarusutamaan gender, serta memajukan seni budaya. Hal ini penting dilakukan sebagai bentuk memperkuat karakter dan jati diri bangsa.

Dalam upaya mencapai keberhasilan misi Mengembangkan Potensi Pendidikan, Pemuda dan Perempuan sebagai Generasi Emas yang Cerdas dan Berkarakter, dirumuskan tujuan dan sasaran beserta indikator pencapaiannya pada tahun 2025 – 2029 sebagai berikut :

Tabel 3.6
Tujuan dan Sasaran Misi Mengembangkan Potensi Pendidikan, Pemuda dan Perempuan sebagai Generasi Emas yang Cerdas dan Berkarakter

Tujuan / Sasaran	Indikator
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
	Harapan Lama Sekolah

Tujuan / Sasaran	Indikator
Meningkatnya kualitas pendidikan	Rata – Rata Lama Sekolah
Meningkatnya kualitas generasi muda	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)
Meningkatnya kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Terwujudnya kota yang berkebudayaan maju	Indeks Pelestarian Budaya

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar 2025, data diolah

Tujuan pembangunan ketujuh yaitu meningkatnya kualitas sumber daya manusia, merupakan salah satu upaya mendukung pencapaian dari sasaran visi ketiga RPJPD Kota Blitar 2025 – 2045 yaitu Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia sehingga indikator pencapaian menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang juga merupakan indikator sasaran visi RPJPD ketiga.

Sedangkan penentuan sasaran pembangunan pada Misi Mengembangkan Potensi Pendidikan, Pemuda dan Perempuan sebagai Generasi Emas yang Cerdas dan Berkarakter selain memperhatikan upaya tujuan dari misi, mempertimbangkan pula sasaran pokok pembangunan yang tertuang dalam RPJPD Kota Blitar 2025 – 2045, yaitu sasaran pokok pembangunan kedua yaitu terwujudnya pendidikan yang merata di Kota Blitar dan sasaran pokok pembangunan keempat terwujudnya keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif di Kota Blitar.

3.1.2.5. Tujuan dan Sasaran Misi Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar sebagai Kota Perdagangan, Jasa, Pariwisata, dan Industri

Pembangunan Kota Blitar yang difokuskan pada kota perdagangan, jasa, pariwisata dan industri adalah agar pembangunan daerah lebih fokus pada sektor-sektoryang selama ini berkontribusi besar pada pembangunan daerah. Pengembangan Kota Blitar sebagai kota perdagangan adalah dalam upaya mewujudkan perluasan lapangan kerja yang berkualitas melalui peningkatan kewirausahaan baru (*start-up*) pengembangan ekonomi kreatif, iklim investasi, dan stabilitas ekonomi.

Pengembangan industri kreatif melalui pembangunan pariwisata dan penguatan ekosistem ekonomi kreatif dioptimalkan untuk mendorong iklim perekonomian Kota Blitar dengan mengoptimalkan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi secara agregat, sehingga akan dapat membuka lebih banyak kesempatan kerja. Atas dasar hal tersebut maka ditetapkan tujuan pada misi Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar sebagai Kota Perdagangan, Jasa, Pariwisata, dan Industri yang Berkelanjutan yaitu terwujudnya stabilitas ekonomi daerah.

Dalam upaya mencapai keberhasilan misi Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar sebagai Kota Perdagangan, Jasa, Pariwisata, dan Industri yang Berkelanjutan, dirumuskan tujuan dan sasaran beserta indikator pencapaiannya pada tahun 2025 – 2029 sebagai berikut :

Tabel 3.7

Tujuan dan Sasaran Misi Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar sebagai Kota Perdagangan, Jasa, Pariwisata, dan Industri

Tujuan / Sasaran	Indikator
Terwujudnya Ekonomi Daerah Yang Inklusif	Laju Pertumbuhan Ekonomi
	Rasio Gini
	Tingkat Inflasi
	PDRB Per Kapita
Meningkatnya kontribusi sektor unggulan terhadap pertumbuhan ekonomi	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB
	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
	Rasio PDRB Industri Pengolahan
Terwujudnya kemudahan berusaha yang mendorong realisasi investasi daerah	Persentase Peningkatan Investasi
Menurunnya pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar 2025, data diolah

Peningkatan kontribusi sektor unggulan terhadap pertumbuhan ekonomi, merupakan salah satu upaya mendukung pencapaian Peningkatan pendapatan per kapita.

Sedangkan penentuan sasaran pembangunan pada Misi Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar sebagai Kota Perdagangan, Jasa, Pariwisata, dan Industri selain memperhatikan upaya tujuan dari misi, mempertimbangkan pula sasaran pokok pembangunan yang tertuang dalam RPJPD Kota Blitar 2025 – 2045, yaitu sebagai berikut :

1. Terwujudnya peningkatan tenaga kerja yang berkompetensi
2. Terwujudnya perkembangan iptek, inovasi dan produktivitas ekonomi Kota Blitar
3. Terwujudnya transformasi ekonomi digital dan ekonomi hijau
4. Terwujudnya perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi
5. Terwujudnya stabilitas ekonomi daerah
6. Terwujudnya iklim investasi yang kondusif

Berdasarkan pernyataan tujuan dan indikator tujuan yang telah ditetapkan, maka dilakukan *cascading down* yaitu menurunkan rencana pencapaian indikator tujuan kepada indikator sasaran yang memberikan kontribusi terhadap pencapaian indikator tujuan yang hendak dicapai target kinerjanya, sebagaimana ditampilkan dalam tabel 3.8 berikut :

Tabel 3.8
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Rencana Jangka Menengah Kota Bitar Tahun 2025 – 2029

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)		(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
KOTA BLITAR YANG MAJU, SEHAT DAN SEJAHTERA MENUJU KOTA MASA DEPAN - Mewujudkan Blitar Kota Pancasila yang Aman, Religius dan Nasionalis - Mewujudkan Kota Blitar Sehat dan Sejahtera - Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar yang Berkelanjutan dan Tata Kelola Pemerintahan yang berbasis <i>Smart Governance</i> - Mengembangkan Potensi Pendidikan, Pemuda dan Perempuan sebagai Generasi Emas yang Cerdas dan Berkarakter - Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar sebagai Kota Perdagangan, Jasa,	Terwujudnya kehidupan yang harmonis melalui penguatan nilai - nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat		Indeks Harmoni Indonesia (Indeks)	Data belum pernah dirilis	6,91	6,95	6,99	7,09	7,19	7,25	
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam politik dan pembangunan daerah	Indeks Demokrasi Indonesia (indeks)	84,37	88,68	88,69	88,70	88,71	88,72	88,73	
	Terwujudnya jaminan rasa aman pada masyarakat		Indeks Rasa Aman (Angka)	Data belum pernah dirilis	76,60	76,65	76,70	76,75	76,80	76,85	
		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban (Angka)	98,52	98,80	99,10	99,40	99,70	100	100	
		Terwujudnya Kota yang Berketahanan Bencana	Indeks Risiko Bencana (IRB) (Angka)	71,51	70,32	68,60	66,97	65,41	63,93	62,50	
	Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat yang sehat		Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))	75,20	75,30	75,56	75,82	76,07	76,33	76,59	
		Terwujudnya Kesehatan yang Merata	Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (Indeks)	0,699	0,699	0,700	0,720	0,725	0,730	0,735	
			Prevalensi Stunting	11,40	9,69	9,69	9,24	8,74	8,19	7,60	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)		(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
Pariwisata dan Industri			(pendek dan sangat pendek) pada balita (%)								
	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat		Tingkat Kemiskinan (%)	6,75	6,63	6,42	6,14	5,92	5,57	4,87	
		Meningkatnya Kualitas Hidup dan Ketangguhan Sosial Masyarakat	Indeks Kesejahteraan Sosial (Indeks)	62,23	62,58	62,93	63,28	63,63	63,98	64,33	
	Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (Indeks)		80,80	80,81	81,56	82,31	83,06	83,81	84,56		
	Terwujudnya pembangunan kota nyaman dan layak huni		Indeks Kota Layak Huni (Indeks)	Data belum pernah dirilis	62,80	65,60	68,40	71,20	74,00	76,80	
			Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) Kumulatif (TON CO2 EQ)	650.775,46	663.790,97	677.066,79	690.608,12	704.420,29	718.508,69	732.878,87	
		Terwujudnya fasilitas perkotaan yang berkelanjutan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) (Indeks)	80,00	81,00	82,00	83,00	84,00	85,00	85,00	
		Meningkatnya kualitas permukiman	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau	79,03	91,00	92,49	94,19	95,88	97,38	99,02	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.	
					2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(01)	(02)	(03)	(04)		(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	
			dan Berkelanjutan (%)									
		Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (Indeks)	64,94	67,02	67,09	67,17	67,25	67,33	67,41		
	Meningkatnya Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel		Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	90,41	90,91	91,00	91,25	91,50	91,75	92,00		
		Terwujudnya pelayanan pemerintahan yang berkualitas dan terintegrasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	89,23	89,40	89,57	89,74	89,91	90,08	90,25		
			Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	4,52	4,54	4,56	4,58	4,60	4,62	4,64		
			Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Level)	Terdefinisi (3,026)	Terdefinisi (3,030)	Terdefinisi (3,034)	Terdefinisi (3,038)	Terdefinisi (3,042)	Terdefinisi (3,046)	Terdefinisi (3,05)		
			Indeks Pemerintahan Digital Indonesia (Indeks)	Data belum pernah dirilis	-	1,70	1,70	1,90	1,90	2,20		
			Opini BPK Atas Laporan	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)		(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
			Keuangan (Nilai)								
		Terwujudnya manajemen pemerintahan yang profesional	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (Indeks)	99,15	77,70	78,57	80,28	82,00	83,71	85,42	
			Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (Angka)	80,060	80,11	80,14	80,17	80,20	80,23	80,26	
	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia		Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)	81,44	82,71	82,86	83,20	83,54	83,88	84,32	
		Meningkatnya kualitas pendidikan	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	14,81	14,82	14,84	14,91	15	15,06	15,1	
			Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	10,820	10,825	10,830	10,835	10,840	10,845	10,850	
		Meningkatnya kualitas generasi muda	Indeks Pembangunan Pemuda (Nilai)	59,67	62,65	65,63	68,61	71,59	74,57	77,55	
		Meningkatnya kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Indeks)	97,49	97,49	97,59	97,64	97,69	97,74	97,79	
		Terwujudnya kota yang	Indeks Pelestarian	Data belum pernah dirilis	50,29	86,14	86,98	87,83	88,67	89,52	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)		(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
		berkebudayaan maju	Budaya (Indeks)								
	Terwujudnya Ekonomi Daerah yang Inklusif		Rasio Gini (Indeks)	0,353	0,352	0,349	0,346	0,343	0,340	0,337	
Tingkat Inflasi (%)			0,52	1,97	2,12	1,96	1,81	1,71	1,61		
PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)			59,33	60,01	60,65	61,33	62,01	63,69	64,37		
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)			5,33	5,37	5,41	5,54	5,58	5,62	5,65		
Meningkatnya kontribusi sektor unggulan terhadap pertumbuhan ekonomi		Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	24,69	25,09	25,24	25,39	25,54	25,69	25,84		
		Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	5,89	5,90	5,92	5,95	5,98	6,05	6,12		
		Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	9,91	10,03	10,08	10,13	10,18	10,23	10,28		
Terwujudnya kemudahan berusaha yang mendorong realisasi investasi daerah		Persentase peningkatan investasi	12,38	1	1,5	2	2,5	3	3,5		

Q

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)		(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
		Menurunnya pengangguran	Tingkat Pengangguran terbuka (%)	5,11	4,97	4,83	4,69	4,55	4,41	4,27	

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar 2025, data diolah

3.2. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

3.2.1. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

Strategi adalah cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang dijabarkan dalam bentuk program pembangunan daerah.

Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas - prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten untuk mewujudkan visi dan misi dengan mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Adapun strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kota Blitar disajikan pada Tabel 3.9.

Tabel 3.9
Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kota Blitar Tahun 2025 – 2029

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Mewujudkan Blitar Kota Pancasila yang aman, religius dan nasionalis	Terwujudnya kehidupan yang harmonis di masyarakat melalui penguatan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam politik dan pembangunan daerah	Meningkatkan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan	Peningkatan ketentraman dan ketertiban yang mantap didukung tertib hukum dan kehidupan demokrasi yang sehat dan dinamis
					Pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba serta precursor narkoba (P4GN-PN)
		Terwujudnya jaminan rasa aman pada masyarakat	Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat		Peningkatan keamanan wilayah dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi
					Penguatan keamanan, ketentraman, dan ketertiban serta peningkatan keterlibatan Masyarakat dalam trantibum linmas untuk mengurangi kriminalitas dan mengoptimalkan penegakan perda
Terwujudnya kota yang berketahanan bencana		Meningkatkan Pencegahan dan Penanganan Bencana	Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat tentang potensi bahaya gempa bumi, dan cuaca ekstrem maupun bahaya lainnya dengan mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana		
			Pengembangan sistem mitigasi bencana dan pengembangan jalur dan penetapan kawasan rawan bencana melalui sistem zonasi kawasan rawan bencana		
				Pengembangan jalur dan ruang evakuasi bencana pada kawasan rawan bencana berbasis partisipasi masyarakat	
2.		Meningkatnya Kualitas Kehidupan		Meningkatkan upaya pelayanan kesehatan	Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Mewujudkan Kota Blitar sehat dan sejahtera	Masyarakat yang Sehat	Terwujudnya kesehatan yang merata	secara menyeluruh, terjangkau, merata, berkelanjutan, profesional dan bermutu	Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan dan jaminan kesehatan universal dengan penguatan dan optimalisasi fasilitas layanan kesehatan
					Pemerataan, peningkatan kompetensi dan kesejahteraan tenaga kesehatan
					Peningkatan pencegahan kematian ibu dan anak disertai pencegahan dan pengurangan angka anak tidak sehat
					Percepatan penurunan angka kesakitan, penurunan penyakit menular dan tidak menular
					Percepatan Penuntasan stunting dan pencegahan stunting
					Dukungan pada program Makan Bergizi
					Dukungan pada penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis
					Dukungan pada penuntasan kasus TBC
					Dukungan pada pembangunan Rumah Sakit lengkap dan berkualitas
					Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat
Pemberian beasiswa untuk sekolah menengah dan perguruan tinggi berbasis keluarga miskin					
Peningkatan jaminan keluarga miskin melalui bantuan sosial					

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					Peningkatan jaminan perlindungan sosial bagi masyarakat / rentan
				Meningkatkan ketahanan pangan daerah	Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat
					Peningkatan ketahanan pangan dan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi <i>smart farming</i>
					Peningkatan ketahanan pangan melalui <i>smart farming</i> dan stabilitas harga terkait usaha pertanian
3.	Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar yang Berkelanjutan dan Tata Pemerintahan yang Berbasis <i>Smart Governance</i>	Terwujudnya pembangunan kota yang nyaman dan layak huni	Terwujudnya fasilitas perkotaan yang berkelanjutan	Meningkatkan kualitas infrastruktur perkotaan	Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas umum dan infrastruktur kota yang peduli lingkungan
				Meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan drainase serta menjamin ketersediaan air yang berkelanjutan	Peningkatan pelayanan air minum dan sanitasi yang aman bagi masyarakat
					Peningkatan pembangunan sumur resapan dari aliran air dan sumur biopori pada drainase lingkungan sebagai penangkap air hujan aliran air
					Peningkatan pengelolaan Sumber Daya Air yang berketahanan iklim dan ekologi
					Peningkatan pengelolaan mata air di wilayah kota dan pengembangan jaringan irigasi secara terintegrasi
				Mewujudkan tata ruang yang efisien dan berkelanjutan melalui perencanaan ruang	Penguatan pengelolaan dan pengendalian tata ruang dan pemanfaatannya melalui evaluasi secara berkala dengan penyesuaian berdasarkan kebutuhan daerah
					Penguatan pengelolaan jalan kota

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana jalan beserta fasilitas jalan yang berkualitas, aman, ramah serta nyaman	Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi dan logistik yang andal
				Peningkatan konektivitas layanan jaringan mobilitas utama masyarakat melalui dan integrasi multimoda dan penyiapan sarana prasarana integrasi antarmoda	
				Transformasi tata kelola kelembagaan dalam sistem transportasi publik masal	
				Peningkatan kerjasama dengan Kabupaten Blitar untuk peningkatan jalan penghubung antar daerah menuju akses jalur regional (JLS) dan nasional (jalan tol)	
			Meningkatnya kualitas permukiman	Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman	Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan
			Terwujudnya Lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatkan cakupan pengelolaan sampah dengan melibatkan peran serta masyarakat dan pemanfaatan teknologi	Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy dan peningkatan pengelolaan dan layanan sampah B3
Mengendalikan pencemaran lingkungan melalui berbagai instrumen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	Peningkatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan				

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Meningkatnya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Terwujudnya pelayanan pemerintahan yang berkualitas dan terintegrasi	Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan publik serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Peningkatan pelayanan publik terintegrasi berbasis teknologi informasi
					Peningkatan satu data pelayanan berbasis identitas penduduk
					Peningkatan interoperabilitas sistem pelayanan publik
					Peningkatan akses dan konektivitas internet pada pusat pelayanan publik, pusat layanan wilayah dan sub pusat layanan wilayah
					Peningkatan kemampuan keuangan dan aset daerah sebagai modal pembangunan
					Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan pengembangan manfaat aset daerah di dukung kebijakan penambahan aset daerah
					Penataan kelembagaan yang adaptif dengan kebutuhan daerah
			Penguatan kelembagaan dan integrasi lintas sektor di posyandu untuk mendukung 6 (enam) layanan dasar		
			Terwujudnya manajemen pemerintahan yang profesional	Meningkatnya reformasi tata kelola pemerintahan dan profesionalisme ASN	Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN Kota Blitar, menuju penyelenggaraan pemerintah daerah Kota Blitar yang profesional dan bebas korupsi
					Peningkatan partisipasi masyarakat, dunia pendidikan dan dunia usaha dalam semua tahapan pembangunan
					Peningkatan pengendalian, evaluasi dan pengawasan pembangunan
					Peningkatan profesionalitas ASN

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward dan punishment termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan berdasarkan capaian kinerja
4.	Mengembangkan potensi pendidikan, pemuda dan perempuan sebagai generasi emas yang cerdas dan berkarakter	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Meningkatkan Pengelolaan dan Pemerataan Aksesibilitas Layanan Pendidikan	<p>Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah</p> <p>Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan berbasis kondisi dan budaya lokal, potensi, dan keunggulan daerah.</p> <p>Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik menuju generasi berkompeten dan berdaya saing tinggi</p> <p>Peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan</p> <p>Peningkatan akses pendidikan sekolah menengah dan perguruan tinggi</p> <p>Dukungan pada program pemberian makan bergizi</p>
			Meningkatnya kualitas generasi muda	Membangun generasi muda yang handal dan berdaya saing tinggi melalui penguatan karakter, prestasi, kreatifitas dan Inovasi	<p>Penguatan Daya saing generasi muda melalui pemupukan ajang prestasi di segala bidang</p> <p>Peningkatan peran serta pemuda dalam mengisi pembangunan</p> <p>Pembinaan Organisasi Kepemudaan dan Karakter Pemuda yang Mandiri dan Kreatif</p>

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				generasi muda serta menumbuhkan budaya berolahraga di masyarakat	Memperluas tingkat partisipasi dan kolaborasi masyarakat dalam meningkatkan masyarakat olahraga
			Meningkatnya Kesetaraan Gender	Meningkatkan Pengarusutamaan Gender	<p>Penguatan pengarusutamaan gender dan keluarga berkualitas</p> <p>Pemberdayaan penyandang disabilitas dan lansia melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan Keputusan serta peningkatan partisipasi di pelbagai bidang pembangunan</p> <p>Pengendalian penduduk yang proporsional dan produktif.</p> <p>Peningkatan kualitas keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.</p>
			Terwujudnya kota yang berkebudayaan maju	Optimalisasi nilai budaya dalam pembangunan karakter	<p>Peningkatan pemajuan kebudayaan</p> <p>Penguatan pelestarian cagar budaya dan obyek yang diduga cagar budaya sebagai icon penguat karakter kebudayaan daerah</p> <p>Sertifikasi seniman dan budayawan agar mampu bersaing secara global</p>
5.	Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar sebagai Kota Perdagangan, Jasa, Pariwisata dan Industri	Terwujudnya ekonomi daerah yang inklusif	Meningkatnya kontribusi sektor unggulan terhadap pertumbuhan ekonomi	Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui penguatan struktur ekonomi yang berorientasi pada	<p>Peningkatan produktivitas dan daya saing sektor ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, penguatan stabilitas ekonomi serta pengendalian inflasi daerah</p> <p>Peningkatan produktivitas BUMD</p> <p>Transformasi pasar tradisional</p> <p>Penguatan stabilitas pasar melalui sinergitas pasar konvensional dan pasar modern</p>

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				pengembangan perdagangan, industri, UMKM dan pariwisata	Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang menerapkan prinsip-prinsip dari pembangunan Ekonomi Hijau (Green Economy)
					Pengembangan kota sebagai pusat layanan regional
					Hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi
					Dukungan terhadap koperasi merah putih sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi lokal yang inklusif
					Peningkatan peran UMKM pada rantai industri melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif melalui penerapan teknologi dan kemitraan usaha
					Optimalisasi pemasaran UMKM melalui kerjasama antar pelaku UMKM dan pelaku industri dan sumber bahan baku
					Sertifikasi SDM pelaku/pengelola wisata dalam rangka peningkatan SDM profesional
					Peningkatan citra, karakter, dan daya saing kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata berbasis wisata kebangsaan dan kultural dengan urban tourism
					Penataan dan penguatan wisata sejarah khususnya terkait PETA dan Proklamator Bung Karno yang didukung penguatan peran kampung wisata dan wisata hutan kota
					Peningkatan kerjasama wisata dengan daerah sekitar, Pelaku wisata, media dan dunia usaha

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					Pengembangan wisata kebangsaan sebagai edukasi nasional dalam Pembangunan karakter nasional
				Mengembangkan ekonomi kreatif	Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif
					Peningkatan pemasaran produk ekonomi kreatif pada pasar nasional dan internasional
			Terwujudnya kemudahan berusaha yang mendorong realisasi investasi daerah	Meningkatkan nilai investasi daerah	Peningkatan pelayanan investasi dan perizinan berbasis teknologi informasi didukung data data pendukung penarik investasi
					Peningkatan akses kemudahan investasi terkait regulasi, human resources, aksesibilitas dan kondusitivitas daerah
			Menurunnya pengangguran	Menurunkan Pengangguran	Peningkatan kompetensi tenaga kerja dan pengurangan pengangguran terbuka dan terselubung
					Peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja menghadapi transformasi industrialisasi
					Peningkatan kesejahteraan tenaga kerja dan pemberian jaminan kesejahteraan tenaga kerja rentan

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar 2025, data diolah

3.2.1.1. Strategi dan Arah Kebijakan Misi Pertama Mewujudkan Blitar Kota Pancasila yang Aman, Religius dan Nasionalis

Dalam rangka mengawal keberhasilan untuk menjadikan Kota Blitar yang aman, religius dan nasionalis, telah ditetapkan sasaran pembangunannya. Selanjutnya untuk mewujudkan sasaran pembangunan pada misi mewujudkan Blitar Kota Pancasila yang aman, religius dan nasionalis ditetapkan Strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

Strategi 1 : Meningkatkan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat dengan Melibatkan Seluruh Pemangku Kepentingan

Sasaran 1 : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam politik dan pembangunan daerah

Arah kebijakan :

- Peningkatan ketentraman dan ketertiban yang mantap didukung tertib hukum dan kehidupan demokrasi yang sehat dan dinamis;
- Pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba serta prekursor narkoba (P4GN-PN).

Sasaran 2 : Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat

Arah kebijakan :

- Peningkatan keamanan wilayah dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
- Penguatan keamanan, ketentraman, dan ketertiban serta peningkatan keterlibatan masyarakat dalam trantibum linmas untuk mengurangi kriminalitas dan mengoptimalkan penegakan perda.

Strategi 2 : Meningkatkan Pencegahan dan Penanganan Bencana

Sasaran 3 : Terwujudnya kota yang berketahanan bencana

Arah kebijakan :

- Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat tentang potensi bahaya gempa bumi, dan cuaca ekstrem maupun bahaya lainnya dengan mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana
- Pengembangan sistem mitigasi bencana dan pengembangan jalur dan penetapan kawasan rawan bencana melalui sistem zonasi kawasan rawan bencana
- Pengembangan jalur dan ruang evakuasi bencana pada kawasan rawan bencana berbasis partisipasi masyarakat

Sebagai bentuk dukungan dan kontribusi atas pencapaian Asta Cita, Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dan Nawa Bhakti Satya merupakan dukungan atas pencapaian :

- Asta Cita 1 - Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan HAM
- Asta Cita 8 - Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur;
- Jatim Lestari - Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan
- Jatim Harmoni - Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif.

3.2.1.2. Strategi dan Arah Kebijakan Misi Kedua Mewujudkan Kota Blitar Sehat dan Sejahtera

Dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, telah ditetapkan sasaran pembangunannya. Selanjutnya untuk mewujudkan sasaran pembangunan pada misi mewujudkan Kota Blitar Sehat dan Sejahtera ditetapkan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

Strategi 3 : Meningkatkan Upaya Pelayanan Kesehatan Secara Menyeluruh, Terjangkau, Merata, Berkelanjutan, Profesional dan Bermutu.

Sasaran 4 : Terwujudnya kesehatan yang merata

Arah Kebijakan :

- Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat
- Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan dan jaminan kesehatan universal dengan penguatan dan optimalisasi fasilitas layanan kesehatan
- Pemerataan, peningkatan kompetensi dan kesejahteraan tenaga kesehatan
- Peningkatan pencegahan kematian ibu dan anak disertai pencegahan dan pengurangan angka anak tidak sehat
- Percepatan penurunan angka kesakitan, penurunan penyakit menular dan tidak menular
- Percepatan Penuntasan stunting dan pencegahan stunting
- Dukungan pada Program Pemberian Makan Bergizi
- Dukungan pada penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis
- Dukungan pada penuntasan kasus TBC
- Dukungan pada pembangunan Rumah Sakit lengkap dan berkualitas

Strategi 4 : Penanggulangan Kemiskinan secara terpadu dan terintegrasi

Sasaran 5 : Meningkatkan kualitas hidup dan ketangguhan sosial masyarakat

Arah kebijakan :

- Penuntasan kemiskinan secara terpadu dengan perlindungan sosial terintegrasi

- Pemberian beasiswa untuk sekolah menengah dan perguruan tinggi berbasis keluarga miskin
- Peningkatan jaminan keluarga miskin melalui bantuan sosial
- Peningkatan jaminan perlindungan sosial bagi masyarakat / rentan

Strategi 5 : Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah

Sasaran 5 : Meningkatnya kualitas hidup dan ketangguhan sosial masyarakat

Arah kebijakan :

- Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat
- Peningkatan ketahanan pangan dan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi *smart farming*
- Peningkatan ketahanan pangan melalui *smart farming* dan stabilitas harga terkait usaha pertanian

Sebagai bentuk dukungan dan kontribusi atas pencapaian Asta Cita, Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dan Nawa Bhakti Satya merupakan dukungan atas pencapaian :

- Asta Cita 2 - Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
- Asta Cita 4 - Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
- Asta Cita 6 - Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
- PHTC 1 - Memberi makanan bergizi sehat di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil;
- PHTC 2 - Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas;
- PHTC 3 - Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional;
- PHTC 5 - Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut;
- PHTC 7 - Melanjutkan Pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menyediakan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan terutama generasi milenial, Generasi Z, dan Masyarakat berpenghasilan Rendah (MBR);

- Jatim Agro - Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan
- Jatim Sehat - Meningkatkan derajat Kesehatan Masyarakat yang Berkualitas, Merata, Mudah Diakses dan Berkeadilan.
- Jatim Sejahtera - Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan melalui Perlindungan Sosial yang Adaptif, Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Pedesaan dengan Pendekatan Lintas sectoral - Spasial Berbasis Data Terpadu

3.2.1.3. Strategi dan Arah Kebijakan Misi Ketiga Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar yang Berkelanjutan dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berbasis *Smart Governance*

Dalam rangka mewujudkan Kota Blitar yang berkelanjutan dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif telah dirumuskan sasaran pembangunannya. Selanjutnya untuk mewujudkan sasaran pembangunan pada misi Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar yang Berkelanjutan dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berbasis *Smart Governance* ditetapkan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

Strategi 6 : Meningkatkan Akses Infrastruktur Perkotaan
Sasaran 6 : Terwujudnya fasilitas perkotaan yang berkelanjutan

Arah Kebijakan : Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas umum dan infrastruktur kota yang peduli lingkungan

Strategi 7 : Meningkatkan Kualitas Dan Kuantitas Jaringan Drainase Serta Menjamin Ketersediaan Air Yang Berkelanjutan

Sasaran 6 : Terwujudnya fasilitas perkotaan yang berkelanjutan

Arah Kebijakan :

- Peningkatan pelayanan air minum dan sanitasi yang aman bagi masyarakat
- Peningkatan pembangunan sumur resapan dari aliran air dan sumur biopori pada drainase lingkungan sebagai penangkap air hujan aliran air
- Peningkatan pengelolaan Sumber Daya Air yang berketahanan iklim dan ekologi
- Peningkatan pengelolaan mata air di wilayah kota dan pengembangan jaringan irigasi secara terintegrasi

Strategi 8 : Mewujudkan Tata Ruang Yang Efisien Dan Berkelanjutan Melalui Perencanaan Ruang

Sasaran 6 : Terwujudnya fasilitas perkotaan yang berkelanjutan

Arah Kebijakan : Penguatan pengelolaan dan pengendalian tata ruang dan pemanfaatannya melalui evaluasi secara berkala dengan penyesuaian berdasarkan kebutuhan daerah

Strategi 9 : Meningkatkan Kualitas Sarana Dan Kuantitas Prasarana Jalan Beserta Fasilitas Jalan Yang Berkualitas, Aman, Ramah Serta Nyaman

Sasaran 6 : Terwujudnya fasilitas perkotaan yang berkelanjutan

Arah Kebijakan :

- Penguatan pengelolaan jalan kota
- Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi dan logistik yang andal
- Peningkatan konektivitas layanan jaringan mobilitas utama masyarakat melalui dan integrasi multimoda dan penyiapan sarana prasarana integrasi antarmoda
- Transformasi tata kelola kelembagaan dalam sistem transportasi publik masal
- Peningkatan kerjasama dengan Kabupaten Blitar untuk peningkatan jalan penghubung antar daerah menuju akses jalur regional (JLS) dan nasional (jalan tol)

Strategi 10 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Perumahan Dan Permukiman

Sasaran 7 : Meningkatkan kualitas permukiman

Arah Kebijakan : Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan

Strategi 11 : Meningkatkan Cakupan Pengelolaan Sampah Dengan Melibatkan Peran Serta Masyarakat Dan Pemanfaatan Teknologi

Sasaran 8 : Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan

Arah Kebijakan : Pengelolaan sampah terpadu hulu – hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan sirkular ekonomi dan peningkatan pengelolaan dan layanan sampah B3.

Strategi 12 : Mengendalikan Pencemaran Lingkungan Melalui Berbagai Instrumen Pengendalian Dan Pencemaran Lingkungan

Sasaran 8 : Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan

Arah Kebijakan : Peningkatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan

Strategi 13 : Meningkatkan Kualitas Kinerja Dan Pelayanan Publik Serta Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Sasaran 9 : Terwujudnya pelayanan pemerintahan yang berkualitas dan terintegrasi

Arah kebijakan :

- Peningkatan pelayanan publik terintegrasi berbasis teknologi informasi
- Peningkatan satu data pelayanan berbasis identitas penduduk

- Peningkatan interoperabilitas sistem pelayanan publik
- Peningkatan akses dan konektivitas internet pada pusat pelayanan publik, pusat pelayanan wilayah dan sub pusat pelayanan wilayah
- Peningkatan kemampuan keuangan dan aset daerah sebagai modal pembangunan
- Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan pengembangan manfaat aset daerah di dukung kebijakan penambahan aset daerah
- Dukungan penguatan kelembagaan dan integrasi lintas sektor di posyandu untuk mendukung 6 (enam) layanan dasar
- Penataan kelembagaan yang adaptif dengan kebutuhan daerah

Strategi 14 : Meningkatkan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan Dan Profesionalisme ASN

Sasaran 10 : Terwujudnya manajemen pemerintahan yang profesional

Arah kebijakan :

- Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN Kota Blitar, menuju penyelenggaraan pemerintah daerah Kota Blitar yang profesional dan bebas korupsi
- Peningkatan partisipasi masyarakat, dunia pendidikan dan dunia usaha dalam semua tahapan pembangunan
- Peningkatan pengendalian, evaluasi dan pengawasan pembangunan
- Peningkatan profesionalitas ASN
- Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward dan punishment termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan berdasarkan capaian kinerja

Sebagai bentuk dukungan dan kontribusi atas pencapaian Asta Cita, Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dan Nawa Bhakti Satya merupakan dukungan atas pencapaian :

- Asta cita 3 - Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
- Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan
- Asta cita 8 - Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam & budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil & makmur;

- PHTC 6 - Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara
- Jatim Berkah Amanah - Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif
- Jatim Akses - Memperkuat infrastruktur Konektivitas Antar Wilayah dan Intra Aglomerasi yang Berkualitas, Modern, Terpadu, dan Berkeadilan;
- Jatim Lestari - Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan

3.2.1.4. Strategi dan Arah Kebijakan Misi Keempat mengembangkan potensi pendidikan, pemuda dan perempuan sebagai generasi emas yang cerdas dan berkarakter

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan dalam upaya perkuatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pemuda dan perempuan telah dirumuskan sasaran pembangunannya. Selanjutnya untuk mewujudkan sasaran pembangunan pada misi mengembangkan potensi pendidikan, pemuda dan perempuan sebagai generasi emas yang cerdas dan berkarakter ditetapkan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

Strategi 15 : Meningkatkan Pengelolaan dan Pemerataan Aksesibilitas Layanan Pendidikan

Sasaran 11 : Meningkatkan kualitas pendidikan

Arah kebijakan :

- Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah
- Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan berbasis kondisi dan budaya lokal, potensi, dan keunggulan daerah
- Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik menuju generasi berkompeten dan berdaya saing tinggi
- Peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan
- Peningkatan akses pendidikan sekolah menengah dan perguruan tinggi
- Dukungan pada program pemberian makan bergizi

Strategi 16 : Membangun Generasi Muda Yang Handal Dan Berdaya Saing Tinggi Melalui Penguatan Karakter, Prestasi, Kreativitas Dan Inovasi Generasi Muda Serta Menumbuhkan Budaya Berolahraga Di Masyarakat

Sasaran 12 : Meningkatkan kualitas generasi muda

Arah kebijakan :

- Penguatan daya saing generasi muda melalui pemupukan ajang prestasi di segala bidang
- Peningkatan peran serta pemuda dalam mengisi pembangunan

- Pembinaan Organisasi Kepemudaan dan Karakter Pemuda yang Mandiri dan Kreatif
- Memperluas tingkat partisipasi dan kolaborasi masyarakat dalam meningkatkan masyarakat olahraga

Strategi 17 : Meningkatkan Pengarusutamaan Gender

Sasaran 13 : Meningkatnya kesetaraan gender

Arah kebijakan :

- Penguatan pengarusutamaan gender dan keluarga berkualitas
- Pemberdayaan penyandang disabilitas dan lansia melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan Keputusan serta peningkatan partisipasi di pelbagai bidang pembangunan
- Pengendalian penduduk yang proporsional dan produktif
- Peningkatan kualitas keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.

Strategi 18 : Optimalisasi Nilai Budaya Dalam Pembangunan Karakter

Sasaran 14 : Terwujudnya kota yang berkebudayaan maju

Arah kebijakan :

- Peningkatan pemajuan kebudayaan
- Penguatan pelestarian cagar budaya dan obyek yang diduga cagar budaya sebagai ikon penguat karakter kebudayaan daerah
- Sertifikasi seniman dan budayawan agar mampu bersaing secara global

Sebagai bentuk dukungan dan kontribusi atas pencapaian Asta Cita, Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dan Nawa Bhakti Satya merupakan dukungan atas pencapaian :

- Asta Cita 4 - Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
- Asta cita 8 - Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur;
- PHTC 4 - Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah sekolah yang perlu renovasi;
- PHTC 6 - Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara;
- Jatim Harmoni - Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif melalui Pengembangan Nilai-nilai Kesalehan Sosial, Berjiwa Pancasila, Pengarusutamaan Gender, serta Memajukan Seni, Budaya dan Prestasi Olahraga;

- **Jatim Cerdas** - Memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan dan akses Pendidikan untuk semua (Education for all) yang berkualitas, merata, dan berkeadilan

3.2.1.5. Strategi dan Arah Kebijakan Misi Kelima Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar sebagai Kota Perdagangan, Jasa, Pariwisata dan Industri

Dalam rangka mengawal keberhasilan mewujudkan Kota Blitar sebagai Kota Perdagangan, Jasa, Pariwisata dan Industri telah dirumuskan sasaran pembangunannya. Selanjutnya untuk mewujudkan sasaran pembangunan pada misi mewujudkan pembangunan Kota Blitar sebagai kota perdagangan, jasa, pariwisata dan industri ditetapkan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

Strategi 19 : Membangun Kemandirian Ekonomi Yang Berdimensi Kerakyatan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Melalui Penguatan Struktur Ekonomi Yang Berorientasi Pada Pengembangan Perdagangan, Industri , UMKM Dan Pariwisata

Sasaran 15 : Meningkatnya kontribusi sektor unggulan terhadap pertumbuhan ekonomi

Arah kebijakan :

- Peningkatan produktivitas dan daya saing sektor ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, penguatan stabilitas ekonomi serta pengendalian inflasi daerah
- Peningkatan produktivitas BUMD
- Transformasi pasar tradisional
- Penguatan stabilitas pasar melalui sinergitas pasar konvensional dan pasar modern
- Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang menerapkan prinsip-prinsip dari pembangunan Ekonomi Hijau (Green Economy)
- Pengembangan kota sebagai pusat layanan regional
- Hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi
- Dukungan terhadap koperasi merah putih sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi lokal yang inklusif
- Peningkatan peran UMKM pada rantai industri melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif melalui penerapan teknologi dan kemitraan usaha
- Optimalisasi pemasaran UMKM melalui kerjasama antar pelaku UMKM dan pelaku industri dan sumber bahan baku
- Sertifikasi SDM pelaku/pengelola wisata dalam rangka peningkatan SDM profesional
- Peningkatan citra, karakter, dan daya saing kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata berbasis wisata kebangsaan dan kultural dengan *urban tourism*
- Penataan dan penguatan wisata sejarah khususnya terkait PETA dan Proklamator Bung Karno yang didukung penguatan peran kampung wisata dan wisata hutan kota

- Peningkatan kerjasama wisata dengan daerah sekitar, Pelaku wisata, media dan dunia usaha
- Pengembangan wisata kebangsaan sebagai edukasi nasional dalam Pembangunan karakter nasional

Strategi 20 : Mengembangkan Ekonomi Kreatif

Sasaran 15 : Meningkatnya kontribusi sektor unggulan terhadap pertumbuhan ekonomi

Arah kebijakan :

- Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif
- Peningkatan pemasaran produk ekonomi kreatif pada pasar regional, nasional dan internasional

Strategi 21 : Meningkatkan Nilai Investasi Daerah

Sasaran 16 : Terwujudnya kemudahan berusaha yang mendorong kemudahan investasi daerah

Arah kebijakan :

- Peningkatan pelayanan investasi dan perizinan berbasis teknologi informasi didukung data data pendukung penarik investasi
- Peningkatan akses kemudahan investasi terkait regulasi, *human resources*, aksesibilitas dan kondusivitas daerah

Strategi 22 : Menurunkan Pengangguran

Sasaran 17 : Menurunnya pengangguran

Arah kebijakan :

- Peningkatan kompetensi tenaga kerja dan pengurangan pengangguran terbuka dan terselubung
- Peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja menghadapi transformasi industrialisasi
- Peningkatan kesejahteraan tenaga kerja dan pemberian jaminan kesejahteraan tenaga kerja rentan

Sebagai bentuk dukungan dan kontribusi atas pencapaian Asta Cita, Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dan Nawa Bhakti Satya merupakan dukungan atas pencapaian :

- Asta Cita 2 - Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
- Asta Cita 3 - Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
- Asta Cita 5 - Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
- Jatim Kerja - Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas melalui Peningkatan Kewirausahaan, Iklim Investasi dan Stabilitas Ekonomi

3.2.2. Pentahapan Pembangunan

Pelaksanaan pembangunan Kota Blitar 2025 – 2029 merupakan tahap pembangunan lima tahunan dari RPJPD Kota Blitar Tahun 2025 – 2045. Sesuai dengan arah kebijakan pembangunan RPJPD Kota Blitar Tahun 2025 - 2045, Prioritas utama, tema atau fokus pembangunan pada periode 2025 – 2029 adalah Penguatan Pondasi Transformasi sebagai dasar pembangunan melalui transformasi ekonomi, sosial, lingkungan dan pemerintahan.

Selanjutnya, untuk menuju pada terwujudnya visi kota Blitar pada tahun 2025 - 2029, maka disusunlah tema pembangunan dalam RKPD pada periode 2025 - 2029. Fokus/Tema pembangunan tahunan sebagai berikut :



Gambar 3.1 Fokus / Tema Tahunan RKPD selama Periode RPJMD Tahun 2025 – 2029

3.2.3. Arah Kebijakan Kewilayahan

Berdasarkan faktor sosial, ekonomi dan lingkungan, Kota Blitar merumuskan kebijakan kewilayahan yang mendukung keterpaduan pembangunan. Kebijakan kewilayahan dirumuskan untuk menciptakan daya saing daerah yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Merujuk pada RTRW Provinsi Jawa Timur tahun 2023-2043 dan RPJPD Provinsi Jawa Timur tahun 2025-2045, pembangunan kewilayahan Provinsi Jawa Timur lima tahun ke depan fokus pada peningkatan lima koridor penghubung antar kawasan dan kepulauan yaitu Kawasan Gerbangkertosusila, Kawasan Bromo Tengger-Sumeru, Kawasan Selingkar Ijen, Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan, serta Kawasan Madura dan Kepulauan. Potret kondisi perkembangan wilayah di Provinsi Jawa Timur pada lima koridor penghubung antar kawasan dan kepulauan menunjukkan pusat pertumbuhan berada pada Kawasan Gerbangkertosusila yang merupakan pusat dari perdagangan, jasa, industri pengolahan, serta logistik di Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru yang merupakan kawasan dengan potensi pertanian, perkebunan serta sektor pariwisata relatif berkembang selama 20 tahun utamanya di sekitar Kota Malang-Kota

Batu. Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas selatan memperlihatkan adanya perkembangan yang cukup signifikan utamanya di sekitar Kota Kediri. Di sisi lain, Kawasan Selingkar Ijen menunjukkan perkembangan relatif tinggi di Kabupaten Jember dan Kabupaten Banyuwangi. Perkembangan di wilayah tersebut dipengaruhi oleh potensi besar pada sektor pariwisata dan agroindustri. Di Kawasan Madura dan Kepulauan, perkembangan wilayah di kawasan tersebut terlihat memusat di Kabupaten Pamekasan. Perkembangan wilayah di Kawasan Madura dan Kepulauan didorong dan difokuskan pada pengembangan pertanian, peternakan dan perikanan.

Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043 Kota Blitar merupakan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang berada di Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan. Selatan merupakan kawasan strategis yang menghubungkan wilayah selatan Jawa Timur dengan akses jalan nasional lintas selatan. Dikelilingi oleh pegunungan dan potensi alam yang belum banyak tereksplorasi, kawasan ini memiliki kekuatan dalam pengembangan pertanian, energi terbarukan, serta pariwisata berbasis alam dan petualangan. Percepatan pembangunan infrastruktur di kawasan ini membuka peluang besar bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi lokal. Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan memiliki peluang untuk dikembangkan sebagai kawasan agropolitan, minapolitan dan agroindustri dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan dan perikanan. Selain itu, kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan juga memiliki keunggulan dalam pariwisata alam. Untuk mewujudkan Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan sebagai pusat agropolitan dan minapolitan, serta berkembang untuk menjadi kawasan agroindustri di sektor pertanian, perkebunan dan perikanan perlu adanya peningkatan akses layanan dasar seperti fasilitas pendidikan dan kesehatan, peningkatan daya saing dan kompetensi sumber daya manusia, pengentasan kemiskinan serta perluasan penyediaan jaminan sosial. Dalam aspek ekonomi, Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan ini perlu didorong untuk optimalisasi sektor pertanian, perkebunan dan perikanan, pengembangan komoditas unggulan, hilirisasi produk unggulan, peningkatan akses pendanaan, peningkatan kerja sama antar daerah dan juga perluasan pemasaran produk sebagai upaya mewujudkan keterkaitan pasar lokal dan pasar regional. Pengembangan tersebut juga harus didukung dengan peningkatan konektivitas ekonomi dan transportasi pendukung sistem logistik seperti jalan tol dan bandara. Selain itu, untuk mendukung pengembangan pariwisata di Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan perlu didukung dengan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup untuk mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan.

Dalam mendukung pengembangan di wilayah tersebut diperlukan highlight indikasi intervensi yang mampu

memberikan dampak positif serta meningkatkan ekonomi di Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan. Adapun highlight indikasi intervensi untuk Kota Blitar adalah:

1. Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Sesar Darat di Jawa Timur dengan intervensi Retrofit atau penguatan infrastruktur publik berketahanan seismik di Kota Blitar.
2. Pengembangan dalam urusan Pariwisata dengan intervensi Revitalisasi Museum PETA Blitar

3.2.4. Pengarustamaan Pembangunan

3.2.4.1. Pengarusutamaan SDGs

Pengarustamaan *Sustainable Development Goals (SDGs)* mengintegrasikan agenda pembangunan berkelanjutan ke seluruh aspek nasional dan daerah melalui:

- Setiap kebijakan pemerintah harus mendukung percepatan pencapaian SDGs 2030;
- Mengintegrasikan target-target SDGs kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- Penyusunan Rancangan Aksi Daerah, dan Penguatan Kolaborasi Multi Pihak;
- Pemantauan dan evaluasi pencapaian target SDGs; dan
- Inklusi Sosial dan Keberlanjutan, semua program pembangunan harus mengintegrasikan prinsip inklusi sosial, dengan fokus pada kelompok rentan dan marginal, serta prinsip keberlanjutan lingkungan.

Sesuai dengan Peraturan Presiden No 111/2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs, Peraturan Menteri Peraturan Menteri No 7 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional (dokumen RAN dan RAD) terdapat 212 indikator sasaran yang terbagi dalam Tujuan 1 sampai dengan Tujuan 17 dari TPB/SDGs dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.10
Kontribusi Kota Blitar terhadap Pencapaian SDGs

Tujuan SDGs	Kontribusi Kota Blitar
Tanpa Kemiskinan	Pemerintah Kota Blitar berkomitmen dalam SDGs tanpa kemiskinan (<i>SDGs Goal 1</i>) selaras dengan misi mewujudkan kota Blitar sehat dan sejahtera pada sasaran Meningkatnya kualitas hidup dan ketangguhan sosial masyarakat
Tanpa kelaparan	Pemerintah Kota Blitar berkomitmen dalam SDGs tanpa kelaparan (<i>SDGs Goal 2</i>) selaras dengan misi mewujudkan kota Blitar sehat dan sejahtera pada sasaran meningkatnya kualitas hidup dan ketangguhan sosial masyarakat
Kehidupan sehat dan sejahtera	Pemerintah Kota Blitar berkomitmen dalam SDGs kehidupan sehat dan sejahtera (<i>SDGs Goal 3</i>) selaras dengan misi mewujudkan Kota Blitar sehat dan sejahtera pada sasaran terwujudnya kesehatan yang merata di Kota Blitar dan sasaran meningkatnya kualitas hidup dan ketangguhan sosial masyarakat

Tujuan SDGs	Kontribusi Kota Blitar
Pendidikan berkualitas	Pemerintah Kota Blitar berkomitmen dalam SDGs Pendidikan berkualitas (<i>SDGs Goal 4</i>) selaras dengan misi mengembangkan potensi pendidikan, pemuda dan perempuan sebagai generasi emas yang cerdas dan berkarakter pada sasaran meningkatnya kualitas pendidikan
Kesetaraan gender	Pemerintah Kota Blitar berkomitmen dalam SDGs kesetaraan gender (<i>SDGs Goal 5</i>) selaras dengan misi mengembangkan potensi pendidikan, pemuda dan perempuan sebagai generasi emas yang cerdas dan berkarakter pada sasaran meningkatnya kesetaraan gender
Air bersih dan sanitasi layak	Pemerintah Kota Blitar berkomitmen dalam SDGs air bersih dan sanitasi layak (<i>SDGs Goal 6</i>) selaras dengan misi mewujudkan pembangunan Kota Blitar yang berkelanjutan dan tata kelola pemerintahan yang berbasis <i>smart governance</i> pada sasaran terwujudnya fasilitasi perkotaan yang berkelanjutan
Energi bersih dan terjangkau	Pemerintah Kota Blitar berkomitmen dalam SDGs energi bersih dan terjangkau (<i>SDGs Goal 7</i>) selaras dengan misi mewujudkan pembangunan Kota Blitar yang berkelanjutan dan tata kelola pemerintahan yang berbasis <i>smart governance</i> pada sasaran terwujudnya fasilitasi perkotaan yang berkelanjutan
Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi	Pemerintah Kota Blitar berkomitmen dalam SDGs pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi (<i>SDGs Goal 8</i>) selaras dengan misi mewujudkan pembangunan Kota Blitar sebagai kota perdagangan, jasa, pariwisata dan industri pada sasaran meningkatnya kontribusi sektor unggulan terhadap pertumbuhan ekonomi dan sasaran menurunnya pengangguran
Industri, inovasi dan infrastruktur	Pemerintah Kota Blitar berkomitmen dalam SDGs industri, inovasi dan infrastruktur (<i>SDGs Goal 9</i>) selaras dengan misi mewujudkan pembangunan Kota Blitar yang berkelanjutan dan tata kelola pemerintahan yang berbasis <i>smart governance</i> pada sasaran terwujudnya fasilitasi perkotaan yang berkelanjutan serta misi mewujudkan pembangunan Kota Blitar sebagai kota perdagangan, jasa, pariwisata dan industri pada sasaran meningkatnya kontribusi sektor unggulan terhadap pertumbuhan ekonomi

Tujuan SDGs	Kontribusi Kota Blitar
Berkurangnya kelompok rentan	Pemerintah Kota Blitar berkomitmen dalam SDGs berkurangnya kelompok rentan (<i>SDGs Goal 10</i>) selaras dengan misi mewujudkan pembangunan Kota Blitar sebagai kota perdagangan, jasa, pariwisata dan industri pada sasaran meningkatnya kontribusi sektor unggulan terhadap pertumbuhan ekonomi serta misi mewujudkan Kota Blitar sehat dan sejahtera pada sasaran meningkatnya kualitas hidup dan ketangguhan sosial masyarakat
Kota dan permukiman berkelanjutan	Pemerintah Kota Blitar berkomitmen dalam SDGs kota dan permukiman berkelanjutan (<i>SDGs Goal 11</i>) selaras dengan misi mewujudkan pembangunan Kota Blitar yang berkelanjutan dan tata kelola pemerintahan yang berbasis <i>smart governance</i> pada sasaran meningkatnya kualitas permukiman
Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab	Pemerintah Kota Blitar berkomitmen dalam SDGs konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab (<i>SDGs Goal 12</i>) selaras dengan misi mewujudkan pembangunan Kota Blitar yang berkelanjutan dan tata kelola pemerintahan yang berbasis <i>smart governance</i> pada sasaran terwujudnya fasilitasi perkotaan yang berkelanjutan dan sasaran terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan
Penanganan perubahan iklim	Pemerintah Kota Blitar berkomitmen dalam SDGs penanganan perubahan iklim (<i>SDGs Goal 13</i>) selaras dengan misi mewujudkan pembangunan Kota Blitar yang berkelanjutan dan tata kelola pemerintahan yang berbasis <i>smart governance</i> pada sasaran terwujudnya fasilitasi perkotaan yang berkelanjutan
Ekosistem lautan	-
Ekosistem daratan (life on land)	Pemerintah Kota Blitar berkomitmen dalam SDGs ekosistem daratan (<i>life on land</i>) (<i>SDGs Goal 15</i>) selaras dengan misi mewujudkan pembangunan Kota Blitar yang berkelanjutan dan tata kelola pemerintahan yang berbasis <i>smart governance</i> pada sasaran terwujudnya fasilitasi perkotaan yang berkelanjutan dan sasaran terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan
Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kuat	Pemerintah Kota Blitar berkomitmen dalam SDGs perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kuat (<i>SDGs Goal 16</i>) selaras dengan misi mewujudkan pembangunan Kota Blitar yang

Tujuan SDGs	Kontribusi Kota Blitar
	berkelanjutan dan tata kelola pemerintahan yang berbasis <i>smart governance</i> pada sasaran terwujudnya pelayanan pemerintahan yang berkualitas dan terintegrasi serta sasaran terwujudnya manajemen pemerintahan yang <i>professional</i>
Kemitraan untuk mencapai tujuan	Pemerintah Kota Blitar berkomitmen dalam SDGs kemitraan untuk mencapai tujuan (<i>SDGs Goal 17</i>) melalui berbagai inisiatif dan kolaborasi bersinergi dengan universitas, organisasi masyarakat, dan sektor swasta untuk menciptakan pembangunan berkelanjutan. Sebagai bentuk dukungan dan kontribusi atas pencapaian (<i>SDGs Goal 17</i>) kemitraan dengan memberikan fasilitasi dan mediasi, kemudahan bagi pihak yang terlibat dalam kemitraan

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar 2025, data diolah

3.2.5. Program Prioritas Daerah

Program pembangunan daerah disusun dan ditetapkan berdasarkan tema tahunan untuk penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah. Sehingga bentuk dasar dari program pembangunan daerah adalah program perangkat daerah. Sedangkan program prioritas pembangunan daerah adalah program yang dirumuskan dan dipilih dari program pembangunan daerah karena memiliki keterhubungan langsung dengan pencapaian visi dan misi daerah.

Keterhubungan langsung dengan visi dan misi daerah disebabkan adanya program yang disusun sebagai janji politik sebagai operasionalisasi dari visi dan misi yang diajukan dalam proses pemilihan Kepala Daerah. Agar Program yang dijanjikan dapat terlaksana untuk mencapai visi dan misi dalam struktur perencanaan pembangunan daerah, maka program tersebut harus dikonversi atau dipersamakan dengan klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur program dalam ketentuan perencanaan daerah.

Adapun persamaan program janji politik yang dikonversi ke dalam program prioritas daerah berdasarkan klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur program adalah sebagaimana tercantum pada tabel 3.11 dan program prioritas pembangunan daerah yang dihubungkan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran sebagai mana disajikan pada Tabel 3.12. berikut :

Tabel 3.11
Pelaksanaan Program Prioritas Walikota oleh Perangkat Daerah dengan Program Prioritas Daerah
Tahun 2025-2029

No	Program Prioritas Walikota	Perangkat Daerah	Program Prioritas Daerah
1	Mendirikan pusat kajian pemikiran dan ajaran Bung Karno	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
2	Membumikan pemikiran dan ajaran Bung Karno ke dalam Lembaga Pendidikan, Organisasi Sosial Politik dan komponen masyarakat lainnya.	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 2. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik 3. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya 4. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
3	Penyediaan dana bantuan untuk TPQ, Madrasah Diniyah, Pesantren, Sekolah Minggu, dan lainnya, serta peningkatan SDM dan kesejahteraan tenaga pendidiknya.	Bagian yang menangani urusan kesra pada Sekretariat daerah	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat)
4	"Sarapan Bareng Walikota Blitar" sebagai sarana pelatihan Life Skill bagi masyarakat Kota Blitar	Bagian yang manangani urusan Pemerintahan pada Sekretariat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Bagian Pemerintahan)
5	Meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan tenaga kesehatan, dan dokter.	Perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
		Rumas Sakit Umum Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
6	Pembangunan baru gedung RSUD untuk penambahan jumlah ruang rawat inap,	Rumas Sakit Umum Daerah	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

No	Program Prioritas Walikota	Perangkat Daerah	Program Prioritas Daerah
	ruang operasi, CATH LAB dan pengajuan peningkatan fasilitasi pelayanan Kesehatan		
7	Menjadikan RSUD Mardi Waluyo sebagai Rumah Sakit Rujukan	Rumas Sakit Umum Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
8	Memfasilitasi pelayanan ambulan gratis untuk penjemputan dan pemulangan pasien/jenazah yang cepat dan tanggap	Perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Rumas Sakit Umum Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
9	Meningkatkan Bantuan Sosial bagi lansia, penyandang disabilitas, dan keluarga tidak mampu	Perangkat Daerah yang menangani urusan sosial	Program Rehabilitasi Sosial
10	Optimalisasi bantuan beras kesejahteraan daerah (Rastrada) dengan bantuan lauk-pauk bagi keluarga tidak mampu	Perangkat Daerah yang menangani urusan sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
11	Pembangunan sarana, prasarana, utilitas umum dan infrastruktur kota yang ramah publik dan lingkungan	Perangkat Daerah yang menangani urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Program Penataan Bangunan Gedung 2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase 3. Program Pengelolaan Sumber Daya Air 4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 5. Penyelenggaraan Jalan
		Perangkat Daerah yang menangani urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)
		Perangkat Daerah yang menangani urusan Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
		Perangkat Daerah yang menangani urusan Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
		Kecamatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

No	Program Prioritas Walikota	Perangkat Daerah	Program Prioritas Daerah
12	Memfasilitasi Pengelolaan sampah dan limbah	Perangkat Daerah yang menangani urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
		Perangkat Daerah yang menangani urusan Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Persampahan
13	Peningkatan pengelolaan Sumber Daya Air yang berketahanan iklim dan ekologi	Perangkat Daerah yang menangani urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air 2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
14	Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat tentang potensi bahaya gempa bumi, dan cuaca ekstrem maupun bahaya lainnya dengan mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural	Perangkat Daerah yang menangani urusan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penanggulangan Bencana
15	Pengembangan karier ASN berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward dan punishment	Perangkat Daerah yang menangani urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Kepegawaian Daerah
16	Mengembangkan pelayanan berbasis Teknologi Informasi yang terintegrasi melalui Blitar <i>Smart Services</i>	Perangkat Daerah yang menangani urusan Komunikasi, Informatika dan Statistik	1. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kab/Kota 2. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
		Perangkat Daerah yang menangani urusan Perpustakaan dan Kearsipan	Program Pembinaan Perpustakaan Program Pengelolaan Arsip
		Perangkat Daerah yang menangani urusan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

No	Program Prioritas Walikota	Perangkat Daerah	Program Prioritas Daerah
		Bagian yang menangani urusan Organisasi pada Sekretariat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Perangkat Daerah yang menangani urusan Penanaman Modal	Program Pelayanan Penanaman Modal
17	Optimalisasi program RT KEREN menjadi KARYA MAS (Kelurahan Berdaya Menuju Kota Masa Depan) dengan meningkatkan kemanfaatan bagi warga masyarakat	Bagian yang menangani urusan Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kecamatan	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
18	Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan	Perangkat Daerah yang menangani urusan Pendidikan	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
19	Menyediakan fasilitas belajar mengajar berbasis IT (Digitalisasi Pendidikan)	Perangkat Daerah yang menangani urusan Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan (SD, SMP)
		Perangkat Daerah yang menangani urusan Komunikasi, Informatika dan Statistik	Program pengelolaan aplikasi dan informatika
20	Mengembangkan budaya akademik di Kota Blitar melibatkan perguruan tinggi	Perangkat Daerah yang menangani urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Riset dan Inovasi Daerah
21	Peningkatan pelayanan sarana transportasi bagi peserta didik	Perangkat Daerah yang menangani urusan Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
22	Menumbuhkembangkan kreativitas kebudayaan berupa pembinaan, bantuan peralatan, optimalisasi pusat kesenian, dan penyelenggaraan event-event seni budaya	Perangkat Daerah yang menangani urusan Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan (PAUD, SD, SMP)
		Perangkat Daerah yang menangani urusan Kebudayaan dan Pariwisata	Program Pengembangan Kebudayaan
23	Pembekalan pendidikan pra-nikah dan parenting bagi ibu dalam pola asuh anak	Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) 2. Program Pemenuhan Hak Anak

No	Program Prioritas Walikota	Perangkat Daerah	Program Prioritas Daerah
		Perangkat Daerah yang menangani urusan Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
24	Pendampingan dan perlindungan bagi pekerja wanita	Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1. Program Pemenuhan Hak Anak 2. Program Perlindungan Perempuan
		Perangkat Daerah yang menangani Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja	Program Hubungan Industrial
25	Menjalin kerjasama perdagangan antar pemerintah daerah	Bagian yang menangani urusan Pemerintahan pada Sekretariat Daerah	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Bagian Pemerintahan)
		Perangkat Daerah yang menangani urusan Perindustrian dan Perdagangan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
26	Membuka akses & koneksi antar wilayah dengan cara: membenahi jalur transportasi (Pintu Gerbang Tol Menghadap ke Kota)	Perangkat Daerah yang menangani Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Penyelenggaraan Jalan
27	Membangun Pasar Agro, Pasar Induk, dan Pergudangan sebagai pusat perdagangan pasar grosir dan Revitalisasi Pasar	Bagian yang menangani urusan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah	Program Perekonomian dan Pembangunan (Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat)
		Perangkat Daerah yang menangani Perindustrian dan Perdagangan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
28	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menghasilkan produk unggulan daerah melalui penerapan teknologi dan kemitraan usaha	Perangkat Daerah yang menangani urusan UMKM	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
29	Membangun pasar ekonomi kreatif dengan memberi ruang kreasi kepada milenial dan perempuan dalam bidang	Perangkat Daerah yang menangani urusan Kebudayaan dan Pariwisata	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

No	Program Prioritas Walikota	Perangkat Daerah	Program Prioritas Daerah
	IT, kuliner, kriya, fashion, dan potensi lainnya		
30	Memfasilitasi promosi dan pemasaran produk unggulan Kota Blitar ke dalam dan luar negeri	Perangkat Daerah yang menangani urusan Penanaman Modal	Program Promosi Penanaman Modal
		Perangkat Daerah yang menangani, UMKM	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
		Perangkat Daerah yang menangani urusan Perdagangan Kota Blitar	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
31	Membentuk BUMD baru guna menangani kegiatan bidang usaha baru dalam satu wadah multiusaha	Bagian yang menangani urusan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah	Program Perekonomian dan Pembangunan (Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat)
		Perangkat Daerah yang menangani urusan Keuangan	Penyertaan Modal
		Bagian yang menangani urusan Hukum pada Sekretariat Daerah	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
32	Makam Bung Karno sebagai Destinasi Wisata Utama Kota Blitar berskala internasional	Perangkat Daerah yang menangani urusan Kebudayaan dan Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
33	Menjalin hubungan kemitraan dengan negara dan kota di luar negeri yang memiliki hubungan kesejarahan dengan Bung Karno	Bagian yang menangani urusan kerjasama pada Sekretariat Daerah	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
34	Penguatan peran kampung wisata dan membangun objek wisata baru	Perangkat Daerah yang menangani urusan Kebudayaan dan Pariwisata	Program Pemasaran Pariwisata
		Perangkat Daerah yang menangani urusan Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
		Kecamatan	1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

No	Program Prioritas Walikota	Perangkat Daerah	Program Prioritas Daerah
35	Memfasilitasi dan pendampingan pertanian model Urban Farming dan Pola Tanam Organik	Perangkat Daerah yang menangani urusan Ketahanan Pangan dan Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penyuluhan Pertanian 2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 3. Program Pengolahan Dan Pemasaran Perikanan 4. Program Pengawasan Keamanan Pangan 5. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat 6. Program Penanganan Kerawanan Pangan 7. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 8. Program Perizinan Usaha Pertanian 9. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
36	Bantuan peralatan dan fasilitas pendukung di bidang pertanian	Perangkat Daerah yang menangani urusan Ketahanan Pangan dan Pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
37	Pengelolaan tata niaga produk pertanian dan UMKM melalui BUMD	Bagian yang menangani urusan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah	Program Perekonomian dan Pembangunan (Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat)
		Perangkat Daerah yang menangani urusan Ketahanan Pangan dan Pertanian	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
38	Membuka Industri Baru dan memberikan kemudahan serta kenyamanan bagi investor untuk berinvestasi dan membuka pabrik (berproduksi) sehingga menyerap tenaga kerja	Perangkat Daerah yang menangani urusan Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 2. Program Pelayanan Penanaman Modal 3. Program Pengendalian Penanaman Modal
		Perangkat Daerah yang menangani urusan Lingkungan hidup	Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
		Perangkat Daerah yang menangani urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pemyelenggaraan Penataan Ruang
		Perangkat Daerah yang menangani urusan Perindustrian dan Perdagangan	Program Pengendalian Izin Usaha Industri

No	Program Prioritas Walikota	Perangkat Daerah	Program Prioritas Daerah
39	Membangun kerja sama dengan pelaku usaha untuk memprioritaskan tenaga kerja warga kota Blitar	Perangkat Daerah yang menangani urusan Tenaga Kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja
		Bagian yang menangani urusan Pemerintahan pada Sekretariat Daerah	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Bagian Pemerintahan)
40	Normalisasi Drainase Perkotaan, Normalisasi Sungai untuk peningkatan fungsi irigasi dan Sanitasi Perkotaan	Perangkat Daerah yang menangani urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air 2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
		Kecamatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
		Perangkat Daerah yang menangani urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum
41	Pembangunan Sekolah dan Revitalisasi Sekolah	Perangkat Daerah yang menangani urusan Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan
42	Pembangunan Rusunawa dan Rumah Layak Huni Perkotaan	Perangkat Daerah yang menangani urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1. Program Pengembangan Perumahan 2. Program Kawasan Permukiman 3. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
43	Pembangunan Hunian Perumahan PNS, Karyawan BUMN/BUMD dan Karyawan swasta.	Perangkat Daerah yang menangani urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Pengembangan Perumahan
44	Pembangunan Pusat Ekonomi Perdagangan (Blitar Trade Center)	Perangkat Daerah yang menangani Perindustrian dan Perdagangan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
45	Pembangunan Fasilitas Olahraga (Sirkuit Sentul)	Perangkat Daerah yang menangani urusan Kepemudaan dan Olahraga	Program Peningkatan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
46	Pembangunan dan peningkatan infrastruktur obyek Wisata Perkotaan	Perangkat Daerah yang menangani urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program penyelenggaraan jalan
47	Pembangunan dan Peningkatan Fasilitas Umum	Perangkat Daerah yang menangani urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Program Penataan Bangunan Gedung 2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

No	Program Prioritas Walikota	Perangkat Daerah	Program Prioritas Daerah
			3. Program Pengelolaan Sumber Daya Air 4. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
		Kecamatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
48	Mall UMKM	Perangkat Daerah yang menangani urusan UMKM	Program Pengembangan UMKM
49	Pemberian beasiswa untuk sekolah menengah dan perguruan tinggi berbasis keluarga miskin	Perangkat Daerah yang menangani urusan Kepemudaan	Program Peningkatan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
		Perangkat Daerah yang menangani urusan Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan
50	Pilkada 2029	Perangkat Daerah yang menangani urusan Kesatuan Bangsa dan Politik	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan pengembangan Etika serta Budaya Politik

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar 2025, data diolah

Tabel 3.12
Program Prioritas Pembangunan Daerah Kota Blitar Tahun 2025 – 2029

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
<p>Visi : KOTA BLITAR YANG MAJU, SEHAT DAN SEJAHTERA MENUJU KOTA MASA DEPAN</p> <p>Misi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mewujudkan Blitar Kota Pancasila yang Aman, Religius dan Nasionalis - Mewujudkan Kota Blitar Sehat dan Sejahtera - Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar yang Berkelanjutan dan Tata Kelola Pemerintahan yang berbasis <i>Smart Governance</i> - Mengembangkan Potensi Pendidikan, Pemuda dan Perempuan sebagai Generasi Emas yang Cerdas dan Berkarakter - Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar sebagai Kota Perdagangan, 	<p>Terwujudnya kehidupan yang harmonis melalui penguatan nilai - nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat</p>	<p>Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam politik dan pembangunan daerah</p>		Indeks Harmoni Indonesia (Indeks)		
				Indeks Demokrasi Indonesia (indeks)		
			Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (%)	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	
			Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (%)	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	
			Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (%)	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	
Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (%)	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
Jasa, Pariwisata dan Industri	Terwujudnya jaminan rasa aman pada masyarakat	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (%)	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	
				Indeks Rasa Aman(Angka)		
				Indeks Ketenteraman dan Ketertiban (Angka)		
			Meningkatnya penyelesaian gangguan trantibum dan pelanggaran Perda	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (%)	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (%)	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya kualitas pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (%)	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	
				Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran (%)	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
		Terwujudnya Kota yang Berketahanan Bencana		Indeks Risiko Bencana (IRB) (Angka)		
			Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (%)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
			Meningkatnya penanganan bencana pada saat pascabencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana (%)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
			Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase penanganan tanggap darurat bencana (%)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
	Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat yang sehat	Terwujudnya Kesehatan yang Merata		Usia Harapan Hidup (UHH)((tahun))		
				Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (Indeks)		
			Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita ((%))			
		Meningkatnya kinerja BLUD UPT Puskesmas		Skor penilaian kinerja BLUD UPT Puskesmas Sananwetan (Nilai)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Skor penilaian kinerja BLUD UPT Puskesmas Kepanjenkidul (Nilai)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Skor penilaian kinerja BLUD UPT Puskesmas Sukorejo (Nilai)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya mutu layanan Rumah Sakit	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit (%)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Akreditasi RSUD (Nilai Akreditasi)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku (%)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup. (Orang)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase pemenuhan syarat kualitas kesehatan lingkungan (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Insiden Stunting Balita (kasus baru) (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik yang cukup (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Angka Populasi Bebas Penyakit Menular (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase kelurahan yang mencapai target kekebalan kelompok (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi paripurna (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Jumlah Kematian Ibu AMPSR (Orang)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Angka Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Presentase lanjut usia yang mandiri (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat melalui pelayanan kesehatan rujukan	Persentase layanan rumah sakit dengan kompetensi minimal dasar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Rasio Nakes dan Named terhadap populasi (Indeks (Skala 0-100))	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
			Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
				Persentase fasilitas layanan kefarmasian dan alat kesehatan dan yang memenuhi evaluasi mutu (%)	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase UKBM sesuai standar (%)	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat			Tingkat Kemiskinan(%)		
		Meningkatnya Kualitas Hidup dan Ketangguhan Sosial Masyarakat			Indeks Kesejahteraan Sosial (Indeks)	
					Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (Indeks)	
			Meningkatnya daya dukung potensi dan sumber kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase Pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar panti sesuai standar (%)	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
			Meningkatnya cakupan rehabilitasi sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti (%)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti (%)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
				Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (%)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
				Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti (%)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
				Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti (%)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
			Meningkatnya kecukupan perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (%)	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
				Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergradiasi dari kemiskinan (%)	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
				Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi (%)	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya cakupan perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Kabupaten/Kota (%)	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
			Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	
			Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (%)	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	
			Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Persentase Izin Usaha budidaya perikanan yang Diterbitkan (%)	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	
				Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	
			Meningkatnya kualitas produk hasil perikanan	Persentase Izin Usaha pengolahan hasil perikanan yang Diterbitkan (%)	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	
				Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Persentase Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (%)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
				Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (%)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
				Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura (%)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
			Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Persentase produk RPH yang dijamin ASUH (Aman, Sehat, Utuh, Halal) (%)	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
				Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha)	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
			Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Dokumen)	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	
				Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) (%)	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	
			Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian (%)	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	
				Persentase Penanganan Bencana Pertanian (%)	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	
			Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan (%)	3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	
				Persentase Izin Usaha Peternakan yang Diterbitkan (%)	3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian dan pembinaan kelembagaan usaha tani	Persentase Kelembagaan yang Dibentuk dan Beroperasi Koperasi Tani (%)	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
				Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (%)	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
			Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan	Persentase TMP Nasional yang terkelola dengan baik (%)	1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	
	Terwujudnya pembangunan kota nyaman dan layak huni			Indeks Kota Layak Huni (Indeks)		
				Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) Kumulatif (TON CO2 EQ)		
		Terwujudnya fasilitas perkotaan yang berkelanjutan		Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) (Indeks)		
			Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas (%)	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir (%)	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum aman (%)	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi aman (%)	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	
			Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (%)	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	
			Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (%)	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	
				Persentase bangunan gedung berizin (%)	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	
			Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang aman dan nyaman	Tingkat Kemantapan Jalan (%)	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	
			Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli (%)	1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase kesesuaian perwujudan rencana pola ruang (%)	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertipikat yang Dilakukan melalui Mediasi (%)	2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	
			Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan (%)	2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	
			Meningkatnya pengelolaan tanah kosong	Persentase Tanah Kosong yang Dikelola (%)	2.10.08 PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	
			Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah	Persentase tanah aset yang bersertifikat (%)	2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	
			Meningkatnya kualitas sarpras perhubungan	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (%)	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
			Meningkatnya layanan angkutan jalan berkeselamatan	IKM Layanan Angkutan Jalan Berkeselamatan (Indeks)	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
			Meningkatnya ketertiban jalan	Persentase Ruas Jalan yang Menerapkan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas (%)	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya pengelolaan perlintasan kereta api	Cakupan Perlintasan Kereta Api yang Ditangani (%)	2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	
		Meningkatnya kualitas permukiman		Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)		
			Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	
				Persentase Warga Negara Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni (%)	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	
			Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani (%)	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	
				Persentase Rumah Layak Huni di kawasan kumuh (%)	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	
			Meningkatnya Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani di luar kawasan kumuh	Persentase Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Kumuh yang Tertangani (%)	1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya penyediaan PSU perumahan dan permukiman	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) dalam Kondisi baik (%)	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	
				Persentase Tempat Pemakaman Umum yang dilengkapi PSU dalam kondisi baik (%)	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	
		Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (Indeks)		
			Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (%)	2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	
			Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase badan air yang memenuhi baku mutu (%)	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
				Persentase kawasan yang memenuhi baku mutu udara (%)	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
			Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH (%)	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	
			Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (%)	2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)		BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	
			Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH, dan PUU LH yang diterbitkan (Usaha/Kegiatan)	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	
			Meningkatnya kapasitas dan partisipasi SDM bidang lingkungan hidup	Persentase kelompok masyarakat peduli lingkungan yang aktif (%)	2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
				Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (%)	2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
			Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (%)	2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
			Meningkatnya penyelesaian sengketa /kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (%)	2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	
			Meningkatnya tata kelola persampahan	Persentase cakupan layanan persampahan (%)	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	
	Meningkatnya Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Terwujudnya pelayanan pemerintahan yang berkualitas dan terintegrasi		Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)			
				Opini BPK Atas Laporan Keuangan (Nilai)			
				Indeks Pelayanan Publik (Indeks)			
				Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Level)			
				Indeks Pemerintahan Digital Indonesia (Indeks)			
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)				
			Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk		Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
					Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (%)	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
			Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil		Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan (%)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
					Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (%)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
					Persentase kepemilikan dokumen akte kelahiran seluruh penduduk (%)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
					Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (%)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Persentase kepemilikan dokumen perceraian (%)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
				Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (%)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
				Persentase kepemilikan dokumen perkawinan (%)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
			Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan (%)	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	
			Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (%)	2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan tata kelola kelurahan	Persentase fasilitasi tata kelola kelurahan (%)	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	
			Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Persentase fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan kelurahan (LKK) (%)	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	
			Meningkatnya Jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%)	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
			Meningkatnya Kualitas Penerapan Digitalisasi Pemerintahan	Persentase pemenuhan layanan publik dan administrasi pemerintahan berbasis digital (%)	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Persentase OPD yang menggunakan data statistik sektoral dalam menyusun perencanaan pembangunan dan evaluasi pembangunan (%)	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	
			Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang hasil penilaiain implementasi persandian untuk pengaman informasi masuk kategori baik (%)	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	
			Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Tingkat Ketersediaan Arsip (%)	2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	
				Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa bernegara kepentingan pemerintahan, untuk negara, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (%)	2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase perangkat daerah yang memiliki IKM dengan kategori minimal Baik (%)	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Persentase unit pelayanan publik dengan kategori pelayanan Baik (%)	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (%)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan (%)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (%)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
			Meningkatnya kualitas kerja sama daerah	Efektivitas Kerja Sama Daerah (%)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
			Meningkatnya kualitas produk hukum yang dihasilkan	Persentase produk hukum yang ditindaklanjuti (%)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
			Meningkatnya penyelesaian perkara hukum	Persentase masalah hukum yang terselesaikan (%)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
			Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa	Tingkat Kematangan UKPBJ (Level)	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
			Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	Persentase penyampaian rekomendasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan (%)	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	
				Persentase penyampaian rekomendasi penganggaran (%)	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	
			Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (%)	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			peraturan perundang-undangan	Persentase Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (%)	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	
			Meningkatnya Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan	Persentase laporan keuangan tepat waktu (%)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
			Meningkatnya tata kelola anggaran	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (%)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
				Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (%)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
			Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	Persentase Penurunan SILPA (%)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
				Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (%)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
			Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (%)	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	
			Meningkatnya Tata Kelola Pendapatan Daerah	Persentase Target Pajak Daerah terhadap PAD (%)	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
				Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap PAD (%)	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
				Persentase Realisasi Retribusi Daerah terhadap Target Retribusi Daerah (%)	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Menurunnya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (%)	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
			Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Level)	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
				Indeks Manajemen Risiko (IMR) (Indeks)	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
			Meningkatnya kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan	Persentase pelayanan dan pengaduan yang diselesaikan sesuai standar pelayanan (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Persentase masyarakat yang tertib dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan umum (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Persentase kelurahan yang masyarakatnya aktif menjaga trantibum secara swadaya (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Meningkatnya keberdayaan dan	Jumlah kelompok masyarakat yang aktif dalam kegiatan ekonomi produktif (Kelompok)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Persentase pemenuhan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan sarana prasarana kelurahan yang mendukung pencapaian SPM (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
		Terwujudnya manajemen pemerintahan yang profesional		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (Angka)		
				Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (Indeks)		
			Meningkatnya tata kelola organisasi pemerintah daerah	Indeks Kematangan Organisasi (Indeks)	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Persentase perangkat daerah dengan nilai SAKIP minimal A (%)	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase capaian kinerja program daerah (%)	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
				Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (%)	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
				Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (%)	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
				Persentase program prioritas nasional yang didukung program daerah (%)	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang infrastruktur dan kewilayahan, serta bidang perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (%)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
				Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (%)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
				Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (%)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi (%)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
				Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya (%)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
				Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (%)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)		
			Meningkatnya kualitas analisis kebutuhan, pengembangan dan evaluasi serta layanan pengembangan kompetensi	Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan (%)	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
				Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi (%)	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
				Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis (%)	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
				Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional (%)	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
			Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Rasio Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah (Rasio)	5.05.03 PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH			
				Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (%)	5.05.03 PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH			
			Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kualitas pendidikan		Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)		
						Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)		
						Harapan Lama Sekolah (Tahun)		
					Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Persentase warga negara usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				dalam pendidikan dasar (APS) (%)		
				Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS) (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Persentase warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (APS) (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
			Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (%)	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	
			Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Indeks Pemerataan Guru (Rasio)	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
				Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (%)	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
			Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui (%)	1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	
			Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Persentase ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat (%)	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	
		Meningkatnya kualitas generasi muda		Indeks Pembangunan Pemuda (Nilai)		
				Meningkatnya daya saing kepemudaan	Tingkat Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan organisasional kemasyarakatan (%)	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Rasio Wirausaha Pemuda (%)	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	
			Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga	Persentase atlet yang masuk Pelatda Provinsi (%)	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	
			Meningkatnya kualitas kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (%)	2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	
		Meningkatnya kesetaraan gender		Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Indeks)		
			Meningkatnya kualitas dan efektifitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
				Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (%)	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
				Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan (%)	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
			Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan per 100.000 perempuan (Rasio)	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	
			Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan	Jumlah Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Gender dan Hak sesuai Standar (Unit)		
			Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	
			Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	
				Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak (Rasio)	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	
			Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
				Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) (%)	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga yang aktif Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (%)	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	
		Terwujudnya kota yang berkebudayaan maju		Indeks Pelestarian Budaya (Indeks)			
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (%)	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		
			Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (%)	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		
	Terwujudnya Ekonomi Daerah yang Inklusif		Meningkatnya kontribusi sektor unggulan terhadap pertumbuhan ekonomi		Laju Pertumbuhan Ekonomi(%)		
					Rasio Gini(Indeks)		
					Tingkat Inflasi((%)		
					PDRB Per Kapita(Juta Rupiah)		
					Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)		
					Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)		
					Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)		
		Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam	Persentase Koperasi yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam (%)	2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM			
		Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (%)	2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			
		Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase Koperasi Aktif (%)	2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI			

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan (%)	2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	
			Meningkatnya produktivitas koperasi	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (%)	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (%)	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
				Pertumbuhan Wirausaha (%)	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
			Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor (%)	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	
			Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (%)	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	
			Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (%)	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	
			Meningkatnya kualitas ekosistem ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (%)	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi yang Dibentuk dan Beroperasi (%)	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	
			Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	persentase usaha perdagangan yg berizin (%)	3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	
			Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (%)	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	
			Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (%)	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	
			Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai Ekspor Barang (Nilai)	3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	
			Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Indeks kepuasan konsumen terhadap layanan perlindungan konsumen (Indeks (Skala 0-100))	3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	
				Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (%)	3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	

2

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Jumlah kerjasama penggunaan produk lokal daerah (Kerja Sama)	3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	
			Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (%)	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	
			Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (%)	3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	
			Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Persentase industri yg terdaftar di SliNAS (%)	3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	
		Terwujudnya kemudahan berusaha yang mendorong realisasi investasi daerah		Persentase peningkatan investasi		
			Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi (%)	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	
			Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (%)	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	
			Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (%)	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	
			Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (%)	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	
			Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (%)	2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		
			Meningkatnya kualitas kebijakan administrasi pembangunan	Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan (%)	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		
			Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian (%)	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		
		Menurunnya pengangguran		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)			
			Terpenuhinya tenaga kerja sesuai standar kompetensi perusahaan	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi (%)	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		
			Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (%)	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		
			Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial (Orang)	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar 2025, data diolah

BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini menjelaskan mengenai indikasi keseluruhan program Pemerintah Kota Blitar yang mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah dan yang memenuhi layanan Perangkat Daerah (PD) dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah. Selain itu, bab ini juga memuat target program dan pagu indikatif. Pagu indikatif merupakan proyeksi kebutuhan pendanaan dalam bentuk jumlah dana yang tersedia untuk menyusun program tahunan. Jumlah dana yang tersedia mengacu pada Bab II RPJMD terutama berkaitan dengan kerangka pendanaan yang terdiri dari kapasitas riil keuangan dan belanja daerah.

4.1. Program Perangkat Daerah

Ketercapaian target kinerja program tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kota Blitar, Melainkan juga dari APBN, dari APBD Provinsi, maupun sumber pendanaan lainnya. Namun demikian, kerangka pendanaan pembangunan daerah pada bagian ini hanya mencantumkan sumber pendanaan dari APBD Kota Blitar. Kerangka pendanaan menjadi acuan dalam menyusun kebutuhan pendanaan masing-masing program atau pagu indikatifnya. Program-program yang telah disusun pagu indikatifnya menjadi acuan bagi PD dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) PD. Target dan rencana dalam Tabel 4.1 dapat dipergunakan sebagai dasar penyusunan RKPD Kota Blitar Tahun 2030.

Tabel 4.1
Program Perangkat Daerah
Pemerintah Kota Blitar

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					201.841.996.454,0 0		205.605.433.086,0 0		208.841.448.722,0 0		205.954.446.615,0 0		211.994.061.284,0 0	
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					139.945.193.576,0 0		143.099.774.297,0 0		143.450.243.326,0 0		143.099.774.297,0 0		145.871.683.625,0 0	
Meningkatnya fasilitas layanan kedinasan Perangkat Daerah	Persentase fasilitas layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku (%)	83,75	100	100	139.945.193.576,0 0	87,8	143.099.774.297,0 0	87,9	143.450.243.326,0 0	88	143.099.774.297,0 0	88,10	145.871.683.625,0 0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					54.489.794.578,00		54.728.300.074,00		57.224.978.745,00		55.077.313.603,00		57.956.151.008,00	
Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Persentase warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (APS) (%)	83,75	86,54	89,33	54.489.794.578,00	92,13	54.728.300.074,00	94,67	57.224.978.745,00	97,22	55.077.313.603,00	99,77	57.956.151.008,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Persentase warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) (%)	99,96	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS) (%)	41,06	43,87	46,67		49,48		52,29		55,09		57,9		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					832.919.500,00		927.065.475,00		973.418.749,00		927.065.475,00		973.418.749,00	
Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (%)	100	100	100	832.919.500,00	100	927.065.475,00	100	973.418.749,00	100	927.065.475,00	100	973.418.749,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					6.557.624.300,00		6.833.005.515,00		7.174.655.791,00		6.833.005.515,00		7.174.655.791,00	
Meningkatnya mutu dan distribusi	Indeks Pemerataan Guru (Rasio)	18,29	18,29	18,3	6.557.624.300,00	18,32	6.833.005.515,00	18,34	7.174.655.791,00	18,36	6.833.005.515,00	18,38	7.174.655.791,00	Dinas/Badan yang menangani

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
pendidik dan tenaga pendidikan															Bidang Pendidikan
	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (%)	51,00	53,00	54,00		55,00		56,00		57,00		57,09			Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERKIZINAN PENDIDIKAN					16.464.500,00		17.287.725,00		18.152.111,00		17.287.725,00		18.152.111,00		
Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui (%)	100	100	100	16.464.500,00	100	17.287.725,00	100	18.152.111,00	100	17.287.725,00	100	18.152.111,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					243.076.316.242,00		230.277.325.341,00		239.019.970.702,00		280.680.980.333,00		289.666.155.426,00		
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					180.613.549.802,00		172.283.974.736,00		175.255.779.511,00		172.988.132.955,00		177.896.946.522,00		
Meningkatnya kinerja BLUD UPT Puskesmas					9.300.000.000,00		9.534.060.000,00		9.772.411.000,00		10.016.721.000,00		10.267.139.000,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Skor penilaian kinerja BLUD UPT Puskesmas Kepanjenkidul (Nilai)	-	-	70,00		72,00		74,00		76,00		78,00			Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Skor penilaian kinerja BLUD UPT Puskesmas Sukorejo (Nilai)	-	-	70,00		72,00		74,00		76,00		78,00			Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Skor penilaian kinerja BLUD UPT Puskesmas Sananwetan (Nilai)	-	-	70,00		72,00		74,00		76,00		78,00			Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya mutu layanan Rumah Sakit	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit (%)	87,00	88,00	89,00	95.000.000.000,00	90,00	86.294.454.509,00	91,00	87.696.978.788,00	92,00	86.445.720.758,00	93,00	89.063.355.271,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Akreditasi RSUD (Nilai Akreditasi)	Paripurna	Paripurna	Paripurna		Paripurna		Paripurna		Paripurna		Paripurna			Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku (%)	100	100	100		100		100		100		100			Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya fasilitas layanan kekinisan Daerah Perangkat Daerah	Persentase fasilitas layanan kekinisan sesuai standar / ketentuan yang berlaku (%)	100	100	100	76.313.549.802,00	100	76.455.460.227,00	100	77.786.389.723,00	100	76.525.691.197,00	100	78.566.452.251,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					58.346.902.940,00		53.997.487.105,00		59.655.158.191,00		103.966.359.378,00		108.263.303.904,00	
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat melalui pelayanan kesehatan rujukan	Persentase layanan rumah sakit dengan kompetensi minimal dasar (%)	66,67	66,67	70,83	10.000.000.000,00	75,00	952.529.517,00	79,17	5.968.010.764,00	83,33	50.954.199.213,00	87,50	52.983.093.007,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase lanjut usia yang mandiri (%)	-	-	93,82	48.346.902.940,00	93,84	53.044.957.588,00	93,86	53.687.147.427,00	93,88	53.012.160.165,00	94	55.280.210.897,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka Populasi Bebas Penyakit Menular (%)	-	-	71,90		72,40		72,90		73,40		73,90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase kelurahan yang mencapai target kekebalan kelompok (%)	-	-	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)	-	-	0,70		0,68		0,66		0,64		0,62		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular (%)	-	-	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pemenuhan syarat kualitas kesehatan lingkungan (%)	-	-	70,00		75,00		80,00		85,00		90,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik yang cukup (%)	-	-	30,00		40,00		50,00		60,00		65,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi paripurna (%)	69,23	70,00	78,57		90,50		97,60		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup. (Orang)	-	-	4,35		4,35		4,35		3,91		3,91		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Kematian Ibu AMPSR (Orang)	-	-	3,00		3,00		3,00		2,00		2,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Insiden Stunting Balita (kasus baru) (%)	-	-	2,30		1,70		1,30		1,00		1,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					806.927.700,00		686.927.700,00		689.596.000,00		654.288.000,00		633.929.000,00	
Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Rasio Nakes dan Named terhadap populasi (Indeks [Skala 0-100])	-	8,21	8,21	806.927.700,00	8,22	686.927.700,00	8,22	689.596.000,00	8,22	654.288.000,00	8,22	633.929.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					432.611.000,00		432.611.000,00		437.271.000,00		410.997.000,00		395.846.000,00	
Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase fasilitas layanan kefarmasian dan alat kesehatan yang memenuhi evaluasi mutu (%)	50,00	-	52,00	432.611.000,00	55,00	432.611.000,00	58,00	437.271.000,00	60,00	410.997.000,00	65,00	395.846.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	85,97	-	86,30		86,70		87,00		87,30		87,70		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					2.876.324.800,00		2.876.324.800,00		2.982.166.000,00		2.661.203.000,00		2.476.130.000,00	
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase UKBM sesuai standar (%)	100	100	100	2.876.324.800,00	100	2.876.324.800,00	100	2.982.166.000,00	100	2.661.203.000,00	96,00	2.476.130.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					61.898.502.470,00		33.660.733.065,00		48.602.208.327,00		37.999.148.110,00		39.442.160.437,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.821.602.529,00		8.750.004.755,00		8.932.670.755,00		9.046.272.195,00		9.167.022.337,00	
Meningkatnya fasilitas layanan kedinasan Perangkat Daerah	Persentase fasilitas layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku (%)	100	100	100	8.821.602.529,00	100	8.750.004.755,00	100	8.932.670.755,00	100	9.046.272.195,00	100	9.167.022.337,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					6.744.151.200,00		8.103.219.814,00		10.372.223.555,00		11.600.000.000,00		8.972.534.725,00	
Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas (%)	63,56	63,56	64,00	6.744.151.200,00	64,50	8.103.219.814,00	65,00	10.372.223.555,00	65,50	11.600.000.000,00	66,00	8.972.534.725,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir (%)	97,84	97,84	98,03		98,23		98,43		98,62		98,82	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					1.845.400.700,00		2.171.068.271,00		2.035.000.000,00		2.478.016.350,00		2.713.078.147,00	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum aman (%)	14,10	14,20	14,30	1.845.400.700,00	14,50	2.171.068.271,00	14,70	2.035.000.000,00	15,00	2.478.016.350,00	15,30	2.713.078.147,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					2.756.690.598,00		2.189.879.954,00		2.467.528.729,00		1.662.425.028,00		1.798.977.530,00	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi aman (%)	8,45	18,66	23,51	2.756.690.598,00	28,35	2.189.879.954,00	33,20	2.467.528.729,00	38,04	1.662.425.028,00	42,89	1.798.977.530,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					6.187.928.820,00		2.618.300.181,00		5.680.000.000,00		3.148.505.209,00		2.307.733.269,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (%)	88,08	88,08	89,00	6.187.928.820,00	90,08	2.618.300.181,00	91,00	5.680.000.000,00	92,00	3.148.505.209,00	92,08	2.307.733.269,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					23.482.832.316,00		1.190.795.909,00		10.960.000.000,00		1.062.979.717,00		1.117.357.446,00	
Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (%)	78,19	78,19	81,91	23.482.832.316,00	83,77	1.190.795.909,00	85,63	10.960.000.000,00	87,49	1.062.979.717,00	89,35	1.117.357.446,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Persentase bangunan gedung berizin (%)		15,74	15,93		16,14		16,37		16,63		16,91		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					9.410.064.515,00		5.744.204.090,00		5.850.000.000,00		6.867.220.785,00		10.665.000.000,00	
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang aman dan nyaman	Tingkat Kemantapan Jalan (%)	92,35	92,35	93,35	9.410.064.515,00	94,35	5.744.204.090,00	95,35	5.850.000.000,00	96,35	6.867.220.785,00	97,35	10.665.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					1.592.456.392,00		1.768.000.000,00		1.165.000.000,00		1.117.411.639,00		1.603.140.395,00	
Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli (%)	100	100	100	1.592.456.392,00	100	1.768.000.000,00	100	1.165.000.000,00	100	1.117.411.639,00	100	1.603.140.395,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					1.057.375.400,00		1.125.260.091,00		1.139.785.288,00		1.016.317.187,00		1.097.316.588,00	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase kesesuaian perwujudan rencana pola ruang (%)	94,69	94,80	94,90	1.057.375.400,00	95,00	1.125.260.091,00	95,10	1.139.785.288,00	95,20	1.016.317.187,00	95,30	1.097.316.588,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					15.072.743.794,00		43.412.324.415,00		39.187.822.440,00		30.399.333.309,00		18.597.228.420,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.277.413.402,00		5.926.643.510,00		5.821.595.030,00		5.991.634.508,00		6.366.070.040,00	
Meningkatnya fasilitas layanan kedinasan Perangkat Daerah	Persentase fasilitas layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku (%)	100	100	100	5.277.413.402,00	100	5.926.643.510,00	100	5.821.595.030,00	100	5.991.634.508,00	100	6.366.070.040,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					1.101.569.500,00		2.618.001.862,00		23.890.394.786,00		2.947.703.009,00		1.512.197.017,00	
Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase Warga Negara Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni (%)	100	100	100	1.101.569.500,00	100	2.618.001.862,00	100	23.890.394.786,00	100	2.947.703.009,00	100	1.512.197.017,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					1.281.200.000,00		1.506.824.000,00		1.336.960.480,00		1.363.699.690,00		1.590.973.683,00	
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani (%)	33,52	37,07	40,63	1.281.200.000,00	43,48	1.506.824.000,00	47,03	1.336.960.480,00	50,59	1.363.699.690,00	54,15	1.590.973.683,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Persentase Rumah Layak Huni di kawasan kumuh (%)	97,73	97,77	98,37		98,58		98,83		99,12		99,43		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					6.343.310.850,00		31.680.400.000,00		6.594.008.000,00		18.520.534.676,00		7.520.711.025,00	
Meningkatnya Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani di luar kawasan kumuh	Persentase Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Kumuh yang Tertangani (%)	-	4,22	8,52	6.343.310.850,00	9,64	31.680.400.000,00	11,49	6.594.008.000,00	11,78	18.520.534.676,00	16,24	7.520.711.025,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					1.069.250.042,00		1.680.455.043,00		1.544.864.144,00		1.575.761.426,00		1.607.276.655,00	
Meningkatnya penyediaan PSU perumahan dan permukiman	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) dalam Kondisi baik (%)	73,68	76,32	76,92	1.069.250.042,00	80,48	1.680.455.043,00	83,33	1.544.864.144,00	86,05	1.575.761.426,00	88,37	1.607.276.655,00	Dinas/ Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Persentase Tempat Pemakaman Umum yang dilengkapi PSU dalam kondisi baik (%)	-	16,67	8,33		8,33		8,33		8,33		8,33		Dinas/ Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					17.026.897.440,00		17.462.238.795,00		17.503.920.611,00		17.254.175.163,00		18.022.543.702,00	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					11.436.483.453,00		12.260.784.948,00		11.689.465.835,00		11.052.069.860,00		11.444.969.540,00	
Meningkatnya fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku (%)	-	100	100	7.943.817.847,00	100	7.217.798.970,00	100	7.244.982.145,00	100	7.149.182.540,00	100	7.450.708.461,00	Dinas/ Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku (%)	100	100	100	3.492.665.606,00	100	5.042.985.978,00	100	4.444.483.690,00	100	3.902.887.320,00	100	3.994.261.079,00	Dinas/ Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					4.331.337.245,00		3.692.305.041,00		3.755.902.404,00		3.692.003.737,00		3.806.046.141,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya penyelesaian gangguan trantibum dan pelanggaran Perda	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	59,09	63,64	68,18	4.331.337.245,00	72,73	3.692.305.041,00	77,27	3.755.902.404,00	77,27	3.692.003.737,00	81,82	3.806.046.141,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (%)	79,07	80,97	82,88		86,68		90,49		94,29		98,1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Persentase Penyelenggaraan Tibumtraimas (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					933.660.000,00		1.292.619.217,00		1.866.656.872,00		2.318.206.066,00		2.544.632.521,00	
Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (%)	80,00	80,00	80,00	552.438.100,00	85,00	643.238.917,00	90,00	1.081.002.600,00	95,00	1.474.730.000,00	100	1.572.348.455,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya penanganan bencana pada saat pascabencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana (%)	-	-	100	175.874.900,00	100	297.359.612,00	100	262.879.100,00	100	355.128.100,00	100	315.347.300,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase penanganan tanggap darurat bencana (%)	-	100	100	205.347.000,00	100	352.020.688,00	100	522.775.172,00	100	488.347.966,00	100	656.936.766,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN, KEBAKARAN DAN					325.416.742,00		216.529.589,00		191.895.500,00		191.895.500,00		226.895.500,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
PENYELAMATAN NON KEBAKARAN															
Meningkatnya kualitas pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran (%)	100	100	100	325.416.742,00	100	216.529.589,00	100	191.895.500,00	100	191.895.500,00	100	226.895.500,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	
	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					21.555.215.890,00		18.206.717.730,00		21.205.903.301,00		20.903.338.068,00		18.790.910.479,00		
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.737.256.149,00		4.835.416.170,00		5.331.163.136,00		5.119.802.965,00		5.085.989.590,00		
Meningkatnya fasilitas layanan kedinasan Perangkat Daerah	Persentase fasilitas layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku (%)	100	100	100	4.737.256.149,00	100	4.835.416.170,00	100	5.331.163.136,00	100	5.119.802.965,00	100	5.085.989.590,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial	
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					666.331.589,00		628.531.589,00		646.728.024,00		645.098.555,00		648.507.407,00		
Meningkatnya daya dukung potensi dan sumber kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase Pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar panti sesuai standar (%)	100	100	100	666.331.589,00	100	628.531.589,00	100	646.728.024,00	100	645.098.555,00	100	648.507.407,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial	
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					888.070.200,00		818.897.200,00		888.071.000,00		888.071.000,00		851.897.200,00		
Meningkatnya cakupan rehabilitasi sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti (%)	100	100	100	888.070.200,00	100	818.897.200,00	100	888.071.000,00	100	888.071.000,00	100	851.897.200,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial	

!

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti (%)	-	4,88	14,63		14,63		14,63		14,63		14,63		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					15.022.942.082,00		11.665.360.501,00		14.076.428.871,00		13.986.853.278,00		11.946.004.012,00	
Meningkatnya kecukupan perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi (%)	13,25	14,50	30,00	15.022.942.082,00	32,50	11.665.360.501,00	35,00	14.076.428.871,00	37,50	13.986.853.278,00	40,00	11.946.004.012,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan (%)	0,12	0,14	0,65		1,31		1,96		2,62		3,27		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA					205.615.870,00		223.512.270,00		228.512.270,00		228.512.270,00		223.512.270,00	

2

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya cakupan perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Kabupaten/Kota (%)	100	100	100	205.615.870,00	100	223.512.270,00	100	228.512.270,00	100	228.512.270,00	100	223.512.270,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00	
Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan	Persentase TMP Nasional yang dikelola dengan baik (%)	100	100	100	35.000.000,00	100	35.000.000,00	100	35.000.000,00	100	35.000.000,00	100	35.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					2.765.372.320,00		3.094.244.592,00		2.979.567.552,00		2.858.054.275,00		3.083.980.120,00	
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					2.438.207.320,00		2.173.349.592,00		2.208.672.552,00		2.177.159.275,00		2.243.085.120,00	
Terpenuhinya tenaga kerja sesuai standar kompetensi perusahaan	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi (%)	9,85	9,90	9,95	2.438.207.320,00	10,01	2.173.349.592,00	10,05	2.208.672.552,00	10,11	2.177.159.275,00	10,15	2.243.085.120,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					211.270.000,00		675.000.000,00		595.000.000,00		495.000.000,00		575.000.000,00	
Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (%)	51,45	51,50	51,55	211.270.000,00	51,6	675.000.000,00	51,65	595.000.000,00	51,70	495.000.000,00	51,75	575.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					115.895.000,00		245.895.000,00		175.895.000,00		185.895.000,00		265.895.000,00	
Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial (Orang)	1015	1015	1028	115.895.000,00	1043	245.895.000,00	1045	175.895.000,00	1059	185.895.000,00	1069	265.895.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					5.784.131.214,00		6.312.473.048,00		7.133.386.495,00		7.031.789.843,00		6.524.906.699,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.543.701.864,00		4.958.792.498,00		5.625.657.099,00		5.545.922.523,00		5.146.764.760,00	
Meningkatnya fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku (%)	100	100	100	4.543.701.864,00	100	4.958.792.498,00	100	5.625.657.099,00	100	5.545.922.523,00	100	5.146.764.760,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					744.526.350,00		812.501.606,00		904.964.288,00		891.842.306,00		827.183.739,00	
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Tingkat Partisipasi Anggaran Kerja (TPAK) Perempuan (%)	59,23	59,72	60,21	744.526.350,00	60,69	812.501.606,00	61,18	904.964.288,00	61,67	891.842.306,00	62,16	827.183.739,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan (%)	0	19,00	21,00		24,00		27,00		31,00		35,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (%)	33,8	33,8	33,81		33,82		33,83		33,84		33,85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					125.132.500,00		136.557.097,00		152.097.295,00		149.891.884,00		139.024.723,00	
Menurunya kekerasan terhadap perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan per 100.000 perempuan (Rasio)	14,66	14,64	14,62	125.132.500,00	14,60	136.557.097,00	14,58	152.097.295,00	14,56	149.891.884,00	14,54	139.024.723,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					80.800.000,00		88.177.040,00		98.211.587,00		96.787.519,00		89.770.424,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Jumlah Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak sesuai Standar (Unit)	1	1	3	80.800.000,00	3	88.177.040,00	3	98.211.587,00	3	96.787.519,00	3	89.770.424,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					125.240.000,00		136.674.412,00		152.227.960,00		150.020.655,00		139.144.157,00	
Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) [Indeks]	67,61	67,61	68,96	125.240.000,00	70,34	136.674.412,00	71,75	152.227.960,00	73,18	150.020.655,00	74,65	139.144.157,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					164.730.500,00		179.770.395,00		200.228.266,00		197.324.956,00		183.018.896,00	
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) [Indeks]	83,74	83,74	85,41	164.730.500,00	87,12	179.770.395,00	88,87	200.228.266,00	90,64	197.324.956,00	92,42	183.018.896,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak [Rasio]	6,46	6,46	6,23		6,01		5,79		5,57		5,34		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					578.555.400,00		516.000.000,00		557.000.000,00		557.000.000,00		567.700.000,00	
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					403.882.300,00		381.000.000,00		382.000.000,00		382.000.000,00		392.700.000,00	
Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	88,87	88,90	89,13	403.882.300,00	89,26	381.000.000,00	89,39	382.000.000,00	89,52	382.000.000,00	89,74	392.700.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					154.999.600,00		115.000.000,00		155.000.000,00		155.000.000,00		155.000.000,00	
Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	-	1	1	154.999.600,00	1	115.000.000,00	0,90	155.000.000,00	0,90	155.000.000,00	0,80	155.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					19.673.500,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	
Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (%)	100	100	100	19.673.500,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					569.680.000,00		830.816.818,00		849.000.322,00		1.031.851.521,00		995.674.759,00	
2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN					26.400.000,00		26.400.000,00		45.000.000,00		170.000.000,00		120.000.000,00	
Meningkatnya penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Tersesainya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertipikat yang Dilakukan melalui Mediasi (%)	100	100	100	26.400.000,00	100	26.400.000,00	100	45.000.000,00	100	170.000.000,00	100	120.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN					5.250.000,00		110.000.000,00		120.000.000,00		130.000.000,00		140.000.000,00	
Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan (%)	100	100	0	5.250.000,00	100	110.000.000,00	100	120.000.000,00	100	130.000.000,00	100	140.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.10.08 - PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG					158.000.000,00		244.416.818,00		184.000.322,00		281.851.521,00		170.000.000,00	
Meningkatnya pengelolaan tanah kosong	Persentase Tanah Kosong yang Dikelola (%)	5	5	5	158.000.000,00	10	244.416.818,00	15	184.000.322,00	20	281.851.521,00	25	170.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH					380.030.000,00		450.000.000,00		500.000.000,00		450.000.000,00		565.674.759,00	
Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah	Persentase tanah aset yang bersertifikat (%)	85,00	88,00	90,00	380.030.000,00	92,00	450.000.000,00	94,00	500.000.000,00	96,00	450.000.000,00	98,00	565.674.759,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					34.989.751.323,00		35.157.722.204,00		17.879.122.526,00		17.624.023.708,00		18.740.342.850,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.632.720.991,00		6.664.561.857,00		6.032.713.822,00		6.032.713.822,00		6.032.713.822,00	
Meningkatnya fasilitas layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku (%)		100	100	100	6.632.720.991,00	100	6.664.561.857,00	100	6.032.713.822,00	100	6.032.713.822,00	100	6.032.713.822,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					5.500.000,00		5.526.403,00		5.500.000,00		5.500.000,00		5.500.000,00	
Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (%)	50,00	52,00	55,00	5.500.000,00	58,00	5.526.403,00	60,00	5.500.000,00	62,00	5.500.000,00	65,00	5.500.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					228.599.900,00		229.697.311,00		208.549.900,00		208.549.900,00		208.549.900,00	
Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase badan air yang memenuhi baku mutu (%)	-	66,70	66,70	228.599.900,00	77,80	229.697.311,00	77,80	208.549.900,00	77,80	208.549.900,00	77,80	208.549.900,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
	Persentase kawasan yang memenuhi baku mutu udara (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					7.270.631.300,00		7.305.534.502,00		1.200.631.300,00		1.200.631.300,00		1.200.631.300,00	
Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH (%)	16,26	16,26	16,26	7.270.631.300,00	16,26	7.305.534.502,00	16,26	1.200.631.300,00	16,26	1.200.631.300,00	16,26	1.200.631.300,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					2.970.000,00		2.984.257,00		2.970.000,00		2.970.000,00		2.970.000,00	
Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (%)	75,01	75,01	76,47	2.970.000,00	76,47	2.984.257,00	77,94	2.970.000,00	77,94	2.970.000,00	79,41	2.970.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
dan Beracun (Limbah B3)														
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					5.250.000,00		5.275.203,00		5.250.000,00		5.250.000,00		5.250.000,00	
Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH, dan PUU LH yang diterbitkan (Usaha/Kegiatan)	65,00	66,00	67,00	5.250.000,00	68,00	5.275.203,00	69,00	5.250.000,00	70,00	5.250.000,00	71,00	5.250.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					165.003.200,00		165.795.310,00		135.003.200,00		135.003.200,00		135.003.200,00	
Meningkatnya kapasitas dan partisipasi SDM bidang lingkungan hidup	Persentase kelompok masyarakat peduli lingkungan yang aktif (%)	75,00	75,00	75,00	165.003.200,00	75,00	165.795.310,00	75,00	135.003.200,00	100	135.003.200,00	100	135.003.200,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					186.117.500,00		187.010.971,00		156.117.500,00		156.117.500,00		156.117.500,00	
Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (%)	100	100	100	186.117.500,00	100	187.010.971,00	100	156.117.500,00	100	156.117.500,00	100	156.117.500,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					1.500.000,00		1.507.201,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00	
Meningkatnya penyelesaian sengketa /kasus	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana	100	100	100	1.500.000,00	100	1.507.201,00	100	1.500.000,00	100	1.500.000,00	100	1.500.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
tindak pidana lingkungan hidup	Lingkungan Hidup (%)													Lingkungan Hidup
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					20.491.458.432,00		20.589.829.189,00		10.130.886.804,00		9.875.787.986,00		10.992.107.128,00	
Meningkatnya tata kelola persampahan	Persentase cakupan layanan persampahan (%)	98,01	98,06	98,14	20.491.458.432,00	98,24	20.589.829.189,00	98,32	10.130.886.804,00	98,42	9.875.787.986,00	98,52	10.992.107.128,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					6.572.115.710,00		6.517.232.472,00		7.147.909.136,00		7.045.922.969,00		6.726.348.690,00	
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.734.135.931,00		5.692.841.993,00		6.262.779.816,00		6.002.472.969,00		5.844.898.690,00	
Meningkatnya fasilitas layanan kedinasan Perangkat Daerah	Persentase fasilitas layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku (%)	100	100	100	5.734.135.931,00	100	5.692.841.993,00	100	6.262.779.816,00	100	6.002.472.969,00	100	5.844.898.690,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					328.469.579,00		315.789.279,00		342.169.200,00		377.750.000,00		305.750.000,00	
Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)	18,60	30,00	30,00	328.469.579,00	30,00	315.789.279,00	30,00	342.169.200,00	30,00	377.750.000,00	30,00	305.750.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (%)	99,11	99,17	99,24		99,30		99,37		99,43		99,50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL					200.216.000,00		198.355.000,00		210.500.000,00		264.700.000,00		209.700.000,00	
Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase kepemilikan dokumen akte kelahiran seluruh penduduk (%)	67,11	68,14	69,17	200.216.000,00	70,19	198.355.000,00	71,22	210.500.000,00	72,25	264.700.000,00	73,27	209.700.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
															Dan Pencatatan Sipil
	Persentase kepemilikan dokumen perkawinan (%)	92,78	93,27	93,76		94,24		94,73		95,22		95,71			Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (%)	100	100	100		100		100		100		100			Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (%)	100	100	100		100		100		100		100			Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (%)	100	100	100		100		100		100		100			Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan (%)	99,63	99,81	99,85		99,89		99,93		99,97		100			Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase kepemilikan dokumen perceraian (%)	81,44	85,78	88,63		90,45		92,33		94,13		95,88			Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					293.942.200,00		294.246.200,00		305.500.000,00		368.000.000,00		336.000.000,00		
Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan (%)	69	64,52	74,19	293.942.200,00	80,65	294.246.200,00	87,1	305.500.000,00	93,55	368.000.000,00	100	336.000.000,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					15.352.000,00		16.000.000,00		26.960.120,00		33.000.000,00		30.000.000,00	
Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (%)	100	100	100	15.352.000,00	100	16.000.000,00	100	26.960.120,00	100	33.000.000,00	100	30.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					605.819.750,00		613.089.587,00		629.949.551,00		614.301.227,00		639.524.784,00	
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					98.876.500,00		100.063.018,00		102.814.751,00		100.260.771,00		104.377.535,00	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan tata kelola keturahan					98.876.500,00		100.063.018,00		102.814.751,00		100.260.771,00		104.377.535,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Persentase fasilitasi tata kelola keturahan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					506.943.250,00		513.026.569,00		527.134.800,00		514.040.456,00		535.147.249,00	
Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan					506.943.250,00		513.026.569,00		527.134.800,00		514.040.456,00		535.147.249,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Persentase fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan keturahan (LKK) (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN					646.406.400,00		705.423.305,00		785.700.477,00		774.307.819,00		718.170.503,00	

2

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
KELUARGA BERENCANA															
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					71.089.400,00		77.579.862,00		86.408.451,00		85.155.528,00		78.981.752,00		
Terkendalinya pertumbuhan jumlah penduduk	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	17,3	17,2	17,1	71.089.400,00	16,75	77.579.862,00	16,30	86.408.451,00	15,80	85.155.528,00	15,10	78.981.752,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					270.695.000,00		295.409.454,00		329.027.049,00		324.256.157,00		300.747.586,00		
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	8,11	8,10	8,09	270.695.000,00	8,07	295.409.454,00	8,05	329.027.049,00	8,00	324.256.157,00	7,95	300.747.586,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) (%)	15,9	15,4	15,00		13,10		12,80		11,50		10,80			Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					304.622.000,00		332.433.989,00		370.264.977,00		364.896.134,00		338.441.165,00		
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga yang aktif Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (%)	52,08	52,08	55,01	304.622.000,00	58	332.433.989,00	60,25	370.264.977,00	65,00	364.896.134,00	68,90	338.441.165,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					16.854.685.296,00		17.333.069.254,00		17.058.451.921,00		16.815.062.408,00		17.889.229.542,00		
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.968.190.748,00		7.442.091.835,00		7.256.485.277,00		7.464.064.063,00		7.567.005.416,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya fasilitas layanan kedinasan Perangkat Daerah	Persentase fasilitas layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku (%)	100	100	100	6.968.190.748,00	100	7.442.091.835,00	100	7.256.485.277,00	100	7.464.064.063,00	100	7.567.005.416,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					9.808.494.548,00		9.812.977.419,00		9.723.966.644,00		9.272.998.345,00		10.244.224.126,00	
Meningkatnya kualitas sarpras perhubungan	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (%)	88,31	88,31	88,38	4.595.730.448,00	88,42	4.435.977.419,00	88,50	4.318.966.644,00	89,10	4.563.998.345,00	89,40	4.862.524.126,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
Meningkatnya ketertiban jalan	Persentase Ruas Jalan yang Menerapkan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas (%)	20,00	30,00	40,00	3.499.724.200,00	50,00	3.631.000.000,00	60,00	3.594.000.000,00	70,00	3.164.000.000,00	80,00	3.524.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
Meningkatnya layanan angkutan jalan berkeselamatan	IKM Layanan Angkutan Jalan Berkeselamatan (Indeks)	92,20	90,20	92,25	1.713.039.900,00	92,50	1.746.000.000,00	92,75	1.811.000.000,00	93,00	1.545.000.000,00	93,25	1.857.700.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.15.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN					78.000.000,00		78.000.000,00		78.000.000,00		78.000.000,00		78.000.000,00	
Meningkatnya pengelolaan perlintasan kereta api	Calupun Perlintasan Kereta Api yang Ditangani (%)	100	100	100	78.000.000,00	100	78.000.000,00	100	78.000.000,00	100	78.000.000,00	100	78.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					12.811.268.474,00		12.756.502.733,00		11.994.654.851,00		11.821.180.473,00		13.130.270.329,00	
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.776.268.474,00		5.776.268.733,00		5.776.268.851,00		5.770.000.473,00		5.901.036.329,00	
Meningkatnya fasilitas layanan kedinasan Perangkat Daerah	Persentase fasilitas layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku (%)	0	0	100	5.776.268.474,00	100	5.776.268.733,00	100	5.776.268.851,00	100	5.770.000.473,00	100	5.901.036.329,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					2.450.000.000,00		2.430.234.000,00		2.218.386.000,00		2.051.180.000,00		2.579.234.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%)	0	85,00	86,00	2.450.000.000,00	87,00	2.430.234.000,00	88,00	2.218.386.000,00	89,00	2.051.180.000,00	90,00	2.579.234.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					4.585.000.000,00		4.550.000.000,00		4.000.000.000,00		4.000.000.000,00		4.650.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas Penerapan Digitalisasi Pemerintahan	Persentase pemenuhan layanan publik dan administrasi pemerintahan berbasis digital (%)	92,25	0	87,32	4.585.000.000,00	88,41	4.550.000.000,00	89,49	4.000.000.000,00	90,57	4.000.000.000,00	92,45	4.650.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					7.843.824.060,00		8.982.327.310,00		8.766.653.980,00		8.720.572.498,00		9.380.088.631,00	
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.906.599.160,00		5.186.327.310,00		5.181.653.980,00		5.183.572.498,00		5.185.088.631,00	
Meningkatnya fasilitas layanan kedinasan Perangkat Daerah	Persentase fasilitas layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku (%)	84,00	84,50	85,00	4.906.599.160,00	86	5.186.327.310,00	87	5.181.653.980,00	88	5.183.572.498,00	89	5.185.088.631,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM					123.387.800,00		145.000.000,00		130.000.000,00		137.000.000,00		145.000.000,00	
Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam	Persentase Koperasi yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam (%)	0,50	0,50	0,51	123.387.800,00	0,52	145.000.000,00	0,53	130.000.000,00	0,54	137.000.000,00	0,55	145.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					90.331.600,00		56.000.000,00		55.000.000,00		60.000.000,00		65.000.000,00	
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (%)	3,53	3,53	5,80	90.331.600,00	5,80	56.000.000,00	5,80	55.000.000,00	5,80	60.000.000,00	5,80	65.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					121.501.900,00		135.000.000,00		130.000.000,00		135.000.000,00		140.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase Koperasi Aktif (%)	21,20	21,50	21,90	121.501.900,00	22,60	135.000.000,00	23,20	130.000.000,00	24,00	135.000.000,00	24,7	140.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					267.256.100,00		295.000.000,00		375.000.000,00		385.000.000,00		475.000.000,00	
Meningkatnya kualitas SDM perkeroperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan (%)	21,20	21,20	21,20	267.256.100,00	21,20	295.000.000,00	21,20	375.000.000,00	21,20	385.000.000,00	21,20	475.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					522.407.600,00		565.000.000,00		545.000.000,00		555.000.000,00		760.000.000,00	
Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase peningkatan volume usaha koperasi (%)	20,16	20,30	20,50	522.407.600,00	20,90	565.000.000,00	21,30	545.000.000,00	21,70	555.000.000,00	22,10	760.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					1.388.839.900,00		1.650.000.000,00		1.475.000.000,00		1.595.000.000,00		1.615.000.000,00	
Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (%)	9,28	9,93	10,39	1.388.839.900,00	10,85	1.650.000.000,00	11,31	1.475.000.000,00	11,77	1.595.000.000,00	12,23	1.615.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
	Pertumbuhan Wirausaha (%)	4,20	4,21	4,79		6,86		8,56		9,86		10,77		Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					423.500.000,00		950.000.000,00		875.000.000,00		670.000.000,00		995.000.000,00	
Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalni Kemitraan dan Ekspor (%)	0,001	0,005	0,005	423.500.000,00	0,010	950.000.000,00	0,016	875.000.000,00	0,020	670.000.000,00	0,026	995.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					6.127.484.522,00		6.892.580.221,00		6.689.946.664,00		6.598.775.085,00		7.104.114.097,00	
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					5.053.534.022,00		5.517.580.221,00		5.368.446.664,00		5.313.775.085,00		5.639.114.097,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Meningkatnya fasilitas layanan kedinasan Perangkat Daerah	Persentase fasilitas layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku (%)	100	100	100	5.053.534.022,00	100	5.517.580.221,00	100	5.368.446.664,00	100	5.313.775.085,00	100	5.639.114.097,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					59.914.400,00		120.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		130.000.000,00	
Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi (%)	-	100	100	59.914.400,00	100	120.000.000,00	100	70.000.000,00	100	70.000.000,00	100	130.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					505.658.200,00		535.000.000,00		535.000.000,00		545.000.000,00		555.000.000,00	
Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (%)	0,60	0,60	0,60	505.658.200,00	0,80	535.000.000,00	1,10	535.000.000,00	1,20	545.000.000,00	1,30	555.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					378.377.900,00		420.000.000,00		420.000.000,00		430.000.000,00		450.000.000,00	
Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (%)	100	100	100	378.377.900,00	100	420.000.000,00	100	420.000.000,00	100	430.000.000,00	100	450.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	87,50	88,00	88,25		88,5		88,75		89,00		89,25		Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					110.000.000,00		180.000.000,00		180.000.000,00		190.000.000,00		210.000.000,00	
Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (%)	100	100	100	110.000.000,00	100	180.000.000,00	100	180.000.000,00	100	190.000.000,00	100	210.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					20.000.000,00		120.000.000,00		116.500.000,00		50.000.000,00		120.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (%)	100	100	100	20.000.000,00	100	120.000.000,00	100	116.500.000,00	100	50.000.000,00	100	120.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					12.897.468.738,00		33.738.386.269,00		15.842.731.423,00		15.682.320.447,00		15.218.506.214,00	
2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.095.071.675,00		4.857.897.100,00		5.301.230.068,00		5.264.908.905,00		5.143.506.214,00	
Meningkatnya Fasilitas Layanan Kedinasan Perangkat Daerah	Persentase fasilitas layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku (%)	-	-	100	5.095.071.675,00	100	4.857.897.100,00	100	5.301.230.068,00	100	5.264.908.905,00	100	5.143.506.214,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					2.842.358.000,00		3.040.000.000,00		5.325.000.000,00		4.973.411.542,00		4.945.000.000,00	
Meningkatnya daya saing kepemudaan	Tingkat Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan organisasil kemasyarakatan (%)	51,56	51,56	52,19	2.842.358.000,00	52,81	3.040.000.000,00	53,41	5.325.000.000,00	54	4.973.411.542,00	54,57	4.945.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
	Rasio Wirausaha Pemuda (%)	9,34	9,61	9,74		9,88		10,00		10,13		10,25		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KROLAHRAGAAN					4.640.041.263,00		25.530.489.169,00		4.746.501.355,00		4.974.000.000,00		4.770.000.000,00	
Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga	Persentase atlet yang masuk Pelatda Provinsi (%)	-	-	12,50	4.640.041.263,00	17,50	25.530.489.169,00	25,00	4.746.501.355,00	30,00	4.974.000.000,00	37,50	4.770.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					319.997.800,00		310.000.000,00		470.000.000,00		470.000.000,00		360.000.000,00	
Meningkatnya kualitas kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (%)	-	-	33,95	319.997.800,00	34,47	310.000.000,00	35,77	470.000.000,00	36,43	470.000.000,00	37,20	360.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga

2

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					250.000.000,00		268.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		300.000.000,00	
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					250.000.000,00		268.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		300.000.000,00	
Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Persentase OPD yang menggunakan data statistik sektoral dalam menyusun perencanaan pembangunan dan evaluasi pembangunan (%)	100	100	100	250.000.000,00	100	268.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	300.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Statistik
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					244.865.200,00		244.800.000,00		244.000.000,00		240.000.000,00		264.800.000,00	
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					244.865.200,00		244.800.000,00		244.000.000,00		240.000.000,00		264.800.000,00	
Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang hasil penilaian implementasi persandian untuk pengaman informasi masuk kategori baik (%)	0	67,50	70,00	244.865.200,00	73,30	244.800.000,00	76,70	244.000.000,00	80,00	240.000.000,00	83,30	264.800.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Persandian
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					1.230.179.399,00		1.248.343.979,00		1.109.775.858,00		1.085.100.257,00		1.312.080.502,00	
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					1.065.475.399,00		1.083.639.979,00		945.071.858,00		920.396.257,00		1.105.475.402,00	
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (%)	0	57,97	60,39	1.065.475.399,00	62,80	1.083.639.979,00	65,22	945.071.858,00	67,63	920.396.257,00	70,05	1.105.475.402,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					164.704.000,00		164.704.000,00		164.704.000,00		164.704.000,00		206.605.100,00	
Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (%)	-	-	100	164.704.000,00	100	164.704.000,00	100	164.704.000,00	100	164.704.000,00	100	206.605.100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					5.819.759.391,00		5.765.434.089,00		6.311.662.239,00		6.217.375.705,00		5.958.340.255,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.999.890.104,00		4.985.265.562,00		5.401.086.524,00		5.263.098.709,00		5.215.074.134,00	
Meningkatnya fasilitas layanan kedinasan Perangkat Daerah	Persentase fasilitas layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku (%)	-	100	100	4.999.890.104,00	100	4.985.265.562,00	100	5.401.086.524,00	100	5.263.098.709,00	100	5.215.074.134,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					819.869.287,00		780.168.527,00		910.575.715,00		954.276.996,00		743.266.121,00	
Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Persentase ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat (%)	1,50	1,50	2,00	819.869.287,00	2,5	780.168.527,00	3,00	910.575.715,00	3,50	954.276.996,00	4,00	743.266.121,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					246.602.400,00		246.602.400,00		296.602.400,00		296.602.400,00		246.602.400,00	
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					246.602.400,00		246.602.400,00		296.602.400,00		296.602.400,00		246.602.400,00	
Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa bernegara kepentingan pemerintahan, untuk negara, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (%)	86,00	86,50	86,60	246.602.400,00	86,70	246.602.400,00	86,80	296.602.400,00	86,90	296.602.400,00	87,00	246.602.400,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
	Tingkat Ketersediaan Arsip (%)	88,68	88,70	88,80		88,90		89,00		89,10		89,20		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					679.918.000,00		598.602.000,00		574.180.000,00		577.044.000,00		577.500.000,00	
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					419.418.000,00		421.702.000,00		397.080.000,00		399.744.000,00		400.000.000,00	
Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Persentase Izin Usaha budidaya perikanan yang Diterbitkan (%)	100	100	100	419.418.000,00	100	421.702.000,00	100	397.080.000,00	100	399.744.000,00	100	400.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan

8

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	242,84	242,86	247,28		249,76		252,26		254,77		257,30		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					260.500.000,00		176.900.000,00		177.100.000,00		177.300.000,00		177.500.000,00	
Meningkatnya kualitas produk hasil perikanan	Persentase Izin Usaha pengolahan hasil perikanan yang Diterbitkan (%)	0	100	100	260.500.000,00	100	176.900.000,00	100	177.100.000,00	100	177.300.000,00	100	177.500.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	18,84	20,00	23,20		23,31		23,42		23,53		23,64		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					10.768.311.941,00		10.878.157.097,00		10.704.302.803,00		10.584.671.014,00		11.148.972.161,00	
3.26.D1 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					9.065.786.849,00		9.125.632.005,00		9.145.417.711,00		9.062.137.122,00		9.323.947.069,00	
Meningkatnya fasilitas layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku (%)	Persentase fasilitas layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku (%)	-	-	100	9.065.786.849,00	100	9.125.632.005,00	100	9.145.417.711,00	100	9.062.137.122,00	100	9.323.947.069,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					928.272.092,00		958.272.092,00		874.272.092,00		862.596.492,00		1.004.072.092,00	
Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (%)	-2,96	0,02	0,03	928.272.092,00	0,04	958.272.092,00	0,05	874.272.092,00	0,06	862.596.492,00	0,07	1.004.072.092,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					41.083.600,00		41.083.600,00		41.083.600,00		41.083.600,00		51.083.600,00	
Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (%)	-	-	0,26	41.083.600,00	0,30	41.083.600,00	0,34	41.083.600,00	0,38	41.083.600,00	0,42	51.083.600,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.04 - PROGRAM PEMBANGUNAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					690.603.600,00		710.603.600,00		600.963.600,00		576.288.000,00		717.303.600,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas ekosistem ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (%)	-	0,17	0,35	690.603.600,00	0,52	710.603.600,00	0,69	600.963.600,00	0,87	576.288.000,00	1,04	717.303.600,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					42.565.800,00		42.565.800,00		42.565.800,00		42.565.800,00		52.565.800,00	
Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi yang Dibentuk dan Beroperasi (%)	-	-	22,05	42.565.800,00	24,13	42.565.800,00	26,04	42.565.800,00	28,13	42.565.800,00	30,03	52.565.800,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					13.160.042.155,00		12.398.422.392,00		12.167.774.742,00		11.975.161.630,00		12.801.412.202,00	
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					9.223.910.322,00		9.243.144.586,00		9.014.087.829,00		8.983.071.085,00		9.325.561.907,00	
Meningkatnya fasilitas layanan kedinasan Perangkat Daerah	Persentase fasilitas layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku (%)	100	100	100	9.223.910.322,00	100	9.243.144.586,00	100	9.014.087.829,00	100	8.983.071.085,00	100	9.325.561.907,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					308.270.400,00		298.201.000,00		285.121.000,00		286.693.000,00		287.693.000,00	
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura (%)	0,10	0,14	0,8	308.270.400,00	0,8	298.201.000,00	0,8	285.121.000,00	0,8	286.693.000,00	0,8	287.693.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (%)	4,19	3,00	3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (%)	-38,03	0,20	0,20		0,20		0,20		0,20		0,20		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					953.277.400,00		561.500.000,00		563.000.000,00		413.000.000,00		700.102.232,00	
Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha)	0	30	30	953.277.400,00	30	561.500.000,00	30	563.000.000,00	30	413.000.000,00	30	700.102.232,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase produk RPH yang dijamin ASUH (Aman, Sehat, Utuh, Halal) (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					265.998.700,00		281.399.200,00		290.595.000,00		297.579.000,00		407.283.000,00	
Meningkatnya kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) (%)	40,54	43,24	43,24	265.998.700,00	45,94	281.399.200,00	48,65	290.595.000,00	51,35	297.579.000,00	54,05	407.283.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Dokumen)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					78.804.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (%)	100	100	100	78.804.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian (%)	1	5	5		10		15		20		25		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					28.165.600,00		59.998.000,00		63.651.000,00		69.050.000,00		70.050.000,00	
Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	Persentase Izin Usaha Peternakan yang Diterbitkan (%)	-	0	19,00	28.165.600,00	19,50	59.998.000,00	20,00	63.651.000,00	20,50	69.050.000,00	20,50	70.050.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan (%)	62,22	62,84	62,84		63,47		64,11		64,75		65,39		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					2.301.615.733,00		1.854.179.606,00		1.851.319.913,00		1.825.768.545,00		1.910.722.063,00	
Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian dan pembinaan	Persentase Kelembagaan yang Dibentuk dan Beroperasi Koperasi Tani (%)	0	0	0	2.301.615.733,00	4	1.854.179.606,00	9	1.851.319.913,00	14	1.825.768.545,00	14	1.910.722.063,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
kelembagaan usaha tani														
	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					15.747.917.100,00		23.418.414.877,00		13.958.514.097,00		13.777.262.032,00		14.856.482.866,00	
3.30.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.653.175.800,00		8.723.414.877,00		8.373.350.000,00		8.311.262.032,00		8.961.482.866,00	
Meningkatnya fasilitas layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku (%)		86,05	86,25	86,30	8.653.175.800,00	86,40	8.723.414.877,00	86,50	8.373.350.000,00	86,60	8.311.262.032,00	86,60	8.961.482.866,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					29.997.800,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00	
Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	persentase usaha perdagangan yg berizin (%)	70,00	72,10	75,71	29.997.800,00	79,49	60.000.000,00	83,46	60.000.000,00	87,64	60.000.000,00	92,02	60.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					6.450.000.000,00		14.000.000.000,00		4.969.164.097,00		4.900.000.000,00		5.000.000.000,00	
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (%)	18,18	18,18	18,18	6.450.000.000,00	18,18	14.000.000.000,00	18,18	4.969.164.097,00	18,18	4.900.000.000,00	18,18	5.000.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					150.000.000,00		125.000.000,00		122.000.000,00		122.000.000,00		125.000.000,00	
Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (%)	100	100	100	150.000.000,00	100	125.000.000,00	100	122.000.000,00	100	122.000.000,00	100	125.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					249.763.000,00		200.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		250.000.000,00	

!

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai Ekspor Barang (Nilai)	100	100	100	249.763.000,00	100	200.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	250.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					91.189.700,00		160.000.000,00		134.000.000,00		134.000.000,00		160.000.000,00	
Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Indeks kepuasan konsumen terhadap layanan perlindungan konsumen (Indeks (Skala 0-100))		81,00	84,00	91.189.700,00	85,00	160.000.000,00	86,00	134.000.000,00	87,00	134.000.000,00	88,00	160.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (%)	48,17	47,88	48,26		48,65		49,23		49,62		50,29		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					123.790.800,00		150.000.000,00		150.000.000,00		100.000.000,00		300.000.000,00	
Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Jumlah kerjasama penggunaan produk lokal daerah (Kerja Sama)		5	10	123.790.800,00	15	150.000.000,00	20	150.000.000,00	25	100.000.000,00	30	300.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					3.072.684.294,00		3.258.650.617,00		3.258.650.617,00		3.215.650.617,00		3.339.650.617,00	
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					3.016.751.394,00		3.198.650.617,00		3.198.650.617,00		3.155.650.617,00		3.279.650.617,00	
Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (%)	1,39	1,40	1,41	3.016.751.394,00	1,42	3.198.650.617,00	1,43	3.198.650.617,00	1,44	3.155.650.617,00	1,45	3.279.650.617,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00	
Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (%)	50,00	50,00	50,00	30.000.000,00	50,00	30.000.000,00	50,00	30.000.000,00	50,00	30.000.000,00	50,00	30.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					25.932.900,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Persentase industri yg terdaftar di SIINAS (%)	34,00	34,20	34,40	25.932.900,00	34,60	30.000.000,00	34,80	30.000.000,00	35,00	30.000.000,00	35,20	30.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					43.437.775.909,00		53.808.631.550,00		44.495.869.735,00		43.883.358.906,00		45.172.245.649,00	
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					30.626.252.318,00		30.995.169.676,00		31.486.154.251,00		31.048.894.601,00		31.964.782.488,00	
Meningkatnya fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah					29.723.648.153,00		30.080.331.932,00		30.555.910.306,00		30.133.834.500,00		31.020.360.133,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah					128.934.450,00		131.883.993,00		134.911.478,00		130.713.745,00		137.000.835,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya tata kelola organisasi pemerintah daerah					504.778.523,00		510.835.865,00		518.912.322,00		511.744.466,00		526.799.789,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Indeks Kematangan Organisasi (Indeks)	41,80	42,00	42,10		43,10		44,10		45,10		46,10		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Persentase perangkat daerah dengan nilai SAKIP minimal A (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya kualitas pelayanan publik					268.891.192,00		272.117.886,00		276.420.145,00		272.601.890,00		280.621.731,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Persentase perangkat daerah yang memiliki IKM dengan kategori minimal Baik (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase unit pelayanan publik dengan kategori pelayanan Baik (%)	27,00	27,00	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					11.545.794.877,00		11.532.544.416,00		11.709.179.232,00		11.551.015.389,00		11.887.158.757,00	
Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat					9.341.538.137,00		9.301.836.595,00		9.444.305.432,00		9.316.543.055,00		9.587.858.877,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan					282.006.300,00		285.390.376,00		289.761.473,00		285.841.586,00		294.165.848,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (%)	3,367	3,3672	3,3674		3,3676		3,3678		3,368		3,3682		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya penyelesaian perkara hukum					346.055.960,00		350.208.631,00		355.572.499,00		350.762.321,00		360.977.201,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Persentase masalah hukum yang terselesaikan (%)	96	96	96		96		96		96		96		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya kualitas produk hukum yang dihasilkan					519.083.940,00		525.312.948,00		533.358.748,00		526.381.185,00		541.465.800,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Persentase produk hukum yang dihasilkan (%)	94	94	94		94		94		94		94		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan					908.542.340,00		919.444.848,00		933.527.255,00		920.898.515,00		947.716.868,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya kualitas kerja sama daerah					148.568.200,00		150.351.018,00		152.653.825,00		150.588.727,00		154.974.163,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Efektivitas Kerja Sama Daerah (%)	-	-	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					1.265.728.714,00		11.280.917.458,00		1.300.536.252,00		1.283.448.916,00		1.320.304.404,00	
Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian					512.149.630,00		10.518.295.435,00		526.233.744,00		519.319.725,00		534.232.498,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya kualitas kebijakan administrasi pembangunan					182.852.400,00		185.046.629,00		187.880.841,00		185.412.334,00		190.736.630,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa					570.726.684,00		577.575.404,00		586.421.667,00		578.716.857,00		595.335.276,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Tingkat Kematangan UKPBJ (Level)	8:9	9:9	9:9		9:9		9:9		9:9		9:9		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.02 - SEKRETARIAT DPRD					36.991.260.038,00		37.535.436.348,00		38.227.613.266,00		37.799.304.320,00		39.004.527.781,00	
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					20.619.480.209,00		21.078.956.610,00		21.734.796.067,00		22.220.940.605,00		22.750.340.647,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya fasilitas layanan kedinasan Perangkat Daerah	Persentase fasilitas layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku (%)	100	100	100	20.619.480.209,00	100	21.078.956.610,00	100	21.734.796.067,00	100	22.220.940.605,00	100	22.750.340.647,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					16.371.779.829,00		16.456.479.738,00		16.492.817.199,00		15.578.363.715,00		16.254.187.134,00	
Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (%)	100	100	100	11.438.480.979,00	100	11.510.246.088,00	100	11.546.583.549,00	100	11.196.591.615,00	100	11.307.953.484,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
	Persentase Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	Persentase penyampaian rekomendasi penganggaran (%)	100	100	100	4.933.298.850,00	100	4.946.233.650,00	100	4.946.233.650,00	100	4.381.772.100,00	100	4.946.233.650,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
	persentase penyampaian rekomendasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
5.01 - PERENCANAAN					6.799.034.615,00		6.847.646.886,00		6.966.469.607,00		6.898.207.633,00		7.043.922.510,00	
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.246.006.115,00		5.217.052.081,00		5.243.581.371,00		5.107.304.243,00		5.211.529.623,00	
Meningkatnya fasilitas layanan kedinasan Perangkat Daerah	Persentase fasilitas layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku (%)	100	100	100	5.246.006.115,00	100	5.217.052.081,00	100	5.243.581.371,00	100	5.107.304.243,00	100	5.211.529.623,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					789.661.500,00		793.609.805,00		850.520.828,00		1.007.522.601,00		938.746.691,00	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPd (%)	100	100	100	789.661.500,00	100	793.609.805,00	100	850.520.828,00	100	1.007.522.601,00	100	938.746.691,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Persentase program prioritas nasional yang didukung program daerah (%)	-	46,26	46,26		49,15		52,04		54,93		57,83		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Persentase capaian kinerja program daerah (%)	-	-	91,00		92,00		93,00		94,00		95,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					763.367.000,00		836.985.000,00		872.367.408,00		783.380.789,00		893.646.196,00	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang infrastruktur dan kewilayahan, serta bidang perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (%)	100	100	100	763.367.000,00	100	836.985.000,00	100	872.367.408,00	100	783.380.789,00	100	893.646.196,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.02 - KEUANGAN					24.363.476.074,00		24.929.509.080,00		25.334.682.761,00		24.973.208.219,00		25.729.413.745,00	
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					11.646.609.366,00		12.095.009.080,00		12.500.182.761,00		12.138.708.219,00		12.894.913.745,00	
Meningkatnya fasilitas layanan kedinasan Pemringkat Daerah	Persentase fasilitas layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku (%)	100	100	100	11.646.609.366,00	100	12.095.009.080,00	100	12.500.182.761,00	100	12.138.708.219,00	100	12.894.913.745,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					5.614.596.000,00		5.626.000.000,00		5.626.000.000,00		5.626.000.000,00		5.626.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya tata kelola anggaran	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (%)	33,13	36,00	39,90	1.005.000.000,00	40,00	1.000.000.000,00	40,01	1.000.000.000,00	40,02	1.000.000.000,00	40,03	1.000.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (%)	30,51	30,35	30,20		30,00		29,99		29,98		29,97		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Meningkatnya Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan	Persentase laporan keuangan tepat waktu (%)	100	100	100	363.000.000,00	100	363.000.000,00	100	363.000.000,00	100	363.000.000,00	100	363.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (%)	94,85	95,00	95,10	4.246.596.000,00	95,20	4.263.000.000,00	95,30	4.263.000.000,00	95,40	4.263.000.000,00	95,50	4.263.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase Penurunan SILPA (%)	-27,76	-5	-10		-10,05		-10,1		-10,15		-10,2		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					4.087.089.000,00		4.175.000.000,00		4.175.000.000,00		4.175.000.000,00		4.175.000.000,00	
Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (%)	-5,31	1,00	1,00	4.087.089.000,00	1,05	4.175.000.000,00	1,10	4.175.000.000,00	1,15	4.175.000.000,00	1,20	4.175.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					3.015.181.708,00		3.033.500.000,00		3.033.500.000,00		3.033.500.000,00		3.033.500.000,00	
Meningkatnya Tata Kelola Pendapatan Daerah	Persentase Target Pajak Daerah terhadap PAD (%)	32,02	41,00	42,00	3.015.181.708,00	43,00	3.033.500.000,00	44,00	3.033.500.000,00	45,00	3.033.500.000,00	46,00	3.033.500.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap PAD (%)	32,02	41,00	42,00		43,00		44,00		45,00		46,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase Realisasi Retribusi Daerah terhadap Target Retribusi Daerah (%)	90,91	95,00	95,50		96,00		96,5		97,00		97,50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.03 - KEPEGAWAIAN					10.147.841.724,00		10.310.806.416,00		10.508.104.241,00		10.428.713.384,00		10.782.213.299,00	
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.421.199.972,00		8.769.600.695,00		8.866.641.229,00		8.689.523.102,00		8.890.584.457,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya fasilitas layanan kedinasan Perangkat Daerah	Persentase fasilitas layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku (%)	100	100	100	8.421.199.972,00	100	8.769.600.695,00	100	8.866.641.229,00	100	8.689.523.102,00	100	8.890.584.457,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					1.726.641.752,00		1.541.205.721,00		1.641.463.012,00		1.739.190.282,00		1.891.628.842,00	
Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (%)	98,90	90,00	90,00	1.726.641.752,00	91,00	1.541.205.721,00	92,00	1.641.463.012,00	93,00	1.739.190.282,00	95,00	1.891.628.842,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya (%)	4,00	4,00	4,16		8,32		12,48		16,65		20,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi (%)	80,34	67,00	68,00		69,00		70,00		71,00		72,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					687.629.017,00		1.489.794.598,00		1.484.289.276,00		1.392.573.000,00		1.397.029.580,00	
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					687.629.017,00		1.489.794.598,00		1.484.289.276,00		1.392.573.000,00		1.397.029.580,00	
Meningkatnya kualitas analisis kebutuhan, pengembangan dan evaluasi serta layanan pengembangan kompetensi	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi (%)	37,37	37,37	38,00	687.629.017,00	36,00	1.489.794.598,00	38,00	1.484.289.276,00	36,00	1.392.573.000,00	38,00	1.397.029.580,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan
	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional (%)	19,59	18,00	18,00		18,50		19,00		19,50		20,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan
	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis (%)	80,00	80,00	80,00		82,00		84,00		86,00		88,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan
	Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan (%)	-	72,86	52,00		55,00		60,00		65,00		70,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					776.638.100,00		822.971.290,00		828.817.397,00		785.856.437,00		872.820.190,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH					776.638.100,00		822.971.290,00		828.817.397,00		785.856.437,00		872.820.190,00	
Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (%)	40,00	50,00	50,00	776.638.100,00	50,00	822.971.290,00	50,00	828.817.397,00	50,00	785.856.437,00	50,00	872.820.190,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
	Rasio Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah (Rasio)	35,00	37,50	37,50		38,10		38,64		39,13		39,58		Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH					9.471.384.221,00		9.588.272.723,00		9.744.108.754,00		9.605.080.084,00		9.895.928.363,00	
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.713.233.971,00		7.705.076.191,00		7.705.153.491,00		7.705.084.591,00		7.705.228.791,00	
Meningkatnya fasilitas layanan kedinasan Perangkat Daerah	Persentase fasilitas layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku (%)	100	100	100	7.713.233.971,00	100	7.705.076.191,00	100	7.705.153.491,00	100	7.705.084.591,00	100	7.705.228.791,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					1.403.915.550,00		1.496.776.532,00		1.620.574.263,00		1.510.128.493,00		1.741.181.572,00	
Menurunnya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindakan lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (%)	93,75	93,75	93,8	1.403.915.550,00	93,85	1.496.776.532,00	93,9	1.620.574.263,00	93,95	1.510.128.493,00	94,00	1.741.181.572,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					354.234.700,00		386.420.000,00		418.381.000,00		389.867.000,00		449.518.000,00	
Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Indeks Manajemen Risiko (IMR) (Indeks)	2,966	2,966	2,966	354.234.700,00	2,967	386.420.000,00	2,968	418.381.000,00	2,969	389.867.000,00	2,970	449.518.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
	Level Kapabilitas Aparat Pengawasan	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)		Terintegrasi (Integrated)		Terintegrasi (Integrated)		Terintegrasi (Integrated)		Terintegrasi (Integrated)		Dinas/Badan yang menangani Bidang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Intern Pemerintah (APIP) (Level)														Inspektorat Daerah
7.01 - KECAMATAN					94.705.329.423,00		93.485.659.052,00		95.005.060.354,00		93.649.530.821,00		96.485.301.544,00		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					43.521.452.724,00		47.244.193.073,00		48.219.291.228,00		47.280.028.505,00		49.352.156.559,00		
Meningkatnya fasilitas layanan kedinasan Perangkat Daerah	Persentase fasilitas layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku (%)	100	100	100	14.016.199.797,00	100	14.036.688.598,00	100	14.494.229.566,00	100	14.086.035.698,00	100	14.939.978.155,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
															Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya fasilitas layanan kedinasan Perangkat Daerah	Persentase fasilitas layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku (%)	100	100	100	15.625.822.158,00	100	15.465.611.550,00	100	15.620.267.670,00	100	15.423.745.267,00	100	15.753.418.487,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
															Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya fasilitas layanan kedinasan Perangkat Daerah	Persentase fasilitas layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku (%)	100	100	100	13.879.430.769,00	100	17.741.892.925,00	100	18.104.793.992,00	100	17.770.247.540,00	100	18.658.759.917,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
															Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					8.358.704.059,00		7.685.690.663,00		7.754.210.767,00		7.736.316.997,00		8.091.560.023,00		
Meningkatnya kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan	Persentase kelurahan yang masyarakatnya aktif menjaga trantibum secara swadaya (%)	-	-	100	2.885.950.783,00	100	2.213.525.836,00	100	2.234.731.648,00	100	2.226.598.238,00	100	2.337.928.150,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase masyarakat yang tertib dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan umum (%)	-	-	100		100		100		100		100			Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase pelayanan dan pengaduan yang diselesaikan sesuai standar pelayanan (%)	-	-	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan	Persentase kelurahan yang masyarakatnya aktif menjaga trantibum secara swadaya (%)	100	100	100	2.150.238.384,00	100	2.150.238.384,00	100	2.150.238.384,00	100	2.150.238.384,00	100	2.150.238.384,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase masyarakat yang tertib dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan umum (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase pelayanan dan pengaduan yang diselesaikan sesuai dengan standar pelayanan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan	Persentase kelurahan yang masyarakatnya aktif menjaga trantibum secara swadaya (%)	100	100	100	3.322.514.892,00	100	3.321.926.443,00	100	3.369.240.735,00	100	3.359.480.375,00	100	3.603.393.489,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase masyarakat yang tertib dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan umum (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase pelayanan dan pengaduan yang diselesaikan sesuai standar pelayanan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					42.825.172.640,00		38.555.775.316,00		39.031.558.359,00		38.633.185.319,00		39.041.584.962,00	
Meningkatnya keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Jumlah kelompok masyarakat yang aktif dalam kegiatan ekonomi produktif (Kelompok)	8	8	8	11.964.634.324,00	8	11.964.634.324,00	8	11.964.634.324,00	8	11.964.634.324,00	8	11.964.634.324,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase pemenuhan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan sarana prasarana kelurahan yang mendukung pencapaian SPM (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Jumlah kelompok masyarakat yang aktif dalam kegiatan ekonomi produktif (Kelompok)	7	7	7	16.955.722.748,00	7	15.455.702.725,00	7	15.810.279.970,00	7	15.520.040.330,00	7	15.985.179.940,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase pemenuhan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan sarana prasarana kelurahan yang mendukung pencapaian SPM (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Jumlah kelompok masyarakat yang aktif dalam kegiatan ekonomi produktif (Kelompok)	-	-	7	13.904.815.568,00	7	11.135.438.267,00	7	11.256.644.065,00	7	11.148.510.665,00	7	11.091.770.698,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (%)	-	-	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

2

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase pemenuhan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan sarana prasarana kelurahan yang mendukung pencapaian SPM (%)	-	-	70,00		70,00		70,00		70,00		70,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					7.822.439.759,00		6.952.294.897,00		22.587.178.244,00		37.466.083.423,00		7.204.248.808,00	
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.374.754.396,00		4.379.493.301,00		4.716.841.819,00		4.710.647.907,00		4.504.563.981,00	
Meningkatnya fasilitasi layanan kedinasan Daerah Peringkat	Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku (%)	100	100	100	4.374.754.396,00	100	4.379.493.301,00	100	4.716.841.819,00	100	4.710.647.907,00	100	4.504.563.981,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					1.035.000.000,00		1.009.183.773,00		1.133.902.407,00		1.123.736.042,00		1.040.018.681,00	
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (%)	47,62	57,14	66,67	1.035.000.000,00	76,19	1.009.183.773,00	85,71	1.133.902.407,00	95,24	1.123.736.042,00	100	1.040.018.681,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					680.621.708,00		680.621.708,00		15.680.621.708,00		27.080.621.708,00		691.338.659,00	
Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (%)	0	84,00	85,00	680.621.708,00	86,00	680.621.708,00	87,00	15.680.621.708,00	88,00	27.080.621.708,00	89,00	691.338.659,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
S.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					113.800.000,00		115.000.000,00		119.490.000,00		122.477.250,00		124.517.257,00	
Meningkatnya keterlibatan organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (%)	89,47	89,90	90,00	113.800.000,00	90,10	115.000.000,00	90,20	119.490.000,00	90,30	122.477.250,00	90,40	124.517.257,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
S.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					475.000.000,00		475.000.000,00		498.750.000,00		511.218.750,00		485.717.257,00	
Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (%)	100	100	100	475.000.000,00	100	475.000.000,00	100	498.750.000,00	100	511.218.750,00	100	485.717.257,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
S.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					1.143.263.655,00		292.996.115,00		437.572.310,00		3.917.381.766,00		358.092.973,00	
Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (%)	100	100	100	1.143.263.655,00	100	292.996.115,00	100	437.572.310,00	100	3.917.381.766,00	100	358.092.973,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
TOTAL KESELURUHAN					955.941.324.257,00		986.171.090.536,00		976.683.005.392,00		1.005.417.367.753,00		991.625.409.438,00	

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir masa jabatan, yang ditunjukkan melalui akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian bersifat mandiri setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Untuk pencapaian Visi Pembangunan Jangka Menengah, diperlukan tahapan pencapaiannya, dan dari setiap tahapan tersebut perlu ditetapkan tolok ukur/indikator tingkat keberhasilannya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Penetapan indikator kinerja daerah dalam RPJMD diformulasikan menjadi 2 kategori yaitu :

1. Indikator kinerja yang bertujuan untuk memberi gambaran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Indikator tersebut selanjutnya ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU).
2. Indikator Kinerja yang bertujuan untuk memberi gambaran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan urusan dan kewenangan daerah. Indikator tersebut selanjutnya ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD).

4.2.1. Indikator Kinerja Utama

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Utama

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	Indeks Harmoni Indonesia	Indeks	Data belum pernah dirilis	6,91	6,95	6,99	7,09	7,19	7,25	
2.	Usia Harapan Hidup (UHH)	(tahun)	75,20	75,30	75,56	75,82	76,07	76,33	76,59	
3.	Tingkat Kemiskinan	(%)	6,75	6,63	6,42	6,14	5,92	5,57	4,87	
4.	Indeks Kota Layak Huni	Indeks	Data belum pernah dirilis	62,80	65,60	68,40	71,20	74,00	76,80	
5.	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	81,44	82,71	82,86	83,2	83,54	83,88	84,32	
6.	Rasio Gini	Indeks	0,353	0,352	0,349	0,346	0,343	0,34	0,337	
7.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	90,41	90,91	91,00	91,25	91,50	91,75	92,00	
8.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,33	5,37	5,41	5,54	5,58	5,62	5,65	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
9.	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	Angka	98,52	98,80	99,10	99,40	99,70	100	100	
10.	Indeks Risiko Bencana	Indeks	71,51	70,32	68,60	66,97	65,41	63,93	62,50	
11.	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	(%)	11,4	9,69	9,69	9,24	8,74	8,19	7,60	
12.	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	62,23	62,58	62,93	63,28	63,63	63,98	64,33	
13.	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	80,00	81,00	82,00	83,00	84,00	85,00	85,00	
14.	Indeks Demokrasi Indonesia	indeks	84,37	88,68	88,69	88,70	88,71	88,72	88,73	
15.	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	79,03	91,00	92,49	94,19	95,88	97,38	99,02	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
16.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,11	4,97	4,83	4,69	4,55	4,41	4,27	
17.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	89,23	89,40	89,57	89,74	89,91	90,08	90,25	
18.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	64,94	67,02	67,09	67,17	67,25	67,33	67,41	
19.	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Angka	80,06	80,11	80,14	80,17	80,20	80,23	80,26	
20.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,81	14,82	14,84	14,91	15,00	15,06	15,10	
21.	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	10,820	10,825	10,830	10,835	10,840	10,845	10,850	
22.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	97,49	97,49	97,59	97,64	97,69	97,74	97,79	
23.	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persentase	24,69	25,09	25,24	25,39	25,54	25,69	25,84	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
24.	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	5,89	5,90	5,92	5,95	5,98	6,05	6,12	
25.	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	9,91	10,03	10,08	10,13	10,18	10,23	10,28	
26.	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Nilai	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar 2025, data diolah

4.2.2. Indikator Kinerja Daerah

Indikator Kinerja Daerah (IKD) merupakan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari aspek Geografi dan Demografi, aspek Kesejahteraan Masyarakat, aspek Daya Saing Daerah serta aspek Pelayanan Umum (termasuk di dalamnya adalah IKK). Adapun IKD Kota Blitar yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
I	ASPEK DAYA SAING DAERAH									
1	Tingkat Inflasi	%	0,52	1,97	2,12	1,96	1,81	1,71	1,61	
2	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	%	12,38	1	1,5	2	2,5	3	3,5	
3	ICOR (Incremental Capital Output Ratio)	Rasio	3,51	3,54	3,67	3,67	3,66	3,66	3,65	
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PDRB)	%	19,24	19,24	19,25	19,26	19,27	19,29	19,30	
5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	70,44	72,26	74,08	75,9	77,72	79,54	81,36	
6	Indeks Inovasi Daerah	Angka	48,04	50	51	53	56	58	60	
7	Proporsi jumlah usaha mikro	%	8,04	8,84	8,87	8,91	8,95	8,99	9,02	
8	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	%	93,29	93,59	93,89	94,19	94,49	94,79	95,09	
9	Proporsi Penyerapan Tenaga Kerja di Sektor Formal	%	38,04	67,83	67,94	68,04	68,15	68,25	68,36	
10	Rasio kewirausahaan daerah	%	2,90	2,92	3,21	3,49	3,78	4,06	4,35	
11	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	4,05	4,20	4,35	4,50	4,65	4,80	5,00	
12	Persentase pemanfaatan digital pada sektor ekonomi	%	9,88	10,88	11,88	12,88	13,88	14,88	15,88	
13	Angka Partisipasi Masyarakat dalam Proses Politik	%	85,14	85,14	85,14	85,14	85,14	85,16	85,16	
14	Angka Ketergantungan	%	40,72	40,57	40,42	40,27	40,12	39,97	39,32	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN					KET	
				2025	2026	2027	2028	2029		2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
15	Return on Asset (ROA) BUMD	%	-0,045	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	
16	Ekspor Barang dan Jasa	% PDRB	-4,91	-4,81	-4,71	-4,61	-4,51	-4,41	-4,31	
17	Realisasi investasi (Triliun Rupiah)	triliun rupiah	0,432	0,437	0,443	0,452	0,463	0,477	0,494	
18	Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	6,46	6,47	6,47	6,48	6,48	6,49	6,49	
19	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,64	0,70	0,71	0,72	0,73	0,74	0,75	
II	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI									
1	Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) Kumulatif	TON CO2 EQ	650775,46	663790,97	677066,79	690608,12	704420,29	718508,69	732878,87	
2	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	80,80	80,81	81,56	82,31	83,06	83,81	84,56	
3	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	98,01*	28,22	29,3	30,38	31,46	32,54	33,62	
4	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,47	0,41	0,42	0,43	0,44	0,45	0,47	
5	Indeks Kualitas Udara	Indeks	89,79	79,59	79,69	79,79	79,89	79,99	80	
6	Indeks Kualitas Air	Indeks	56,11	69,47	69,57	69,67	69,77	69,87	69,97	
7	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	34,13	39,55	39,56	39,56	39,56	39,56	39,56	
8	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	%	5,42	4,99	4,79	4,59	4,39	4,19	3,99	
9	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,450	0,447	0,422	0,397	0,372	0,347	0,322	
10	Rasio Penduduk	%	99,00	99,47	99,52	99,57	99,62	99,67	99,72	
11	Kepadatan Penduduk	Orang/km ²	4835	4712	4589	4466	4343	4220	4097	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
12	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	14,00	14,12	14,20	14,30	14,50	14,70	15,30	
13	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	%	11,99	12,23	12,46	12,69	12,93	13,16	13,39	
14	Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	90,5	91,0	91,2	91,5	91,7	92,0	92,2	
15	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	8,45	18,66	23,51	28,35	33,2	38,04	42,89	
16	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Indeks	71,90	72,00	72,34	72,77	73,01	73,24	73,54	
III	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1	PDRB Per Kapita	Juta Rupiah	59,33	60,01	60,65	61,33	62,01	63,69	64,37	
2	Indeks Pelestarian Budaya	Indeks	Data belum pernah dirilis	50,29	86,14	86,98	87,83	88,67	89,52	
3	Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat	Indeks	0.699 (Rilis data 2018)	0,699	0,700	0,720	0,725	0,730	0,735	
4	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	Nilai	70,33	72,83	75,33	77,83	80,33	82,83	85,33	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
5	Rata-rata kemampuan Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	85,77	86,87	87,97	89,07	90,17	91,27	92,37	
6	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	Nilai	59,00	61,90	64,80	67,70	70,60	73,50	76,40	
7	Rata-rata kemampuan Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	71,24	72,74	74,24	75,74	77,24	78,74	80,24	
8	Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai	59,67	62,65	65,63	68,61	71,59	74,57	77,55	
9	Indeks Pembangunan Olahraga	Indeks	Data belum pernah dirilis	0,569	0,583	0,609	0,621	0,641	0,660	
10	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	70,57	71,06	71,98	73,42	74,88	76,38	77,91	
11	Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 kelahiran hidup	173,99	173,99	173,99	130,49	130,49	130,49	86,99	
12	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun	tahun	10,85	11,01	11,09	11,18	11,32	11,39	11,41	
13	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,198	0,185	0,175	0,170	0,165	0,159	0,154	
14	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	%	100	100	100	100	100	100	100	
15	Indeks Zakat Nasional (IZN)	Poin	0,40	0,44	0,48	0,52	0,56	0,60	0,64	
16	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis	%	82,61	83,0	83,5	84,0	84,5	85,0	85,5	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
17	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis	%	73,91	74,44	74,97	75,49	76,02	76,55	77,08	
18	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	%	85,49	84,93	85,64	85,71	85,8	85,95	86	
19	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	16,59	11,86	11,92	12,02	12,12	12,43	13,56	
20	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	47,43	48	49	50	51	52	53	
21	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	59,23	59,72	60,21	60,69	61,18	61,67	62,16	
22	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	48,41	48,41	50,74	54,56	56,9	60,72	63,47	
IV	ASPEK PELAYANAN UMUM									
1	Indeks Rasa Aman	Angka	Data belum pernah dirilis	76,60	76,65	76,70	76,75	76,80	76,85	
2	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	Terdefinisi (3,026)	Terdefinisi (3,030)	Terdefinisi (3,034)	Terdefinisi (3,038)	Terdefinisi (3,042)	Terdefinisi (3,046)	Terdefinisi (3,050)	
3	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks	99,15 (Metode perhitungan lama)	77,70	78,57	80,28	82,00	83,71	85,42	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
4	Indeks Pemerintahan Digital Indonesia	Indeks	Data belum pernah dirilis	-	1,70	1,70	1,90	1,90	2,20	
5	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	59,09	63,64	68,18	72,73	77,27	77,27	81,82	
6	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	4,11	4,11	2,00	2,00	2,80	2,80	3,60	
7	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	97,57	97,65	97,70	97,85	98,00	98,15	98,30	
8	Persentase Capaian Aksi HAM	%	94,70	94,80	95,00	95,30	95,60	95,90	96,20	
9	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,52	4,54	4,56	4,58	4,60	4,62	4,64	
V	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)									
	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN									
1	Persentase warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (APS)	%	83,75	86,54	89,33	92,13	94,67	97,22	99,77	
2	Persentase warga negara usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	%	99,96	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	%	41,06	43,87	46,67	49,48	52,29	55,09	57,9	
4	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	Nilai	70,33	72,83	75,33	77,83	80,33	82,83	85,33	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
5	Rata-rata kemampuan Literasi SMP berdasarkan asesmen nasional	Nilai	85,77	86,87	87,97	89,07	90,17	91,27	92,37	
6	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	Nilai	59,00	61,90	64,80	67,70	70,60	73,50	76,40	
7	Rata-rata kemampuan Numerasi SMP berdasarkan asesmen nasional	Nilai	71,24	72,74	74,24	75,74	77,24	78,74	80,24	
8	Proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	82,07	82,48	82,89	83,30	83,71	84,12	84,54	
9	Proporsi guru PAUD formal dengan kualifikasi S 1 / D IV	%	87,07	92,62	93,12	93,62	94,12	94,62	95,12	
10	Iklim Keamanan SD	Nilai	81,95	82,85	83,75	84,65	85,55	86,45	87,35	
11	Iklim Keamanan SMP	Nilai	78,26	79,76	81,26	82,76	84,26	85,76	87,26	
12	Iklim Kebhinekaan SD	Nilai	80,58	81,58	82,58	83,58	84,58	85,58	86,58	
13	Iklim Kebinekaan SMP	Nilai	77,68	78,68	79,68	80,68	81,68	82,68	83,68	
14	Iklim Inklusivitas SD	Nilai	65,29	67,79	70,29	72,79	75,29	77,79	80,29	
15	Iklim Inklusivitas SMP	Nilai	68,21	70,61	73,01	75,41	77,81	80,21	82,61	
	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
1	Angka Kematian Ibu (AKI)	(per 100.000 kelahiran hidup)	173,99	173,99	173,99	130,49	130,49	130,49	86,99	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
2	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
9	Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
10	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
11	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
12	Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
13	Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
14	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	(%)	11,4	9,69	9,69	9,24	8,74	8,19	7,60	
	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
1	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	%	97,84	97,84	98,03	98,23	98,43	98,62	98,82	
2	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas	%	63,56	63,56	64	64,5	65	65,5	66	
3	Persentase Kondisi irigasi	%	63,56	63,56	64,00	64,50	65,00	65,50	66,00	
4	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan	%	99,54	99,54	100	100	100	100	100	

2

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota									
5	Persentase penduduk yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	%	8,45	8,45	9,00	10,50	12,00	13,50	15,00	
6	Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	100	100	100	
7	Tingkat Kemantapan Jalan	%	92,35	92,35	93,35	94,35	95,35	96,35	97,35	
8	Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja kualifikasi operator/teknisi/analisis	%	100	100	100	100	100	100	100	
9	Persentase Pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	%	55,00	56,00	57,00	58,00	59,00	60,00	61,00	
10	Jumlah hari layanan penerbitan KKPR berusaha/non berusaha (sesuai kewenangan) yang terbit/dilayani Pemerintah Daerah	Hari	78,00	78,00	75,00	70,00	65,00	60,00	55,00	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
11	Persentase penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kab/Kota	%	100	100	100	100	100	100	100	
	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
1	Persentase Warga Negara Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani	%	33,52	37,07	40,63	43,48	47,03	50,59	54,15	
4	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	%	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	%	17,69	8,74	10,73	13,60	18,04	23,28	34,85	
	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN									

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
1	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	59,09	63,64	68,18	72,73	77,27	77,27	81,82	
3	Jumlah PPNS pada Satpol PP	Orang	4	5	6	7	8	9	10	
4	Persentase SOP yang tersedia dalam penegakan Perda dan perkada serta Penyelenggaraan Tibumtranmas	%	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Jumlah Sarana prasarana minimal yang digunakan sebagai penunjang dalam penegakan perda dan perkada serta penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase jumlah anggota Satpol PP yang telah mengikuti diklat dasar	%	65,63	60,00	67,50	75,00	82,50	90,00	97,50	
7	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	52	52	53	54	55	56	
8	Persentase warga negara dan aparatur yang memperoleh	%	100	58	58	58	59	59	60	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana									
9	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	
10	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	%	-	100	100	100	100	100	100	
11	Persentase penanganan pra bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	
12	Persentase Penanganan Pasca Bencana	%	-	-	100	100	100	100	100	
13	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	
14	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100	100	100	100	
	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL									
1	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
2	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya di Luar Panti	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar panti sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi	%	13,25	14,5	30	32,5	35	37,5	40	
5	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	%	100	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya di Luar Panti	%	100	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhannya di Luar Panti	%	-	4,88	14,63	14,63	14,63	14,63	14,63	
8	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya di Luar Panti	%	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
9	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	100	100	100	100	
10	Jumlah pemutahiran data fakir miskin dan kelompok rentan yang dilakukan selama satu tahun	%	100	100	100	100	100	100	100	
11	Persentase pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana kabupaten/kota pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
12	Persentase Potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) perorangan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
13	Persentase sarana prasarana bagi korban bencana kabupaten/kota yang disediakan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
14	Persentase sarana prasarana yang disediakan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN					KET	
				2025	2026	2027	2028	2029		2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	untuk pelayanan sosial di luar panti									
	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA									
1	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp/orang	25.038.520, 505	25.278.78 9,00	26.542.72 8,45	27.869.86 4,87	29.263.35 8,12	30.726.52 6,02	32.262.85 2,32	
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi	%	9,85	9,9	9,95	10,01	10,05	10,11	10,15	
3	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar kerja dalam wilayah Kabupaten/kota	%	51,45	51,50	51,55	51,60	51,65	51,70	51,75	
4	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	21,46	21,51	21,56	21,61	21,66	21,71	21,76	
	2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									

2

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	97,49	97,49	97,59	97,64	97,69	97,74	97,79	
2	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,198	0,185	0,175	0,170	0,165	0,159	0,154	
3	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	%	33,80	33,80	33,81	33,82	33,83	33,84	33,85	
4	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100	100	100	100	100	100	100	
	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN									
1	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	-	1	1	1	0,9	0,9	0,9	
2	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	%	12,5	12,7	12,9	13,1	13,3	13,5	13,7	
3	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	88,87	88,9	89,13	89,26	89,39	89,52	89,56	
	2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN									
1	Persentase terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum	%	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	Bersertipikat yang Dilakukan melalui Mediasi									
2	Ditetapkannya Hak Atas Tanah dalam Penguasaan dan Pengelolaan Pemerintah Daerah	%	85,00	88,00	90,00	92,00	94,00	96,00	98,00	
3	Terpetakannya seluruh bidang tanah dalam satu desa atau kelurahan lengkap secara berkualitas	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Luas Peta Nilai Tanah yang telah dimanfaatkan dalam pelayanan BPHTB	%	90,12	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	
	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP									
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	64,94	67,02	67,09	67,17	67,25	67,33	67,41	
2	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	poin	61,7	61,7	61,7	61,7	62	62	62	
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH, dan PUU LH yang diterbitkan	Usaha/Ke giatan	65	66	67	68	69	70	71	
	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan	%	99,63	99,81	99,85	99,89	99,93	99,97	100	
5	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	%	18,6	30	30	30	30	30	30	
6	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	%	99,11	99,17	99,24	99,30	99,37	99,43	99,50	
7	Jumlah data profil kependudukan yang disusun	Dokumen	2	2	2	2	2	2	2	
	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
1	Persentase fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan kelurahan (LKK)	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat	%	100	100	100	100	100	100	100	

NO (01)	INDIKATOR (02)	SATUAN (03)	BASELINE 2024 (04)	TARGET TAHUN						KET (11)
				2025 (05)	2026 (06)	2027 (07)	2028 (08)	2029 (09)	2030 (10)	
	Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat									
	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
1	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Rata-rata Anak per Wanita	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	
2	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	8,11	8,1	8,09	8,07	8,05	8,00	7,95	
3	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	17,30	17,20	17,10	16,75	16,30	15,80	15,10	
4	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	65,89	65,96	66,23	66,54	67,01	68,41	69,56	
5	Angka prevalensi kontrasepsi modern/Modern Contraceptive Rate (mCPR)	%	64,75	64,87	64,95	65	65,2	65,3	65,56	
	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN									
1	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	%	88,31	88,31	88,38	88,42	88,50	89,10	89,40	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
2	Rasio konektivitas kabupaten/kota	%	70,00	70,00	72,73	75,00	83,33	91,67	100	
	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
1	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Perangkat Dearah yang Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD)	%	20	20	23,23	26,67	30,00	33,33	36,67	
3	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100	100	100	100	100	100	
	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH									
1	Persentase Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	%	9,28	9,93	10,39	10,85	11,31	11,77	12,23	
2	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	%	18,80	18,85	19,01	19,25	19,51	19,76	19,81	
3	Pertumbuhan Wirausaha	%	4,20	4,21	4,79	6,86	8,56	9,86	10,77	

Q

NO (01)	INDIKATOR (02)	SATUAN (03)	BASELINE 2024 (04)	TARGET TAHUN						KET (11)
				2025 (05)	2026 (06)	2027 (07)	2028 (08)	2029 (09)	2030 (10)	
	2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL									
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	%	12,38	1	1,5	2	2,5	3	3,5	
2	Realisasi Total terhadap Target Investasi	%	100	100	100	100	100	100	100	
	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA									
1	Persentase Atlet yang berasal dari kab/kota yang masuk Pelatda Provinsi	%	Tidak dilaksanakan Pelatda	0	0,09	0,09	0,18	0,18	0,27	
2	Persentase Pemuda yang pernah mengikuti pelatihan/kursus/training dan memperoleh sertifikat	%	0,25	0,54	0,54	0,58	0,61	0,61	0,61	
	2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK									
1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	2,65	2,65	2,75	2,75	3,0	3,0	3,18	
	2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN									
1	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Angka	60,24	29,75	42,27	51,58	61,87	71,90	74,84	
	2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN									

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	%	Belum ditetapkan Warisan Budaya	-	100	100	100	100	100	
2	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	%	Belum ditetapkan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	-	14,29	28,57	42,86	57,14	71,43	
3	Persentase Jumlah Tenaga Kebudayaan yang memperoleh sertifikasi profesi dibidang kebudayaan	%	Belum tersedia tenaga kebudayaan	-	19,72	19,72	19,72	19,72	19,72	
	2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN									
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	52,4	55	59	63	67	71	75,1	
2	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	47,43	48	49	50	51	52	53	
	2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN									
1	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah	Nilai	91,59	91,7	91,8	91,9	92	92,1	92,2	
	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN									

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1	Persentase produksi perikanan budidaya	%	100,57	100	100	100	100	100	100	
	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA									
1	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	%	-	0,17	0,35	0,52	0,69	0,87	1,04	
2	Pertumbuhan Investasi Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	%	0,5	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	
3	Pertumbuhan Tamu Wisatawan Asing (Hotel Berbintang non Bintang)	%	-	3,75	3,97	4,17	4,33	4,47	4,59	
	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									
1	Peningkatan Produksi Hortikultura	%	0,1	0,14	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	
2	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	%	4,19	3	3	3	3	3	3	
3	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	%	-38,03	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	
4	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	%	100	100	100	100	100	100	100	
5	Luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI	%	-	5	5	10	15	20	25	

NO (01)	INDIKATOR (02)	SATUAN (03)	BASELINE 2024 (04)	TARGET TAHUN						KET (11)
				2025 (05)	2026 (06)	2027 (07)	2028 (08)	2029 (09)	2030 (10)	
	Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan									
	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN									
1	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	48,17	47,88	48,26	48,65	49,23	49,62	50,29	
2	Nilai Total Penjualan Perdagangan Antar Wilayah pada kab/kota	%	Tidak menghitung	100	100	100	100	100	100	
	3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN									
1	Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang memiliki tingkat kepatuhan minimal "Baik" dibandingkan seluruh jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang sudah dilakukan pembinaan	%	0	75	80	85	90	95	100	
2	Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah menindaklanjuti hasil rekomendasi pengawasan dibandingkan dengan jumlah Perusahaan Industri dan	%	0	75	80	85	90	95	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	Kawasan Industri yang telah dilakukan pengawasan									
3	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor	%	11,2	11,3	11,4	11,5	11,6	11,7	12	
4	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	%	0	100	100	100	100	100	100	
5	Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi: 1. Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota 2. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Kabupaten/Kota 3. Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota 4. Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota 5. Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota	%	75	76	77	78	79	80	81	
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH										
1	Tingkat Kematangan UKPBJ	Level	8:9	9:9	9:9	9:9	9:9	9:9	9:9	
2	Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Poin	27,49	27,50	27,60	27,70	27,80	27,90	28,00	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
3	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	Poin	15	15	21	21	21	21	22	
4	Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun N	Nilai	98,19	98,20	98,23	98,25	98,27	98,29	98,31	
4.02 - SEKRETARIAT DPRD										
1	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	%	100	100	100	100	100	100	100	
5.01 - PERENCANAAN										
1	Persentase program prioritas nasional yang didukung program daerah	%	-	46,26	46,26	49,15	52,04	54,93	57,83	
5.02 - KEUANGAN										
1	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	18,04	18,04	22,10	22,20	22,30	22,40	22,50	
2	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	%	94,85	95	95,10	95,20	95,30	95,40	95,50	
3	Persentase Penurunan SILPA	%	-27,76	-5	-10	-10,05	-10,10	-10,15	-10,20	
4	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	%	-5,31	1,00	1,00	1,05	1,10	1,15	1,20	
5	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	%	30,51	30,35	30,20	30,00	29,99	29,98	29,97	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
6	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	%	33,13	36,00	39,90	40,00	40,01	40,02	40,03	
	5.03 - KEPEGAWAIAN									
1	Nilai Indeks Implementasi NSPK manajemen ASN	Indeks	77,49	78	78,50	79	79,50	80	80,50	
	5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									
1	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	%	40	50	50	50	50	50	50	
2	Rasio Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah	Rasio	35	37,5	37,5	38,1	38,64	39,13	39,58	
	6.01 - INSPEKTORAT DAERAH									
1	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	
2	Indeks Manajemen Risiko (IMR)	Indeks	2,966	2,966	2,966	2,967	2,968	2,969	2,970	
3	Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	
4	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	%	93,75	93,75	93,8	93,85	93,9	93,95	94	
5	Opini Laporan Keuangan	%	5	5	5	5	5	5	5	

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar 2025, data diolah

Tabel 4.4

Metadata Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Bitar Tahun 2025 – 2029

NO.	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	ASPEK DAYA SAING DAERAH			
1	Indeks Harmoni Indonesia (Indeks)	Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) merupakan alat ukur yang dikembangkan untuk memahami, memantau, dan meningkatkan harmoni sosial di berbagai wilayah Indonesia dengan mengukur 4 dimensi yaitu ekonomi, sosial, budaya dan keberagaman. Adapun IHaI mencakup 5 tujuan diantaranya: 1. Sosialisasi dan Edukasi 2. Potret dan Pemetaan Skor PPA 3. Menggali Data Usul Saran dan Kritik 4. Mendapatkan Evidence dan 5. Menyajikan Saran dan Rekomendasi.	<p>Cara Menghitung Indeks Harmoni: Perhitungan Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) melibatkan beberapa langkah dan variabel, termasuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penentuan Dimensi: Indeks ini mengukur berbagai dimensi, termasuk ekonomi, sosial, budaya, dan religius. 2. Pengumpulan Data: Data dikumpulkan melalui survei atau kuesioner yang melibatkan berbagai responden di berbagai daerah. 3. Analisis Data: Data yang terkumpul kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi pola dan tren yang relevan dengan harmoni sosial. 4. Perhitungan Skor: Skor dihitung untuk setiap dimensi dan kemudian digabungkan untuk mendapatkan skor keseluruhan Indeks Harmoni. 5. Interpretasi Hasil: Hasil perhitungan kemudian diinterpretasikan untuk memberikan gambaran tentang tingkat harmoni di suatu wilayah. 	<p>PD Penanggung Jawab Utama : Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik</p> <p>Sumber data : Kementerian Dalam Negeri</p>

NO.	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Indeks Kota Layak Huni (Indeks)	<p>Kota layak huni menggambarkan sebuah lingkungan dan suasana kota yang nyaman sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat untuk beraktivitas yang dilihat dari berbagai aspek baik aspek fisik (fasilitas perkotaan, prasarana, tata ruang, dan lainnya) maupun aspek non fisik (hubungan sosial, aktivitas ekonomi, dan lainnya). Sebuah kota layak huni dapat dikatakan sebagai kota ideal berdasarkan indikator-indikator yang diberikan, yakni :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kualitas Infrastruktur • Kualitas Lingkungan Hidup • Kualitas Perumahan dan Permukiman yang Layak • Tingkat Mitigasi Bencana • Ketentraman, Ketertiban Masyarakat 	$IKLH = (\%IKLI + \%IKLH + \%RTAHLTB + \%IRB + \%IKK) / 5$ <p>Dimana :</p> <p>IKLH = Indeks Kota Layak Huni IKLI = Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur IKLH = Indeks Kualitas Lingkungan Hidup IRB = Indeks Risiko Bencana IKK = Indeks Ketenteraman dan Ketertiban RTAHLTB = Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan</p>	<p>PD Penanggung Jawab Utama : Dinas/Badan yang menangani Bidang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Lingkungan Hidup • Perumahan dan Kawasan Permukiman • Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan Masyarakat <p>Sumber data : data sektoral Perangkat Daerah pengampu urusan</p>
3	Tingkat Inflasi (%)	<p>Kecenderungan naiknya harga barang dan jasa yang berlangsung secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu dalam wilayah provinsi tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi.</p>	$\text{Tingkat Inflasi (\%)} = (IHK_t - IHK_{t-1}) / (IHK_{t-1}) \times 100\%$ <p>Perhitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) berdasarkan the Classification of Individual Consumption by Purpose (COICOP) 2018. Pengukuran IHK dilakukan melalui Survei Biaya Hidup (SBH) oleh BPS di 90 Kabupaten/Kota sampel IHK. IHKt-1</p>	<p>PD Penanggung Jawab Utama : Dinas/Badan yang menangani Bidang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perindustrian dan Perdagangan • Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Perumahan dan Kawasan Permukiman • Keuangan • Penanaman Modal • Sosial

NO.	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan • Penelitian dan Pengembangan • Perhubungan • Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian • Koperasi dan UKM • Tenaga Kerja <p>Sumber data : Badan Pusat Statistik</p>
4	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) (Indeks)	Digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan infrastruktur yang disediakan oleh pemerintah atau penyedia layanan publik lainnya. Infrastruktur yang dimaksud di sini meliputi berbagai sektor, seperti transportasi, energi, air bersih, saluran pembuangan, telekomunikasi, perumahan, jalan, dan jembatan.	Indikator untuk mengukur IKLI meliputi ketersediaan sarana prasarana, kualitas transportasi darat, kesesuaian jalan dan jembatan, pemanfaatan transportasi darat dan kontribusi terhadap perekonomian dari transportasi darat	<p>PD Penanggung Jawab Utama : Dinas/Badan yang menangani Bidang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Perhubungan • Perumahan dan Kawasan Permukiman • Komunikasi dan Informatika <p>Sumber data : data sektoral Perangkat Daerah pengampu urusan</p>
5	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota (%)	Persentase Peningkatan Investasi di kab/kota merujuk pada perhitungan proporsi peningkatan nilai investasi yang diterima oleh kab/kota dibandingkan dengan nilai investasi pada periode sebelumnya. Ini mengukur seberapa banyak	<p>Persentase Peningkatan Investasi =</p> $\frac{\text{jumlah Investasi tahun } n - \text{jumlah Investasi tahun } (n - 1)}{\text{jumlah Investasi tahun } n - 1 \text{ di kota}} \times 100\%$	<p>PD Penanggung Jawab Utama : Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal</p> <p>Sumber data : data sektoral</p>

NO.	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		investasi baru atau tambahan yang telah masuk ke Kab/kota dalam periode yang sedang dianalisis. Langkah : Menentukan Periode Waktu: Tentukan periode waktu yang akan dibandingkan, misalnya tahun ke tahun, semester ke semester, atau bulan ke bulan. Mengumpulkan Data Investasi: Kumpulkan data investasi dari dua periode waktu yang akan dibandingkan. Data investasi ini bisa berupa total nilai investasi yang masuk ke kabupaten/kota tersebut dalam periode waktu tersebut. Menghitung Selisih Investasi: Hitung selisih antara nilai investasi pada periode terbaru dengan periode sebelumnya.		Perangkat Daerah pengampu urusan
6	ICOR (Incremental Capital Output Ratio) (Rasio)	ICOR merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (output), dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran). ICOR mampu menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap output. Setiap pertambahan satu unit nilai output (keluaran) akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak "K" unit.	$ICOR = It / ((Yt - Y(t-1))$ Keterangan: It = investasi pada tahun ke-t Yt = output pada tahun ke-t Y(t-1) = output pada tahun t-1	PD Penanggung Jawab Utama : Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Sumber data : data sektoral Perangkat Daerah pengampu urusan
7	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	menunjukkan seberapa besar peran sektor perdagangan dalam menghasilkan nilai tambah ekonomi di suatu wilayah (provinsi, kabupaten, atau kota) dalam periode tertentu.	Kontribusi Perdagangan = $\left(\frac{PDRB \text{ Sektor Perdagangan}}{Total PDRB} \right) \times 100\%$	PD Penanggung Jawab Utama : Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan

NO.	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				Sumber data : Badan Pusat Statistik
8	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	Proporsi PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum adalah persen bagian PDB regional yang dikontribusikan oleh aktivitas terkait pariwisata meliputi: 1. Penyediaan Akomodasi bagi Wisatawan, dan 2. Penyediaan Jasa Makan dan Minum.	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi = $\frac{\text{Nilai Tambah Penyediaan Akomodasi}}{\text{Nilai PDRB Kab/Kota}} \times 100 \%$	PD Penanggung Jawab Utama : Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata Sumber data : Badan Pusat Statistik
9	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	Persentase nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Ini adalah indikator penting untuk mengukur kontribusi sektor industri terhadap perekonomian daerah.	Rasio PDRB Industri Pengolahan = $\frac{\text{Nilai Tambah Industri Pengolahan}}{\text{Nilai PDRB Kab/Kota}} \times 100 \%$	PD Penanggung Jawab Utama : Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian Sumber data : Badan Pusat Statistik
10	Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PDRB)	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. Pengeluaran barang modal untuk keperluan militer tidak dicakup dalam rincian ini tetapi digolongkan sebagai konsumsi pemerintah. PMTB juga merupakan salah satu unsur yang dipakai dalam metode penghitungan PDRB. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) merupakan share PMTB terhadap PRDB Provinsi.	$\text{Pembentukan PMTB (\%PDRB)} = \frac{\text{PMTB}}{\text{PDRB ADHK}} \times 100\%$ Keterangan: Pembentukan Modal Tetap Bruto = Total PMTB berdasarkan PDB Sisi Pengeluaran (Miliar Rupiah) PDRB ADHK = Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)	PD Penanggung Jawab Utama : Dinas/Badan yang menangani Sekretariat Daerah Sumber data : Badan Pusat Statistik

NO.	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	Persentase penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang termasuk dalam angkatan kerja terhadap total penduduk usia kerja. TPAK menunjukkan seberapa besar proporsi penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah.	$TPAK = \left(\frac{\text{Angkatan Kerja}}{\text{Penduduk Usia Kerja}} \right) \times 100\%$	PD Penanggung Jawab Utama : Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja Sumber data : Badan Pusat Statistik
12	Indeks Inovasi Daerah (Angka)	Indeks Inovasi Daerah adalah himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai Indeks Inovasi Daerah yang dikeluarkan oleh Kemendagri	PD Penanggung Jawab Utama : Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian dan Pengembangan Sumber data : Kementerian Dalam Negeri
13	Proporsi Jumlah Usaha Mikro (%)	Perbandingan jumlah usaha mikro dengan jumlah penduduk usia produktif di suatu wilayah.	Jumlah usaha mikro / jumlah penduduk usia produktif dikalikan 100%	PD Penanggung Jawab Utama : Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Sumber data : data sektoral Perangkat Daerah pengampu urusan
14	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	Seberapa banyak penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya. Indikator ini mencakup beberapa aspek yang meliputi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggal pada siang dan malam hari. Indikator ini biasanya digunakan sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan sektoral di bidang keamanan dan	$PPMA = \frac{JPMA}{JP} \times 100\%$ Keterangan: PPMA: Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya JPMA: Jumlah penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya JP: Jumlah penduduk	PD Penanggung Jawab Utama : Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

NO.	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		ketertiban masyarakat serta perencanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.		Sumber data : data sektoral Perangkat Daerah pengampu urusan
15	Proporsi Penyerapan Tenaga Kerja di Sektor Formal (%)	Penempatan tenaga kerja di sektor formal dibagi penempatan tenaga kerja keseluruhan x 100%	$\text{Proporsi Penyerapan Tenaga Kerja di Sektor Formal} = \frac{\text{Penempatan tenaga kerja di sektor formal}}{\text{Penempatan Tenaga Kerja Keseluruhan}} \times 100\%$	PD Penanggung Jawab Utama : Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja Sumber data : data sektoral Perangkat Daerah pengampu urusan
16	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	Rasio kewirausahaan daerah merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar adalah berusaha atas resiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau pekerja tetap yang dibayar. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.	$\text{Rasio Kewirausahaan Daerah} = \left(\frac{\text{Berusaha dibantu buruh tetap Daerah}}{\text{Total angkatan kerja Daerah}} \right) \times 100\%$	PD Penanggung Jawab Utama : Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Sumber data : data sektoral Perangkat Daerah pengampu urusan
17	Indeks Daya Saing Daerah (Angka)	Indeks Daya Saing Daerah merupakan alat untuk mengukur kemampuan suatu daerah dalam memanfaatkan potensi yang dimilikinya untuk meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing, baik di tingkat domestik maupun internasional, demi kesejahteraan yang	Nilai Indeks Daya Saing Daerah yang dikeluarkan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)	PD Penanggung Jawab Utama : Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian dan Pengembangan

NO.	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		berkelanjutan. IDSD juga dapat diartikan sebagai refleksi tingkat produktivitas, kemajuan, persaingan dan kemandirian suatu daerah. Pentingnya IDSD sebagai alat untuk menilai keberhasilan suatu daerah untuk dapat bersaing dengan daerah lain dan mendukung daya saing nasional.		Sumber data : Badan Riset dan Inovasi Nasional
18	Persentase pemanfaatan digital pada sektor ekonomi (%)	Pemanfaatan platform digital dalam transaksi keuangan UMKM	Persentase pemanfaatan digital pada sektor ekonomi $= \frac{\text{Jumlah UMKM yang menggunakan transaksi keuangan digital}}{\text{Jumlah UMKM}}$	PD Penanggung Jawab Utama : Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Sumber data : data sektoral Perangkat Daerah pengampu urusan
19	Angka Partisipasi Masyarakat dalam Proses Politik (%)	Angka partisipasi masyarakat dalam proses politik dihitung dengan tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu dan pilkada. Angka partisipasi masyarakat diambil partisipasi pemilih dalam pemilu sebesar 40% dan partisipasi pemilih dalam pilkada sebesar 60%. Indikator dihitung pada tahun pelaksanaan Pemilu/Pilkada.	Partisipasi Pemilih (%) $= \frac{\text{Jumlah pengguna Hak Pilih}}{\text{Jumlah Daftar Pemilih Tetap}} \times 100\%$ Keterangan : Jumlah Pengguna Hak Pilih = Suara Sah + Suara Tidak Sah	PD Penanggung Jawab Utama : Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Sumber data : Komisi Pemilihan Umum
20	Angka Ketergantungan (%)	Rasio ketergantungan menunjukkan perbandingan antara jumlah penduduk usia non-produktif (usia 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) terhadap jumlah penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) dalam suatu wilayah dan waktu tertentu.	Angka Ketergantungan $= \frac{\text{Penduduk usia tidak produktif}}{\text{Penduduk usia produktif}} \times 100\%$	PD Penanggung Jawab Utama Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO.	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				Sumber data : data sektoral Perangkat Daerah pengampu urusan
21	Return On Asset (ROA) BUMD (%)	Return On Asset (ROA) adalah indikator untuk mengukur kemampuan aset perusahaan dalam menghasilkan laba bersih. Return On Asset (ROA) dihitung dengan membandingkan laba bersih dengan total aset yang dimiliki perusahaan.	$\text{Return On Asset (ROA)} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$	PD Penanggung Jawab Utama : Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah Sumber data : data sektoral Perangkat Daerah pengampu urusan
22	Ekspor Barang dan Jasa (%PDRB)	Ekspor didefinisikan sebagai transaksi alih kepemilikan (ekonomi) atas barang dan jasa antara residen suatu perekonomian dengan nonresiden. Suatu unit institusi didefinisikan sebagai residen dari wilayah ekonomi sebuah negara, jika unit institusi tersebut memiliki pusat kepentingan ekonomi yang utama di dalam wilayah ekonomi dan unit institusi ini terlibat dalam aktivitas atau transaksi ekonomi untuk periode waktu yang lama, umumnya ditetapkan minimal satu tahun. Ekspor barang menggunakan prinsip pencatatan dengan basis akrual di mana untuk barang dicatat saat terjadi alih kepemilikan yang pendekatannya menggunakan waktu pencatatan pada dokumen kepabeanan, sedangkan untuk ekspor jasa dicatat saat jasa tersebut disediakan atau diberikan. Ekspor barang dan jasa (% PDRB) merupakan share ekspor barang dan jasa terhadap PDRB Provinsi.	$\text{Ekspor Barang dan Jasa (\%PDB)} = \frac{\text{Ekspor Barang dan Jasa}}{\text{PDB ADHK}} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ekspor Barang dan Jasa: Total nilai ekspor barang dan jasa berdasarkan perhitungan PDB dari sisi pengeluaran (dalam miliar rupiah). ▪ PDB ADHK: Produk Domestik Bruto atas dasar harga konstan (dalam miliar rupiah). 	PD Penanggung Jawab Utama : Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian / Perdagangan Sumber data : data sektoral Perangkat Daerah pengampu urusan

NO.	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
23	Realisasi investasi (Triliun Rupiah)	Realisasi investasi adalah Nilai investasi yang dicapai, baik dari PMDN maupun PMA, dalam suatu periode tertentu yang datanya berasal dari LKPM yang disampaikan pelaku usaha.	Jumlah realisasi investasi pada tahun berjalan	PD Penanggung Jawab Utama : Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal Sumber data : data sektoral Perangkat Daerah pengampu urusan
24	Indeks Akses Keuangan Daerah (Indeks)	Indeks yang menggambarkan kemudahan, keterjangkauan, dan kedalaman akses keuangan di Kabupaten/Kota, yang dihitung dari data supply dan demand. Indeks terdiri dari 14 indikator yang terbagi dalam 3 dimensi yaitu Penggunaan, Ketersediaan dan Kedalaman. Nilai indeks berkisar antara 0-10. Menggambarkan tingkat akses keuangan di kabupaten dan kota, dimana semakin tinggi nilai indeks menggambarkan tingkat akses keuangan yang semakin baik. Nilai indeks juga menunjukkan adanya tantangan dalam inklusi keuangan, seperti keterbatasan infrastruktur keuangan, rendahnya literasi keuangan, kepemilikan produk/layanan keuangan yang belum terjangkau, atau kedalaman/kualitas penggunaan produk/layanan keuangan. Adapun baseline dan target lengkap dari Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) di Kabupaten/Kota dapat diakses melalui tautan: https://link.bappenas.go.id/IndikatorIKAD_KabKota	$IKAD_m = \left(\sum_{l=1}^{14} a_l Z_{lm} \right) \times 10$ Keterangan: a _l merupakan bobot dari masing-masing indikator yang telah disesuaikan menjadi satu skala	PD Penanggung Jawab Utama : Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan Sumber data : Kementerian PPN/Bappenas

NO.	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
25	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. PDRB adalah Penjumlahan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu regional/negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dan jasa dihitung menggunakan harga yang berlaku pada periode penghitungan. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PDRB suatu daerah. Persentase rasio tersebut menggambarkan sejauh mana penerimaan pajak daerah bagi pemerintah daerah.	$RPDRB_t = \frac{\text{Penerimaan Pajak Daerah}_t}{PDRB_t} \times 100\%$ Keterangan: RPDRB: Kontribusi Rasio Penerimaan Pajak Daerah terhadap PDRB (%) pada tahun t	PD Penanggung Jawab Utama : Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan Sumber data : data sektoral Perangkat Daerah pengampu urusan
II	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI			
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (Indeks)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH adalah nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Kualitas Lahan (untuk level wilayah Kabupaten/Kota).	$IKLH \text{ Kabupaten/Kota} = (0.376 \times IKA) + (0.405 \times IKU) + (0.219 \times IKL)$ IKLH = Indeks Kualitas Lingkungan Hidup IKA = Indeks Kualitas Air IKU = Indeks Kualitas Udara, dan IKL = Indeks Kualitas Lahan	PD Penanggung Jawab Utama : Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup Sumber data : data sektoral Perangkat Daerah pengampu urusan

NO.	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) Kumulatif (TON CO2 EQ)	Persentase penurunan emisi GRK daerah kumulatif adalah perbandingan akumulasi penurunan emisi GRK daerah selama periode base year hingga tahun tertentu terhadap akumulasi emisi GRK baseline daerah untuk periode yang sama.	$\%PEK = \frac{\sum_{i=base\ year} PE_t}{\sum_{i=base\ year} EB_t}$ <p>%PEK = Persentase penurunan emisi GRK daerah kumulatif. $\sum_{i=base\ year} PE_t$ = Akumulasi penurunan emisi GRK total daerah selama periode base year hingga tahun t. $\sum_{i=base\ year} EB_t$ = Akumulasi emisi GRK total baseline daerah selama periode base year hingga tahun t. t = Titik tahun perhitungan. i = Base year tahun 2010.</p>	PD Penanggung Jawab Utama : Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup Sumber data : Kementerian PPN/Bappenas
3	Indeks Risiko Bencana (IRB) (Angka)	IRB dihasilkan dari suatu kajian risiko bencana. Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari suatu potensi bencana yang ada di suatu wilayah. Potensi tersebut dihitung dengan mempertimbangkan tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas wilayah tersebut. Maka dari itu, terdapat 3 (tiga) komponen yang membentuk risiko, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Interaksi antara tiga komponen tersebut digunakan untuk memperoleh potensi risiko bencana suatu wilayah dengan memperhitungkan potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan.	$Risk = Hazard \times \frac{Vulnerability}{Capacity}$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Hazard (Bahaya): Menggambarkan potensi suatu fenomena alam yang dapat menimbulkan kerusakan, baik dilihat dari seberapa sering (frekuensi), seberapa luas area yang terdampak (spasial), maupun seberapa besar kekuatannya (magnitudo). ▪ Vulnerability (Kerentanan): Menunjukkan tingkat kepekaan masyarakat atau sistem terhadap dampak yang ditimbulkan oleh bahaya. Semakin tinggi kerentanan, semakin besar risiko yang ditimbulkan. 	PD Penanggung Jawab Utama : Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sumber data : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur

NO.	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Capacity (Kapasitas): Menggambarkan kemampuan yang dimiliki individu, kelompok, atau masyarakat untuk menghadapi, menanggulangi, dan memulihkan diri dari bencana. Semakin besar kapasitas, semakin kecil tingkat risiko yang terjadi. 	
4	Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (Indeks)	digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan di suatu wilayah. Indeks ini mencerminkan seberapa mampu suatu daerah atau negara memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya secara berkelanjutan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penghitungan Indeks Ketahanan Pangan Standarisasi nilai indikator dengan menggunakan z-score dan distance to scale (0-100) 2. Menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing nilai indikator yang sudah distandarisasi dengan bobot indikator, dengan rumus: $Y(j) = \sum_{i=1}^9 a_i x_{ij}$ <p>Dimana:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ i = Indikator ke-1, 2, 3, ... 7, 8, dan 9 a ▪ a_i = Bobot masing-masing indikator ke-i ▪ j = Kabupaten ke-1, 2, 3, ... 414, 415, dan 416; kota ke-1, 2, 3, ... 96, 97, dan 98 ▪ x_{ij} = Nilai standarisasi masing-masing indikator ke-i pada kabupaten/kota ke-j ▪ Y_j = Indeks Ketahanan Pangan kabupaten/kota ke-j 	<p>PD Penanggung Jawab Utama : Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan</p> <p>Sumber data : Badan Pangan Nasional</p>

NO.	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	Timbulan sampah merupakan sampah yang berasal dari sumber sampah. Jenis sampah yang dimaksud adalah Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT). Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. Kegiatan pengolahan sampah merupakan kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah. Pengolahan sampah yang dimaksud karakteristik sampah, teknologi pengolahan yang ramah lingkungan, keselamatan kerja, dan kondisi sosial masyarakat. Sampah diolah berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Kegiatan pengolahan sampah yang diukur meliputi a. Pengolahan sampah organik seperti pengomposan, dan/atau pengolahan sampah organik lainnya seperti biokonversi maggot BSF, vermi composting, biodigester, dsb. b. Daur ulang materi (material recovery) merupakan upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah	$\%SO = \frac{SO}{TS} \times 100\%$ <p>Keterangan: %SO : Tingkat sampah terolah (%) SO : Sampah terolah (ton/hari) TS : Timbulah sampah (ton/hari)</p>	PD Penanggung Jawab Utama : Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup Sumber data : data sektoral Perangkat Daerah pengampu urusan

NO.	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu. Kegiatan pengolahan sampah berlangsung di fasilitas pengolahan sebagai TPS3R, TPST, Pusat Olah Organik (POO), Bank Sampah, Pusat Daur Ulang (PDU), fasilitas pengolahan lainnya yang dikelola operator pemerintah dan/atau swasta.		
6	Indeks Ketahanan Daerah (Angka)	Alat ukur yang digunakan untuk menilai kemampuan suatu daerah dalam menghadapi dan menanggulangi bencana. IKD mengukur kapasitas daerah dalam tiga aspek utama: kapasitas, kerentanan, dan ancaman bencana. Dengan kata lain, IKD membantu daerah memahami sejauh mana mereka siap menghadapi bencana dan apa saja yang perlu ditingkatkan untuk mengurangi risiko.	Untuk mengetahui kapasitas suatu daerah, maka perlu dilakukan diskusi group (FGD) untuk menjawab 284 pertanyaan perangkat penilaian kapasitas daerah yang melibatkan multipihak; 284 pertanyaan tersebut mewakili 71 indikator ketangguhan daerah yang dikelompokkan kedalam 7 prioritas. Setelah melakukan penilaian mandiri, selanjutnya akan dilakukan verifikasi oleh BNPB yang difasilitasi oleh BPBD Provinsi Jawa Timur.	PD Penanggung Jawab Utama : Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sumber data : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur
7	Indeks Kualitas Udara (Indeks)	Pencemaran udara merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh beberapa wilayah perkotaan di Indonesia. Kecenderungan penurunan kualitas udara di beberapa kota besar di Indonesia. Selain itu kebutuhan akan transportasi dan energi semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk. Indeks kualitas udara pada umumnya dihitung berdasarkan lima pencemar utama yaitu oksidan/ozon di permukaan, bahan partikel, karbon monoksida (CO), sulfur dioksida (SO) dan nitrogen dioksida (NO). Parameter NOx mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan	$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} \times (I_{eu} - 0,1) \right)$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>IKU</i>: Indeks Kualitas Udara ▪ <i>I_{eu}</i>: 40% Indeks SO₂ + 40% Indeks NO₂ + 20% Indeks PM_{2.5} 	PD Penanggung Jawab Utama : Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup Sumber data : data sektoral Perangkat Daerah pengampu urusan

NO.	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		bakar bensin, dan SO _x mewakili emisi dari industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan bakar yang mengandung sulfur lainnya. Ukuran yang digunakan untuk menilai kualitas udara berdasarkan pengukuran parameter pencemar udara yang digunakan dalam perhitungan Indeks Kualitas Udara yaitu NO ₂ , SO ₂ dan PM _{2,5} .		
8	Indeks Kualitas Air (Indeks)	Indeks Kualitas Air (IKA) dihitung dari hasil konversi indeks pencemaran. Pencemaran air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu air yang telah ditetapkan. Perhitungan IKA dilakukan berdasarkan Penentuan Status Mutu Air. Perhitungan IKA memiliki konsep bahwa semakin tinggi indeks pencemar maka semakin buruk kualitas airnya. Perhitungan ini didasarkan pada nilai hasil sampel terhadap baku mutu tiap parameter. Terdapat 7 (tujuh) parameter yang digunakan dalam menghitung indeks kualitas air (IKA), yang dianggap mewakili kondisi riil kualitas air permukaan yaitu: TSS (total suspended solid atau zat padat tersuspensi); DO (dissolved oxygen atau oksigen terlarut); BOD (biochemical oxygen demand atau kebutuhan oksigen biokimiawi); COD (chemical oxygen demand atau kebutuhan oksigen kimiawi) T-P (total fosfat); fecal coli dan total coli. Nilai IKA dipengaruhi oleh berbagai	$IKA = \frac{\sum_{i=1}^n (W_i \times P_i)}{\sum_{i=1}^n W_i}$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ IKA = Indeks Kualitas Air ▪ W_i = Bobot dari parameter kualitas air ke-i ▪ P_i = Nilai indeks dari parameter kualitas air ke-i ▪ n = Jumlah total parameter yang diukur 	PD Penanggung Jawab Utama : Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup Sumber data : data sektoral Perangkat Daerah pengampu urusan

NO.	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		variable antara lain: (a) penurunan beban pencemaran serta upaya pemulihan (restorasi) pada beberapa sumber (b) ketersediaan dan fluktuasi debit air yang dipengaruhi oleh perubahan fungsi lahan serta faktor cuaca lokal, iklim regional dan (c) penggunaan dan (d) serta tingkat erosi dan sedimentasi.		
9	Indeks Kualitas Lahan (Indeks)	Indeks Kualitas Lahan (IKL) adalah nilai yang menggambarkan kualitas lahan yang terdiri dari nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG). IKL menggambarkan kualitas tutupan lahan yang dipengaruhi oleh dampak kebakaran dan kanal pada ekosistem lahan gambut sebagai faktor koreksi kualitas tutupan lahan. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) merupakan nilai yang menggambarkan kualitas tutupan lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan. Kualitas tutupan lahan yang dihitung adalah tutupan yang mencerminkan kondisi vegetasi yang menutupi suatu bidang lahan dalam wilayah provinsi. Kualitas tutupan lahan yang baik ditunjukkan dengan proporsi penutupan lahan yang dikategorikan sebagai hutan menutupi area (coverage area) mendekati 84,3% dari luas wilayah administrasinya atau dengan rentang nilai indeks 90 - 100. Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG) merupakan nilai komposit dari beberapa parameter kualitas ekosistem gambut dalam suatu wilayah pada	$IKL = IKTL + \text{Faktor koreksi gambut}$	PD Penanggung Jawab Utama : Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup Sumber data : data sektoral Perangkat Daerah pengampu urusan

NO.	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		waktu tertentu. Parameter utama yang digunakan dalam metodologi Indeks Kualitas Ekosistem Gambut yaitu areal terdampak Kanal, indikasi areal terbakar, perubahan Tutupan Lahan, tinggi muka air tanah (TMAT), dan tereksposnya sedimen pirit dan/atau kwarsa dengan proporsi bobotnya pada fungsi lindung maupun fungsi budi daya.		
10	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	Ketidakcukupan konsumsi pangan merupakan kondisi seseorang secara reguler mengkonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup sehat, aktif, dan produktif. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment/PoU) adalah proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Atau, probabilitas individu yang dipilih secara acak dari suatu populasi referensi, yang secara reguler mengkonsumsi makanan yang kurang dari kebutuhan energinya.	$PoU = \int_{x < MDER} f(x) dx$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>PoU</i> : Proporsi populasi yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan di bawah kebutuhan minimum energi (MDER) yang diukur dengan kkal. ▪ <i>MDER</i> : Kebutuhan Minimum Energi yang diukur dengan kkal (Minimum Dietary Energy Requirement). ▪ <i>f(x)</i> : Fungsi kepadatan probabilitas tingkat konsumsi kalori umumnya sehari-hari untuk rata-rata per kapita individu dalam suatu populasi tertentu. 	<p>PD Penanggung Jawab Utama : Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan</p> <p>Sumber data : Badan Pusat Statistik</p>
11	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	Indikator demografi yang menggambarkan persentase perubahan jumlah penduduk dalam suatu wilayah dari waktu ke waktu, biasanya per tahun, sebagai akibat dari kelahiran, kematian, dan migrasi. Indikator ini menjadi dasar penting dalam perencanaan pembangunan, seperti	$r = \left(\frac{\ln(P_t) - \ln(P_0)}{t} \right) \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>r</i> = laju pertumbuhan penduduk per tahun (%) 	<p>PD Penanggung Jawab Utama : Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</p>

NO.	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		penyediaan layanan pendidikan, kesehatan, perumahan, dan infrastruktur.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ P_0 = jumlah penduduk pada awal tahun ▪ P_t = jumlah penduduk pada akhir tahun (setelah t tahun) ▪ t = selang waktu dalam tahun ▪ ln = logaritma natural 	Sumber data : Badan Pusat Statistik
12	Rasio Penduduk (%)	Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Rasio jenis kelamin menghitung jumlah laki-laki untuk setiap 100 perempuan dalam suatu populasi. Misalnya, rasio 105 berarti ada 105 laki-laki untuk setiap 100 perempuan.	$\text{Sex Ratio} = \left(\frac{\text{Jumlah penduduk laki-laki}}{\text{Jumlah penduduk perempuan}} \right) \times 100$	PD Penanggung Jawab Utama : Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sumber data : Badan Pusat Statistik
13	Kepadatan Penduduk (Orang/km ²)	Indikator Kepadatan Penduduk adalah ukuran yang menunjukkan jumlah penduduk yang tinggal di suatu wilayah tertentu dalam satu satuan luas (biasanya per kilometer persegi).	$\text{Kepadatan Penduduk} = \frac{\text{Jumlah penduduk}}{\text{Luas Wilayah km}^2}$	PD Penanggung Jawab Utama : Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sumber data : Badan Pusat Statistik
14	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan adalah rumah tangga di perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum melalui jaringan perpipaan yang memenuhi kriteria sebagai berikut 1) Rumah tangga menggunakan sumber air minum jaringan 2) Lokasi sumber air minum berada di dalam atau di halaman rumah (on premises); 3) Tersedia setiap saat dan 4) Memenuhi syarat kualitas air minum	$\text{PASMMP} = \frac{\text{JRTASMP}}{\text{JRT}} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ PASMMP : Persentase rumah tangga perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum perpipaan. ▪ JRTASMP : Jumlah rumah tangga perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum perpipaan. 	PD Penanggung Jawab Utama : Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sumber data : data sektoral Perangkat Daerah pengampu urusan

NO.	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>JRT</i> : Jumlah rumah tangga seluruhnya di perkotaan. 	
15	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum (%)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, baik dari segi kualitas, kuantitas, keterjangkauan, dan kontinuitas.	$\text{Akses Air Minum (\%)} = \left(\frac{\text{Jumlah rumah tangga dengan akses air minum layak}}{\text{Jumlah total rumah tangga}} \right)$	PD Penanggung Jawab Utama : Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sumber data : data sektoral Perangkat Daerah pengampu urusan
16	Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (%)	Pengumpulan Sampah Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPS3R. Sampah yang dikumpulkan berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah adalah rumah tangga yang: Menerima layanan pengumpulan sampah dari pintu ke pintu dengan frekuensi tetap dan rutin (minimal 2 kali dalam seminggu), serta sampah dikumpulkan minimal dalam tiga atau lebih yang terpisah misal: fraksi basah (organik), daur ulang, dan atau Memiliki tempat pengumpulan sampah bersama (Komunal) yang disepakati di lingkungan dalam jarak 200m, dilayani dengan frekuensi tetap dan rutin tanpa membuang sampah sembarangan dan sampah	Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah = $\left(\frac{\text{Jumlah rumah tangga dengan layanan pengumpulan sampah}}{\text{Jumlah total rumah tangga}} \right) \times 100\%$	PD Penanggung Jawab Utama : Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup Sumber data : data sektoral Perangkat Daerah pengampu urusan

NO.	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		dikumpulkan dalam tiga fraksi atau lebih yang terpisah, misalnya fraksi basah (organik), daur ulang, dan residu.		
17	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	Akses Aman adalah apabila rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi sendiri, dengan bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa, dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), atau tersambung ke sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T).	$PSA = \frac{JRTSPAL + JRTIPLT}{JRTS} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ PSA = Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses sanitasi aman ▪ JRTSPAL = Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap SPALD-T ▪ JRTIPLT = Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap tangka septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) ▪ JRTS = Jumlah rumah tangga seluruhnya 	<p>PD Penanggung Jawab Utama : Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p> <p>Sumber data : data sektoral Perangkat Daerah pengampu urusan</p>
18	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) (Indeks)	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan adalah indeks komposit yang merepresentasikan dimensi pembangunan berwawasan kependudukan sebagai alat ukur dalam memahami kondisi pembangunan berwawasan kependudukan di Indonesia.	$IPBK = \sqrt[5]{D_1 + D_2 + D_3 + D_4 + D_5}$ <p>Atau rumus menggunakan Excel</p> $IPBK = (D_1 + D_2 + D_3 + D_4 + D_5)^{(1/5)}$	<p>PD Penanggung Jawab Utama : Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</p> <p>Sumber data : Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga serta Badan Pusat Statistik</p>
III	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT			

NO.	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	Suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Indikator ini dapat pula dipakai untuk menentukan arah kebijakan pembangunan yang akan datang.	Laju Pertumbuhan Ekonomi = $\left(\frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \right) \times 100\%$ Keterangan: PDRB _t = Produk Domestik Regional Bruto tahun berjalan PDRB _{t-1} = Produk Domestik Regional Bruto tahun sebelumnya	PD Penanggung Jawab Utama : Dinas/Badan yang menangani Bidang <ul style="list-style-type: none"> • Perindustrian dan Perdagangan • Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan • Kebudayaan dan Pariwisata • Koperasi dan Usaha Kecil Menengah • Tenaga Kerja • Penanaman Modal • Sosial • Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Perhubungan • Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian • Perumahan dan Kawasan Permukiman • Perencanaan • Penelitian dan Pengembangan Sumber data : Badan Pusat Statistik
2	Tingkat Kemiskinan (%)	Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika	$P_a = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^a$ Dimana:	PD Penanggung Jawab Utama : Dinas/Badan yang menangani Bidang <ul style="list-style-type: none"> • Sosial

NO.	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Garis Kemiskinan (GK) merupakan akumulasi dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).	<ul style="list-style-type: none"> ▪ $a = 0$ ▪ $z =$ garis kemiskinan. ▪ $y_i =$ Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ($i = 1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$. ▪ $q =$ Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. ▪ $n =$ jumlah penduduk. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan <p>PD Pendukung : semua PD di Kota Blitar</p> <p>Sumber data : Badan Pusat Statistik</p>
3	Rasio Gini (Indeks)	Rasio gini merupakan salah satu teknik statistik untuk mengukur ketimpangan pendapatan. Keistimewaan dari alat ukur ini adalah dapat ditampilkan secara geometris, sehingga mempunyai dua aspek sekaligus yaitu aspek visual melalui kurva yang disebut kurva Lorenz dan aspek matematis.	$\text{Rasio Gini} = 1 - \sum_{i=1}^n (p_i - p_{i-1})(Y_i + Y_{i-1})$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ $p_i =$ Proporsi kumulatif dari penerima pendapatan ke-i ▪ $Y_i =$ Proporsi kumulatif pengeluaran per kapita ke-i ▪ $n =$ jumlah observasi 	<p>PD Penanggung Jawab Utama : Dinas/Badan yang menangani Bidang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan • Perindustrian dan Perdagangan • Koperasi dan UKM • Tenaga Kerja • Sosial • Penanaman Modal <p>Sumber data : Badan Pusat Statistik</p>
4	Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)	Indeks komposit yang mengukur pembangunan manusia dari tiga aspek dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur tingkat pembangunan manusia di suatu wilayah. HDI ini merupakan indeks yang dikembangkan oleh	<p>PD Penanggung Jawab Utama : Dinas/Badan yang menangani Bidang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kesehatan • Pendidikan

NO.	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			<p>United Nations Development Programme (UNDP) dan menggabungkan tiga dimensi utama:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesehatan: Diukur melalui harapan hidup saat lahir. 2. Pendidikan: Diukur melalui dua indikator, yaitu rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. 3. Standar Hidup Layak: Diukur melalui Gross National Income (GNI) per kapita dalam PPP (Purchasing Power Parity). <p>Rumus dasar untuk menghitung IPM adalah sebagai berikut:</p> $IPM = \sqrt[3]{IK \times IP \times ISHL}$ <p>IK = Indeks Kesehatan IP = Indeks Pendidikan ISHL = Indeks Standar Hidup Layak</p> <p>Masing-masing indeks dihitung sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Kesehatan (Indeks Harapan Hidup): $\text{Indeks Kesehatan} = \frac{\text{Harapan Hidup} - 20}{85 - 20}$ <p>Di mana, Harapan Hidup adalah angka harapan hidup saat lahir</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Indeks Pendidikan $\text{Indeks Pendidikan} = \left(\frac{RLS}{15} \right) + \left(\frac{HLS}{18} \right) / 2$	<ul style="list-style-type: none"> • Perindustrian dan Perdagangan • Koperasi, UKM • Tenaga Kerja • Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan <p>Perangkat Daerah Pendukung : Dinas/Badan yang menangani Bidang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan • Penelitian dan Pengembangan • Keuangan • Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Perumahan dan Kawasan Permukiman <p>Sumber data : Badan Pusat Statistik</p>

NO.	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata jumlah tahun pendidikan yang dijalani oleh orang yang berusia 25 tahun ke atas. ▪ Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah jumlah tahun pendidikan yang diharapkan dapat ditempuh oleh anak-anak pada usia memasuki sekolah. <p>3. Indeks Standar Hidup Layak</p> $ISHL = \frac{\log(GNI\text{perkapita}) - \log(100)}{\log(75.000) - \log(100)}$ <p>GNI per kapita adalah Gross National Income per kapita dalam PPP (Purchasing Power Parity).</p> <p>Setelah ketiga indeks dihitung, nilai IPM diperoleh dengan mengambil rata-rata geometri dari ketiganya, seperti pada rumus di atas. IPM dinyatakan dalam skala 0 hingga 1, di mana semakin mendekati 1, semakin tinggi tingkat pembangunan manusia di wilayah tersebut.</p>	
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha /	$TPT = PP / (PAK) \times 100\%$ <p>Keterangan: TPT = Tingkat pengangguran terbuka (%) PP = Jumlah pengangguran (orang) PAK = Jumlah angkatan kerja (orang)</p>	PD Penanggung Jawab Utama : Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja Sumber data : Badan Pusat Statistik

NO.	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, serta (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.		
6	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Indeks)	Alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat kesetaraan gender dalam pembangunan suatu negara. IPG menghitung perbedaan pencapaian antara laki-laki dan perempuan dalam tiga dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu: 1. Kesehatan: Diukur dengan angka harapan hidup saat lahir. 2. Pendidikan: Diukur dengan angka melek huruf dewasa dan tingkat partisipasi pendidikan dasar hingga tinggi. 3. Pendapatan: Diukur dengan Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita yang disesuaikan.	$IPG = IPM \text{ Perempuan} / IPM \text{ Laki - Laki}$	PD Penanggung Jawab Utama : Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sumber data : Badan Pusat Statistik
7	Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))	Rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu.	Idealnya dihitung berdasarkan Angka Kematian menurut umur (Age Specific Death Rate / ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Namun karena catatan registrasi tidak tersedia dengan baik, maka dihitung dengan cara tidak langsung dengan paket program <i>Micro Computer Program for Demographic Analysis (MCPDA)</i>	PD Penanggung Jawab Utama Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan Sumber data : Badan Pusat Statistik
8	PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)	PDRB per kapita menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per		PD Penanggung Jawab Utama :

NO.	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		kapita dihitung dengan cara membagi total PDRB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.	$PDRB \text{ per kapita} = (PDRB \text{ ADHB}) / \text{populasi}$ <p>Keterangan: PDRB_{ADHB} = PDRB Atas Dasar Harga Berlaku populasi = jumlah penduduk regional</p>	Dinas/Badan yang menangani Bidang <ul style="list-style-type: none"> • Perindustrian dan Perdagangan • Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan • Pariwisata • Penanaman Modal • Sosial • Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Sosial • Perhubungan • Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian • Perumahan dan Kawasan Permukiman • Perencanaan • Penelitian dan Pengembangan Sumber data : Badan Pusat Statistik
9	Indeks Pelestarian Budaya (Indeks)	Indeks Pelestarian Kebudayaan (IPK) Kota Blitar adalah ukuran terstruktur untuk menilai capaian pelestarian budaya lokal melalui tiga dimensi utama, yaitu Pelindungan Objek Budaya, Partisipasi Masyarakat dan Pelaku Budaya, serta Regenerasi dan Keberlanjutan Budaya.	Indeks Pelestarian Kebudayaan = Nilai Dimensi Pelindungan Objek Budaya ditambah Nilai Dimensi Partisipasi Masyarakat dan Pelaku Budaya, ditambah nilai Dimensi Regenerasi dan Keberlanjutan Budaya	PD Penanggung Jawab Utama Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan

NO.	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				Sumber data : data sektoral Perangkat Daerah pengampu urusan
10	Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (Indeks)	IPKM adalah gambaran tentang keberhasilan pembangunan kesehatan masyarakat secara keseluruhan yang terdiri dari beberapa sub - indeks yang mencakup berbagai aspek kesehatan, seperti kesehatan balita, kesehatan reproduksi, pelayanan kesehatan, perilaku kesehatan, penyakit tidak menular, penyakit menular dan kesehatan lingkungan. Terdiri dari 30 (tiga puluh) data penyusun yang diperoleh melalui data bidang terkait.	Penentuan nilai bobot, nilai standar dan nilai indeks dari indikator penyusun	PD Penanggung Jawab Utama Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan Sumber data : data sektoral Perangkat Daerah pengampu urusan
11	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita ((%))	Stunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan standar WHO tahun 2005. Data tinggi badan pada menjadi analisis untuk status gizi dan tinggi badan setiap anak balita dikonversikan ke dalam nilai terstandar (Z-score) menggunakan baku antropometri anak balita WHO 2005. Klasifikasi berdasarkan indikator TB/U sesuai standar dari WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1995/MENKES/SK/XII/2010. a. Sangat pendek: Zscore < -3,0 b. Pendek: Zscore ≥ -3,0 s/d Zscore < -2,0	Cara perhitungan (1) (1) Jumlah anak balita pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada waktu yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%). $PAB(5)P \text{ stunting} = (JAB(5)P \text{ stunting}) / JAB(5) \times 100\%$ Keterangan PAB(5) P stunting : Prevalensi anak balita yang menderita pendek (stunting) JAB(5)P stunting : Jumlah anak balita pendek (stunting) pada waktu tertentu JAB(5) : Jumlah anak balita pada waktu yang sama Cara perhitungan (2) (2) Jumlah anak balita sangat pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita	PD Penanggung Jawab Utama Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan Sumber data : Kementerian Kesehatan dan Perangkat Daerah pengampu urusan

NO.	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			<p>pada periode yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%).</p> $\text{PAB(5)SP stunting} = (\text{JAB(5)SP stunting}) / \text{JAB(5)} \times 100\%$ <p>Keterangan PAB(5) SP stunting : Prevalensi anak balita yang 79 menderita sangat pendek (stunting) JAB(5) SP stunting : Jumlah anak balita sangat pendek (stunting) pada waktu tertentu JAB(5) : Jumlah anak balita pada waktu yang sama</p> <p>Cara perhitungan (3) Prevalensi stunting = PAB(5) P + PAB(5) SP</p>	
12	Indeks Kesejahteraan Sosial (Indeks)	Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS) digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan sosial masyarakat berdasarkan berbagai aspek kehidupan sosial. IKS dibangun dari aspek-aspek kesejahteraan sosial yang mencakup dimensi-dimensi utama seperti: Ketahanan Keluarga, Ketersediaan dan Akses terhadap Pelayanan Sosial, Partisipasi Sosial, Pendidikan, Kesehatan, Perumahan Layak, Perlindungan Sosial, Pekerjaan dan Pendapatan, dan Lingkungan Sosial. Setiap dimensi diukur menggunakan beberapa indikator, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, dan dinilai dengan menggunakan skala tertentu.	IKS = 27% dimensi kebutuhan dasar + 31% dimensi peranan sosial + 42% dimensi keberdayaan ekonomi	PD Penanggung Jawab Utama Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial Sumber data : Kementerian Sosial

NO.	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
13	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Lamanya waktu bersekolah yang diharapkan dapat dirasakan oleh anak-anak usia tertentu pada jenjang pendidikan usia tersebut di masa mendatang.	$\text{Harapan Lama Sekolah} = FK \sum_{i=7}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ <p>Keterangan: FK = Faktor koreksi pesantren E_i^t = Jumlah penduduk usia i yang berkolah pada tahun t P_i^t = Jumlah penduduk usia i pada tahun t i = Usia (7, 8, ..., n)</p>	PD Penanggung Jawab Utama : Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Sumber data : Badan Pusat Statistik
14	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	Ukuran yang menunjukkan berapa tahun rata-rata penduduk suatu wilayah telah menempuh pendidikan formal. RLS biasanya dihitung untuk penduduk berusia 25 tahun ke atas, karena diasumsikan bahwa pada usia tersebut, pendidikan formal seseorang telah selesai. RLS digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat dan kualitas pendidikan dalam suatu wilayah.	$\text{Rata-rata Lama Sekolah (RLS)} = \frac{\sum (\text{Jumlah tahun sekolah tiap individu usia 25+})}{\sum (\text{Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas})}$	PD Penanggung Jawab Utama : Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Sumber data : Badan Pusat Statistik
15	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional (Nilai)	Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai rerata peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi)	PD Penanggung Jawab Utama : Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Sumber data : data sektoral Perangkat Daerah pengampu urusan
16	Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	Definisi Konseptual Indikator: Kemampuan peserta didik dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan	Nilai rerata peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi)	PD Penanggung Jawab Utama : Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan

NO.	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Sumber Data : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Badan Pusat Statistik) Tersedia dalam Rapor Pendidikan Daerah.		Sumber data : data sektoral Perangkat Daerah pengampu urusan
17	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional (Nilai)	Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai rerata peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berfikir menggunakan konsep, prosedur, fakta dan alat matematika untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan	PD Penanggung Jawab Utama : Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Sumber data : data sektoral Perangkat Daerah pengampu urusan
18	Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	Definisi Konseptual Indikator: Kemampuan peserta didik dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Sumber Data : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Badan Pusat Statistik) Tersedia dalam Rapor Pendidikan Daerah.	Nilai rerata peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berfikir menggunakan konsep, prosedur, fakta dan alat matematika untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan	PD Penanggung Jawab Utama : Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Sumber data : data sektoral Perangkat Daerah pengampu urusan
19	Indeks Pembangunan Pemuda (Nilai)	Indeks komposit yang mengukur capaian pembangunan pemuda berdasarkan 16 indikator yang dikelompokkan dalam lima domain: Pendidikan dan Pelatihan, Kesehatan, Ketenagakerjaan Layak, Partisipasi dan	Perhitungan nilai IPP berdasarkan rata rata nilai seluruh indeks domain sehingga menghasilkan nilai IPP antara 0-100, atau sesuai dengan persamaan berikut :	PD Penanggung Jawab Utama : Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan dan Olah Raga Sumber data : data sektoral

NO.	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN	KETERANGAN																		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)																		
		Kepemimpinan, serta Inklusivitas dan Kesetaraan Gender.	$IPP = \frac{Indeks\ Domain_1 + Indeks\ Domain_2 + \dots + Indeks\ Domain_5}{5}$	Perangkat Daerah pengampu urusan																		
20	Indeks Pembangunan Olahraga (Persentase)	Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) adalah indeks gabungan yang mencerminkan keberhasilan Pembangunan keolahragaan yang meliputi 9 (sembilan) dimensi.	$Indeks\ Dimensi = \frac{nilai\ aktual - nilai\ minimum}{nilai\ maksimum - nilai\ minimum}$ $Indeks\ SDI = \frac{Indeks\ (D1 + D2 + D3 + \dots + D9)}{9}$ <p>Keterangan : SDI = Sport Development Indeks D1 = Dimensi SDI pertama, D2 = Dimensi SDI kedua, dst</p>	PD Penanggung Jawab Utama : Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan dan Olah Raga Sumber data : data sektoral Perangkat Daerah pengampu urusan																		
21	Indeks Perlindungan Anak (IPA) (Indeks)	Indeks Perlindungan Anak adalah ukuran yang digunakan untuk menilai upaya yang dilakukan dalam melindungi anak dari kekerasan, penelantaran, eksploitasi dan bentuk lain penyalahgunaan.	Metode Perhitungan Bobot masing-masing klaster: <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Klaster</th> <th>Bobot</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Hak Sipil dan Kebebasan</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif</td> <td>22%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan</td> <td>18%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya</td> <td>18%</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Perlindungan Khusus</td> <td>22%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Persamaan yang digunakan untuk memperoleh indeks klister IPA Adalah sebagai berikut:</p> $Indeks\ K_j = \frac{\sum_{i=1}^n SX_{ji}}{n_j} \times 100$	No	Klaster	Bobot	1	Hak Sipil dan Kebebasan	20%	2	Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	22%	3	Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	18%	4	Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	18%	5	Perlindungan Khusus	22%	PD Penanggung Jawab Utama : Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sumber data : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
No	Klaster	Bobot																				
1	Hak Sipil dan Kebebasan	20%																				
2	Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	22%																				
3	Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	18%																				
4	Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	18%																				
5	Perlindungan Khusus	22%																				

NO.	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			<p>di mana</p> <p>$Indeks K_j$ = nilai indeks klaster ke-j</p> <p>SX_{ji} = nilai indikator ke-I pada klaster ke-j yang telah dinormalisasi</p> <p>n_j = banyaknya indikator pada klaster ke-j</p> <p>Kemudian nilai IPA diperoleh dengan mengalikan bobot klaster dengan indeks klaster. Persamaan yang digunakan untuk penghitungan IPA sebagai berikut:</p> $IPA = \sum_{j=1}^n Indeks K_j \times W_j$ <p>di mana:</p> <p>$Indeks K_j$ = nilai indeks klaster ke-j</p> <p>W_j = bobot pada klaster ke-j</p>	
22	Angka kematian ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.	$AKI = \frac{Jumlah\ Kematian\ Ibu}{Jumlah\ Kelahiran\ Hidup} \times 100.000$	<p>PD Penanggung Jawab Utama : Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan</p> <p>Sumber data : data sektoral Perangkat Daerah pengampu urusan</p>

NO.	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
23	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun (tahun)	<p>Rerata waktu (dalam satuan tahun) yang ditempuh oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menyelesaikan semua jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (RLS 15+) dihitung dengan cara mengkonversikan ijazah terakhir dan tingkat pendidikan yang sedang dijalani ke dalam satuan tahun dengan tidak memperhitungkan adanya kejadian pengulangan kelas. Ijazah yang dimiliki akan dikonversi ke dalam lama waktu bersekolah (satuan tahun) berdasarkan ketentuan berikut: a. Tidak punya ijazah = 0 b. SD = 6 c. SMP = 9 d. SMA = 12 e. D1/D2 = 14 f. D3 = 15 g. D4 = 16 h. S1 = 17 i. S2 = 19 j. S3 = 22 tahun. Konversi ijazah ke menjadi lamanya waktu bersekolah memenuhi perhitungan berikut ini: a. Tidak pernah sekolah = 0 2. Masih sekolah di SD sampai dengan S1= konversi ijazah terakhir + kelas terakhir 3. Masih sekolah di S2/S3 = konversi ijazah terakhir + 4. Tidak bersekolah lagi dan tamat kelas terakhir = konversi ijazah 5. Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir.</p>	$\text{Rata - rata Lama Sekolah } 15+ = \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} x_i$ <p>Keterangan: P_{15+} = Jumlah Penduduk yang berusia 15 tahun ke atas x_i = Lama sekolah penduduk ke-i</p>	<p>PD Penanggung Jawab Utama : Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan</p> <p>Sumber data : data sektoral Perangkat Daerah pengampu urusan</p>
24	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	<p>Indeks Ketimpangan Gender (IKG) terdiri dari 3 (tiga) dimensi dan 5 (lima) indikator, yaitu dimensi kesehatan reproduksi perempuan yang dibentuk dari indikator proporsi perempuan yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF) dan proporsi perempuan yang saat</p>	<p>Langkah-langkah metode penghitungan IKG berikut formula yang digunakan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghitung Indeks Perempuan dan Indeks Laki-laki 	<p>PD Penanggung Jawab Utama : Dinas/Badan yang menangani Bidang Perlindungan dan Anak Pemberdayaan Perempuan</p>

NO.	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		<p>melahirkan hidup pertama berumur kurang dari 20 tahun (MHPK20), dimensi pemberdayaan yang dibentuk dari indikator persentase penduduk usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA/ sederajat ke atas dan persentase anggota legislatif, serta dimensi pasar tenaga kerja yang diwakili dengan indikator tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) laki-laki dan TPAK perempuan.</p>	$G_p = \sqrt[3]{\left(\frac{0,005}{MTF} + \frac{0,01}{MHPK20}\right)^{\frac{1}{2}} \times (PR_p \times SE_p)^{\frac{1}{2}} \times TPAK_p}$ $G_L = \sqrt[3]{1 \times (PR_L \times SE_L)^{\frac{1}{2}} \times TPAK_L}$ <p>2. Menghitung agregasi indeks perempuan dan indeks laki-laki dengan rata-rata harmonis</p> $HARM (G_p, G_L) = \left[\frac{(G_p)^{-1} + (G_L)^{-1}}{2} \right]^{-1}$ <p>3. Menghitung indeks masing-masing dimensi</p> $IKR = \frac{\left(\sqrt{\frac{0,005}{MTF} \times \frac{0,01}{MHPK20}} + 1 \right)}{2}$ $IPK = \frac{TPAK_p + TPAK_L}{2}$ $IP = \frac{(\sqrt{PR_p + SE_p} + \sqrt{PR_L + SE_L})}{2}$ <p>4. Menghitung agregasi indeks dimensi dengan rata-rata geometrik</p> $G_{p,L} = \sqrt[3]{IKR \times IP \times IPK}$ <p>5. Menghitung Indeks Kesetaraan Gender</p>	<p>Sumber data : Badan Pusat Statistik</p>

NO.	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			<p style="text-align: center;">$\text{Indeks Kesetaraan Gender} = \frac{HARM(G_p, G_L)}{G_{p,L}}$</p> <p>6. Menghitung Indeks Ketimpangan Gender</p> <p style="text-align: center;">$IKG = 1 - \frac{HARM(G_p, G_L)}{G_{p,L}}$</p> <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> G_p = Indeks Perempuan G_L = Indeks Laki-laki MTF = Proporsi Perempuan usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup tidak di fasilitas Kesehatan MHPK20 = Proporsi Perempuan usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun PR_p = Persentase Perempuan di legislatif PR_L = Persentase Laki-laki di legislatif SE_p = Persentase perempuan usia 25 tahun ke atas dengan Pendidikan SMA ke atas SE_L = Persentase laki-laki usia 25 tahun ke atas dengan Pendidikan SMA ke atas 	

NO.	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			TPAK _P = Persentase angkatan kerja perempuan terhadap penduduk perempuan usia kerja TPAK _L = Persentase angkatan kerja laki-laki terhadap penduduk laki-laki usia kerja HARM (G _P ,G _L) = Agregasi indeks perempuan dan laki-laki dengan rata-rata harmonik IKR = Indeks Dimensi Kesehatan reproduksi IP = Indeks dimensi pemberdayaan IPK = Indeks dimensi asar tenaga kerja G _{P,L} = Agregasi Indeks Dimensi dengan rata-rata geometrik IKG = Indeks Ketimpangan Gender	
25	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	Indikator ini menyatakan jumlah penduduk yang terdaftar sebagai kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) atau BPJS Kesehatan di mana bagi fakir miskin dan orang tidak mampu dibayarkan oleh pemerintah.	$\text{Persentase cakupan kepesertaan JKN} = \frac{\text{Jumlah peserta JKN}}{\text{Jumlah penduduk Indonesia}} \times 100\%$	PD Penanggung Jawab Utama : Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan Sumber data : BPJS Kesehatan dan Dinas Kesehatan
26	Indeks Zakat Nasional (IZN) (Poin)	Indeks Zakat Nasional (IZN) adalah sebuah alat ukur yang digunakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk mengevaluasi kinerja pengelolaan zakat di Indonesia. IZN bertujuan untuk memberikan gambaran objektif mengenai pengelolaan zakat, membantu BAZNAS dalam merancang kebijakan, dan mendorong	$\text{IZN} = 0,30 \text{ X1} + 0,70 \text{ X2}$ Keterangan : X1 : Dimensi makro (Regulasi, Dukungan APBN/APBD, Database Lembaga Zakat, Penguatan Jaringan, Literasi dan Dakwah Zakat) X2 : Dimensi mikro (Tata Kelola, Dampak Zakat)	PD Penanggung Jawab Utama : Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah Sumber data : Badan Amil Zakat Nasional

NO.	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		peningkatan kualitas pengelolaan zakat secara nasional. IZN menggunakan berbagai indikator yang terbagi dalam dua dimensi utama, yaitu dimensi makro yang mencerminkan peran pemerintah dan masyarakat, serta dimensi mikro yang berfokus pada kinerja lembaga zakat dan dampaknya terhadap mustahik.		
27	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (persentase)	Persentase pasien tuberkulosis yang sembuh dan menyelesaikan pengobatan lengkap	Jumlah pasien tuberkulosis yang sembuh dan menyelesaikan pengobatan dibandingkan dengan semua kasus tuberkulosis yang diobati dan dilaporkan	PD Penanggung Jawab Utama : Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan Sumber data : data sektoral Perangkat Daerah pengampu urusan
28	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (Persentase)	Persentase kasus tuberkulosis yang berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan di suatu wilayah dalam periode tertentu.	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis dihitung berdasarkan jumlah seluruh kasus tuberkulosis yang berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan dibandingkan dengan perkiraan jumlah kasus tuberkulosis yang ada di suatu wilayah dalam periode tertentu.	PD Penanggung Jawab Utama : Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan Sumber data : data sektoral Perangkat Daerah pengampu urusan
29	Indeks Kerukunan Umat Beragama (%)	Indeks yang menggambarkan sejauh mana tingkat kerukunan umat beragama. IKUB diukur melalui tiga indikator kerukunan umat beragama, yakni toleransi, kesetaraan, dan kerja sama.	$IKUB = \frac{\sum_{j=1}^3 Indeks D_j}{3}$ Keterangan : Dj : Dimensi ke-j	PD Penanggung Jawab Utama : Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

NO.	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Rumus menghitung indeks dimensi (Dj) : $\text{Indeks } D_j = \frac{\sum_{i=1}^n SX_{ji}}{n_j}$ Keterangan: D _j = Dimensi ke-j SX _{ji} = Nilai indikator i pada dimensi ke-j n _j = Jumlah indikator dimensi ke-j	Sumber data : data sektoral Perangkat Daerah pengampu urusan
30	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	Proporsi penduduk berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi adalah untuk memantau jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi. Nilai tertinggi dari indikator ini mencapai 100% (seluruh penduduk berusia 15 tahun ke atas di provinsi tersebut sudah menyelesaikan pendidikan tinggi). Jenjang pendidikan tinggi mencakup: o Diploma I-IV o S1 o S2 61 o S2 Terapan o S3.	Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi Pendidikan tinggi $= \frac{\text{Jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang lulus atau b}}{\text{Jumlah penduduk 15 tahun ke}} \times 100\%$	PD Penanggung Jawab Utama : Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Sumber data : data sektoral Perangkat Daerah pengampu urusan
31	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (Indeks)	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah ukuran yang menggambarkan tingkat perkembangan literasi dalam suatu masyarakat. Literasi tidak hanya mencakup kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga kemampuan memahami, menganalisis, dan menggunakan informasi secara efektif. Definisi operasional dari variabel ini dapat dipecah menjadi beberapa komponen utama: Tingkat Melek Huruf: Persentase populasi yang dapat membaca dan menulis pada usia tertentu. Akses ke Pendidikan:	$\text{IPLM} = 0,2T + 0,2A + 0,2K + 0,15I + 0,15P + 0,1G$ di mana: T = Tingkat Melek Huruf A = akses ke Pendidikan K = Kualitas Pendidikan I = Infrastruktur Literasi P = Partisipasi dalam Kegiatan Literasi G = Penggunaan Teknologi untuk Literasi	PD Penanggung Jawab Utama : Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan Sumber data : data sektoral Perangkat Daerah pengampu urusan

NO.	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Kemudahan akses ke fasilitas pendidikan dan bahan bacaan. Kualitas Pendidikan: Kualitas pengajaran dan kurikulum yang berfokus pada pengembangan literasi. Infrastruktur Literasi: Ketersediaan perpustakaan, pusat belajar, dan fasilitas lain yang mendukung kegiatan literasi. Partisipasi dalam Kegiatan Literasi: Jumlah dan jenis kegiatan literasi yang diikuti oleh masyarakat, seperti klub buku, seminar, dan lokakarya. Penggunaan Teknologi untuk Literasi: Akses dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk kegiatan literasi.		
32	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan adalah persentase jumlah angkatan kerja perempuan terhadap jumlah penduduk usia kerja perempuan. Angkatan kerja perempuan adalah penduduk usia kerja perempuan yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Penduduk usia kerja perempuan adalah penduduk berjenis kelamin perempuan yang berusia 15 tahun ke atas.	$TPAK_p = \frac{PAK_p}{P_{(15+p)}} \times 100\%$ <p>Keterangan: <i>TPA</i> = Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) <i>PAK</i> = Jumlah Angkatan kerja Perempuan <i>p</i> (orang) <i>P_(15+p)</i> = Jumlah penduduk Perempuan usia 15 tahun ke atas (orang)</p>	PD Penanggung Jawab Utama : Dinas/Badan yang menangani Bidang <ul style="list-style-type: none"> • Tenaga Kerja • Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sumber data : Badan Pusat Statistik
33	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan adalah proksi yang digunakan untuk mengukur perlindungan jaminan sosial nasional bagi pekerja di Indonesia. Definisinya adalah jumlah pekerja yang memiliki Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program	$\text{Cakupan Jamsos Naker} = \frac{\text{Jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan}}{\text{Jumlah semesta penduduk bekerja}} \times 100\%$ <p>Di mana:</p>	PD Penanggung Jawab Utama : Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja Sumber data : BPJS Ketenagakerjaan

NO.	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan terhadap semesta penduduk bekerja.	Peserta = Pekerja Penerima Upah (PPU), Jasa Konstruksi dan Pekerja Bukan Penerima Upah Semesta penduduk bekerja = Penduduk Bekerja yang berusia 15-65 tahun	
IV	ASPEK PELAYANAN UMUM			
1	Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	Pengukuran reformasi birokrasi dengan melakukan penilaian hasil evaluasi kinerja instansi pemerintah dalam menerapkan berbagai prinsip reformasi birokrasi, seperti peningkatan pelayanan publik, peningkatan kualitas SDM, dan perbaikan tata kelola pemerintahan.	Penilaian atas implementasi kebijakan RB (immediate outcomes) oleh para instansi pengampu kebijakan dan capaian sasaran strategis yang merupakan outcomes dari implementasi kebijakan RB (intermediate outcomes) oleh Deputi RBKUNWAS selaku koordinator (UPRBN) dan kementerian/ lembaga yang menjadi leading institution kebijakan RB pada tingkat meso.	PD Penanggung Jawab Utama : Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah Sumber data : KemenPANRB
2	Indeks Demokrasi Indonesia ((%))	IDI merupakan indeks komposit yang mengukur kualitas demokrasi di Indonesia. IDI diukur sejak tahun 2009 (IDI 2009). Pada tahun 2021 metode pengukuran IDI mengalami perubahan karena terdapat perluasan konsep demokrasi yang digunakan. Pada IDI 2009 s.d 2020 konsep demokrasi hanya dilihat dari ranah politik, sedangkan pada IDI metode baru, demokrasi tidak hanya mencakup ranah politik, tetapi juga mencakup ranah ekonomi dan sosial.	Skema aspek penyusunan IDI Metode Baru sebagai berikut : 1. Aspek kebebasan (7 indikator) 2. Aspek kesetaraan (7 indikator) 3. Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi (8 indikator) $IDI = \sum_{j=1}^3 P_{ij} I(A_{ij})$ Dimana : IDI : Indeks Demokrasi Indonesia di tingkat kota	PD Penanggung Jawab Utama : Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik Sumber data : data sektoral Perangkat Daerah pengampu urusan

!

NO.	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			<p>ke-i <i>P_j</i> : Nilai penimbang dari aspek ke-j <i>I (A_{ij})</i> : Indeks kota ke-i aspek ke-j j : 1 = Aspek kebebasan, 2 = aspek kesetaraan, 3 = aspek kapasitas lembaga demokrasi</p>	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh suatu instansi atau lembaga.	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) seluruh Perangkat Daerah pada tahun berjalan pada aplikasi e-Sukma	<p>PD Penanggung Jawab Utama : Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah</p> <p>Perangkat Daerah Pendukung : seluruh Perangkat Daerah di Kota Blitar</p> <p>Sumber data : data sektoral Perangkat Daerah pengampu urusan</p>
4	Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Hasil pengukuran yang diperoleh dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja	<p>1. Menentukan nilai untuk setiap indikator Nilai per indikator = $\left(\frac{\text{nilai } F01 + \text{nilai } F02 + \text{nilai } F03}{3} \right) \times \text{bobot per indikator}$</p> <p>2. Menentukan nilai setiap aspek Nilai per aspek = $\sum \text{nilai per indikator}$</p> <p>3. Menentukan indeks Nilai indeks = $\sum (\text{nilai aspek}_n \times \text{bobot aspek}_n)$</p>	<p>PD Penanggung Jawab Utama : Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah</p> <p>Sumber data : KemenPANRB</p>

NO.	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh nilai indeks.		
5	Indeks Rasa Aman (Angka)	Indeks rasa aman adalah suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat rasa aman yang dirasakan oleh masyarakat di suatu wilayah atau lingkungan tertentu. Indeks ini mencerminkan persepsi masyarakat terhadap keamanan dan ketenteraman di lingkungan mereka, yang dapat mempengaruhi kesejahteraan sosial dan ekonomi. Indeks ini mengukur sejauh mana masyarakat merasa terlindungi dari kejahatan, kekerasan, gangguan sosial, dan bencana, baik dalam aktivitas pribadi maupun kehidupan sosial.	$\text{Indeks Rasa Aman} = \frac{\sum_{i=1}^n (I_i \times w_i)}{n}$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ I_i = skor persepsi atau pengalaman (skala 0-100) ▪ w_i = bobot (jika ada pembobotan, tergantung pentingnya indikator) <p>Nilai akhir = 0-100, makin tinggi makin aman</p>	<p>PD Penanggung Jawab Utama : Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat</p> <p>Sumber data : data sektoral Perangkat Daerah pengampu urusan</p>
6	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban (Angka)	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban (IKK) adalah suatu ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat ketenteraman dan ketertiban di suatu wilayah. IKK ini biasanya mencakup berbagai aspek seperti keamanan, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. IKK yang baik menunjukkan bahwa suatu wilayah aman, nyaman, dan kondusif bagi warganya untuk beraktivitas. Hal ini berdampak positif pada kualitas hidup masyarakat, investasi, dan pembangunan ekonomi. IKK dapat mencakup berbagai indikator, seperti tingkat kejahatan, pelanggaran lalu lintas, pelanggaran ketertiban umum, tingkat kepatuhan terhadap peraturan	$\text{Indeks Trantibum} = \sum_{i=1}^n (w_i \times I_i)$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ I_i = Skor indikator ke-i (skala 0-100, hasil normalisasi) ▪ w_i = Bobot indikator ke-i (jumlah bobot = 1) ▪ Hasil akhir dalam skala 0-100, makin tinggi makin baik 	<p>PD Penanggung Jawab Utama : Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat</p> <p>Sumber data : Kementerian Dalam Negeri</p>

NO.	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		daerah, dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban.		
7	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	<p>Rumah tangga dengan akses rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan adalah rumah tangga yang menempati rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan. Mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah yang layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan memenuhi: a. Persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat b. Prasyarat tata ruang, kesesuaian hak atas tanah dan rumah, dan tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan. Pengukuran indikator tersebut menggunakan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dan SLF (Sertifikat Laik Fungsi). Mempertimbangkan variasi penerapan PBG dan SLF di tingkat pemerintah daerah (kabupaten/kota) maka pengukuran indikator ini dapat menggunakan proksi yaitu memenuhi empat kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketahanan bangunan (durable housing) yaitu bahan bangunan atap, dinding dan lantai rumah memenuhi syarat, 2. Kecukupan luas tempat tinggal (sufficient living space) yaitu luas lantai perkapita $\geq 7,2$ m² 3. Memiliki akses air minum layak 4. Memiliki akses sanitasi layak. 	<p>Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%) = (Persentase hunian layak + Persentase hunian terjangkau + Persentase hunian berkelanjutan) / 3</p> <p>Persentase hunian layak = jumlah rumah tangga dengan hunian layak / jumlah rumah tangga x 100%</p> <p>Persentase hunian terjangkau = jumlah rumah terbangun / kebutuhan rumah x 100 %</p> <p>Persentase hunian berkelanjutan = (jumlah rumah tangga yang menempati rumah dengan akses PSU layak / Jumlah rumah tangga) x 100 %</p>	<p>PD Penanggung Jawab Utama : Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</p> <p>Sumber data : data sektoral Perangkat Daerah pengampu urusan</p>

NO.	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Level)	sebuah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat kematangan atau efektivitas dari SPIP yang diterapkan oleh suatu instansi pemerintah.	$Maturitas\ SPIP = \left(\frac{Total\ skor\ hasil\ evaluasi}{Skor\ maksimal} \right) \times 100\%$ <ul style="list-style-type: none"> ▪ Total skor hasil evaluasi = Jumlah skor dari hasil penilaian setiap elemen pengendalian intern (misalnya kebijakan, lingkungan pengendalian, manajemen risiko, aktivitas pengendalian, informasi, komunikasi, dan pemantauan). ▪ Skor maksimal = Skor tertinggi yang dapat dicapai jika semua elemen pengendalian internal telah terpenuhi secara optimal. 	PD Penanggung Jawab Utama : Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Sumber data : Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
9	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (Indeks)	Indeks perencanaan pembangunan daerah adalah hasil perhitungan mandiri atas komponen penilaian perencanaan pembangunan yang terdiri dari : 1. Sinergi, yaitu mengukur kerja sama antar unit pemerintahan, meliputi : a. Persentase program prioritas nasional yang didukung program daerah b. Persentase anggaran program daerah yang mendukung program prioritas nasional. 2. Kualitas Perencanaan yaitu mengukur kualitas perencanaan dengan mempertimbangkan kesesuaian antara isu strategis target	Rata-rata persentase komponen penilaian perencanaan pembangunan, terdiri : 1. Sinergi : a. Jumlah program prioritas nasional dalam RKP yang didukung program daerah dalam RKPD ----- x 100% Jumlah program prioritas nasional b. Jumlah anggaran program daerah yang mendukung program prioritas nasional yang tercantum pada RKPD ----- x 100% Jumlah total anggaran RKPD 2. Kualitas Perencanaan :	PD Penanggung Jawab Utama : Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Sumber data : data sektoral Perangkat Daerah pengampu urusan

NO.	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		<p>Program/Kegiatan/ Proyek di RPJMD atau RKPD, meliputi :</p> <p>b. Persentase kesesuaian prioritas daerah dengan isu daerah</p> <p>c. Persentase kesesuaian target dan sasaran dalam menyelesaikan prioritas daerah dan isu daerah</p> <p>d. Persentase kesesuaian kegiatan prioritas untuk mencapai target dan sasaran</p> <p>e. Persentase capaian indikator kinerja daerah dengan kriteria sangat tinggi</p> <p>f. Persentase kegiatan prioritas daerah berbasis inovasi</p>	<p>a. Jumlah isu daerah yang dijawab dalam prioritas daerah yang tercantum dalam RKPD ----- x 100% Jumlah isu daerah yang tercantum dalam RKPD</p> <p>b. Jumlah sasaran RKPD yang menyelesaikan prioritas daerah dan isu daerah dengan target sesuai RPJMD ----- x 100% Jumlah sasaran RKPD</p> <p>c. Jumlah kegiatan prioritas daerah untuk mencapai target dan sasaran dalam RKPD yang ditindaklanjuti sebagai kegiatan prioritas PD yang tercantum dalam renja PD ----- x 100% Jumlah kegiatan prioritas daerah untuk mencapai target dan sasaran dalam RKPD</p> <p>d. Rata-rata Persentase (capaian indikator kinerja tujuan dan capaian indikator kinerja sasaran) RPJMD</p> <p>e. Jumlah kegiatan prioritas daerah dalam RKPD yang berbasis inovasi ----- x100% Kegiatan prioritas daerah dalam RKPD</p>	
		<p>3. Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja yaitu mengukur keterhubungan antara perencanaan kinerja instansi dengan substansi perencanaan pembangunan</p>	<p>3. Jumlah target prioritas daerah dalam RKPD yang ditetapkan menjadi target kinerja PD dalam Renja PD ----- 100%</p> <p>4. Jumlah target prioritas daerah dalam RKPD</p>	

NO.	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (Angka)	Nilai SAKIP adalah hasil pengukuran tingkat kualitas implementasi manajemen kinerja organisasi atas komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Internal sesuai Peraturan MENPANRB Nomor 88 Tahun 2021 atau aturan lain yang berlaku guna mewujudkan budaya akuntabilitas kinerja organisasi yang baik dan dapat mendorong peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran yang dilakukan oleh KemenPANRB.	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah pada tahun berjalan sesuai hasil evaluasi KemenPAN RB	PD Penanggung Jawab Utama : Dinas/Badan yang menangani Bidang : • Sekretariat Daerah • Inspektorat • Perencanaan Perangkat Daerah Pendukung : seluruh PD di Kota Blitar Sumber data : Hasil penilaian atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh KemenPAN RB
11	Indeks Pemerintahan Digital Indonesia (Indeks)	Indeks Pemerintah Digital (Indeks Pemdi) adalah salah satu instrumen pengukuran kematangan transformasi digital pemerintah yang merupakan transisi dari Indeks SPBE. Pengukuran tingkat kematangan Indeks Pemdi meliputi 9 aspek dan 35 indikator sesuai dengan arah kebijakan dan strategi dalam RPJMN 2025-2029.	Perhitungan tingkat kematangan indikator Pemdi yang telah ditetapkan dengan pembobotan oleh Kementerian PANRB pada 9 aspek.	PD Penanggung Jawab Utama : Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Sumber data : data sektoral Perangkat Daerah pengampu urusan
12	Opini BPK Atas Laporan Keuangan (Nilai)	merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan,		PD Penanggung Jawab Utama : Dinas/Badan yang menangani Bidang : • Inspektorat • Keuangan

NO.	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.		Sumber data : hasil audit BPK atas Laporan Keuangan Daerah
13	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	Penegakan Perda yang dimaksud adalah segala tahapan penegakan perda yang dimulai dari inventaris perda, sosialisasi, pembinaan, penyuluhan, pelaksanaan penegakan perda sesuai ketentuan yang diatur dalam perda dan perkada dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan dibagi dengan Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi	PD Penanggung Jawab Utama : Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman dan Kertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sumber data : data sektoral Perangkat Daerah pengampu urusan
14	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks)	SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE. Nilai indeks SPBE merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE secara keseluruhan.	$Indeks\ Domain_i = \frac{1}{BD_i} \sum_{j=m}^n NA_{ij} \times BA_{ij}$ <p>Di mana: ND_j Adalah nilai indeks domain ke-j BD_j Adalah nilao bobot domain ke-j</p>	PD Penanggung Jawab Utama : Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Sumber data : KemenPANRB
15	Indeks Reformasi Hukum (Indeks)	Reformasi Hukum adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang hukum dalam upaya penataan regulasi yang berkualitas bersih dan akuntabel pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah instrumen untuk mengukur	Penilaian penerapan reformasi hukum oleh Kementerian Hukum pada tahun berjalan	PD Penanggung Jawab Utama : Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah Sumber data : Kementerian Hukum

NO.	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional.		
16	Persentase Capaian Aksi HAM (%)	Persentase Capaian Aksi HAM adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keterlibatan dan keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) sesuai dengan arahan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) adalah kebijakan strategis yang disusun oleh pemerintah Indonesia untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia di seluruh wilayah Indonesia. RANHAM bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak dasar setiap warga negara dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara serta oleh masyarakat. Setiap daerah di Indonesia diharapkan untuk melaksanakan dan melaporkan kemajuan implementasi RANHAM sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.	$\text{Persentase Capaian Aksi HAM} = \frac{\text{jumlah poin aksi yang dilaksanakan}}{\text{jumlah poin aksi yang direncanakan}} \times 100\%$	PD Penanggung Jawab Utama : Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah Sumber data : Kementerian HAM

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar 2025, data diolah

BAB V

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025 – 2029 merupakan perencanaan pembangunan yang bersifat jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagai operasionalisasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025 -2045. Kerangka waktu perencanaan yang tertulis 2025 – 2029 tidak sama dengan kerangka waktu Masa Bhakti Walikota 2025 – 2030. Hal ini disebabkan adanya penyeragaman secara nasional terkait RPJMD oleh Kementerian Dalam Negeri, dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 -2029.

Dalam konteks rencana pelaksanaannya, RPJMD secara operasional sudah dapat dipedomani sejak Perubahan APBD 2025. Untuk mengantisipasi kekosongan dasar penyusunan APBD 2030, maka Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 memerintahkan RPJMD 2025 – 2029 juga merencanakan target untuk tahun 2030.

RPJMD 2025 – 2029 menjadi pedoman perencanaan pembangunan tahunan dalam bentuk RKPD sampai dengan penetapan APBD yang terbagi dalam 6 (enam) periodisasi :

1. Perubahan RKPD dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025
2. RKPD dan APBD Tahun Anggaran 2026
3. RKPD dan APBD Tahun Anggaran 2027
4. RKPD dan APBD Tahun Anggaran 2028
5. RKPD dan APBD Tahun Anggaran 2029
6. RKPD dan APBD Tahun Anggaran 2030

5.1. Pedoman Transisi

Pedoman Transisi memuat berbagai hal yang perlu dilakukan pada saat masa transisi dokumen perencanaan pembangunan. Hal ini merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan dokumen pada saat masa transisi antara dokumen perencanaan yang lama dan dokumen perencanaan yang baru.

Berbagai hal yang perlu diatur antara lain sebagai berikut:

1. Pada saat penyusunan Perubahan RKPD 2025 dan RKPD 2026 masih berlaku RPJMD 2021-2026 dan RPJMD 2025 – 2029 belum ditetapkan. Akan tetapi berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan daerah melalui Perubahan RKPD dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, mengatur bahwa Perubahan APBD mengakomodir kebijakan visi dan misi Walikota terpilih.
2. Pada saat menyusun RKPD 2030 yang akan dimulai pada bulan November 2028 sampai dengan Juli 2029, target dan rencana dalam RPJMD 2025 -2029 dapat dipergunakan sebagai dasar penyusunannya. Dengan catatan dapat dilakukan perubahan jika ada perubahan kondisi yaitu perubahan visi dan misi walikota hasil pemilihan 2029 atau kondisi yang lainnya yang akan berpengaruh pada tahun 2030.

3. Mengingat pembangunan tahun 2025 masih berpedoman pada RPJPD 2005 – 2025 dan RPJMD 2021-2026, maka hasil pembangunan tahun 2025 tidak bisa sepenuhnya langsung dibandingkan dengan target dalam RPJPD 2025-2045 atau produk perencanaan turunannya.
4. Apabila RPJMD 2025 -2029 dapat ditetapkan sebelum Perubahan APBD 2025 maka APBD 2025 dapat disesuaikan dengan program dan kegiatan dalam RPJMD 2025 - 2029 dalam Perubahan APBD.
5. Dalam hal direncanakan penyesuaian sebagaimana point 3, maka penyusunan Perubahan RKPD 2025 dapat didasarkan pada draft RPJMD 2025 -2029.
6. Dalam hal dilakukan atau tidak dilakukan Perubahan APBD 2025, maka hasil capaian pembangunan tahunan 2025 dapat sebagian atau seluruhnya dipergunakan sebagai capaian target RPJMD 2025 – 2029 dan atau RPJPD 2025 -2045.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah Pelaksanaan bertujuan untuk menciptakan petunjuk umum pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi lintas Perangkat Daerah dalam mengimplementasikan arah kebijakan RPJPD secara efektif dan efisien. Koordinasi, sinkronisasi dan integrasi tersebut bertujuan untuk mengelola sumber daya pembangunan secara optimal serta dapat dilakukan dengan pembagian tugas secara tepat agar mencapai tujuan pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan. Adapun kaidah pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan RKPD 2026 berpedoman pada RPJMD 2025 -2029
2. Semua Perangkat Daerah pengampu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) harus membuat kertas kerja rencana pencapaian selama 5 (lima) tahun dalam bentuk Rencana Strategis Perangkat daerah dan Rencana Kinerja Perangkat Daerah.
3. Perangkat Daerah pengampu urusan Perencanaan Daerah mengkoordinasikan seluruh Perangkat Daerah (PD) di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar, agar semua perangkat daerah dalam menyusun Rencana Strategis (renstra) memperhatikan Arah kebijakan dan Sasaran pokok Pembangunan lima tahunan
4. Apabila terjadi perubahan Nomenklatur Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Blitar, maka penanggungjawab penyelenggaraan urusan pemerintahan menyesuaikan dengan peraturan daerah tentang Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) yang baru dan memastikan seluruh urusan dapat tertangani dengan baik.

5.3. Kerangka Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dilakukan pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Evaluasi dilakukan terhadap pencapaian hasil pembangunan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun perencanaan tahap berikutnya.

Pengendalian dan evaluasi diatur sebagai berikut :

1. Pengendalian dan evaluasi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang mengampu urusan perencanaan daerah
2. Pengendalian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Blitar dilaksanakan melalui pengendalian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disertai dengan identifikasi risiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya.
3. Pengendalian perencanaan juga dilakukan terhadap perencanaan Perangkat Daerah dalam jangka menengah (Rentsra PD) dan jangka pendek (Renja PD).
4. Pengendalian pelaksanaan pembangunan dilakukan melalui koordinasi pada saat penetapan anggaran belanja tahunan dengan perangkat daerah terkait.
5. Evaluasi hasil pembangunan jangka menengah dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang mengampu urusan perencanaan daerah. Hasil pembangunan dipergunakan sebagai pengendalian progres pencapaian target, yang hasilnya disampaikan kepada Kepala Daerah.
6. Evaluasi terhadap kondisi yang berpengaruh pada pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) baik di tingkat kota, provinsi, nasional dan global dilakukan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah pengampu IKU dan IKD yang hasilnya dipergunakan sebagai bahan pertimbangan penetapan target IKU dan IKD.

5.4. Mekanisme Perubahan

Mengingat adanya faktor faktor yang tidak dapat dikendalikan maka RPJMD Kota Blitar 2025 – 2029 dapat ditinjau kembali untuk dilakukan perubahan dengan ketentuan :

1. Hasil Evaluasi Tahunan dan atau hasil evaluasi perangkat daerah pengampu IKU dan IKD menunjukkan adanya capaian target meleset lebih dari 20% dari asumsi dasar.
2. Terjadi perubahan yang mendasar, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, atau perubahan kebijakan nasional yang mengakibatkan perubahan kondisi lebih dari 10% atas asumsi dasar.
3. Perubahan dapat dilakukan maksimal 2 (dua) kali perubahan yaitu tahun 2027 dan 2029. Mekanisme perubahan RPJMD mengikuti peraturan perundangan yang berlaku.

5.5. Pembiayaan Pembangunan

Upaya mewujudkan visi dan misi memerlukan kapasitas pembiayaan yang memadai. Mengingat keterbatasan kemampuan pembiayaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka perlu dilakukan upaya kerjasama dengan berbagai pihak baik pemerintah pusat, provinsi, pemerintah daerah sekitar atau pihak pihak lain. Maka selain upaya peningkatan PAD baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi diharapkan pembiayaan pembangunan Kota Blitar juga didukung oleh sumber pembiayaan APBN, APBD Provinsi, BUMN, BUMD, Swasta, Filantropi, Lembaga Donor, serta sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Hal yang utama dilakukan adalah pengalokasian biaya pembangunan yang didasarkan pada prioritas, efektifitas dan efisiensi yang didukung dengan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan yang baik.

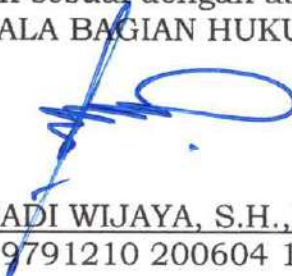
Akhirnya, RPJMD 2025 -2029 merupakan bagian dari pembangunan daerah yang berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan dan upaya peningkatan kesejahteraan itu dapat diwujudkan hanya jika RPJMD 2025 - 2029 dipergunakan sebagai pedoman bagi semua pihak dalam membangun Kota Blitar. Dimana kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Kota Blitar harus berpedoman pada RPJMD 2025 - 2029. Demikian juga semua kegiatan dunia usaha dan masyarakat yang didukung oleh para akademisi dan media massa harus berpedoman pada RPJMD 2025 - 2029. Sebab keberhasilan pembangunan daerah bergantung pada kebersamaan para pihak yang saling mendukung untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan daerah.

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SYAUQUL MUHIBBIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008